



Katalog BPS : 3302001

S **STATISTIK PERUMAHAN DAN** **PERMUKIMAN 2013**

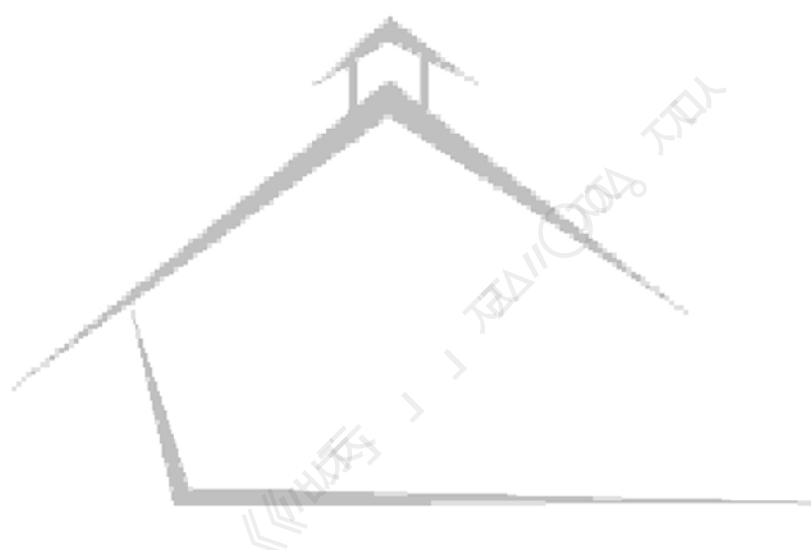


Survei Sosial Ekonomi Nasional
Modul Kesehatan dan Perumahan 2013



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

S **STATISTIK PERUMAHAN DAN** **PERMUKIMAN 2013**



Survei Sosial Ekonomi Nasional
Modul Kesehatan dan Perumahan 2013

STATISTIK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 2013 (HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2013)

ISBN: 978-979-064-738-1

No. Publikasi: 04230.1401

Katalog BPS: 3302001

Ukuran Buku: 18 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: 249 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Data mengenai perumahan dan permukiman sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya perumahan dan permukiman yang sehat. Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal tidak hanya terbatas pada tersedianya tempat tinggal saja namun juga dikaitkan pada kelayakan rumah hunian dari sisi keadaan fisik bangunan, keamanan atas rumah dan permukiman, serta perilaku rumah tangga yang dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan seperti penggunaan bahan bakar untuk memasak, dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Publikasi Statistik Perumahan dan Permukiman tahun 2014 merupakan deskripsi hasil Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) tahun 2013. Publikasi ini diterbitkan secara berkala setiap tiga tahun. Publikasi Statistik Perumahan dan Permukiman Tahun 2013 ini menyajikan berbagai informasi tentang perumahan dan permukiman seperti penguasaan bangunan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan bangunan, pemanfaatan air, pemanfaatan energi, dan kondisi lingkungan.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data perumahan dan permukiman untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan hingga diterbitkannya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran demi perbaikan publikasi ini sangat kami harapkan.

Jakarta, November 2014
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

DR. SURYAMIN, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xviii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.1 Ruang Lingkup Susenas	3
1.3 Metodologi Susenas	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
1.5 Definisi Operasional	5
2 PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL	13
2.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal	13
2.2 Proses Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri	15
2.3 Jangka Waktu KPR dan Kemampuan Membayar	19
2.4 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal	20
2.5 Nilai Kontrak dan Sewa	22
2.6 Kepemilikan Rumah Lain selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan	24
3 KONDISI FISIK BANGUNAN	53
3.1 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	53
3.2 Plafon Terluas	57
3.4 Kondisi Bangunan	59
4 FASILITAS DAN PERLENGKAPAN RUMAH	83
4.1 Jumlah dan Jenis Ruangan	83
4.2 Kecukupan Sirkulasi Udara	86
4.3 Kecukupan Cahaya Alami	87
4.4 Penggunaan <i>Air Conditioner</i> (AC)	88
4.5 Fasilitas Kamar Mandi dan Dapur	89

	Halaman
5 PEMANFAATAN AIR	103
5.1 Sumber Air untuk Minum, Masak, dan Mandi/Cuci	103
5.2 Lokasi Sumber Air Minum Utama	104
5.3 Rata-Rata Waktu yang Digunakan untuk Memperoleh Air Minum	105
5.4 Kualitas Air Minum	106
5.5 Kebiasaan Rumah Tangga agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum	107
5.6 Penghematan Air	108
6 PEMANFAATAN ENERGI	165
6.1 Penggunaan Listrik	165
6.2 Penggunaan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak ...	167
7 KONDISI LINGKUNGAN	177
7.1 Lokasi Rumah	177
7.2 Kondisi Lingkungan Permukiman	179
7.3 Fasilitas Umum	186
LAMPIRAN	219
Kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) 2013	221
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, dan Tipe Daerah, 2013	14
Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Cara Memperoleh Bangunan, dan Tipe Daerah, 2013	16
Tabel 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Bangunan dengan Cara Membeli Menurut Cara Pembayaran dan Tipe Daerah, 2013	18
Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengangsur KPR menurut Pelunasan Angsuran, dan Tipe Daerah, 2013 ...	20
Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah, dan Tipe Daerah, 2013	21
Tabel 2.6 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Kontrak Menurut Tipe Daerah dan Kategori Nilai Kontrak Sebulan, 2013	23
Tabel 2.7 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Sewa Menurut Kategori Nilai Sewa Sebulan, 2013	23
Tabel 2.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan dan Tipe Daerah, 2013	24
Tabel 2.9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan).....	25
Tabel 2.9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	26
Tabel 2.9.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	27
Tabel 2.10.1 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013 (Perkotaan)	28
Tabel 2.10.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013 (Perdesaan).....	29

Tabel 2.10.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	30
Tabel 2.11.1	Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Pembayaran, 2013 (Perkotaan)	31
Tabel 2.11.2	Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Pembayaran, 2013 (Perdesaan)	32
Tabel 2.11.3	Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, dan Cara Pembayaran, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	33
Tabel 2.12.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013 (Perkotaan).....	34
Tabel 2.12.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013 (Perdesaan).....	35
Tabel 2.12.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	36
Tabel 2.13.1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013 (Perkotaan).....	37
Tabel 2.13.2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013 (Perdesaan).....	38
Tabel 2.13.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	39
Tabel 2.14.1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan).....	40
Tabel 2.14.2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	41
Tabel 2.14.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	42
Tabel 2.15.1	Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak Per Bulan, 2013 (Perkotaan)	43

	Halaman
Tabel 2.15.2 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak Per Bulan, 2013 (Perdesaan).....	44
Tabel 2.15.3 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak Per Bulan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	45
Tabel 2.16.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa Per Bulan, 2013 (Perkotaan)	46
Tabel 2.16.2 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa Per Bulan, 2013 (Perdesaan).....	47
Tabel 2.16.3 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa Per Bulan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	48
Tabel 2.17.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013 (Perkotaan)	49
Tabel 2.17.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013 (Perdesaan)	50
Tabel 2.17.3 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	51
Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan (m^2), 2013	54
Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kategori Besaran Luas Tanah (m^2), 2013	55
Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kategori Besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 2013	56
Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Plafon Terluas, 2013	57
Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Keadaan/Kondisi Atap, Lantai, Dinding Bangunan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2013	60
Tabel 3.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, 2013 (Perkotaan)	61
Tabel 3.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, 2013 (Perdesaan).....	62
Tabel 3.6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	63
Tabel 3.7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perkotaan).....	64

Tabel 3.7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perdesaan).....	65
Tabel 3.7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	66
Tabel 3.8.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perkotaan).....	67
Tabel 3.8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perdesaan).....	68
Tabel 3.8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kategori Besaran Luas Tanah, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	69
Tabel 3.9.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan).....	70
Tabel 3.9.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	71
Tabel 3.9.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	72
Tabel 3.10.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan)	73
Tabel 3.10.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	74
Tabel 3.10.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	75
Tabel 3.11.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan).....	76
Tabel 3.11.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	77
Tabel 3.11.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	78
Tabel 3.12.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan).....	79
Tabel 3.12.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perdesaan).....	80
Tabel 3.12.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	81
Tabel 4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Ruangan dan Tipe Daerah, 2007 dan 2013	84
Tabel 4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Sirkulasi Udara, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, 2013	87

Tabel 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Cahaya Alami Rumah, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, 2013 ..	88
Tabel 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan AC, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, 2013	89
Tabel 4.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Dapur Terpisah dari Bangunan Utama Menurut Tipe Daerah, 2013	92
Tabel 4.6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Banyaknya Ruangan, 2013 (Perkotaan).....	93
Tabel 4.6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Banyaknya Ruangan, 2013 (Perdesaan).....	94
Tabel 4.6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Banyaknya Ruangan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	95
Tabel 4.7.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangan Tersendiri Menurut Provinsi dan Jenis Ruangan, 2013 (Perkotaan)	96
Tabel 4.7.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangan Tersendiri Menurut Provinsi dan Jenis Ruangan, 2013 (Perdesaan).....	97
Tabel 4.7.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangan Tersendiri Menurut Provinsi dan Jenis Ruangan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	98
Tabel 4.8	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi Menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 2013	99
Tabel 4.9	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Dapur Menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 2013	100
Tabel 4.10	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Dapur Terpisah dari Bangunan Utama Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	101
Tabel 5.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013.....	105
Tabel 5.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lamanya Waktu Untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013	106
Tabel 5.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kualitas Air Minum, 2013	107
Tabel 5.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum, 2013	108
Tabel 5.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Perilaku Hemat Air, 2013	109

Tabel 5.6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013 (Perkotaan).....	110
Tabel 5.6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013 (Perdesaan).....	111
Tabel 5.6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	112
Tabel 5.7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang , 2013 (Perkotaan).....	113
Tabel 5.7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang , 2013 (Perdesaan).....	114
Tabel 5.7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).	115
Tabel 5.8.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran, 2013 (Perkotaan)	116
Tabel 5.8.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran, 2013 (Perdesaan).....	117
Tabel 5.8.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	118
Tabel 5.9.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/Terminal Air, 2013 (Perkotaan)..	119
Tabel 5.9.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/Terminal Air, 2013 (Perdesaan).	120
Tabel 5.9.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/Terminal Air, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	121
Tabel 5.10.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran, 2013 (Perkotaan).....	122
Tabel 5.10.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran, 2013 (Perdesaan).....	123
Tabel 5.10.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	124
Tabel 5.11.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/Pompa, 2013 (Perkotaan)	125
Tabel 5.11.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/Pompa, 2013 (Perdesaan).....	126
Tabel 5.11.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/Pompa, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	127

Tabel 5.12.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung, 2013 (Perkotaan)	128
Tabel 5.12.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung, 2013 (Perdesaan).....	129
Tabel 5.12.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	130
Tabel 5.13.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung, 2013 (Perkotaan)	131
Tabel 5.13.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung, 2013 (Perdesaan).....	132
Tabel 5.13.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)	133
Tabel 5.14.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung, 2013 (Perkotaan)	134
Tabel 5.14.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung, 2013 (Perdesaan).....	135
Tabel 5.14.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	136
Tabel 5.15.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung, 2013 (Perkotaan)	137
Tabel 5.15.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung, 2013 (Perdesaan).....	138
Tabel 5.15.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	139
Tabel 5.16.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013 (Perkotaan)	140
Tabel 5.16.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013 (Perdesaan).....	141
Tabel 5.16.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)...	142
Tabel 5.17.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013 (Perkotaan).....	143
Tabel 5.17.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013 (Perdesaan).....	144
Tabel 5.17.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)....	145

	Halaman
Tabel 5.18.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya, 2013 (Perkotaan)	146
Tabel 5.18.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya, 2013 (Perdesaan).....	147
Tabel 5.18.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	148
Tabel 5.19.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013 (Perkotaan).....	149
Tabel 5.19.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013 (Perdesaan).....	150
Tabel 5.19.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	151
Tabel 5.20.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lamanya Waktu untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013 (Perkotaan)	152
Tabel 5.20.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lamanya Waktu untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013 (Perdesaan).....	153
Tabel 5.20.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lamanya Waktu untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	154
Tabel 5.21.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kualitas Air Minum, 2013 (Perkotaan)	155
Tabel 5.21.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kualitas Air Minum, 2013 (Perdesaan).....	156
Tabel 5.21.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kualitas Air Minum, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	157
Tabel 5.22.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum, 2013 (Perkotaan).....	158
Tabel 5.22.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum, 2013 (Perdesaan).....	159
Tabel 5.22.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	160
Tabel 5.23.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Perilaku Hemat Air, 2013 (Perkotaan)	161
Tabel 5.23.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Perilaku Hemat Air, 2013 (Perdesaan).....	162

Tabel 5.23.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Perilaku Hemat Air, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	163
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Pengurangan Pemakaian Listrik dalam Setahun Terakhir, 2013	166
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar Memasak Menurut Tipe Daerah, 2013.	167
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar untuk Memasak Menurut Cara Memperolehnya, 2013	168
Tabel 6.4.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013 (Perkotaan).....	169
Tabel 6.4.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013 (Perdesaan)....	170
Tabel 6.4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	171
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2013	172
Tabel 6.6.1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak Menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, 2013 (Perkotaan)	173
Tabel 6.6.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak Menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, 2013 (Perdesaan).....	174
Tabel 6.6.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak Menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	175
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/ Gang/Lorong Menurut Jenis Permukaan Jalan/ Gang/Lorong dan Tipe Daerah, 2013	178
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Menurut Penyebab Banjir dan Tipe Daerah, 2013	179
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Saluran Pembuangan Air Limbah/Mandi/Dapur/Cuci dan Tipe Daerah, 2013	180
Tabel 7.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Air Limbah/Mandi/Dapur/Cuci dan Tipe Daerah, 2013..	181
Tabel 7.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Keadaan Air Got/ Selokan di Sekitar Rumah dan Tipe Daerah, 2013	182
Tabel 7.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan MCK Komunal/Umum dan Tipe Daerah, 2013	182
Tabel 7.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Pembuangan Sampah dan Tipe Daerah, 2013	183

Tabel 7.8	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Jenis Polusi dan Tipe Daerah, 2013	185
Tabel 7.9	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Sumber Polusi dan Tipe Daerah, 2013	186
Tabel 7.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Umum dan Jarak dari Rumah (dalam kilometer), 2013	188
Tabel 7.11.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/Letak Rumah, 2013 (Perkotaan)	189
Tabel 7.11.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/Letak Rumah, 2013 (Perdesaan).....	190
Tabel 7.11.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/Letak Rumah, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	191
Tabel 7.12.1	Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/Gang/Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/Gang/Lorong, 2013 (Perkotaan)	192
Tabel 7.12.2	Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/Gang/Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/Gang/Lorong, 2013 (Perdesaan).....	193
Tabel 7.12.3	Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/Gang/Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/Gang/Lorong, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	194
Tabel 7.13.1	Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013 (Perkotaan)	195
Tabel 7.13.2	Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013 (Perdesaan).....	196
Tabel 7.13.3	Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	197
Tabel 7.14.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013 (Perkotaan)	198
Tabel 7.14.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013 (Perdesaan).....	199
Tabel 7.14.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	200
Tabel 7.15.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perkotaan)	201

Tabel 7.15.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perdesaan).....	202
Tabel 7.15.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)	203
Tabel 7.16.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perkotaan)	204
Tabel 7.16.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perdesaan).....	205
Tabel 7.16.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/Mandi/Dapur/Cuci, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)	206
Tabel 7.17.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumah, 2013 (Perkotaan)	207
Tabel 7.17.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumah, 2013 (Perdesaan).....	208
Tabel 7.17.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/Selokan di Sekitar Rumah, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan)	209
Tabel 7.18	Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan MCK Menurut Provinsi, 2013	210
Tabel 7.19.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013 (Perkotaan)	211
Tabel 7.19.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013 (Perdesaan).....	212
Tabel 7.19.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	213
Tabel 7.20	Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Provinsi, 2013	214
Tabel 7.21.1	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013 (Perkotaan).	215
Tabel 7.21.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013 (Perdesaan).....	216
Tabel 7.21.3	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013 (Perkotaan dan Perdesaan).....	217

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri dan Tipe Daerah, 2007 dan 2013	15
Gambar 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Rumah dengan Cara Membeli dari Pengembang Menurut Tipe Daerah, 2007 dan 2013	17
Gambar 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah dengan Angsuran KPR, 2007 dan 2013	19
Gambar 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah melalui KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit (Tahun) dan Tipe Daerah, 2013	19
Gambar 2.5 Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama ART, 2007 dan 2013	22
Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Plafon, 2007 dan 2013	58
Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Ruangan yang Dimiliki, 2013	86
Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kamar Mandi, 2013	90
Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Dapur, 2013	91
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Tipe Daerah, 2013	184

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal memiliki peran strategis dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa. Hal ini merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia yang berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Sehingga kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yang akan terus berkembang sesuai dengan tahapan dan siklus kehidupan.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dengan menyediakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah padat penduduk terutama di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk masyarakat guna memperoleh rumah melalui penyelenggaraan perumahan, dan kawasan permukiman, serta keswadayaan masyarakat.

UU RI No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Sedangkan, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang turut menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro,

Indonesia aktif dalam kegiatan yang diprakarsai oleh United Nations Centre for Human Settlements, seperti yang tertuang dalam Agenda 21 dan Deklarasi Habitat II bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*adequate and affordable shelter for all*). Hal tersebut juga sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2014, disebutkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diantaranya adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah, dan menengah bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, meningkatkan peyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*); meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai, meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi); dan meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah, persampahan serta drainase. Pada tahun 2012, program pemerintah direktif Presiden meluncurkan 6 program pro-rakyat dalam Klaster IV, yaitu program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, program peningkatan kehidupan nelayan, dan program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

Pembangunan perumahan dan permukiman memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya, dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan perumahan dan permukiman yang didukung oleh kebijakan, strategi dan program yang terpadu akan dapat memenuhi hak dasar rakyat dan menghasilkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, diperlukan data yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan. Data perumahan dan

permukiman memiliki peranan penting dalam perencanaan dan monitoring pembangunan perumahan dan permukiman. Data perumahan dan permukiman yang berkesinambungan seyogyanya disediakan secara periodik guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

Sejak tahun 1963, setiap tahunnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang sangat luas, mencakup perumahan, kesehatan/gizi, pendidikan, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga. Data yang dikumpulkan dalam Susenas bermanfaat untuk penyusunan kebijakan, dan memonitor, serta mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Ketersediaan data hasil Susenas juga bermanfaat untuk memonitor pencapaian tujuan tujuh dari Millenium Development Goals (MDGs), yaitu memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. MDGs tujuan 7 target 10 menyebutkan penurunan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015. Salah satu indikatornya adalah proporsi rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan.

Penyajian data dalam publikasi Statistik Perumahan dan Pemukiman ini berupa tabel dan grafik dengan analisis statistik deskriptif. Publikasi ini menyajikan hasil Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP) tahun 2013. Selain itu juga disajikan tabel tren data hasil Susenas Modul Perumahan tahun 2007.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Perumahan dan Permukiman 2013 adalah menyajikan informasi mengenai perumahan dan permukiman yang bersumber dari hasil Susenas MKP tahun 2013. Data hasil Susenas MKP 2013 merupakan informasi yang didapatkan dari rumah tangga.

1.2.2 Ruang Lingkup Susenas

Susenas modul kesehatan dan perumahan tahun 2013 mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga dengan

respon rate sebesar 95,27 persen. Tingkat penyajian datanya merupakan estimasi pada level nasional dan provinsi. Ini berarti bahwa data Susenas MKP 2013 bisa disajikan menurut provinsi dan dipilah berdasarkan tipe daerah perkotaan dan perdesaan.

1.3 Metodologi Susenas

Data yang digunakan dalam Statistik Perumahan dan Permukiman 2013 diolah dari Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2013. Unit observasi Susenas MKP 2013 adalah rumah tangga biasa. Rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti kompleks militer dan sejenisnya dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Sampel Susenas MKP 2013 didesain sampai level penyajian tingkat provinsi. Pemilihan sampel dilakukan melalui tiga tahap dengan kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1), muatan blok sensus dominan (permukiman biasa, permukiman mewah, permukiman kumuh), informasi daerah sulit/tidak sulit, dan klasifikasi desa/kelurahan (*rural/urban*). Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih, dan kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa tidak termasuk *institutional household* (panti asuhan, barak polisi/militer, penjara, dll) dalam setiap blok sensus sampel hasil pencacahan lengkap SP2010 (SP2010-C1) yang telah dimutakhirkan setiap menjelang pelaksanaan survei.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Susenas MKP 2013 yang ditujukan kepada individu, pencacah mengusahakan agar individu yang bersangkutan yang menjadi responden dapat memberikan informasi karena tidak ada penggantian sampel. Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga (KRT), pasangan KRT, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

1.4 Sistematika Penyajian

Penulisan publikasi ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, metodologi susenas, sistematika penyajian, dan definisi operasional.
- Bab II menggambarkan tentang penguasaan tempat tinggal, seperti status penguasaan, proses kepemilikan bangunan, jangka waktu KPR, status hukum tanah, nilai kontrak dan sewa, dan kepemilikan rumah lain.
- Bab III mengenai kondisi fisik bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, jenis plafon, dan kondisi bangunan.
- Bab IV tentang fasilitas dan perlengkapan rumah termasuk di dalamnya jumlah dan jenis ruangan, sirkulasi udara, kecukupan cahaya alami, penggunaan *Air Conditioner* (AC), fasilitas kamar mandi, dan dapur.
- Bab V mengenai pemanfaatan air meliputi sumber air untuk minum, masak, dan mandi/cuci, lokasi sumber air minum utama, rata-rata waktu yang digunakan untuk memperoleh air minum, kualitas air minum, dan penghematan air.
- Bab VI tentang pemanfaatan energi yaitu pemanfaatan listrik, dan penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak.
- Bab VII menyajikan masalah yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan fasilitas umum.

1.5 Definisi Operasional

Dalam publikasi ini disajikan beberapa konsep dan definisi operasional yang digunakan dalam Susenas MKP 2013.

A. Tipe Daerah

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, yang dimaksud dengan:

1. Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.

2. Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan

Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki suatu desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan. Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkotaan dan perdesaan yaitu:

1. Wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor sepuluh atau lebih.
2. Wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah sepuluh.

B. Rumah tangga (Ruta) dibedakan menjadi :

1. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai Ruta biasa antara lain:
 - a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
 - b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
 - c. Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
 - d. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

2. Rumah tangga khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain:

- a. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Anggota TNI dan POLRI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan Rumah khusus.
- b. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan.
- c. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.

Catatan: rumah tangga khusus tidak dicakup dalam sampel Susenas

- C. Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ ditunjuk sebagai KRT.
- D. Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal, di suatu Rumah, baik yang berada di Rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, dan ART yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih tidak dianggap ART. Orang yang tinggal di Rumah selama 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di Rumah kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/ bertempat tinggal di rumah tersebut selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai ART.
- E. Bangunan Fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.
- F. Status penguasaan tempat tinggal
 1. Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik KRT atau salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran

melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.

2. Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak.
3. Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.
4. Bebas sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh Rta tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
5. Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu ART baik dengan membayar sewa maupun tidak.
6. Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.
7. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

G. Cara memperoleh bangunan

1. Membeli dari Pengembang (perumnas, *real estate*, dll), adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah yang dibeli langsung dari pengembang baik dengan pembayaran tunai atau kredit.
2. Membeli dari Bukan Pengembang, adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah yang dibeli bukan dari developer (pengembang), tetapi membeli baik dari perorangan, dari koperasi/yayasan, atau pihak lain yang bukan pengembang, termasuk juga mereka yang membeli rumah alih kredit dari penghuni lama dengan masih melanjutkan membayar angsuran.

3. Membangun sendiri, adalah cara memperoleh tempat tinggal/rumah dengan membangun sendiri rumah tersebut, baik yang biayanya berasal dari uang sendiri, pinjaman/hutang dari perorangan, pinjaman/hutang dari lembaga keuangan seperti bank maupun pinjaman/hutang dari koperasi.
4. Lainnya, yang tidak masuk kategori di atas, contohnya rumah warisan dan hibah.

H. Cara pembayaran

1. Tunai, adalah membayar secara kontan (bukan kredit) kepada pihak penjual dan tidak melalui hutang dari manapun.
2. Angsuran KPR (Bank, lembaga keuangan) adalah angsuran yang dipergunakan untuk kredit pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh Bank/lembaga keuangan.
3. Angsuran bukan KPR, adalah angsuran yang dipergunakan untuk pembayaran kredit pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh bukan KPR. Termasuk dalam kategori ini adalah membeli langsung kepada pengembang yang uangnya dipinjam dari koperasi untuk membeli rumah.
4. Lainnya, seperti membeli rumah dengan meminjam uang kepada saudara, teman dan sebagainya.

I. Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART. Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertipikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertipikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain.
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART. SHM dalam pilihan ini merupakan SHM yang bukan atas nama ART.
3. Sertipikat non Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah jenis-jenis sertipikat selain Sertipikat Hak Milik (SHM), seperti Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)¹⁾,

Sertipikat Hak Pakai(SHP)²⁾, Girik³⁾, akte jual beli⁴⁾Notaris/PPAT baik di atas segel/meterai maupun tidak, dan tanda bukti kepemilikan lain.

4. Tidak punya. Isikan pilihan ini jika responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.
- J. Luas tapak bangunan adalah luas sebatas luas lantai dasar yang dibuat untuk bangunan. Untuk bangunan bertingkat, luas tapak bangunannya adalah lantai 1 saja.
- K. Jenis Plafon Terluas adalah jenis pembatas ruang bagian atas ruangan yang terletak di bawah atap yang berfungsi untuk melindungi penghuni ruangan dari udara panas, dingin, dan tampias air hujan sehingga ruangan menjadi aman/nyaman untuk ditinggali, yang mempunyai ukuran paling luas.
1. Beton adalah plafon yang terbuat dari beton. Jika beton ini merupakan atap bangunan, maka bangunan tersebut masuk kategori tidak ada plafon.
 2. Gypsum adalah plafon yang bahannya terbuat dari grip dengan campuran semen putih.
 3. Kayu/triplek adalah plafon yang bahannya terbuat dari kayu triplek.
 4. Asbes adalah plafon yang bahannya terdiri dari asbes dan semen. Pada umumnya plafon asbes berbentuk empat persegi panjang.
 5. Anyaman bambu adalah plafon yang bahannya terbuat dari anyaman bambu.
 6. Lainnya, adalah plafon yang bahannya terbuat dari selain yang telah disebutkan di atas.
 7. Tidak ada, apabila bangunan tempat tinggal tersebut tidak menggunakan plafon, atau atap bangunan langsung merangkap sebagai plafon.
- L. Ventilasi/Lubang Angin adalah tempat keluar/masuk udara/sinar dari luar rumah ke dalam ruangan yang biasanya tidak tertutup rapat.
- M. Cahaya Alami adalah pencahayaan yang berasal dari sinar matahari baik langsung maupun tidak langsung tanpa adanya bantuan pencahayaan buatan (lampu, api). Pencahayaan dikatakan cukup bila pada siang hari dapat membaca secara jelas di dalam ruangan, tanpa bantuan alat penerangan.

- N. Kamar Mandi adalah tempat mandi permanen (tetap) yang berdinding dan memenuhi syarat kesopanan.
- O. Waktu yang Dibutuhkan untuk Memperoleh Air Minum adalah waktu yang biasanya digunakan dalam satu kali pengambilan air minum pulang pergi, baik menggunakan alat transportasi maupun tidak, termasuk waktu menunggu atau antri.
- P. Kualitas Air Minum
1. Jernih/bening, bila air dituang dalam gelas bening tidak terlihat adanya benda-benda kecil yang bercampur menjadi satu.
 2. Berwarna, bila air tampak keruh (bening/jernih) tetapi berwarna.
 3. Berasa, bila air memberi rasa tertentu, seperti : asin, anta, payau.
 4. Berbusa, bila air mengeluarkan busa/buih yang cukup banyak (seperti tercampur deterjen) pada waktu dituang ke suatu tempat (gelas).
 5. Berbau, bila air mengeluarkan bau tertentu.

2

PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kutipan UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa setiap penduduk di Indonesia berhak bertempat tinggal dan hidup sejahtera. Yang dimaksud dengan berhak bertempat tinggal adalah memiliki kesempatan untuk memiliki tempat berteduh yang digunakan sebagai tempat tinggal, umumnya berbentuk tenda-tenda nomaden, rumah, hingga apartemen.

Berkaitan dengan hak bertempat tinggal tersebut, hasil Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2013 dengan pendekatan rumah tangga memberikan gambaran mengenai keadaan rumah tangga di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau rumah. Bab ini mendeskripsikan status penguasaan tempat tinggal, proses kepemilikan rumah dari kepemilikan bangunan hingga tanah yang ditempati, kemampuan kontrak atau sewa rumah, serta kepemilikan rumah lain selain dari rumah yang ditempati.

2.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal

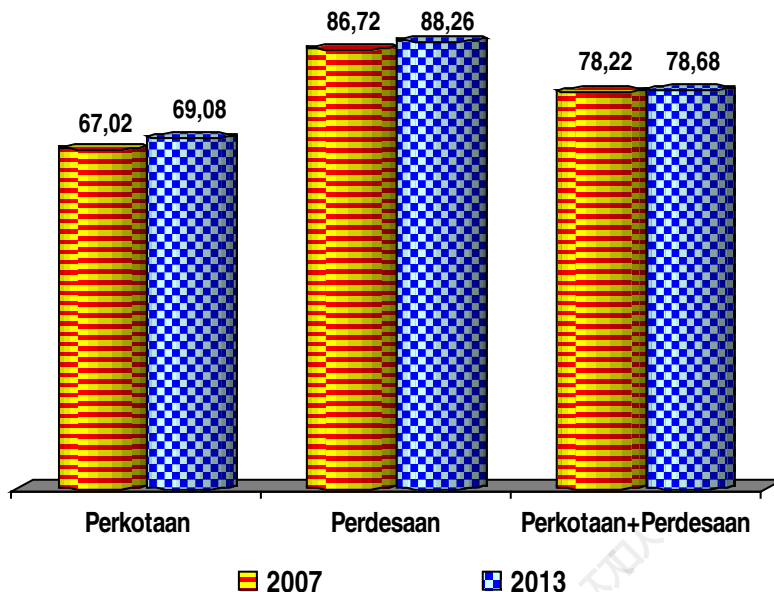
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi memberikan pengaruh yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Penduduk yang berpenghasilan relatif tinggi memiliki kesempatan yang lebih dibandingkan dengan penduduk berpenghasilan rendah atau rumah tangga miskin untuk memiliki rumah sendiri dengan kondisi rumah yang lebih baik. Tingkat ekonomi rumah tangga menyebabkan perbedaan dalam perilaku masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, yaitu milik sendiri, kontrak atau sewa, menempati rumah tanpa mengeluarkan uang atau bebas sewa, menempati rumah dinas, atau lainnya seperti menempati rumah adat.

Tabel 2.1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2013

Status Penguasaan Tempat Tinggal	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	69,08	88,26	78,68
Kontrak	6,99	0,65	3,82
Sewa	8,87	0,50	4,68
Bebas Sewa	1,48	1,19	1,33
Rumah milik orang tua/ sanak/saudara	12,08	7,46	9,77
Dinas	1,29	1,80	1,54
Lainnya	0,21	0,15	0,18
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.1 menyajikan persentase rumah tangga menurut status penguasaan tempat tinggal dan tipe daerah. Menurut hasil Susenas MKP 2013, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri mencapai 78,68 persen, sisanya 21,32 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah milik orang tua/sanak/saudara sekitar 9,77 persen, kontrak sekitar 3,82 persen, sewa sebesar 4,68 persen, rumah dinas sebesar 1,54 persen, dan bebas sewa sebesar 1,33 persen. Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan (30,92 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (11,74 persen). Sebaliknya persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status penguasaan milik sendiri cenderung lebih tinggi di perdesaan (88,26 persen) dibanding perkotaan (69,08 persen).

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2007. Persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri pada tahun 2007 sekitar 78,22 persen, naik menjadi 78,68 persen pada tahun 2013. Fenomena ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Gambar 2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri dan menurut Tipe Daerah, 2007 dan 2013

Variasi penguasaan bangunan tempat tinggal per provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.9.1 - 2.9.3. Persentase terendah kepemilikan rumah dengan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri ada di Provinsi DKI Jakarta (43,91 persen), sedangkan persentase tertinggi ada di provinsi Kalimantan Barat (88,03 persen). Menurut tipe daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan, Provinsi Papua Barat dan DKI Jakarta memiliki persentase terendah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri (DKI Jakarta 43,91 persen dan Papua Barat 45,40 persen), sedangkan persentase tertinggi adalah provinsi Sulawesi Barat (84,77 persen). Sementara di daerah perdesaan, provinsi dengan persentase terendah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu 72,05 persen, dan Kalimantan tengah (73,98 persen). Sedangkan persentase tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 93,83 persen.

2.2 Proses Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri

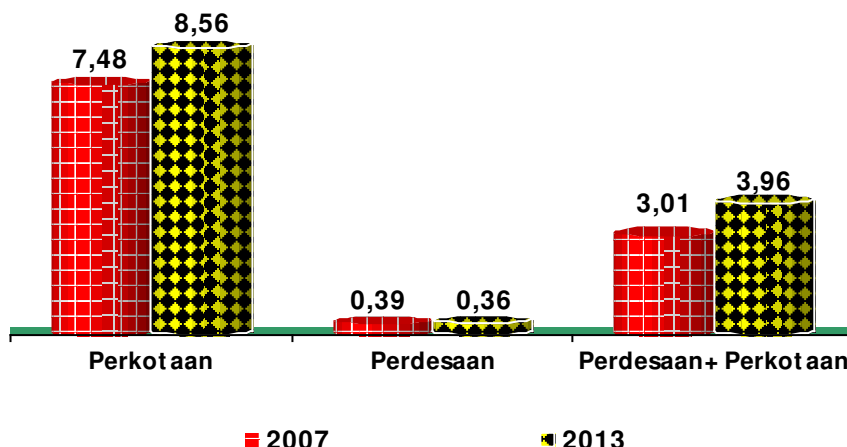
Perilaku rumah tangga dalam cara memiliki rumah sendiri dapat berupa berbagai cara seperti membeli baik tunai maupun angsuran, membangun sendiri, dan

lainnya (warisan, hibah, dan rumah adat). Membeli dapat dilakukan dengan membeli dari pengembang, atau dari bukan pengembang. Hasil Susenas MKP 2013 menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri memperolehnya dengan cara membangun sendiri (71,07 persen). Sisanya, 10,06 persen rumah tangga memperoleh rumah dengan cara membeli, dan 18,87 persen memperoleh rumah dengan cara lainnya selain membeli dan membangun sendiri seperti warisan, hibah, dan rumah adat.

Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Cara Memperoleh Bangunan, dan menurut Tipe Daerah, Tahun 2013

Cara Memperoleh Bangunan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Membeli dari pengembang	8,56	0,36	3,96
Membeli bukan dari pengembang	9,93	3,11	6,10
Membangun sendiri	62,03	78,12	71,07
Lainnya (warisan,hibah,rumah adat,dll)	19,48	18,41	18,87
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Menurut tipe daerah, persentase rumah tangga yang membangun rumah sendiri di daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan di perdesaan (62,03 persen berbanding 78,12 persen). Tabel 2.2 memperlihatkan fenomena perkotaan dimana sekitar 18 persen rumah tangga membeli rumah dari pengembang (8,56 persen) dan bukan dari pengembang (9,93 persen). Variasi per provinsi pada Tabel 2.10.3 memperlihatkan persentase terendah rumah tangga yang membangun rumahnya sendiri ada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 36,73 persen. Di provinsi DKI Jakarta, selain membangun rumah sendiri, ternyata banyak juga rumah tangga yang membeli rumah dari pengembang maupun bukan pengembang (35,28 persen) dan mendapat rumah dari warisan, hibah, rumah adat dan lain-lain (27,99 persen). Sementara persentase tertinggi rumah tangga yang memperoleh rumah milik sendiri dengan cara membangun sendiri ada di Provinsi Maluku Utara sebesar 88,50 persen dan Provinsi Sulawesi Barat yaitu 86,50 persen.



Gambar 2.2 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Rumah dengan Cara Membeli dari Pengembang Menurut Tipe Daerah, 2007 dan 2013

Informasi mengenai rumah tangga yang membeli rumah dari pengembang merupakan informasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam program perumahan dan juga bagi para pengembang. Susenas MKP mencatat bahwa terjadi kenaikan persentase rumah tangga yang memperoleh rumah dengan cara membeli dari pengembang pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007. Pada tahun 2007, ada sekitar 3,01 persen rumah tangga yang membeli rumah dari pengembang, naik menjadi 3,96 persen pada tahun 2013 (Gambar 2.2). Fenomena kenaikan ini terjadi di daerah perkotaan.

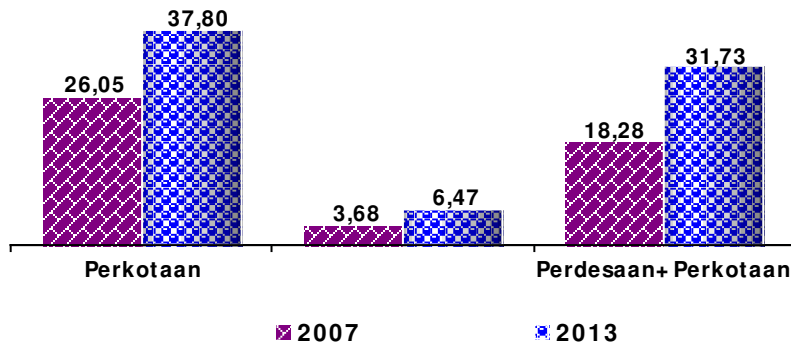
Membeli rumah, baik melalui pengembang maupun bukan pengembang, dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. Tabel 2.3 memperlihatkan persentase rumah tangga yang membeli rumah secara tunai (59,53 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang membeli secara kredit (KPR atau non KPR). Di daerah perdesaan, sekitar 77,25 persen rumah tangga membeli rumah secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan yang hanya sekitar 55,27 persen. Fenomena pembelian rumah dengan angsuran KPR lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Sekitar 37,80 persen rumah tangga di daerah perkotaan membeli rumah dengan angsuran KPR, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 6,47 persen. Sebaliknya di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran bukan KPR lebih tinggi dibandingkan dengan angsuran KPR (10,28 persen berbanding 6,47 persen).

Provinsi yang memiliki persentase tertinggi dan terendah rumah tangga yang membeli rumah dengan pembayaran secara kredit adalah Provinsi Banten yaitu 65,61 persen dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 5,32 persen (Tabel 2.11.3).

Tabel 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Bangunan dengan Cara Membeli Menurut Cara Pembayaran dan Tipe Daerah, 2013

Daerah	Tunai	Angsuran KPR	Angsuran bukan KPR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	55,27	37,80	4,50	2,43	100,00
Perdesaan	77,25	6,47	10,28	6,01	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	59,53	31,73	5,62	3,12	100,00

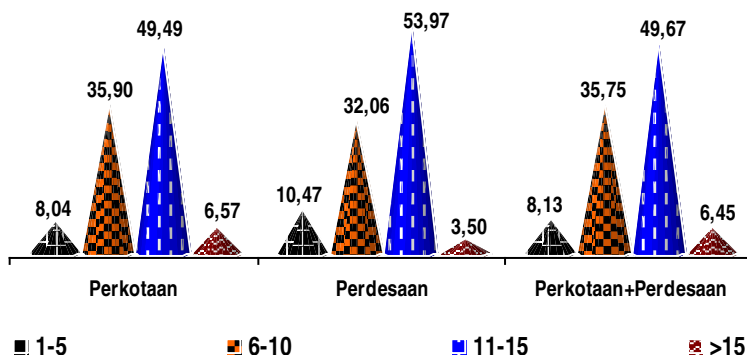
Persentase rumah tangga yang membeli rumah melalui KPR mengalami peningkatan selama periode tahun 2007 dan 2013. Gambar 2.3 memperlihatkan persentase rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran KPR pada tahun 2007 sebesar 18,28 persen, naik menjadi 31,73 persen pada tahun 2013. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pembelian rumah dengan angsuran KPR merupakan fenomena perkotaan, persentase rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran KPR pada tahun 2007 sebesar 26,05 persen, naik menjadi 37,80 persen pada tahun 2013. Kenaikan persentase rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran KPR juga terjadi di daerah perdesaan, walaupun kenaikan relatif kecil. Persentase rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran KPR pada tahun 2007 sekitar 3,68 persen, naik menjadi 6,47 persen pada tahun 2013.



Gambar 2.3 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah dengan Angsuran KPR, 2007 dan 2013

2.3 Jangka Waktu KPR dan Kemampuan Membayar

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa rumah tangga yang membeli rumah dengan angsuran KPR ada sekitar 31,73 persen. Jangka waktu pengembalian KPR dikelompokkan menjadi 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun dan lebih dari 15 tahun. Gambar 2.4 memperlihatkan bahwa rumah tangga cenderung memilih jangka waktu pengembalian KPR selama 11-15 tahun yaitu 49,67 persen, dan jangka waktu 6-10 tahun (35,75 persen). Pola ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan KPR selama 11-15 tahun ada sekitar 49,49 persen, jangka waktu 6-10 tahun sekitar 35,90 persen, dan jangka waktu 1-5 tahun sekitar 8,04 persen. Sedangkan di perdesaan, persentase rumah tangga yang memiliki rumah melalui KPR dengan jangka waktu pengembalian 11-15 tahun sekitar 53,97 persen, jangka waktu 6-10 tahun sebesar 32,06 persen, dan jangka waktu 1-5 tahun sebesar 10,47 persen.



Gambar 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah melalui KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit (Tahun) dan Tipe Daerah, 2013

Kemampuan membayar angsuran cicilan rumah yang digunakan dalam publikasi ini adalah penyelesaian pelunasannya. Hasil Susenas MKP 2013 menunjukkan ada sekitar 62,29 persen rumah tangga yang sudah melunasi pembayaran KPR, dan 37,71 persen rumah tangga yang belum melunasi pembayaran KPR (Tabel 2.4). Berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak yang sudah lunas angsuran KPR nya dibandingkan dengan yang belum lunas (63,01 persen berbanding 36,99 persen). Sedangkan di daerah perdesaan, lebih banyak rumah tangga yang belum lunas angsuran KPR nya dibandingkan dengan yang sudah lunas (55,11 persen berbanding 44,89 persen).

Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Mengangsur KPR Menurut Pelunasan Angsuran dan Tipe Daerah, 2013

Tipe Daerah	Sudah Lunas	Belum Lunas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	63,01	36,99	100,00
Perdesaan	44,89	55,11	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	62,29	37,71	100,00

2.4 Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal

Bukti kepemilikan tanah tempat tinggal merupakan jaminan kepastian hukum atas tanah tempat tinggal sehingga setiap petak tanah sudah seharusnya memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Dengan adanya bukti kepemilikan tanah, rumah tangga memiliki kekuatan hukum bila terjadi sengketa atas tanah yang ditempatinya. Informasi bukti kepemilikan tanah yang dikumpulkan dalam Susenas MKP 2013 meliputi sertifikat hak milik (SHM) atas nama anggota rumah tangga (ART), SHM bukan atas nama art, sertifikat lain, dan tidak punya.

Menurut Susenas MKP 2013, masih relatif banyak rumah tangga yang tidak punya surat tanah (37,85 persen). Namun cukup banyak juga rumah tangga yang sudah memiliki bukti kepemilikan tanah SHM atas nama art (37,63 persen). Di daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa

SHM atas nama art mencapai 48,34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah (26,11 persen). Di daerah perdesaan, persentase tertinggi rumah tangga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah adalah 47,02 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah SHM atas nama art di perdesaan adalah 29,27 persen.

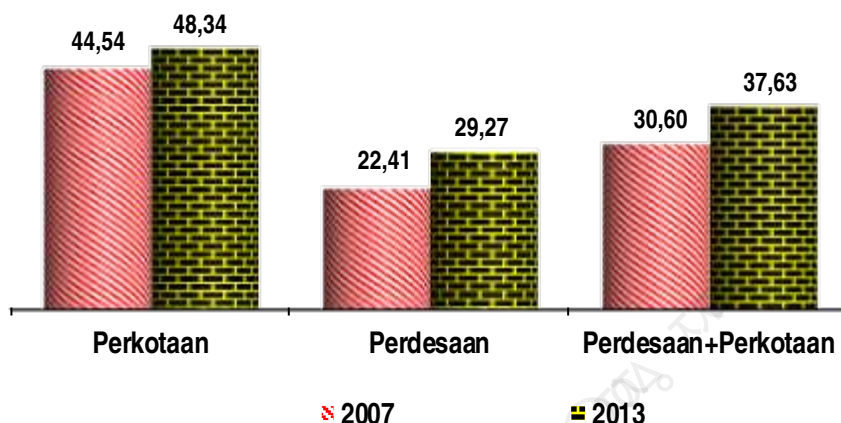
Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Jenis Bukti Kepemilikan Tanah dan Tipe Daerah, 2013

Surat Tanah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota rumah tangga (an art)	48,34	29,27	37,63
Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan an art	11,12	8,88	9,86
Sertifikat selain SHM	14,43	14,83	14,66
Tidak Punya	26,11	47,02	37,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel 2.14.3 dapat dilihat tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yaitu Provinsi Sumatera Barat (58,86 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (63,42 persen), dan Provinsi Papua Barat (80,47 persen). Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM atas nama art adalah Provinsi Jawa Tengah (47,06 persen), Provinsi DI Yogyakarta (58,42 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (63,07 persen).

Perkembangan persentase bukti kepemilikan rumah dapat dilihat pada Gambar 2.5. Persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah SHM atas nama anggota rumah tangga pada tahun 2007 sekitar 30,60 persen, dan pada tahun 2013 sekitar 37,63 persen. Di daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki bukti kepemilikan tanah SHM atas nama art naik pada tahun 2013 (48,34 persen) dibandingkan tahun 2007 (44,54 persen). Sedangkan di perdesaan,

walaupun persentase kenaikan bukti kepemilikan SHM atas nama art lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, namun persentase kepemilikannya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan.



Gambar 2.5. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama ART, 2007 dan 2013

2.5 Nilai Kontrak dan Sewa

Rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa mengeluarkan biaya kontrak atau sewa dalam kurun waktu tertentu. Nilai kontrak harus dibayarkan secara teratur kepada pemilik rumah selama waktu tertentu sebagai biaya atas rumah yang ditempatinya. Menurut Susenas MKP 2013, persentase tertinggi rumah tangga mengontrak dengan nilai kontrak sebulan sebesar 100 ribu sampai 299 ribu (35,86 persen) (Tabel 2.6). Persentase tertinggi berikutnya dengan nilai kontrak sebulan antara 300 ribu sampai 499 ribu (26,97 persen). Di perkotaan, kebanyakan penduduk mengontrak dengan nilai kontrak sebulan berkisar antara 100 ribu sampai 299 ribu rupiah (35,23 persen), dan nilai kontrak sebulan antara 300 ribu sampai 499 ribu (28,48 persen). Di daerah perdesaan, mayoritas penduduk desa mengontrak rumah dengan nilai kontrak sebulan kurang dari 100 ribu rupiah (30,93 persen), dan nilai kontrak antara 100 sampai 299 ribu sebulan (42,63 persen).

Tabel 2.6. Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Kontrak Menurut Tipe Daerah dan Kategori Nilai Kontrak Sebulan, 2013

Tipe Daerah	< 100.000	100.000-299.999	300.000-499.999	500.000-699.999	700.000-899.999	≥ 900.000	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	3,95	35,23	28,48	14,97	5,56	11,79	100,00
Perdesaan	30,93	42,63	10,58	10,39	3,24	2,23	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	6,24	35,86	26,97	14,59	5,37	10,98	100,00

Persentase rumah tangga yang menyewa rumah, menurut hasil Susenas MKP 2013 pada Tabel 2.7, membayar sewa per bulan antara 300 ribu sampai 499 ribu (40,86 persen), dan sewa per bulan antara 100 ribu sampai 299 ribu (32,10 persen). Di daerah perkotaan, persentase tertinggi rumah tangga membayar sewa rumah sebulan antara 300 ribu sampai 499 ribu sebesar 41,99 persen, dan membayar sewa per bulan antara 100 ribu sampai 299 ribu sebesar 31,26 persen. Di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang membayar sewa sebulan antara 100 ribu sampai 299 ribu sekitar 46,88 persen, dan yang membayar sewa per bulan kurang dari 100 ribu sekitar 24,86 persen.

Tabel 2.7. Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Sewa menurut Kategori Nilai Sewa Sebulan, Tahun 2013

Tipe Daerah	< 100.000	100.000-299.999	300.000-499.999	500.000-699.999	700.000-899.999	≥ 900.000	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	2,48	31,26	41,99	16,41	4,93	2,93	100,00
Perdesaan	24,86	46,88	21,00	5,16	1,16	0,95	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	3,68	32,10	40,86	15,80	4,73	2,83	100,00

2.6 Kepemilikan Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan

Program pemerintah yang ingin mewujudkan setiap keluarga menempati rumah sendiri, berdasarkan hasil Susenas MKP 2013 dengan menggunakan pendekatan rumah tangga menunjukkan bahwa dari 64 juta rumah tangga di Indonesia ada sekitar 7,71 persen rumah tangga yang memiliki rumah lain selain dari rumah yang ditempatinya saat periode survei. Sekitar 92,29 persen rumah tangga hanya memiliki satu rumah saja yaitu rumah yang ditempatinya saat periode survei. Fenomena memiliki rumah selain dari rumah yang ditempatinya banyak terjadi di daerah perkotaan dengan persentase sekitar 10,72 persen, dibandingkan dengan di perdesaan yang hanya sekitar 4,71 persen. Dilihat menurut provinsi (Tabel 2.17.3), persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki rumah selain yang ditempati adalah Provinsi Bali (17,09 persen), DKI Jakarta (16,34 persen), dan Kalimantan Timur (15,77 persen).

Tabel 2.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan dan Tipe Daerah, 2013

Kepemilikan Rumah lain	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	10,72	4,71	7,71
Tidak	89,28	95,29	92,29
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013

Provinsi	Milik sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas sewa	Rumah dinas	Milik orang tua/ sanak/ saudara	Perkotaan	
							Lain-nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	71,07	10,67	3,73	1,60	9,53	3,21	0,19	100,00
Sumatera Utara	59,53	13,13	5,07	2,32	15,05	4,02	0,87	100,00
Sumatera Barat	61,05	11,21	8,34	2,54	14,15	2,14	0,58	100,00
Riau	54,13	11,84	20,27	4,02	6,14	3,35	0,26	100,00
Jambi	64,04	16,98	2,87	2,36	12,34	1,22	0,19	100,00
Sumatera Selatan	66,31	13,76	5,91	1,74	11,74	0,54	-	100,00
Bengkulu	61,21	11,82	11,44	1,90	11,47	2,16	-	100,00
Lampung	76,95	5,72	2,51	2,16	11,65	1,02	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	76,91	7,36	6,81	2,73	5,86	0,33	-	100,00
Kepulauan Riau	58,78	4,30	25,96	1,20	8,15	1,07	0,54	100,00
DKI Jakarta	43,91	14,90	21,29	1,32	15,88	2,23	0,48	100,00
Jawa Barat	70,57	5,31	7,64	1,12	14,44	0,75	0,17	100,00
Jawa Tengah	80,51	3,38	2,62	0,95	12,20	0,26	0,08	100,00
DI Yogyakarta	65,18	13,98	8,21	1,09	11,49	0,05	-	100,00
Jawa Timur	80,27	4,80	3,98	0,99	9,16	0,60	0,20	100,00
Banten	71,13	6,21	13,34	0,77	7,64	0,77	0,14	100,00
Bali	57,45	7,51	21,8	3,53	9,21	0,41	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	78,92	2,09	3,40	0,85	13,70	0,94	0,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,09	6,27	12,26	1,68	11,25	1,44	-	100,00
Kalimantan Barat	76,85	5,57	2,73	0,74	11,28	2,83	-	100,00
Kalimantan Tengah	61,60	6,48	15,66	2,40	9,16	4,61	0,09	100,00
Kalimantan Selatan	59,61	4,76	18,30	3,40	11,47	2,10	0,37	100,00
Kalimantan Timur	60,23	6,36	19,12	2,44	8,85	2,99	-	100,00
Sulawesi Utara	63,09	2,08	5,67	4,40	22,40	2,04	0,33	100,00
Sulawesi Tengah	61,48	5,65	14,91	1,98	12,34	3,65	-	100,00
Sulawesi Selatan	74,50	7,16	3,24	2,04	11,07	1,96	0,03	100,00
Sulawesi Tenggara	72,03	8,15	9,70	2,57	6,35	0,72	0,48	100,00
Gorontalo	64,52	0,21	3,92	2,13	27,87	0,88	0,47	100,00
Sulawesi Barat	84,77	5,48	2,37	1,57	4,92	0,90	-	100,00
Maluku	70,04	3,99	9,85	2,28	10,96	2,75	0,13	100,00
Maluku Utara	70,71	3,44	7,24	6,04	10,61	1,59	0,36	100,00
Papua Barat	45,40	4,96	22,71	8,59	10,34	7,43	0,57	100,00
Papua	46,84	5,29	28,69	2,48	5,63	11,08	-	100,00
Indonesia	69,08	6,99	8,87	1,48	12,08	1,29	0,21	100,00

Tabel 2.9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013

Perdesaan								
Provinsi	Milik sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas sewa	Rumah dinas	Milik orang tua/sanak/saudara	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	83,83	0,53	2,10	1,56	10,05	1,86	0,06	100,00
Sumatera Utara	72,05	3,37	1,99	3,40	12,12	6,83	0,23	100,00
Sumatera Barat	74,12	1,60	0,40	2,65	18,75	2,16	0,32	100,00
Riau	76,09	1,26	0,88	2,10	6,91	12,76	-	100,00
Jambi	84,18	1,71	0,17	1,49	8,95	3,18	0,33	100,00
Sumatera Selatan	85,03	0,98	0,35	1,53	10,33	1,40	0,38	100,00
Bengkulu	84,14	1,46	0,92	1,85	6,49	4,45	0,69	100,00
Lampung	90,04	0,85	0,51	1,23	6,51	0,82	0,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,89	0,58	0,96	3,07	3,53	1,97	-	100,00
Kepulauan Riau	88,70	0,46	-	4,45	5,31	1,08	-	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	89,75	0,59	0,21	0,69	8,59	0,10	0,06	100,00
Jawa Tengah	92,26	0,27	0,04	0,50	6,36	0,48	0,09	100,00
DI Yogyakarta	93,70	0,68	1,71	0,60	3,30	-	-	100,00
Jawa Timur	93,38	0,15	0,04	0,36	5,26	0,65	0,16	100,00
Banten	93,72	-	0,93	0,29	5,06	-	-	100,00
Bali	86,34	1,32	-	3,12	9,22	-	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,69	0,10	0,08	1,85	9,07	0,21	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	91,93	0,34	0,24	0,72	5,30	1,16	-	100,00
Kalimantan Barat	92,58	0,59	0,37	1,48	3,83	1,07	0,07	100,00
Kalimantan Tengah	73,98	0,74	1,64	2,58	11,46	9,01	0,59	100,00
Kalimantan Selatan	79,17	0,65	3,15	2,09	9,08	5,85	-	100,00
Kalimantan Timur	77,19	0,62	2,97	2,57	8,12	8,53	-	100,00
Sulawesi Utara	85,00	0,44	0,52	2,82	10,92	0,22	0,07	100,00
Sulawesi Tengah	86,66	0,33	0,10	2,46	8,29	1,77	0,39	100,00
Sulawesi Selatan	91,21	0,42	0,04	0,79	6,44	0,87	0,23	100,00
Sulawesi Tenggara	93,83	0,35	0,04	1,20	3,80	0,74	0,04	100,00
Gorontalo	85,14	0,17	-	0,65	12,86	0,70	0,48	100,00
Sulawesi Barat	88,43	0,37	0,12	2,35	5,86	2,87	-	100,00
Maluku	88,90	-	0,84	1,04	4,98	3,98	0,27	100,00
Maluku Utara	89,57	0,03	0,94	2,49	6,30	0,67	-	100,00
Papua Barat	86,98	0,03	2,99	2,42	4,78	2,40	0,40	100,00
Papua	90,26	0,25	0,45	0,74	4,90	3,05	0,35	100,00
Indonesia	88,26	0,65	0,50	1,19	7,46	1,80	0,15	100,00

Tabel 2.9.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013

Perkotaan+ Perdesaan								
Provinsi	Milik sendiri	Kontrak	Sewa	Bebas sewa	Rumah dinas	Milik orang tua/ sanak/ saudara	Lain-nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	80,22	3,40	2,56	1,57	9,91	2,24	0,10	100,00
Sumatera Utara	65,97	8,11	3,48	2,88	13,54	5,47	0,54	100,00
Sumatera Barat	69,11	5,28	3,44	2,61	16,98	2,15	0,42	100,00
Riau	67,54	5,38	8,43	2,85	6,61	9,09	0,10	100,00
Jambi	78,21	6,23	0,97	1,75	9,95	2,60	0,29	100,00
Sumatera Selatan	78,38	5,52	2,32	1,60	10,83	1,10	0,25	100,00
Bengkulu	76,91	4,72	4,23	1,87	8,06	3,73	0,47	100,00
Lampung	86,89	2,02	0,99	1,45	7,74	0,87	0,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	83,64	3,85	3,78	2,91	4,65	1,18	-	100,00
Kepulauan Riau	63,66	3,67	21,73	1,73	7,69	1,07	0,45	100,00
DKI Jakarta	43,91	14,90	21,29	1,32	15,88	2,23	0,48	100,00
Jawa Barat	77,37	3,64	5,01	0,97	12,37	0,52	0,13	100,00
Jawa Tengah	86,94	1,68	1,21	0,70	9,00	0,38	0,09	100,00
DI Yogyakarta	74,24	9,75	6,15	0,94	8,89	0,03	-	100,00
Jawa Timur	87,23	2,33	1,89	0,66	7,09	0,63	0,18	100,00
Banten	78,23	4,26	9,44	0,62	6,83	0,53	0,09	100,00
Bali	68,37	5,17	13,61	3,37	9,21	0,26	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	84,51	0,95	1,50	1,42	11,05	0,52	0,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	87,16	1,48	2,55	0,91	6,44	1,22	0,25	100,00
Kalimantan Barat	88,03	2,03	1,05	1,27	5,99	1,58	0,05	100,00
Kalimantan Tengah	69,76	2,69	6,41	2,52	10,68	7,51	0,42	100,00
Kalimantan Selatan	70,74	2,42	9,68	2,65	10,11	4,23	0,16	100,00
Kalimantan Timur	66,66	4,19	13,00	2,49	8,57	5,09	-	100,00
Sulawesi Utara	74,97	1,19	2,88	3,54	16,17	1,05	0,19	100,00
Sulawesi Tengah	80,50	1,63	3,72	2,34	9,28	2,23	0,30	100,00
Sulawesi Selatan	85,20	2,84	1,19	1,24	8,11	1,26	0,15	100,00
Sulawesi Tenggara	87,78	2,52	2,72	1,58	4,51	0,73	0,16	100,00
Gorontalo	78,06	0,18	1,35	1,16	18,02	0,76	0,48	100,00
Sulawesi Barat	87,64	1,46	0,60	2,19	5,66	2,45	-	100,00
Maluku	81,39	1,59	4,43	1,53	7,36	3,49	0,22	100,00
Maluku Utara	84,34	0,97	2,69	3,48	7,49	0,92	0,10	100,00
Papua Barat	75,04	1,45	8,65	4,19	6,38	3,85	0,45	100,00
Papua	79,52	1,49	7,44	1,17	5,08	5,04	0,26	100,00
Indonesia	78,68	3,82	4,68	1,33	9,77	1,54	0,18	100,00

Tabel 2.10.1 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013

					Perkotaan
Provinsi	Membeli dari pengembang	Membeli dari bukan pengembang	Membangun sendiri	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,10	2,91	70,32	25,68	100,00
Sumatera Utara	3,56	13,03	69,97	13,44	100,00
Sumatera Barat	8,43	5,48	71,82	14,27	100,00
Riau	13,93	9,18	69,29	7,61	100,00
Jambi	12,39	8,93	71,44	7,24	100,00
Sumatera Selatan	10,43	11,46	66,60	11,50	100,00
Bengkulu	6,91	11,35	75,63	6,10	100,00
Lampung	0,76	11,03	73,86	14,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,51	10,36	73,47	14,67	100,00
Kepulauan Riau	41,64	15,52	38,53	4,31	100,00
DKI Jakarta	7,87	27,41	36,73	27,99	100,00
Jawa Barat	11,00	10,25	61,37	17,38	100,00
Jawa Tengah	4,37	6,47	64,86	24,30	100,00
DI Yogyakarta	4,76	4,03	69,82	21,39	100,00
Jawa Timur	5,26	8,63	59,41	26,70	100,00
Banten	21,50	9,82	53,46	15,22	100,00
Bali	5,14	3,87	61,34	29,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,82	4,93	69,90	23,36	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,30	2,07	83,54	13,09	100,00
Kalimantan Barat	9,69	8,60	74,91	6,80	100,00
Kalimantan Tengah	12,62	11,22	71,19	4,97	100,00
Kalimantan Selatan	13,58	13,69	61,06	11,67	100,00
Kalimantan Timur	8,80	11,68	69,42	10,10	100,00
Sulawesi Utara	6,80	7,99	70,71	14,50	100,00
Sulawesi Tengah	8,53	6,43	76,55	8,49	100,00
Sulawesi Selatan	12,41	12,68	61,66	13,26	100,00
Sulawesi Tenggara	8,30	3,60	82,64	5,46	100,00
Gorontalo	6,82	4,43	73,71	15,04	100,00
Sulawesi Barat	5,98	5,31	81,40	7,31	100,00
Maluku	0,52	7,30	74,29	17,89	100,00
Maluku Utara	2,32	3,03	90,17	4,47	100,00
Papua Barat	-	7,49	67,83	24,68	100,00
Papua	6,64	10,88	72,68	9,81	100,00
Indonesia	8,56	9,93	62,03	19,48	100,00

Tabel 2.10.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013

					Perdesaan
Provinsi	Membeli dari pengembang	Membeli dari bukan pengembang	Membangun sendiri	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,17	1,85	75,79	22,20	100,00
Sumatera Utara	0,63	2,04	80,13	17,20	100,00
Sumatera Barat	0,22	1,71	80,98	17,08	100,00
Riau	0,60	3,59	85,45	10,36	100,00
Jambi	0,74	2,68	88,79	7,80	100,00
Sumatera Selatan	0,95	4,48	82,63	11,94	100,00
Bengkulu	0,76	7,20	84,00	8,04	100,00
Lampung	0,30	4,41	85,30	9,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,73	9,30	83,45	6,52	100,00
Kepulauan Riau	0,58	2,06	81,67	15,69	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,38	3,86	79,42	16,33	100,00
Jawa Tengah	0,08	2,66	71,79	25,46	100,00
DI Yogyakarta	0,00	2,42	62,27	35,32	100,00
Jawa Timur	0,35	2,16	71,14	26,35	100,00
Banten	0,09	1,26	85,34	13,31	100,00
Bali	0,86	4,22	71,91	23,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,43	4,60	76,00	18,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,05	0,18	86,83	12,95	100,00
Kalimantan Barat	0,30	2,33	87,50	9,87	100,00
Kalimantan Tengah	0,54	4,15	85,90	9,41	100,00
Kalimantan Selatan	0,78	4,61	85,08	9,53	100,00
Kalimantan Timur	0,38	3,13	79,34	17,15	100,00
Sulawesi Utara	1,27	5,22	77,42	16,10	100,00
Sulawesi Tengah	0,00	4,70	84,38	10,92	100,00
Sulawesi Selatan	0,61	6,12	82,04	11,23	100,00
Sulawesi Tenggara	0,76	4,09	87,54	7,61	100,00
Gorontalo	0,27	8,43	76,75	14,55	100,00
Sulawesi Barat	0,00	4,90	87,83	7,27	100,00
Maluku	0,00	0,25	88,02	11,73	100,00
Maluku Utara	0,00	1,91	88,00	10,09	100,00
Papua Barat	0,02	1,37	60,02	38,59	100,00
Papua	0,03	0,41	77,08	22,48	100,00
Indonesia	0,36	3,11	78,12	18,41	100,00

Tabel 2.10.3 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Memperoleh Bangunan, 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	Membeli dari pengembang	Membeli dari bukan pengembang	Membangun sendiri	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,40	2,11	74,41	23,07	100,00
Sumatera Utara	1,91	6,85	75,68	15,56	100,00
Sumatera Barat	3,00	2,99	77,88	16,13	100,00
Riau	4,76	5,34	80,40	9,50	100,00
Jambi	3,56	4,19	84,58	7,66	100,00
Sumatera Selatan	3,80	6,58	77,82	11,81	100,00
Bengkulu	2,30	8,24	81,90	7,56	100,00
Lampung	0,40	5,82	82,87	10,91	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,08	9,77	79,03	10,13	100,00
Kepulauan Riau	32,32	12,46	48,33	6,89	100,00
DKI Jakarta	7,87	27,41	36,73	27,99	100,00
Jawa Barat	6,63	7,62	68,80	16,95	100,00
Jawa Tengah	1,88	4,26	68,89	24,97	100,00
DI Yogyakarta	2,85	3,39	66,79	26,97	100,00
Jawa Timur	2,47	4,95	66,08	26,50	100,00
Banten	13,44	6,60	65,46	14,50	100,00
Bali	3,10	4,04	66,39	26,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,99	4,73	73,56	20,72	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,23	0,46	86,34	12,97	100,00
Kalimantan Barat	2,67	3,91	84,32	9,10	100,00
Kalimantan Tengah	4,17	6,27	81,48	8,08	100,00
Kalimantan Selatan	5,43	7,91	76,35	10,31	100,00
Kalimantan Timur	5,10	7,93	73,78	13,19	100,00
Sulawesi Utara	3,40	6,28	74,83	15,49	100,00
Sulawesi Tengah	1,59	5,02	82,92	10,46	100,00
Sulawesi Selatan	4,32	8,18	75,64	11,86	100,00
Sulawesi Tenggara	2,47	3,98	86,42	7,12	100,00
Gorontalo	2,13	7,29	75,89	14,69	100,00
Sulawesi Barat	1,23	4,98	86,50	7,28	100,00
Maluku	0,18	2,67	83,32	13,84	100,00
Maluku Utara	0,54	2,17	88,50	8,79	100,00
Papua Barat	0,02	2,43	61,38	36,17	100,00
Papua	0,99	1,94	76,44	20,64	100,00
Indonesia	3,96	6,10	71,07	18,87	100,00

Tabel 2.11.1 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Pembayaran, 2013

					Perkotaan
Provinsi	Tunai	Angsuran KPR	Angsuran bukan KPR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,17	18,36	13,48	-	100,00
Sumatera Utara	88,92	7,84	2,09	1,15	100,00
Sumatera Barat	49,89	47,24	2,66	0,21	100,00
Riau	32,79	58,64	7,06	1,51	100,00
Jambi	32,50	58,79	8,72	-	100,00
Sumatera Selatan	50,73	32,40	7,32	9,56	100,00
Bengkulu	66,15	21,07	8,90	3,88	100,00
Lampung	77,19	6,45	6,07	10,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	84,90	9,43	1,54	4,13	100,00
Kepulauan Riau	31,59	55,15	6,60	6,66	100,00
DKI Jakarta	80,51	12,21	5,55	1,73	100,00
Jawa Barat	51,10	43,57	2,41	2,91	100,00
Jawa Tengah	59,13	35,70	4,65	0,52	100,00
DI Yogyakarta	45,99	41,85	9,36	2,80	100,00
Jawa Timur	66,14	27,34	5,07	1,45	100,00
Banten	30,20	62,10	5,22	2,48	100,00
Bali	32,09	56,88	7,73	3,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	70,51	21,91	7,58	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,23	43,77	-	-	100,00
Kalimantan Barat	55,79	32,99	9,89	1,33	100,00
Kalimantan Tengah	46,55	44,69	6,70	2,06	100,00
Kalimantan Selatan	50,50	47,47	1,67	0,36	100,00
Kalimantan Timur	57,05	36,96	4,71	1,27	100,00
Sulawesi Utara	43,81	40,79	6,61	8,79	100,00
Sulawesi Tengah	27,62	64,58	4,93	2,87	100,00
Sulawesi Selatan	52,41	43,73	2,58	1,27	100,00
Sulawesi Tenggara	19,72	66,28	12,21	1,80	100,00
Gorontalo	22,83	60,65	16,52	-	100,00
Sulawesi Barat	62,43	37,57	-	-	100,00
Maluku	87,28	9,39	3,33	-	100,00
Maluku Utara	78,33	16,45	5,23	-	100,00
Papua Barat	100,00	-	-	-	100,00
Papua	61,39	17,88	18,97	1,76	100,00
Indonesia	55,27	37,80	4,50	2,43	100,00

Tabel 2.11.2 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Pembayaran, 2013

Perdesaan					
Provinsi	Tunai	Angsuran KPR	Angsuran bukan KPR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	72,24	-	12,74	15,01	100,00
Sumatera Utara	75,00	12,33	0,87	11,80	100,00
Sumatera Barat	93,22	-	6,78	-	100,00
Riau	74,78	14,28	8,82	2,12	100,00
Jambi	68,93	16,61	12,54	1,92	100,00
Sumatera Selatan	69,04	11,42	15,99	3,55	100,00
Bengkulu	85,91	-	5,57	8,52	100,00
Lampung	74,44	-	17,45	8,11	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,38	-	-	6,62	100,00
Kepulauan Riau	78,05	-	21,95	-	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	76,26	8,58	7,12	8,04	100,00
Jawa Tengah	88,96	-	9,99	1,05	100,00
DI Yogyakarta	83,76	-	-	16,24	100,00
Jawa Timur	72,03	7,76	11,85	8,37	100,00
Banten	84,28	-	-	15,72	100,00
Bali	57,32	16,93	25,74	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	86,85	8,60	4,55	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,85	-	20,67	20,49	100,00
Kalimantan Barat	85,77	3,43	4,87	5,92	100,00
Kalimantan Tengah	73,93	11,60	10,66	3,81	100,00
Kalimantan Selatan	76,47	14,46	6,88	2,18	100,00
Kalimantan Timur	68,62	-	23,22	8,16	100,00
Sulawesi Utara	67,31	16,43	5,01	11,25	100,00
Sulawesi Tengah	78,67	-	9,97	11,35	100,00
Sulawesi Selatan	74,57	6,33	12,59	6,51	100,00
Sulawesi Tenggara	70,69	12,91	16,40	-	100,00
Gorontalo	85,85	-	11,31	2,84	100,00
Sulawesi Barat	74,39	-	17,36	8,25	100,00
Maluku	100,00	-	-	-	100,00
Maluku Utara	100,00	-	-	-	100,00
Papua Barat	100,00	-	-	-	100,00
Papua	87,75	-	12,25	-	100,00
Indonesia	77,25	6,47	10,28	6,01	100,00

Tabel 2.11.3 Persentase Rumah Tangga yang Membeli Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Cara Pembayaran, 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	Tunai	Angsuran KPR	Angsuran bukan KPR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	70,62	7,33	13,04	9,02	100,00
Sumatera Utara	86,53	8,61	1,88	2,98	100,00
Sumatera Barat	59,15	37,14	3,54	0,17	100,00
Riau	44,79	45,97	7,56	1,68	100,00
Jambi	44,65	44,71	9,99	0,64	100,00
Sumatera Selatan	57,42	24,72	10,49	7,36	100,00
Bengkulu	77,32	9,15	7,02	6,51	100,00
Lampung	75,55	2,60	12,86	8,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,27	4,57	0,75	5,41	100,00
Kepulauan Riau	32,21	54,41	6,81	6,57	100,00
DKI Jakarta	80,51	12,21	5,55	1,73	100,00
Jawa Barat	54,19	39,28	2,99	3,54	100,00
Jawa Tengah	66,88	26,42	6,04	0,66	100,00
DI Yogyakarta	51,86	35,34	7,91	4,89	100,00
Jawa Timur	67,27	23,58	6,37	2,78	100,00
Banten	31,57	60,52	5,09	2,81	100,00
Bali	40,67	43,30	13,86	2,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,14	14,88	5,98	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,96	31,56	5,76	5,71	100,00
Kalimantan Barat	64,74	24,17	8,39	2,70	100,00
Kalimantan Tengah	55,15	34,29	7,94	2,61	100,00
Kalimantan Selatan	57,19	38,97	3,01	0,83	100,00
Kalimantan Timur	58,42	32,59	6,90	2,09	100,00
Sulawesi Utara	53,48	30,77	5,95	9,80	100,00
Sulawesi Tengah	57,09	27,30	7,84	7,77	100,00
Sulawesi Selatan	60,60	29,92	6,28	3,20	100,00
Sulawesi Tenggara	49,29	35,32	14,64	0,75	100,00
Gorontalo	64,50	20,55	13,07	1,88	100,00
Sulawesi Barat	69,91	14,08	10,85	5,16	100,00
Maluku	88,03	8,84	3,13	-	100,00
Maluku Utara	90,05	7,55	2,40	-	100,00
Papua Barat	100,00	-	-	-	100,00
Papua	64,77	15,59	18,11	1,53	100,00
Indonesia	59,53	31,73	5,62	3,12	100,00

Tabel 2.12.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013

					Perkotaan
Provinsi	1-5 tahun	6-10 tahun	11-15 tahun	> 15 tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37,81	13,58	48,61	-	100,00
Sumatera Utara	-	57,07	12,75	30,17	100,00
Sumatera Barat	13,85	21,49	41,76	22,91	100,00
Riau	9,39	77,25	13,36	-	100,00
Jambi	-	3,63	71,29	25,08	100,00
Sumatera Selatan	41,62	46,71	10,96	0,71	100,00
Bengkulu	-	42,53	45,68	11,79	100,00
Lampung	69,04	-	-	30,96	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,53	19,59	28,88	-	100,00
Kepulauan Riau	8,08	57,78	30,69	3,44	100,00
DKI Jakarta	17,46	6,19	76,36	-	100,00
Jawa Barat	7,20	26,73	60,75	5,32	100,00
Jawa Tengah	8,83	34,78	35,29	21,09	100,00
DI Yogyakarta	41,13	8,75	25,88	24,24	100,00
Jawa Timur	8,04	47,22	41,62	3,12	100,00
Banten	1,89	39,44	55,34	3,33	100,00
Bali	8,22	47,43	42,35	2,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	42,17	10,01	47,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	47,83	19,88	32,29	-	100,00
Kalimantan Barat	12,78	27,79	55,58	3,85	100,00
Kalimantan Tengah	12,56	61,78	25,66	-	100,00
Kalimantan Selatan	4,42	34,90	53,90	6,78	100,00
Kalimantan Timur	2,24	44,41	46,04	7,31	100,00
Sulawesi Utara	4,24	26,95	67,88	0,93	100,00
Sulawesi Tengah	-	41,35	42,43	16,22	100,00
Sulawesi Selatan	7,70	43,66	45,35	3,29	100,00
Sulawesi Tenggara	-	49,90	50,10	-	100,00
Gorontalo	-	16,60	62,09	21,32	100,00
Sulawesi Barat	-	44,38	22,28	33,34	100,00
Maluku	47,60	16,51	35,88	-	100,00
Maluku Utara	-	-	100,00	-	100,00
Papua Barat	-	-	-	-	100,00
Papua	-	24,88	75,12	-	100,00
Indonesia	8,04	35,90	49,49	6,57	100,00

Tabel 2.12.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013

					Perdesaan
Provinsi	1-5 tahun	6-10 tahun	11-15 tahun	> 15 tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	40,60	23,03	36,37	-	100,00
Sumatera Barat	-	-	-	-	-
Riau	-	-	100,00	-	100,00
Jambi	-	56,97	25,98	17,05	100,00
Sumatera Selatan	18,47	42,06	39,47	-	100,00
Bengkulu	-	-	-	-	-
Lampung	-	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	17,86	69,78	12,35	100,00
Jawa Tengah	-	-	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
Jawa Timur	19,71	41,72	38,57	-	100,00
Banten	-	-	-	-	-
Bali	60,61	-	39,39	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	-	100,00	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	100,00	-	-	100,00
Kalimantan Tengah	-	100,00	-	-	100,00
Kalimantan Selatan	-	18,20	81,80	-	100,00
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	100,00	-	100,00
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	91,25	8,75	-	100,00
Sulawesi Tenggara	-	47,10	52,90	-	100,00
Gorontalo	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	10,47	32,06	53,97	3,50	100,00

Tabel 2.12.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah melalui Kredit KPR Menurut Jangka Waktu Pengembalian Kredit, 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	1-5 tahun	6-10 tahun	11-15 tahun	> 15 tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	37,81	13,58	48,61	-	100,00
Sumatera Utara	9,97	48,71	18,55	22,76	100,00
Sumatera Barat	13,85	21,49	41,76	22,91	100,00
Riau	8,56	70,39	21,05	-	100,00
Jambi	-	10,24	65,67	24,09	100,00
Sumatera Selatan	37,71	45,92	15,78	0,59	100,00
Bengkulu	-	42,53	45,68	11,79	100,00
Lampung	69,04	-	-	30,96	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,53	19,59	28,88	-	100,00
Kepulauan Riau	8,08	57,78	30,69	3,44	100,00
DKI Jakarta	17,46	6,19	76,36	-	100,00
Jawa Barat	7,00	26,50	60,99	5,51	100,00
Jawa Tengah	8,83	34,78	35,29	21,09	100,00
DI Yogyakarta	41,13	8,75	25,88	24,24	100,00
Jawa Timur	8,77	46,87	41,43	2,92	100,00
Banten	1,89	39,44	55,34	3,33	100,00
Bali	15,19	41,12	41,96	1,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	29,29	37,49	33,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	47,83	19,88	32,29	-	100,00
Kalimantan Barat	12,24	30,85	53,22	3,69	100,00
Kalimantan Tengah	11,22	65,84	22,94	-	100,00
Kalimantan Selatan	4,00	33,31	56,56	6,13	100,00
Kalimantan Timur	2,24	44,41	46,04	7,31	100,00
Sulawesi Utara	3,31	21,03	74,94	0,73	100,00
Sulawesi Tengah	-	41,35	42,43	16,22	100,00
Sulawesi Selatan	7,10	47,38	42,49	3,03	100,00
Sulawesi Tenggara	-	49,31	50,69	-	100,00
Gorontalo	-	16,60	62,09	21,32	100,00
Sulawesi Barat	-	44,38	22,28	33,34	100,00
Maluku	47,60	16,51	35,88	-	100,00
Maluku Utara	-	-	100,00	-	100,00
Papua Barat	-	24,88	75,12	-	100,00
Papua	-	-	-	-	-
Indonesia	8,13	35,75	49,67	6,45	100,00

Tabel 2.13.1 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Lunas	Belum lunas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	-	100,00
Sumatera Utara	81,52	18,48	100,00
Sumatera Barat	57,39	42,61	100,00
Riau	68,15	31,85	100,00
Jambi	62,83	37,17	100,00
Sumatera Selatan	58,06	41,94	100,00
Bengkulu	37,02	62,98	100,00
Lampung	69,04	30,96	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	12,46	87,54	100,00
DKI Jakarta	100,00	-	100,00
Jawa Barat	60,35	39,65	100,00
Jawa Tengah	84,11	15,89	100,00
DI Yogyakarta	100,00	0,00	100,00
Jawa Timur	68,52	31,48	100,00
Banten	62,94	37,06	100,00
Bali	64,29	35,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,82	52,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,67	24,33	100,00
Kalimantan Barat	86,69	13,31	100,00
Kalimantan Tengah	49,10	50,90	100,00
Kalimantan Selatan	55,69	44,31	100,00
Kalimantan Timur	78,69	21,31	100,00
Sulawesi Utara	61,38	38,62	100,00
Sulawesi Tengah	28,48	71,52	100,00
Sulawesi Selatan	59,87	40,13	100,00
Sulawesi Tenggara	16,27	83,73	100,00
Gorontalo	48,49	51,51	100,00
Sulawesi Barat	-	100,00	100,00
Maluku	100,00	-	100,00
Maluku Utara	100,00	-	100,00
Papua Barat	-	-	-
Papua	100,00	-	100,00
Indonesia	63,01	36,99	100,00

Tabel 2.13.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Lunas	Belum lunas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	40,60	59,40	100,00
Sumatera Barat	-	-	-
Riau	-	100,00	100,00
Jambi	-	100,00	100,00
Sumatera Selatan	46,83	53,17	100,00
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	77,58	22,42	100,00
Jawa Tengah	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	47,68	52,32	100,00
Banten	-	-	-
Bali	60,61	39,39	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	100,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	-	-	-
Kalimantan Barat	-	100,00	100,00
Kalimantan Tengah	78,53	21,47	100,00
Kalimantan Selatan	-	100,00	100,00
Kalimantan Timur	-	-	-
Sulawesi Utara	85,78	14,22	100,00
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	25,90	74,10	100,00
Sulawesi Tenggara	52,90	47,10	100,00
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Indonesia	44,89	55,11	100,00

Tabel 2.13.3 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri dengan Angsuran KPR Menurut Pelunasan Angsuran, 2013

Perkotaan + Perdesaan			
Provinsi	Lunas	Belum lunas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	-	100,00
Sumatera Utara	71,47	28,53	100,00
Sumatera Barat	57,39	42,61	100,00
Riau	62,10	37,90	100,00
Jambi	55,04	44,96	100,00
Sumatera Selatan	56,16	43,84	100,00
Bengkulu	37,02	62,98	100,00
Lampung	69,04	30,96	100,00
Kep. Bangka Belitung	100,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	12,46	87,54	100,00
DKI Jakarta	100,00	-	100,00
Jawa Barat	60,82	39,18	100,00
Jawa Tengah	84,11	15,89	100,00
DI Yogyakarta	100,00	0,00	100,00
Jawa Timur	67,20	32,80	100,00
Banten	62,94	37,06	100,00
Bali	63,80	36,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,22	66,78	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,67	24,33	100,00
Kalimantan Barat	83,02	16,98	100,00
Kalimantan Tengah	52,23	47,77	100,00
Kalimantan Selatan	50,37	49,63	100,00
Kalimantan Timur	78,69	21,31	100,00
Sulawesi Utara	66,75	33,25	100,00
Sulawesi Tengah	28,48	71,52	100,00
Sulawesi Selatan	57,21	42,79	100,00
Sulawesi Tenggara	24,04	75,96	100,00
Gorontalo	48,49	51,51	100,00
Sulawesi Barat	-	100,00	100,00
Maluku	100,00	-	100,00
Maluku Utara	100,00	-	100,00
Papua Barat	-	-	-
Papua	100,00	-	100,00
Indonesia	62,29	37,71	100,00

Tabel 2.14.1 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013

Provinsi	Perkotaan				Jumlah
	Sertifikat Hak Milik atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat Hak Milik bukan atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat selain Sertifikat Hak Milik	Tidak punya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	60,37	10,48	9,72	19,42	100,00
Sumatera Utara	60,40	7,86	17,80	13,94	100,00
Sumatera Barat	46,53	9,64	8,24	35,58	100,00
Riau	55,94	5,79	19,82	18,44	100,00
Jambi	65,05	10,06	3,75	21,13	100,00
Sumatera Selatan	44,76	8,42	17,85	28,97	100,00
Bengkulu	66,91	12,76	10,32	10,02	100,00
Lampung	55,58	12,51	8,58	23,34	100,00
Kep. Bangka Belitung	33,39	7,76	16,17	42,68	100,00
Kepulauan Riau	47,66	4,84	23,09	24,41	100,00
DKI Jakarta	63,07	12,58	9,21	15,14	100,00
Jawa Barat	42,67	8,99	18,61	29,73	100,00
Jawa Tengah	55,09	14,07	9,19	21,66	100,00
DI Yogyakarta	65,56	19,77	6,24	8,43	100,00
Jawa Timur	40,80	11,01	20,84	27,35	100,00
Banten	46,98	12,16	11,69	29,17	100,00
Bali	35,81	20,49	3,71	39,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	31,99	10,17	1,43	56,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	62,25	20,28	4,01	13,47	100,00
Kalimantan Barat	64,31	12,38	8,19	15,12	100,00
Kalimantan Tengah	49,58	15,09	6,77	28,56	100,00
Kalimantan Selatan	44,74	9,19	17,19	28,88	100,00
Kalimantan Timur	48,75	10,75	20,67	19,83	100,00
Sulawesi Utara	43,55	14,48	7,28	34,69	100,00
Sulawesi Tengah	45,32	11,79	6,23	36,65	100,00
Sulawesi Selatan	50,16	10,34	8,16	31,34	100,00
Sulawesi Tenggara	59,01	11,25	4,47	25,26	100,00
Gorontalo	56,78	12,28	4,82	26,11	100,00
Sulawesi Barat	61,02	5,85	5,14	27,99	100,00
Maluku	42,29	3,18	12,27	42,26	100,00
Maluku Utara	79,49	6,48	1,38	12,65	100,00
Papua Barat	58,11	13,95	2,80	25,14	100,00
Papua	61,93	9,08	8,87	20,11	100,00
Indonesia	48,34	11,12	14,43	26,11	100,00

Tabel 2.14.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013

					Perdesaan
Provinsi	Sertifikat Hak Milik atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat Hak Milik bukan atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat selain Sertifikat Hak Milik	Tidak punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	36,73	5,43	16,94	40,90	100,00
Sumatera Utara	25,41	5,76	21,16	47,68	100,00
Sumatera Barat	19,24	2,83	7,14	70,79	100,00
Riau	21,53	4,72	20,09	53,67	100,00
Jambi	36,19	11,66	16,78	35,37	100,00
Sumatera Selatan	30,86	6,70	16,79	45,65	100,00
Bengkulu	39,77	10,22	6,18	43,83	100,00
Lampung	40,17	11,81	17,03	30,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	23,41	4,67	16,55	55,37	100,00
Kepulauan Riau	19,13	5,80	11,86	63,22	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	21,57	7,38	18,48	52,57	100,00
Jawa Tengah	41,26	11,94	11,92	34,88	100,00
DI Yogyakarta	47,75	19,57	5,55	27,14	100,00
Jawa Timur	27,61	10,98	19,57	41,84	100,00
Banten	16,89	8,54	25,04	49,54	100,00
Bali	32,05	24,29	5,22	38,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,13	5,17	5,61	68,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,47	7,00	7,77	62,76	100,00
Kalimantan Barat	25,68	5,99	12,47	55,86	100,00
Kalimantan Tengah	30,21	5,56	11,96	52,27	100,00
Kalimantan Selatan	21,80	7,46	16,51	54,23	100,00
Kalimantan Timur	39,67	10,39	14,98	34,95	100,00
Sulawesi Utara	28,31	3,70	9,69	58,30	100,00
Sulawesi Tengah	31,04	7,26	6,23	55,47	100,00
Sulawesi Selatan	28,73	7,16	14,42	49,69	100,00
Sulawesi Tenggara	38,28	10,96	3,95	46,81	100,00
Gorontalo	30,31	6,03	9,49	54,17	100,00
Sulawesi Barat	27,19	7,69	4,29	60,84	100,00
Maluku	28,89	3,15	4,93	63,04	100,00
Maluku Utara	33,72	5,08	2,43	58,77	100,00
Papua Barat	27,93	8,25	0,48	63,34	100,00
Papua	7,70	0,61	0,92	90,77	100,00
Indonesia	29,27	8,88	14,83	47,02	100,00

Tabel 2.14.3 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	Sertifikat Hak Milik atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat Hak Milik bukan atas nama Anggota Rumah Tangga	Sertifikat selain Sertifikat Hak Milik	Tidak punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42,66	6,70	15,12	35,51	100,00
Sumatera Utara	40,73	6,68	19,69	32,91	100,00
Sumatera Barat	28,49	5,14	7,51	58,86	100,00
Riau	32,27	5,05	20,00	42,67	100,00
Jambi	43,19	11,27	13,62	31,91	100,00
Sumatera Selatan	35,04	7,22	17,11	40,64	100,00
Bengkulu	46,57	10,86	7,22	35,35	100,00
Lampung	43,45	11,96	15,23	29,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	27,83	6,04	16,38	49,75	100,00
Kepulauan Riau	41,18	5,06	20,54	33,22	100,00
DKI Jakarta	63,07	12,58	9,21	15,14	100,00
Jawa Barat	33,99	8,33	18,56	39,13	100,00
Jawa Tengah	47,06	12,83	10,77	29,33	100,00
DI Yogyakarta	58,42	19,69	5,96	15,93	100,00
Jawa Timur	33,30	10,99	20,12	35,59	100,00
Banten	35,66	10,80	16,71	36,83	100,00
Bali	34,02	22,30	4,43	39,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	25,47	7,17	3,94	63,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	28,35	8,96	7,21	55,47	100,00
Kalimantan Barat	35,43	7,61	11,39	45,57	100,00
Kalimantan Tengah	36,03	8,42	10,40	45,15	100,00
Kalimantan Selatan	30,13	8,09	16,76	45,02	100,00
Kalimantan Timur	44,76	10,59	18,17	26,47	100,00
Sulawesi Utara	34,18	7,85	8,76	49,20	100,00
Sulawesi Tengah	33,71	8,10	6,23	51,96	100,00
Sulawesi Selatan	35,46	8,16	12,45	43,93	100,00
Sulawesi Tenggara	43,00	11,03	4,07	41,91	100,00
Gorontalo	37,83	7,80	8,16	46,21	100,00
Sulawesi Barat	34,17	7,31	4,46	54,06	100,00
Maluku	33,48	3,16	7,44	55,92	100,00
Maluku Utara	44,35	5,40	2,19	48,06	100,00
Papua Barat	33,18	9,24	0,88	56,70	100,00
Papua	15,60	1,85	2,08	80,47	100,00
Indonesia	37,63	9,86	14,66	37,85	100,00

Tabel 2.15.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak per Bulan, 2013

Provinsi	Perkotaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	≥ 900.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,69	30,38	25,57	24,90	5,28	9,18	100,00
Sumatera Utara	4,82	49,36	24,72	4,43	2,90	13,77	100,00
Sumatera Barat	4,64	43,74	27,76	12,94	1,39	9,53	100,00
Riau	2,64	27,57	26,85	20,23	11,93	10,78	100,00
Jambi	-	57,39	27,65	4,15	-	10,82	100,00
Sumatera Selatan	0,34	36,75	24,47	13,36	6,65	18,43	100,00
Bengkulu	8,37	43,17	29,06	3,85	11,93	3,62	100,00
Lampung	6,24	57,16	33,16	-	-	3,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	14,42	23,47	39,85	12,12	10,15	100,00
Kepulauan Riau	-	3,85	76,23	4,62	15,30	-	100,00
DKI Jakarta	0,94	10,11	36,16	33,59	6,30	12,90	100,00
Jawa Barat	1,17	29,06	38,67	12,67	7,05	11,38	100,00
Jawa Tengah	14,19	57,84	12,21	6,89	-	8,86	100,00
DI Yogyakarta	3,27	54,49	22,80	9,89	2,49	7,07	100,00
Jawa Timur	12,04	58,30	17,25	4,80	4,13	3,48	100,00
Banten	-	22,57	43,97	17,46	2,10	13,89	100,00
Bali	-	35,14	17,26	19,93	9,49	18,18	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,73	85,23	-	9,77	-	2,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,46	48,53	14,28	11,12	5,18	9,43	100,00
Kalimantan Barat	10,57	30,01	25,53	7,21	-	26,68	100,00
Kalimantan Tengah	3,36	14,64	40,67	24,46	9,96	6,92	100,00
Kalimantan Selatan	-	33,58	19,12	16,27	9,35	21,67	100,00
Kalimantan Timur	-	9,47	10,58	18,84	30,62	30,48	100,00
Sulawesi Utara	-	54,54	22,18	15,82	-	7,46	100,00
Sulawesi Tengah	6,86	28,09	26,25	27,00	5,83	5,97	100,00
Sulawesi Selatan	8,70	47,30	15,56	10,99	3,26	14,19	100,00
Sulawesi Tenggara	10,92	66,25	20,68	1,59	-	0,56	100,00
Gorontalo	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	74,68	21,04	4,28	-	-	100,00
Maluku	-	20,48	15,44	10,18	15,20	38,70	100,00
Maluku Utara	-	3,85	-	51,26	31,70	13,19	100,00
Papua Barat	-	-	19,76	5,01	3,24	71,99	100,00
Papua	-	18,38	-	-	8,37	73,24	100,00
Indonesia	3,95	35,23	28,48	14,97	5,56	11,79	100,00

Tabel 2.15.2 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak per Bulan, 2013

Provinsi	Perdesaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	≥ 900.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	29,05	45,09	21,43	4,43	-	-	100,00
Sumatera Utara	51,23	40,49	0,66	-	4,13	3,49	100,00
Sumatera Barat	48,93	39,32	6,26	3,20	-	2,29	100,00
Riau	11,42	43,29	24,44	17,22	3,64	-	100,00
Jambi	4,20	70,88	14,20	-	-	10,71	100,00
Sumatera Selatan	5,29	58,73	13,92	11,73	10,34	-	100,00
Bengkulu	30,43	35,06	23,52	10,99	-	-	100,00
Lampung	21,27	76,64	2,09	-	-	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	-	100,00	-	-	-	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-	100,00	-	-	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	21,43	27,31	-	51,27	-	-	100,00
Jawa Tengah	50,49	35,27	14,24	-	-	-	100,00
DI Yogyakarta	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Jawa Timur	49,41	50,59	-	-	-	-	100,00
Banten	-	-	-	-	-	-	-
Bali	41,72	58,28	-	-	-	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,23	-	-	-	32,77	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,25	32,19	27,33	25,23	-	-	100,00
Kalimantan Barat	9,62	9,20	60,34	-	20,84	-	100,00
Kalimantan Tengah	-	47,09	46,60	6,32	-	-	100,00
Kalimantan Selatan	-	9,92	68,46	21,62	-	-	100,00
Kalimantan Timur	-	27,38	-	41,90	30,72	-	100,00
Sulawesi Utara	-	89,23	-	-	-	10,77	100,00
Sulawesi Tengah	-	79,12	-	20,88	-	-	100,00
Sulawesi Selatan	7,73	66,18	12,84	-	13,24	-	100,00
Sulawesi Tenggara	35,56	29,98	34,46	-	-	-	100,00
Gorontalo	-	-	100,00	-	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	-	-	45,84	-	54,16	100,00
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Papua Barat	-	-	-	-	100,00	-	100,00
Papua	-	-	42,65	-	7,29	50,06	100,00
Indonesia	30,93	42,63	10,58	10,39	3,24	2,23	100,00

Tabel 2.15.3 Persentase Rumah Tangga dengan Status Kontrak Menurut Provinsi dan Nilai Kontrak per Bulan, 2013

Provinsi	Perkotaan+ Perdesaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	≥ 900000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,40	32,01	25,11	22,62	4,70	8,16	100,00
Sumatera Utara	14,76	47,46	19,57	3,48	3,16	11,57	100,00
Sumatera Barat	12,92	42,91	23,74	11,12	1,13	8,18	100,00
Riau	3,90	29,83	26,50	19,80	10,74	9,23	100,00
Jambi	0,81	59,99	25,06	3,35	-	10,80	100,00
Sumatera Selatan	0,91	39,27	23,26	13,17	7,07	16,32	100,00
Bengkulu	13,04	41,45	27,88	5,37	9,40	2,86	100,00
Lampung	11,02	63,36	23,27	-	-	2,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	13,30	29,42	36,75	11,18	9,36	100,00
Kepulauan Riau	-	3,77	74,67	6,57	14,99	-	100,00
DKI Jakarta	0,94	10,11	36,16	33,59	6,30	12,90	100,00
Jawa Barat	2,35	28,96	36,43	14,90	6,64	10,72	100,00
Jawa Tengah	17,41	55,84	12,39	6,28	-	8,07	100,00
DI Yogyakarta	5,41	53,28	22,29	9,67	2,43	6,92	100,00
Jawa Timur	13,29	58,05	16,67	4,64	3,99	3,36	100,00
Banten	-	22,57	43,97	17,46	2,10	13,89	100,00
Bali	4,03	37,37	15,59	18,01	8,57	16,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,51	80,23	-	9,20	1,92	2,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,16	45,49	16,71	13,75	4,21	7,68	100,00
Kalimantan Barat	10,38	25,70	32,73	5,72	4,31	21,16	100,00
Kalimantan Tengah	2,75	20,51	41,75	21,17	8,16	5,66	100,00
Kalimantan Selatan	-	29,95	26,69	17,09	7,92	18,35	100,00
Kalimantan Timur	-	10,48	9,98	20,14	30,63	28,77	100,00
Sulawesi Utara	-	61,49	17,74	12,65	-	8,12	100,00
Sulawesi Tengah	5,81	35,87	22,25	26,07	4,94	5,06	100,00
Sulawesi Selatan	8,61	49,10	15,30	9,95	4,21	12,84	100,00
Sulawesi Tenggara	13,41	62,58	22,07	1,43	-	0,51	100,00
Gorontalo	-	40,05	59,95	-	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	59,75	16,84	12,59	-	10,83	100,00
Maluku	-	20,48	15,44	10,18	15,20	38,70	100,00
Maluku Utara	-	3,76	-	50,12	33,23	12,89	100,00
Papua Barat	-	-	19,46	4,93	4,71	70,90	100,00
Papua	-	16,11	5,28	-	8,24	70,37	100,00
Indonesia	6,24	35,86	26,97	14,59	5,37	10,98	100,00

Tabel 2.16.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa per Bulan, 2013

Provinsi	Perkotaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	≥ 900.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,78	58,75	10,75	21,96	-	2,77	100,00
Sumatera Utara	13,13	64,12	14,81	6,46	-	1,48	100,00
Sumatera Barat	2,15	46,88	47,11	3,41	-	0,44	100,00
Riau	-	27,93	50,75	21,33	-	-	100,00
Jambi	-	61,39	38,61	-	-	-	100,00
Sumatera Selatan	16,05	52,26	29,69	1,48	-	0,52	100,00
Bengkulu	-	43,58	52,89	3,52	-	-	100,00
Lampung	27,62	47,35	25,04	-	-	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	6,05	60,73	29,00	4,23	-	100,00
Kepulauan Riau	0,41	3,15	29,06	49,52	10,84	7,02	100,00
DKI Jakarta	-	20,83	37,20	28,26	8,67	5,04	100,00
Jawa Barat	1,38	29,77	52,07	10,95	5,16	0,67	100,00
Jawa Tengah	11,44	58,29	28,10	-	-	2,17	100,00
DI Yogyakarta	3,42	62,33	24,50	6,44	3,31	-	100,00
Jawa Timur	9,75	58,90	28,09	3,25	-	-	100,00
Banten	-	27,57	54,91	15,20	0,16	2,17	100,00
Bali	-	22,12	56,21	9,99	7,42	4,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	53,83	40,32	0,99	0,62	4,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,25	62,20	24,46	11,08	-	-	100,00
Kalimantan Barat	6,99	30,99	62,02	-	-	-	100,00
Kalimantan Tengah	1,63	23,96	59,64	12,63	2,14	-	100,00
Kalimantan Selatan	1,39	42,97	41,33	9,71	-	4,60	100,00
Kalimantan Timur	1,96	7,88	46,01	27,59	12,81	3,75	100,00
Sulawesi Utara	7,11	17,76	52,75	22,37	-	-	100,00
Sulawesi Tengah	-	38,98	45,05	13,14	-	2,83	100,00
Sulawesi Selatan	1,67	63,61	26,06	2,99	-	5,66	100,00
Sulawesi Tenggara	2,08	47,97	36,30	10,69	2,96	-	100,00
Gorontalo	-	-	7,57	73,31	19,12	-	100,00
Sulawesi Barat	10,70	-	36,63	52,67	-	-	100,00
Maluku	-	52,76	46,30	0,94	-	-	100,00
Maluku Utara	-	14,12	85,88	-	-	-	100,00
Papua Barat	-	6,76	52,52	21,06	8,28	11,38	100,00
Papua	-	2,41	20,62	29,74	24,26	22,98	100,00
Indonesia	2,48	31,26	41,99	16,41	4,93	2,93	100,00

Tabel 2.16.2 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa per Bulan, 2013

Provinsi	Perdesaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	≥ 900.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	21,02	70,66	1,02	6,54	-	0,76	100,00
Sumatera Utara	50,42	41,11	8,47	-	-	-	100,00
Sumatera Barat	88,66	11,34	-	-	-	-	100,00
Riau	-	45,55	47,40	7,05	-	-	100,00
Jambi	35,78	-	64,22	-	-	-	100,00
Sumatera Selatan	-	65,35	34,65	-	-	-	100,00
Bengkulu	29,91	40,50	29,60	-	-	-	100,00
Lampung	48,60	40,98	10,42	-	-	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	69,31	30,69	-	-	-	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	35,88	26,45	37,67	-	-	-	100,00
Jawa Tengah	100,00	-	-	-	-	-	100,00
DI Yogyakarta	61,34	38,66	-	-	-	-	100,00
Jawa Timur	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Banten	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Bali	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	100,00	-	-	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	-	49,14	50,86	-	-	-	100,00
Kalimantan Barat	48,78	51,22	-	-	-	-	100,00
Kalimantan Tengah	10,92	63,47	25,61	-	-	-	100,00
Kalimantan Selatan	7,40	44,52	40,20	5,52	-	2,36	100,00
Kalimantan Timur	-	30,82	35,25	25,18	0,57	8,18	100,00
Sulawesi Utara	15,09	84,91	-	-	-	-	100,00
Sulawesi Tengah	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Sulawesi Selatan	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Sulawesi Tenggara	-	-	100,00	-	-	-	100,00
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	-	100,00	-	-	-	-	100,00
Maluku	-	50,81	29,87	19,32	-	-	100,00
Maluku Utara	12,95	-	87,05	-	-	-	100,00
Papua Barat	6,82	13,04	36,17	39,95	4,03	-	100,00
Papua	-	-	24,57	20,31	55,13	-	100,00
Indonesia	24,86	46,88	21,00	5,16	1,16	0,95	100,00

Tabel 2.16.3 Persentase Rumah Tangga dengan Status Sewa Menurut Provinsi dan Nilai Sewa per Bulan, Tahun 2013

Provinsi	Perkotaan+ Perdesaan						Jumlah
	< 100.000	100.000- 299.999	300.000- 499.999	500.000- 699.999	700.000- 899.999	>= 900.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	14,72	65,75	5,04	12,91	-	1,59	100,00
Sumatera Utara	24,08	57,37	12,95	4,56	-	1,04	100,00
Sumatera Barat	8,35	44,34	43,74	3,17	-	0,41	100,00
Riau	-	29,06	50,53	20,41	-	-	100,00
Jambi	4,32	53,98	41,70	-	-	-	100,00
Sumatera Selatan	14,51	53,52	30,17	1,34	-	0,47	100,00
Bengkulu	4,45	43,12	49,42	3,00	-	-	100,00
Lampung	35,84	44,85	19,31	-	-	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	-	14,37	56,78	25,18	3,67	-	100,00
Kepulauan Riau	0,41	3,15	29,06	49,52	10,84	7,02	100,00
DKI Jakarta	-	20,83	37,20	28,26	8,67	5,04	100,00
Jawa Barat	1,89	29,72	51,86	10,79	5,08	0,66	100,00
Jawa Tengah	12,94	57,30	27,62	-	-	2,13	100,00
DI Yogyakarta	8,54	60,24	22,33	5,87	3,02	-	100,00
Jawa Timur	9,64	59,38	27,76	3,21	-	-	100,00
Banten	-	29,82	53,20	14,73	0,15	2,10	100,00
Bali	-	22,12	56,21	9,99	7,42	4,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	52,17	42,17	0,96	0,60	4,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,09	61,22	26,44	10,25	-	-	100,00
Kalimantan Barat	17,39	36,02	46,59	-	-	-	100,00
Kalimantan Tengah	3,20	30,63	53,89	10,49	1,78	-	100,00
Kalimantan Selatan	2,50	43,26	41,12	8,93	-	4,18	100,00
Kalimantan Timur	1,79	9,87	45,08	27,38	11,75	4,14	100,00
Sulawesi Utara	7,90	24,37	47,56	20,17	-	-	100,00
Sulawesi Tengah	-	40,18	44,16	12,88	-	2,78	100,00
Sulawesi Selatan	1,63	64,45	25,46	2,92	-	5,53	100,00
Sulawesi Tenggara	2,06	47,48	36,94	10,59	2,93	-	100,00
Gorontalo	-	-	7,57	73,31	19,12	-	100,00
Sulawesi Barat	8,98	16,10	30,73	44,19	-	-	100,00
Maluku	-	52,54	44,43	3,03	-	-	100,00
Maluku Utara	3,28	10,54	86,17	-	-	-	100,00
Papua Barat	1,68	8,31	48,50	25,71	7,23	8,58	100,00
Papua	-	2,30	20,80	29,30	25,68	21,92	100,00
Indonesia	3,68	32,10	40,86	15,80	4,73	2,83	100,00

Tabel 2.17.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Memiliki Rumah lain	Tidak Memiliki Rumah lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,14	91,86	100,00
Sumatera Utara	5,53	94,47	100,00
Sumatera Barat	13,92	86,08	100,00
Riau	11,68	88,32	100,00
Jambi	8,16	91,84	100,00
Sumatera Selatan	9,55	90,45	100,00
Bengkulu	12,34	87,66	100,00
Lampung	9,21	90,79	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,66	92,34	100,00
Kepulauan Riau	11,42	88,58	100,00
DKI Jakarta	16,34	83,66	100,00
Jawa Barat	8,20	91,80	100,00
Jawa Tengah	7,81	92,19	100,00
DI Yogyakarta	18,80	81,20	100,00
Jawa Timur	10,39	89,61	100,00
Banten	11,04	88,96	100,00
Bali	23,24	76,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,26	91,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,98	87,02	100,00
Kalimantan Barat	13,01	86,99	100,00
Kalimantan Tengah	11,52	88,48	100,00
Kalimantan Selatan	11,80	88,20	100,00
Kalimantan Timur	17,36	82,64	100,00
Sulawesi Utara	15,47	84,53	100,00
Sulawesi Tengah	15,91	84,09	100,00
Sulawesi Selatan	15,30	84,70	100,00
Sulawesi Tenggara	11,86	88,14	100,00
Gorontalo	12,65	87,35	100,00
Sulawesi Barat	8,99	91,01	100,00
Maluku	9,20	90,80	100,00
Maluku Utara	13,02	86,98	100,00
Papua Barat	16,78	83,22	100,00
Papua	15,54	84,46	100,00
Indonesia	10,72	89,28	100,00

Tabel 2.17.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Memiliki Rumah lain	Tidak Memiliki Rumah lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,86	96,14	100,00
Sumatera Utara	3,84	96,16	100,00
Sumatera Barat	6,22	93,78	100,00
Riau	7,92	92,08	100,00
Jambi	6,85	93,15	100,00
Sumatera Selatan	4,47	95,53	100,00
Bengkulu	9,01	90,99	100,00
Lampung	5,83	94,17	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,22	94,78	100,00
Kepulauan Riau	7,32	92,68	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	2,81	97,19	100,00
Jawa Tengah	3,53	96,47	100,00
DI Yogyakarta	4,15	95,85	100,00
Jawa Timur	3,42	96,58	100,00
Banten	2,18	97,82	100,00
Bali	6,97	93,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,46	93,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,06	93,94	100,00
Kalimantan Barat	5,54	94,46	100,00
Kalimantan Tengah	11,20	88,80	100,00
Kalimantan Selatan	8,79	91,21	100,00
Kalimantan Timur	13,18	86,82	100,00
Sulawesi Utara	5,37	94,63	100,00
Sulawesi Tengah	6,76	93,24	100,00
Sulawesi Selatan	5,02	94,98	100,00
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	100,00
Gorontalo	6,03	93,97	100,00
Sulawesi Barat	6,36	93,64	100,00
Maluku	9,52	90,48	100,00
Maluku Utara	5,36	94,64	100,00
Papua Barat	10,45	89,55	100,00
Papua	3,72	96,28	100,00
Indonesia	4,71	95,29	100,00

Tabel 2.17.3 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Rumah Lain Selain Rumah yang Ditempati Saat Pencacahan, 2013

Perkotaan + Perdesaan			
Provinsi	Memiliki Rumah lain	Tidak Memiliki Rumah lain	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,07	94,93	100,00
Sumatera Utara	4,66	95,34	100,00
Sumatera Barat	9,17	90,83	100,00
Riau	9,39	90,61	100,00
Jambi	7,24	92,76	100,00
Sumatera Selatan	6,28	93,72	100,00
Bengkulu	10,06	89,94	100,00
Lampung	6,65	93,35	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,39	93,61	100,00
Kepulauan Riau	10,75	89,25	100,00
DKI Jakarta	16,34	83,66	100,00
Jawa Barat	6,29	93,71	100,00
Jawa Tengah	5,47	94,53	100,00
DI Yogyakarta	14,15	85,85	100,00
Jawa Timur	6,69	93,31	100,00
Banten	8,26	91,74	100,00
Bali	17,09	82,91	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,23	92,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,39	92,61	100,00
Kalimantan Barat	7,70	92,30	100,00
Kalimantan Tengah	11,31	88,69	100,00
Kalimantan Selatan	10,09	89,91	100,00
Kalimantan Timur	15,77	84,23	100,00
Sulawesi Utara	9,99	90,01	100,00
Sulawesi Tengah	9,00	91,00	100,00
Sulawesi Selatan	8,72	91,28	100,00
Sulawesi Tenggara	8,61	91,39	100,00
Gorontalo	8,31	91,69	100,00
Sulawesi Barat	6,92	93,08	100,00
Maluku	9,39	90,61	100,00
Maluku Utara	7,48	92,52	100,00
Papua Barat	12,27	87,73	100,00
Papua	6,65	93,35	100,00
Indonesia	7,71	92,29	100,00

3 KONDISI FISIK BANGUNAN

Kondisi fisik bangunan tempat tinggal yang baik, bukan hanya syarat rumah sehat tetapi juga merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Kondisi fisik bangunan merupakan salah satu penentu rumah sehat karena secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup penghuninya. Pemenuhan kebutuhan akan kondisi tempat tinggal yang baik, memerlukan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya rumah sehat. Selain itu, pemenuhan rumah sehat dengan kondisi fisik bangunan yang baik juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, keadaan ekonomi rumah tangga akan sangat mempengaruhi kondisi fisik bangunan tempat tinggal. Semakin baik keadaan ekonomi rumah tangga, maka akan semakin baik juga kondisi fisik rumah yang ditempatinya.

Bab ini memberikan gambaran mengenai kondisi fisik bangunan rumah yang ditempati rumah tangga. Hasil Susenas MKP akan mendeskripsikan kondisi fisik bangunan tempat tinggal meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), jenis plafon terluas, dan kondisi bangunan tempat tinggal.

3.1 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Bangunan tempat tinggal memiliki bentuk fisik yang beraneka ragam dengan luas tanah/kaveling yang juga ragam. Seperti halnya luas lantai bangunan yang dihitung berdasarkan luas hamparan tempat tapak bangunan berdiri sebatas atap, fisik bangunan juga memiliki luas yang dihitung berdasarkan pondasi bangunan. Luas fisik bangunan yang dihitung berdasarkan pondasi bangunan disebut luas tapak bangunan.

Hasil Susenas MKP 2013 yang disajikan pada Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa lebih dari 50 persen rumah tangga memiliki luas tapak bangunan lebih dari 55 m² (39,05 persen rumah tangga memiliki luas tapak bangunan lebih dari 70 m², dan sekitar 16,46 persen rumah tangga memiliki luas tapak bangunan 55-70 m²). Menurut tipe daerah, di perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki luas

tapak bangunan lebih dari 70 m² sekitar 40,12 persen, sedangkan di daerah perdesaan, persentasenya mencapai 37,98 persen. Satu hal menarik dari Tabel 3.1 adalah persentase rumah tangga yang memiliki luas tapak bangunan kurang dari 20 m² di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (7,83 persen berbanding 2,28 persen). Hal ini mungkin disebabkan luas tanah yang relatif minim di daerah perkotaan untuk pembangunan perumahan.

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Tipe Daerah, dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan(m²), Tahun 2013

Tipe Daerah	< 20	20-36	37-54	55-70	> 70	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	7,83	16,72	19,38	15,95	40,12	100,00
Perdesaan	2,28	17,07	25,69	16,98	37,98	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	5,05	16,90	22,54	16,46	39,05	100,00

Variasi luas tapak bangunan per provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.6.3 Tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga dengan luas tapak bangunan lebih dari 70 m² adalah Provinsi Jawa Timur (50,41 persen), DI Yogyakarta (55,02 persen), Provinsi Jawa Tengah (60,03 persen). Sedangkan tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga dengan luas tapak bangunan kurang dari 20 m² adalah Provinsi DI Yogyakarta (12,23 persen), Provinsi Papua (20,75 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (22,24 persen).

Selain luas tapak bangunan, Susenas MKP 2013 juga menghasilkan informasi mengenai luas tanah. Tabel 3.2 menyajikan persentase rumah tangga menurut luas tanah. Persentase rumah tangga yang memiliki luas tanah lebih dari 150 m² mencapai 38,72 persen. Perbedaan yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan perdesaan adalah pada persentase rumah tangga yang memiliki luas tanah kurang dari 50 m², dimana persentase rumah tangga di perkotaan mencapai sekitar 20,35 persen, sedangkan di perdesaan hanya 6,16 persen.

Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga menurut Tipe Daerah, dan Kategori Besaran Luas Tanah (m²), Tahun 2013

Tipe Daerah	< 50	50-100	101-150	> 150	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	20,35	33,50	18,93	27,22	100,00
Perdesaan	6,16	25,33	18,31	50,20	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	13,25	29,41	18,62	38,72	100,00

Dilihat per provinsi (Tabel 3.7.3), hasil Susenas MKP 2013 menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki luas tanah lebih dari 150 m² adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (63,30 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (65,81 persen), Provinsi Lampung (74,48 persen). Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki luas tanah kurang dari 50 m² adalah Provinsi Kepulauan Riau (24,11 persen), Provinsi Papua (35,52 persen), Provinsi DKI Jakarta (53,96 persen).

Luas dasar fisik/tapak bangunan bila dibandingkan dengan luas tanah/kaveling dapat menggambarkan kepadatan bangunan sebatas luas tanah/kaveling peruntukan di suatu daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2002 pasal 12, ada tiga syarat untuk melihat kepadatan dan ketinggian bangunan di suatu daerah, yaitu koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk suatu lokasi. Koefisien dasar bangunan (KDB) merupakan dasar dari kepadatan bangunan sebatas luas tanah/kaveling peruntukan suatu daerah. KDB berfungsi untuk menata kawasan dan menjaga kelestarian lingkungan. KDB merupakan koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan (UU no 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penjelasan pasal 10). KDB disini tidak dapat di definisikan sebagai kepadatan antar bangunan namun hanya sebatas kepadatan terhadap luas tanah/kaveling peruntukkan.

KDB di suatu daerah disesuaikan dengan fungsi suatu tempat di daerah tersebut, misalnya daerah peresapan air akan memiliki KDB yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang diperuntukkan sebagai pusat perkantoran. Hal ini menyebabkan besaran KDB antar daerah menjadi berbeda-beda. Secara umum, KDB terbagi menjadi 3 kategori yaitu KDB padat (60,01%-100%), sedang (40,01%-60%), dan renggang ($\leq 40\%$). Berdasarkan Susenas MKP 2013, persentase rumah tangga yang memiliki KDB padat sebesar 46,77 persen, KDB sedang sebesar 18,07 persen dan KDB renggang sebesar 35,16 persen (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah Dan Kategori Besaran KDB, Tahun 2013

Tipe Daerah	≤ 40 (Renggang)	40,01-60 (Sedang)	60,01-100 (Padat)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	21,15	15,59	63,26	100,00
Perdesaan	49,12	20,56	30,32	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	35,16	18,07	46,77	100,00

Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase rumah tangga yang memiliki KDB padat di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (63,27 persen berbanding 30,32 persen). Sebaliknya dengan KDB renggang, persentase rumah tangga di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan (49,12 persen berbanding 21,16 persen). KDB per provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.8.3, tiga provinsi yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga dengan tingkat KDB padat adalah, Provinsi Kepulauan Riau (60,87 persen), Provinsi Banten (64,93 persen), dan Provinsi DKI Jakarta (89,74 persen). Tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan tingkat KDB renggang adalah Provinsi Lampung (74,17 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (73,92 persen), dan Provinsi Bengkulu (65,78 persen).

3.2 Plafon Terluas

Plafon adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan. Pada dasarnya rumah menggunakan plafon dengan tujuan mencegah suhu panas atau dingin masuk ke rumah melalui bagian teratas rumah atau atap. Selain itu, plafon juga berfungsi untuk menahan benda atau kotoran jatuh ke dalam rumah melalui celah atap, juga berfungsi untuk menahan percikan air, dan mengurangi panas sinar matahari masuk ke rumah. Susenas MKP mengumpulkan informasi mengenai penggunaan dan jenis plafon terluas.

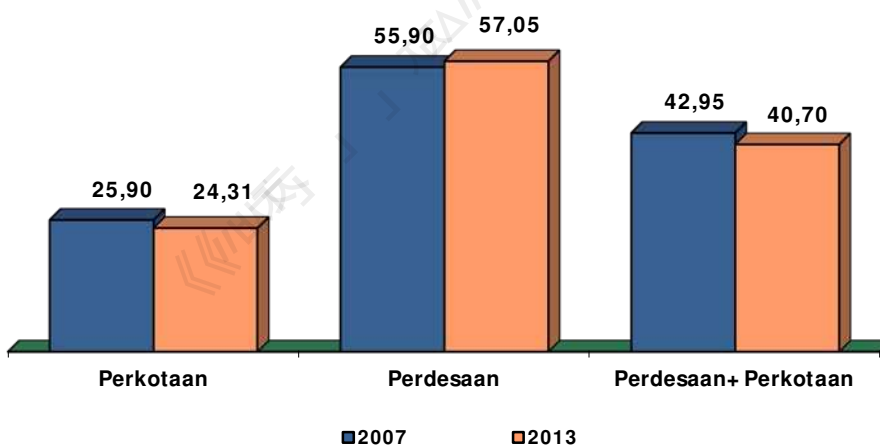
Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga menurut Tipe Daerah, dan Jenis Plafon Terluas, Tahun 2013

Tipe Daerah	Beton	Gypsum	Kayu/ triplek	Asbes	Anyam- an bambu	Lainnya	Tidak ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan	3,38	10,87	33,90	18,78	6,09	2,67	24,31	100,00
Perdesaan	0,98	4,06	15,18	9,70	8,87	4,16	57,05	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	2,18	7,46	24,53	14,24	7,48	3,41	40,70	100,00

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa hampir 60 persen rumah tangga menempati rumah yang memiliki plafon, dan masih sekitar 40 persen rumah tangga yang menempati rumah tanpa plafon. Dari 60 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan plafon, hampir 25 persen plafonnya terbuat dari kayu/triplek, dan sekitar 14,24 persen yang plafonnya terbuat dari asbes. Jenis plafon rumah secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang menempati rumah dengan plafon terbuat dari gypsum atau beton atau kayu/triplek atau asbes yang digolongkan sebagai plafon dengan kualitas baik memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah dengan plafon terbuat dari anyaman bambu atau lainnya.

Menurut tipe daerah, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan plafon dari beton, gypsum, kayu/triplek dan asbes di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (Tabel 3.4). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk, berdasarkan jenis plafon, di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Selanjutnya, tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang plafonnya terbuat dari kayu/triplek (Tabel 3.9.3) adalah provinsi Riau (51,91 persen), Kalimantan Timur (59,24 persen), dan DKI Jakarta (59,73 persen).

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki plafon relatif masih tinggi, terutama di daerah perdesaan yang mencapai lebih dari 50 persen. Perkembangan persentase rumah tangga yang tidak memiliki plafon selama periode tahun 2007 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.1. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki plafon turun relatif kecil selama periode tahun 2007 sampai tahun 2013. Persentase rumah tangga yang rumahnya tidak memiliki plafon pada tahun 2007 sekitar 42,95 persen turun menjadi 40,70 persen pada tahun 2013.



Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Plafon, Tahun 2007 dan 2013.

Perkembangan persentase rumah tangga yang tidak memiliki plafon berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang rumahnya tidak berplafon mengalami peningkatan dari 55,90 persen pada tahun 2007 menjadi 57,05 persen pada tahun 2013. Sedangkan di daerah

perkotaan, persentase rumah tangga yang rumahnya tidak berplafon mengalami penurunan relatif kecil dari 25,90 persen pada tahun 2007 menjadi 24,31 persen pada tahun 2013.

Selanjutnya, tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga tanpa plafon yaitu, Provinsi Sulawesi Tenggara (68,47 persen), Provinsi Lampung (71,63 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (84,52 persen).

3.4 Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan tempat tinggal rumah tangga secara umum dapat memberikan gambaran keadaan sosial ekonomi rumah tangga dan juga mencerminkan kepribadian penghuninya. Hasil Susenas MKP 2013 memberikan informasi tentang kondisi bangunan (atap, lantai, dan dinding) baik atau rusak.

Tabel 3.5 menyajikan persentase rumah tangga menurut kondisi atap, lantai, dan dinding rumah di daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan atap, lantai dan dinding berkondisi baik sekitar 80 persen. Tidak jauh berbeda dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi atap, lantai, dan dinding baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan yaitu sekitar 80 persen. Namun Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi atap, lantai, dan dinding rusak di perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding di perkotaan. Sekitar 20,88 persen rumah tangga di daerah perdesaan menempati rumah dengan kondisi lantai yang rusak.

Berdasarkan Tabel 3.10.3, 3.11.3, dan 3.12.3, tiga provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga menempati rumah dengan atap, lantai dan dinding berkondisi rusak adalah Provinsi Sulawesi Barat (26,42 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (35,65 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (32,05 persen).

Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Keadaan/ Kondisi Atap, Lantai Dan Dinding Bangunan Tempat Tinggal Dan Tipe Daerah, 2013

Keadaan/ kondisi bangunan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	Baik	Rusak	Baik	Rusa k	Baik	Rusak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Atap	87,59	12,41	83,50	16,50	85,54	14,46
Lantai	88,81	11,19	79,12	20,88	83,96	16,04
Dinding	88,37	11,63	80,34	19,66	84,35	15,65

Tabel 3.6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, Tahun 2013

Provinsi	Perkotaan					Jumlah
	< 20	20-36	37-54	55-70	> 70	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,71	24,27	22,38	16,86	34,78	100,00
Sumatera Utara	2,71	12,99	21,98	17,56	44,76	100,00
Sumatera Barat	4,84	15,29	17,54	15,33	47,00	100,00
Riau	1,77	19,84	20,16	16,79	41,44	100,00
Jambi	1,53	10,65	19,85	16,62	51,35	100,00
Sumatera Selatan	8,13	27,34	23,03	13,85	27,64	100,00
Bengkulu	4,86	18,57	21,89	15,62	39,06	100,00
Lampung	4,08	15,80	24,35	14,33	41,44	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,58	18,26	23,77	18,18	37,22	100,00
Kepulauan Riau	9,07	29,91	20,41	13,28	27,33	100,00
DKI Jakarta	22,24	27,89	14,71	8,19	26,97	100,00
Jawa Barat	7,10	21,20	21,62	18,95	31,13	100,00
Jawa Tengah	3,21	5,77	17,33	16,15	57,54	100,00
DI Yogyakarta	17,92	6,68	11,90	10,86	52,64	100,00
Jawa Timur	5,75	9,82	17,76	18,06	48,61	100,00
Banten	9,83	15,38	21,79	19,04	33,96	100,00
Bali	15,42	11,78	14,08	10,36	48,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,31	32,12	24,34	12,24	20,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,76	21,17	20,95	12,38	32,73	100,00
Kalimantan Barat	3,16	15,82	21,60	10,99	48,44	100,00
Kalimantan Tengah	9,28	22,57	22,57	10,87	34,71	100,00
Kalimantan Selatan	8,02	25,09	20,93	13,33	32,63	100,00
Kalimantan Timur	5,78	17,15	19,37	14,90	42,78	100,00
Sulawesi Utara	5,83	24,35	17,76	10,20	41,87	100,00
Sulawesi Tengah	6,81	18,24	22,61	12,75	39,59	100,00
Sulawesi Selatan	4,64	12,49	15,43	14,31	53,13	100,00
Sulawesi Tenggara	12,85	18,07	13,94	13,06	42,07	100,00
Gorontalo	5,77	16,95	20,04	12,66	44,58	100,00
Sulawesi Barat	3,50	10,20	24,10	13,78	48,42	100,00
Maluku	5,96	18,80	28,86	14,70	31,68	100,00
Maluku Utara	6,78	6,04	13,64	12,93	60,61	100,00
Papua Barat	10,62	21,92	22,27	11,80	33,39	100,00
Papua	9,49	29,61	25,45	13,32	22,13	100,00
Indonesia	7,83	16,73	19,38	15,95	40,12	100,00

Tabel 3.6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, Tahun 2013

						Perdesaan
Provinsi	< 20	20-36	37-54	55-70	> 70	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,18	23,44	29,51	20,32	24,54	100,00
Sumatera Utara	3,39	20,22	30,15	15,43	30,82	100,00
Sumatera Barat	3,48	18,32	25,02	19,28	33,90	100,00
Riau	1,56	21,23	30,54	16,21	30,46	100,00
Jambi	1,69	16,83	28,09	16,14	37,25	100,00
Sumatera Selatan	2,14	25,29	26,38	17,67	28,51	100,00
Bengkulu	3,36	22,90	33,52	16,54	23,67	100,00
Lampung	0,60	12,19	29,64	16,77	40,80	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,76	14,11	19,35	20,64	44,14	100,00
Kepulauan Riau	3,66	32,44	17,81	16,35	29,74	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,86	25,43	33,63	16,97	22,11	100,00
Jawa Tengah	0,58	3,51	16,96	16,88	62,08	100,00
DI Yogyakarta	-	3,25	20,68	15,92	60,15	100,00
Jawa Timur	0,56	7,26	21,89	18,30	52,00	100,00
Banten	2,24	17,55	31,56	20,56	28,10	100,00
Bali	3,19	24,72	24,60	17,54	29,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,71	34,35	32,61	13,08	13,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,36	29,56	29,72	17,49	18,87	100,00
Kalimantan Barat	1,93	23,53	31,93	18,38	24,23	100,00
Kalimantan Tengah	6,60	23,76	30,23	14,61	24,80	100,00
Kalimantan Selatan	2,66	18,01	25,58	18,18	35,57	100,00
Kalimantan Timur	1,89	24,34	26,46	13,35	33,96	100,00
Sulawesi Utara	1,92	29,08	30,28	15,52	23,20	100,00
Sulawesi Tengah	3,22	23,79	23,55	16,97	32,47	100,00
Sulawesi Selatan	1,14	12,83	20,21	17,63	48,19	100,00
Sulawesi Tenggara	3,73	22,51	18,96	14,60	40,20	100,00
Gorontalo	3,22	31,50	23,15	13,38	28,74	100,00
Sulawesi Barat	4,25	24,48	22,87	19,47	28,93	100,00
Maluku	0,92	22,47	30,81	17,29	28,51	100,00
Maluku Utara	1,52	14,65	22,44	18,53	42,87	100,00
Papua Barat	0,99	26,14	31,66	19,14	22,07	100,00
Papua	24,45	46,31	19,84	4,20	5,20	100,00
Indonesia	2,28	17,07	25,69	16,98	37,98	100,00

Tabel 3.6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tapak Bangunan, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan						
Provinsi	< 20	20-36	37-54	55-70	> 70	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,05	23,68	27,49	19,34	27,45	100,00
Sumatera Utara	3,06	16,71	26,19	16,46	37,58	100,00
Sumatera Barat	4,00	17,16	22,15	17,77	38,92	100,00
Riau	1,64	20,69	26,50	16,44	34,74	100,00
Jambi	1,64	15,00	25,65	16,28	41,43	100,00
Sumatera Selatan	4,27	26,02	25,19	16,31	28,20	100,00
Bengkulu	3,83	21,54	29,86	16,25	28,52	100,00
Lampung	1,44	13,06	28,37	16,18	40,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,15	16,11	21,48	19,45	40,80	100,00
Kepulauan Riau	8,19	30,32	19,99	13,78	27,72	100,00
DKI Jakarta	22,24	27,89	14,71	8,19	26,97	100,00
Jawa Barat	5,24	22,70	25,88	18,25	27,93	100,00
Jawa Tengah	1,77	4,53	17,13	16,55	60,03	100,00
DI Yogyakarta	12,23	5,59	14,69	12,47	55,02	100,00
Jawa Timur	2,99	8,46	19,95	18,18	50,41	100,00
Banten	7,45	16,06	24,86	19,52	32,12	100,00
Bali	10,80	16,67	18,06	13,07	41,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,68	33,40	29,07	12,72	16,13	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,98	27,95	28,04	16,51	21,53	100,00
Kalimantan Barat	2,28	21,30	28,94	16,24	31,23	100,00
Kalimantan Tengah	7,51	23,36	27,63	13,34	28,17	100,00
Kalimantan Selatan	4,97	21,06	23,57	16,09	34,30	100,00
Kalimantan Timur	4,31	19,88	22,06	14,31	39,44	100,00
Sulawesi Utara	3,71	26,92	24,55	13,09	31,75	100,00
Sulawesi Tengah	4,10	22,43	23,32	15,94	34,21	100,00
Sulawesi Selatan	2,40	12,71	18,49	16,43	49,97	100,00
Sulawesi Tenggara	6,26	21,28	17,57	14,18	40,72	100,00
Gorontalo	4,10	26,50	22,09	13,13	34,18	100,00
Sulawesi Barat	4,09	21,43	23,13	18,26	33,09	100,00
Maluku	2,93	21,01	30,04	16,26	29,77	100,00
Maluku Utara	2,98	12,26	20,00	16,98	47,78	100,00
Papua Barat	3,75	24,92	28,97	17,03	25,32	100,00
Papua	20,75	42,18	21,23	6,45	9,39	100,00
Indonesia	5,05	16,90	22,54	16,46	39,05	100,00

Tabel 3.7.1 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tanah (m²), Tahun 2013

					Perkotaan
Provinsi	< 50	50-100	101-150	> 150	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,35	28,27	15,90	45,48	100,00
Sumatera Utara	13,10	35,70	17,82	33,39	100,00
Sumatera Barat	9,70	30,56	20,94	38,80	100,00
Riau	11,84	24,17	25,61	38,38	100,00
Jambi	10,27	26,97	23,80	38,95	100,00
Sumatera Selatan	23,21	24,25	20,32	32,21	100,00
Bengkulu	13,08	16,33	19,28	51,31	100,00
Lampung	12,85	25,25	14,96	46,94	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,28	20,28	15,68	53,76	100,00
Kepulauan Riau	23,25	55,17	6,74	14,84	100,00
DKI Jakarta	53,96	24,34	9,25	12,45	100,00
Jawa Barat	22,80	41,67	19,53	15,99	100,00
Jawa Tengah	9,42	32,37	23,05	35,15	100,00
DI Yogyakarta	21,57	19,69	16,76	41,97	100,00
Jawa Timur	14,95	34,04	21,34	29,67	100,00
Banten	24,06	43,23	18,04	14,67	100,00
Bali	13,20	21,81	11,57	53,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,87	38,05	13,86	35,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,53	18,35	11,53	54,59	100,00
Kalimantan Barat	7,90	22,96	21,23	47,91	100,00
Kalimantan Tengah	22,76	20,06	18,47	38,71	100,00
Kalimantan Selatan	26,82	31,16	15,37	26,65	100,00
Kalimantan Timur	19,83	27,16	22,94	30,07	100,00
Sulawesi Utara	16,88	14,67	27,43	41,02	100,00
Sulawesi Tengah	20,36	20,26	19,81	39,58	100,00
Sulawesi Selatan	13,79	29,21	25,30	31,70	100,00
Sulawesi Tenggara	11,70	19,42	26,74	42,13	100,00
Gorontalo	8,52	23,05	19,96	48,47	100,00
Sulawesi Barat	8,33	29,15	28,13	34,38	100,00
Maluku	20,47	34,29	19,52	25,72	100,00
Maluku Utara	9,14	19,22	20,48	51,16	100,00
Papua Barat	26,64	30,86	18,23	24,27	100,00
Papua	35,57	36,37	12,10	15,97	100,00
Indonesia	20,35	33,50	18,93	27,22	100,00

Tabel 3.7.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tanah (m²), Tahun 2013

					Perdesaan
Provinsi	< 50	50-100	101-150	> 150	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Aceh	5,41	24,51	15,43	54,66	100,00
Sumatera Utara	9,67	30,63	16,22	43,48	100,00
Sumatera Barat	6,11	24,20	22,84	46,85	100,00
Riau	5,36	17,01	10,99	66,64	100,00
Jambi	2,49	21,61	15,66	60,24	100,00
Sumatera Selatan	8,05	22,19	17,66	52,11	100,00
Bengkulu	3,58	17,38	16,08	62,96	100,00
Lampung	2,52	8,29	5,99	83,20	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,91	13,01	13,65	71,43	100,00
Kepulauan Riau	28,51	22,99	8,58	39,92	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	10,62	39,97	22,02	27,40	100,00
Jawa Tengah	2,43	22,38	23,31	51,87	100,00
DI Yogyakarta	,82	11,46	9,13	78,59	100,00
Jawa Timur	3,49	28,29	20,35	47,87	100,00
Banten	9,73	44,69	23,20	22,38	100,00
Bali	,98	15,41	9,30	74,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,65	27,22	15,68	52,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,68	14,29	12,54	68,48	100,00
Kalimantan Barat	6,35	21,30	18,68	53,66	100,00
Kalimantan Tengah	7,88	21,98	12,23	57,91	100,00
Kalimantan Selatan	8,94	24,03	20,57	46,46	100,00
Kalimantan Timur	8,42	20,80	17,04	53,75	100,00
Sulawesi Utara	4,45	17,14	17,58	60,83	100,00
Sulawesi Tengah	4,29	14,92	14,08	66,71	100,00
Sulawesi Selatan	3,45	20,66	20,35	55,55	100,00
Sulawesi Tenggara	4,89	11,67	12,01	71,43	100,00
Gorontalo	4,27	18,60	13,97	63,17	100,00
Sulawesi Barat	10,36	26,13	21,83	41,68	100,00
Maluku	5,03	22,77	22,17	50,03	100,00
Maluku Utara	5,45	15,53	19,27	59,75	100,00
Papua Barat	6,32	27,11	18,50	48,07	100,00
Papua	35,51	27,81	8,55	28,13	100,00
Indonesia	6,16	25,33	18,31	50,20	100,00

Tabel 3.7.3 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran Luas Tanah (m²) , Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan

Provinsi	< 50	50-100	101-150	> 150	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,81	25,57	15,56	52,06	100,00
Sumatera Utara	11,34	33,09	16,99	38,58	100,00
Sumatera Barat	7,49	26,64	22,11	43,77	100,00
Riau	7,88	19,80	16,68	55,64	100,00
Jambi	4,79	23,20	18,07	53,94	100,00
Sumatera Selatan	13,43	22,92	18,61	45,04	100,00
Bengkulu	6,57	17,05	17,09	59,29	100,00
Lampung	5,01	12,36	8,15	74,48	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,94	16,51	14,63	62,92	100,00
Kepulauan Riau	24,11	49,92	7,04	18,93	100,00
DKI Jakarta	53,96	24,34	9,25	12,45	100,00
Jawa Barat	18,48	41,07	20,41	20,04	100,00
Jawa Tengah	5,60	26,91	23,20	44,30	100,00
DI Yogyakarta	14,98	17,08	14,34	53,60	100,00
Jawa Timur	8,87	30,99	20,81	39,33	100,00
Banten	19,56	43,69	19,66	17,09	100,00
Bali	8,58	19,39	10,71	61,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,17	31,86	14,90	45,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,77	15,07	12,35	65,81	100,00
Kalimantan Barat	6,80	21,78	19,42	52,00	100,00
Kalimantan Tengah	12,94	21,33	14,36	51,38	100,00
Kalimantan Selatan	16,65	27,10	18,33	37,92	100,00
Kalimantan Timur	15,50	24,75	20,70	39,05	100,00
Sulawesi Utara	10,14	16,01	22,09	51,76	100,00
Sulawesi Tengah	8,22	16,23	15,48	60,07	100,00
Sulawesi Selatan	7,16	23,73	22,13	46,98	100,00
Sulawesi Tenggara	6,78	13,82	16,10	63,30	100,00
Gorontalo	5,73	20,13	16,03	58,12	100,00
Sulawesi Barat	9,93	26,77	23,18	40,12	100,00
Maluku	11,18	27,35	21,11	40,35	100,00
Maluku Utara	6,47	16,55	19,61	57,37	100,00
Papua Barat	12,16	28,19	18,43	41,23	100,00
Papua	35,52	29,92	9,43	25,12	100,00
Indonesia	13,25	29,41	18,62	38,72	100,00

Tabel 3.8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran KDB, Tahun 2013

				Perkotaan
Provinsi	≤40 (Renggang)	40,01-60 (Sedang)	60,01-100 (Padat)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	47,08	15,72	37,20	100,00
Sumatera Utara	22,79	18,47	58,75	100,00
Sumatera Barat	31,03	21,68	47,30	100,00
Riau	37,30	19,46	43,24	100,00
Jambi	29,95	24,50	45,56	100,00
Sumatera Selatan	34,38	16,77	48,85	100,00
Bengkulu	51,62	15,32	33,06	100,00
Lampung	43,09	13,69	43,21	100,00
Kep. Bangka Belitung	53,11	16,96	29,92	100,00
Kepulauan Riau	17,66	17,75	64,59	100,00
DKI Jakarta	4,81	5,44	89,74	100,00
Jawa Barat	14,37	16,19	69,45	100,00
Jawa Tengah	20,34	16,08	63,58	100,00
DI Yogyakarta	28,42	14,07	57,51	100,00
Jawa Timur	19,62	15,57	64,82	100,00
Banten	10,73	15,18	74,09	100,00
Bali	42,69	15,74	41,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,28	22,07	24,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,13	15,23	24,65	100,00
Kalimantan Barat	36,44	19,83	43,73	100,00
Kalimantan Tengah	37,08	17,78	45,14	100,00
Kalimantan Selatan	20,31	19,63	60,06	100,00
Kalimantan Timur	24,92	15,40	59,68	100,00
Sulawesi Utara	40,64	14,31	45,05	100,00
Sulawesi Tengah	36,79	16,46	46,75	100,00
Sulawesi Selatan	22,36	16,32	61,32	100,00
Sulawesi Tenggara	43,28	16,24	40,48	100,00
Gorontalo	35,26	22,98	41,76	100,00
Sulawesi Barat	29,76	25,08	45,16	100,00
Maluku	27,32	19,51	53,17	100,00
Maluku Utara	41,23	16,19	42,58	100,00
Papua Barat	24,49	18,72	56,79	100,00
Papua	17,96	14,91	67,14	100,00
Indonesia	21,15	15,58	63,26	100,00

Tabel 3.8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran KDB, Tahun 2013

				Perdesaan
Provinsi	≤40 (Renggang)	40,01-60 (Sedang)	60,01-100 (Padat)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	60,42	16,61	22,97	100,00
Sumatera Utara	48,45	19,83	31,71	100,00
Sumatera Barat	51,81	21,78	26,40	100,00
Riau	70,82	14,40	14,78	100,00
Jambi	62,93	15,39	21,68	100,00
Sumatera Selatan	59,74	19,83	20,43	100,00
Bengkulu	72,29	13,67	14,04	100,00
Lampung	84,00	8,54	7,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	70,42	17,90	11,67	100,00
Kepulauan Riau	41,16	17,10	41,75	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	36,03	23,61	40,36	100,00
Jawa Tengah	33,69	23,94	42,37	100,00
DI Yogyakarta	63,04	22,81	14,14	100,00
Jawa Timur	35,46	24,13	40,41	100,00
Banten	26,60	28,46	44,94	100,00
Bali	82,94	10,45	6,61	100,00
Nusa Tenggara Barat	71,65	16,39	11,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,20	11,76	11,05	100,00
Kalimantan Barat	61,94	16,76	21,30	100,00
Kalimantan Tengah	64,43	12,41	23,16	100,00
Kalimantan Selatan	47,26	23,47	29,26	100,00
Kalimantan Timur	58,29	15,86	25,85	100,00
Sulawesi Utara	68,74	14,87	16,39	100,00
Sulawesi Tengah	71,14	14,85	14,02	100,00
Sulawesi Selatan	49,38	24,75	25,88	100,00
Sulawesi Tenggara	74,29	12,93	12,78	100,00
Gorontalo	70,49	13,70	15,81	100,00
Sulawesi Barat	50,51	22,40	27,09	100,00
Maluku	55,65	20,07	24,28	100,00
Maluku Utara	58,78	18,17	23,05	100,00
Papua Barat	56,09	19,70	24,21	100,00
Papua	43,94	24,62	31,43	100,00
Indonesia	49,12	20,56	30,32	100,00

Tabel 3.8.3 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Kategori Besaran KDB, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan				
Provinsi	≤40 (Renggang)	40,01-60 (Sedang)	60,01-100 (Padat)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	56,64	16,36	27,00	100,00
Sumatera Utara	36,00	19,17	44,83	100,00
Sumatera Barat	43,84	21,74	34,42	100,00
Riau	57,77	16,37	25,86	100,00
Jambi	53,16	18,08	28,76	100,00
Sumatera Selatan	50,73	18,74	30,52	100,00
Bengkulu	65,78	14,19	20,03	100,00
Lampung	74,17	9,78	16,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	62,08	17,45	20,46	100,00
Kepulauan Riau	21,49	17,64	60,87	100,00
DKI Jakarta	4,81	5,44	89,74	100,00
Jawa Barat	22,05	18,82	59,13	100,00
Jawa Tengah	27,65	20,38	51,98	100,00
DI Yogyakarta	39,42	16,85	43,74	100,00
Jawa Timur	28,03	20,11	51,86	100,00
Banten	15,71	19,35	64,93	100,00
Bali	57,90	13,74	28,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,79	18,82	17,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	73,92	12,42	13,66	100,00
Kalimantan Barat	54,57	17,65	27,79	100,00
Kalimantan Tengah	55,13	14,24	30,64	100,00
Kalimantan Selatan	35,65	21,82	42,54	100,00
Kalimantan Timur	37,57	15,58	46,85	100,00
Sulawesi Utara	55,87	14,61	29,51	100,00
Sulawesi Tengah	62,73	15,24	22,03	100,00
Sulawesi Selatan	39,67	21,72	38,61	100,00
Sulawesi Tenggara	65,68	13,85	20,47	100,00
Gorontalo	58,39	16,89	24,72	100,00
Sulawesi Barat	46,09	22,97	30,94	100,00
Maluku	44,37	19,84	35,78	100,00
Maluku Utara	53,92	17,62	28,46	100,00
Papua Barat	47,01	19,42	33,57	100,00
Papua	37,52	22,22	40,26	100,00
Indonesia	35,16	18,07	46,77	100,00

Tabel 3.9.1 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan								
Provinsi	Beton	Gypsum	Kayu/ triplek	Asbes	Anyam- an bambu	Lainnya	Tidak ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	3,92	4,21	55,61	6,61	0,24	2,60	26,82	100,00
Sumatera Utara	4,38	8,59	22,97	34,13	0,72	1,59	27,61	100,00
Sumatera Barat	3,45	3,16	66,08	1,50	0,69	0,44	24,68	100,00
Riau	2,30	11,52	68,49	2,51	-	1,22	13,96	100,00
Jambi	10,93	8,79	48,40	0,41	-	1,55	29,91	100,00
Sumatera Selatan	2,38	9,09	46,26	5,53	0,14	1,37	35,22	100,00
Bengkulu	3,58	1,42	73,00	1,80	0,10	0,98	19,12	100,00
Lampung	2,18	9,79	39,33	2,38	1,78	1,05	43,49	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,87	8,28	22,42	32,29	0,43	4,96	30,75	100,00
Kepulauan Riau	9,14	12,45	42,78	20,04	0,24	0,29	15,06	100,00
DKI Jakarta	5,09	12,13	59,73	17,88	0,38	1,03	3,77	100,00
Jawa Barat	3,39	14,17	33,65	18,41	15,70	5,52	9,15	100,00
Jawa Tengah	1,12	12,09	9,82	22,01	4,09	0,28	50,59	100,00
DI Yogyakarta	5,10	20,78	11,91	12,98	0,75	1,71	46,78	100,00
Jawa Timur	3,72	10,23	10,79	38,58	4,96	0,82	30,90	100,00
Banten	3,61	11,08	48,12	15,36	2,76	1,73	17,34	100,00
Bali	3,29	4,96	55,75	9,46	11,50	0,82	14,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,46	6,59	27,41	3,73	20,78	1,68	37,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,85	2,93	34,98	0,71	1,35	1,87	57,31	100,00
Kalimantan Barat	1,39	8,38	58,00	4,53	-	1,40	26,31	100,00
Kalimantan Tengah	1,67	5,71	54,91	4,31	-	1,78	31,63	100,00
Kalimantan Selatan	1,18	5,34	52,09	1,20	0,28	9,87	30,05	100,00
Kalimantan Timur	2,77	7,44	71,01	0,73	-	1,12	16,93	100,00
Sulawesi Utara	3,13	5,40	61,25	0,03	0,35	2,09	27,75	100,00
Sulawesi Tengah	4,82	5,16	46,81	0,39	0,39	5,46	36,99	100,00
Sulawesi Selatan	5,65	7,14	31,15	7,99	0,70	12,17	35,20	100,00
Sulawesi Tenggara	3,31	4,38	31,08	0,75	-	15,00	45,48	100,00
Gorontalo	1,22	4,03	64,08	0,59	10,86	2,16	17,06	100,00
Sulawesi Barat	0,68	1,61	32,11	7,90	1,53	23,33	32,84	100,00
Maluku	2,85	1,91	60,97	0,91	-	2,28	31,08	100,00
Maluku Utara	0,77	6,00	62,17	-	-	0,64	30,42	100,00
Papua Barat	1,11	0,40	80,78	1,01	-	0,66	16,04	100,00
Papua	1,84	0,32	82,09	0,83	-	1,28	13,64	100,00
Indonesia	3,38	10,88	33,90	18,78	6,09	2,67	24,31	100,00

Tabel 3.9.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perdesaan								
Provinsi	Beton	Gypsum	Kayu/ triplek	Asbes	Anyam- an bambu	Lainnya	Tidak ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	1,31	2,38	33,29	4,38	0,19	6,34	52,10	100,00
Sumatera Utara	1,88	3,08	23,10	16,24	1,24	1,86	52,62	100,00
Sumatera Barat	1,29	1,85	36,80	2,30	0,99	3,43	53,33	100,00
Riau	0,84	2,79	41,34	1,92	0,37	6,66	46,08	100,00
Jambi	1,78	3,83	32,11	0,57	0,09	8,45	53,17	100,00
Sumatera Selatan	1,14	2,78	25,59	1,51	0,10	3,64	65,25	100,00
Bengkulu	0,53	0,93	35,10	0,40	1,40	1,12	60,53	100,00
Lampung	0,70	4,13	10,52	1,62	1,30	1,20	80,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,36	3,21	16,08	23,86	0,86	5,90	47,73	100,00
Kepulauan Riau	2,41	7,95	23,41	2,02	0,81	3,13	60,27	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,84	9,09	13,18	16,62	39,86	6,80	13,61	100,00
Jawa Tengah	0,44	4,88	4,92	10,91	3,17	0,39	75,28	100,00
DI Yogyakarta	1,21	2,87	1,92	5,09	0,57	1,98	86,36	100,00
Jawa Timur	1,44	4,66	3,07	21,64	6,60	0,71	61,87	100,00
Banten	0,59	3,10	20,75	13,86	28,40	2,16	31,15	100,00
Bali	1,12	4,31	20,45	7,83	29,12	0,56	36,61	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,66	1,70	16,49	2,37	16,14	6,43	56,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,89	3,98	0,20	0,55	2,95	90,99	100,00
Kalimantan Barat	1,69	1,97	35,73	0,29	0,21	3,40	56,71	100,00
Kalimantan Tengah	0,43	2,53	25,06	1,45	-	2,51	68,01	100,00
Kalimantan Selatan	1,19	1,26	24,08	1,38	0,08	12,15	59,86	100,00
Kalimantan Timur	1,09	3,05	39,96	1,33	-	2,37	52,21	100,00
Sulawesi Utara	0,82	2,49	34,70	0,42	0,70	0,34	60,53	100,00
Sulawesi Tengah	0,78	1,43	14,07	0,24	0,33	7,36	75,78	100,00
Sulawesi Selatan	1,07	1,79	11,75	1,95	1,00	23,20	59,24	100,00
Sulawesi Tenggara	0,41	0,94	6,78	0,84	0,19	13,53	77,31	100,00
Gorontalo	0,64	1,44	27,14	0,28	11,81	5,41	53,29	100,00
Sulawesi Barat	0,49	0,93	8,48	0,65	0,79	20,83	67,82	100,00
Maluku	0,41	0,26	21,11	0,59	0,30	2,04	75,30	100,00
Maluku Utara	0,64	1,31	24,94	0,56	-	1,13	71,42	100,00
Papua Barat	0,66	0,77	37,68	1,14	-	0,47	59,27	100,00
Papua	0,12	0,58	17,74	0,04	1,26	3,20	77,06	100,00
Indonesia	0,98	4,06	15,19	9,70	8,87	4,16	57,05	100,00

Tabel 3.9.3 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, dan Jenis Plafon Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan								
Provinsi	Beton	Gypsum	Kayu/ triplek	Asbes	Anyam- an bambu	Lainnya	Tidak ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	2,05	2,90	39,62	5,01	0,20	5,28	44,94	100,00
Sumatera Utara	3,09	5,75	23,03	24,92	0,99	1,73	40,48	100,00
Sumatera Barat	2,12	2,35	48,03	2,00	0,88	2,28	42,35	100,00
Riau	1,41	6,19	51,91	2,15	0,23	4,54	33,57	100,00
Jambi	4,49	5,30	36,94	0,52	0,06	6,41	46,28	100,00
Sumatera Selatan	1,58	5,02	32,93	2,94	0,11	2,83	54,58	100,00
Bengkulu	1,49	1,08	47,03	0,84	0,99	1,07	47,48	100,00
Lampung	1,06	5,49	17,44	1,80	1,41	1,16	71,63	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,64	5,65	19,13	27,92	0,65	5,44	39,55	100,00
Kepulauan Riau	8,04	11,72	39,63	17,10	0,33	0,75	22,43	100,00
DKI Jakarta	5,09	12,13	59,73	17,88	0,38	1,03	3,77	100,00
Jawa Barat	2,49	12,37	26,39	17,77	24,27	5,98	10,73	100,00
Jawa Tengah	0,75	8,15	7,14	15,93	3,59	0,34	64,10	100,00
DI Yogyakarta	3,86	15,09	8,74	10,47	0,69	1,80	59,35	100,00
Jawa Timur	2,51	7,27	6,70	29,58	5,83	0,77	47,34	100,00
Banten	2,66	8,57	39,52	14,89	10,81	1,86	21,68	100,00
Bali	2,47	4,72	42,41	8,84	18,16	0,72	22,68	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,43	3,79	21,17	2,95	18,13	4,39	48,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,52	1,28	9,94	0,30	0,70	2,74	84,52	100,00
Kalimantan Barat	1,60	3,83	42,17	1,51	0,15	2,82	47,92	100,00
Kalimantan Tengah	0,85	3,61	35,22	2,42	-	2,26	55,63	100,00
Kalimantan Selatan	1,18	3,02	36,16	1,30	0,16	11,17	47,01	100,00
Kalimantan Timur	2,13	5,78	59,24	0,96	-	1,59	30,30	100,00
Sulawesi Utara	1,88	3,82	46,86	0,24	0,54	1,14	45,52	100,00
Sulawesi Tengah	1,77	2,34	22,08	0,28	0,34	6,90	66,28	100,00
Sulawesi Selatan	2,71	3,71	18,72	4,12	0,89	19,23	50,61	100,00
Sulawesi Tenggara	1,22	1,90	13,52	0,81	0,14	13,94	68,47	100,00
Gorontalo	0,84	2,33	39,82	0,38	11,49	4,30	40,85	100,00
Sulawesi Barat	0,53	1,08	13,52	2,20	0,94	21,37	60,36	100,00
Maluku	1,38	0,92	36,98	0,72	0,18	2,13	57,70	100,00
Maluku Utara	0,68	2,61	35,25	0,40	-	0,99	60,07	100,00
Papua Barat	0,79	0,66	50,06	1,10	-	0,53	46,85	100,00
Papua	0,55	0,52	33,66	0,24	0,95	2,72	61,37	100,00
Indonesia	2,18	7,46	24,53	14,24	7,48	3,41	40,70	100,00

Tabel 3.10.1 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	85,90	14,10	100,00
Sumatera Utara	88,72	11,28	100,00
Sumatera Barat	84,66	15,34	100,00
Riau	91,91	8,09	100,00
Jambi	89,33	10,67	100,00
Sumatera Selatan	84,31	15,69	100,00
Bengkulu	92,73	7,27	100,00
Lampung	89,99	10,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	87,37	12,63	100,00
Kepulauan Riau	91,68	8,32	100,00
DKI Jakarta	90,92	9,08	100,00
Jawa Barat	84,89	15,11	100,00
Jawa Tengah	86,73	13,27	100,00
DI Yogyakarta	89,37	10,63	100,00
Jawa Timur	88,66	11,34	100,00
Banten	87,01	12,99	100,00
Bali	88,59	11,41	100,00
Nusa Tenggara Barat	86,43	13,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	85,77	14,23	100,00
Kalimantan Barat	93,14	6,86	100,00
Kalimantan Tengah	84,24	15,76	100,00
Kalimantan Selatan	86,88	13,12	100,00
Kalimantan Timur	92,73	7,27	100,00
Sulawesi Utara	88,23	11,77	100,00
Sulawesi Tengah	93,87	6,13	100,00
Sulawesi Selatan	85,58	14,42	100,00
Sulawesi Tenggara	88,61	11,39	100,00
Gorontalo	90,80	9,20	100,00
Sulawesi Barat	85,81	14,19	100,00
Maluku	92,75	7,25	100,00
Maluku Utara	96,98	3,02	100,00
Papua Barat	93,79	6,21	100,00
Papua	91,57	8,43	100,00
Indonesia	87,59	12,41	100,00

Tabel 3.10.2 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	76,63	23,37	100,00
Sumatera Utara	79,92	20,08	100,00
Sumatera Barat	82,56	17,44	100,00
Riau	89,15	10,85	100,00
Jambi	86,39	13,61	100,00
Sumatera Selatan	85,37	14,63	100,00
Bengkulu	81,80	18,20	100,00
Lampung	88,82	11,18	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,17	11,83	100,00
Kepulauan Riau	87,97	12,03	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	78,33	21,67	100,00
Jawa Tengah	86,78	13,22	100,00
DI Yogyakarta	79,58	20,42	100,00
Jawa Timur	87,69	12,31	100,00
Banten	73,16	26,84	100,00
Bali	84,77	15,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	83,81	16,19	100,00
Nusa Tenggara Timur	75,28	24,72	100,00
Kalimantan Barat	86,93	13,07	100,00
Kalimantan Tengah	84,89	15,11	100,00
Kalimantan Selatan	83,90	16,10	100,00
Kalimantan Timur	89,28	10,72	100,00
Sulawesi Utara	84,08	15,92	100,00
Sulawesi Tengah	79,45	20,55	100,00
Sulawesi Selatan	80,05	19,95	100,00
Sulawesi Tenggara	74,09	25,91	100,00
Gorontalo	80,32	19,68	100,00
Sulawesi Barat	70,27	29,73	100,00
Maluku	81,49	18,51	100,00
Maluku Utara	84,81	15,19	100,00
Papua Barat	89,18	10,82	100,00
Papua	85,13	14,87	100,00
Indonesia	83,50	16,50	100,00

Tabel 3.10.3 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Atap Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	79,26	20,74	100,00
Sumatera Utara	84,19	15,81	100,00
Sumatera Barat	83,37	16,63	100,00
Riau	90,22	9,78	100,00
Jambi	87,26	12,74	100,00
Sumatera Selatan	84,99	15,01	100,00
Bengkulu	85,24	14,76	100,00
Lampung	89,10	10,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	87,79	12,21	100,00
Kepulauan Riau	91,08	8,92	100,00
DKI Jakarta	90,92	9,08	100,00
Jawa Barat	82,56	17,44	100,00
Jawa Tengah	86,76	13,24	100,00
DI Yogyakarta	86,26	13,74	100,00
Jawa Timur	88,14	11,86	100,00
Banten	82,66	17,34	100,00
Bali	87,15	12,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	84,93	15,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,29	22,71	100,00
Kalimantan Barat	88,73	11,27	100,00
Kalimantan Tengah	84,67	15,33	100,00
Kalimantan Selatan	85,18	14,82	100,00
Kalimantan Timur	91,42	8,58	100,00
Sulawesi Utara	85,98	14,02	100,00
Sulawesi Tengah	82,98	17,02	100,00
Sulawesi Selatan	82,04	17,96	100,00
Sulawesi Tenggara	78,12	21,88	100,00
Gorontalo	83,92	16,08	100,00
Sulawesi Barat	73,58	26,42	100,00
Maluku	85,97	14,03	100,00
Maluku Utara	88,18	11,82	100,00
Papua Barat	90,51	9,49	100,00
Papua	86,72	13,28	100,00
Indonesia	85,54	14,46	100,00

Tabel 3.11.1**Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013**

Perkotaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	86,47	13,53	100,00
Sumatera Utara	89,27	10,73	100,00
Sumatera Barat	87,36	12,64	100,00
Riau	94,70	5,30	100,00
Jambi	90,76	9,24	100,00
Sumatera Selatan	87,93	12,07	100,00
Bengkulu	93,50	6,50	100,00
Lampung	88,36	11,64	100,00
Kep. Bangka Belitung	93,91	6,09	100,00
Kepulauan Riau	95,58	4,42	100,00
DKI Jakarta	92,36	7,64	100,00
Jawa Barat	88,64	11,36	100,00
Jawa Tengah	84,27	15,73	100,00
DI Yogyakarta	86,85	13,15	100,00
Jawa Timur	88,95	11,05	100,00
Banten	88,75	11,25	100,00
Bali	90,65	9,35	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,46	12,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	83,69	16,31	100,00
Kalimantan Barat	93,01	6,99	100,00
Kalimantan Tengah	88,07	11,93	100,00
Kalimantan Selatan	86,92	13,08	100,00
Kalimantan Timur	95,21	4,79	100,00
Sulawesi Utara	87,57	12,43	100,00
Sulawesi Tengah	92,45	7,55	100,00
Sulawesi Selatan	85,11	14,89	100,00
Sulawesi Tenggara	88,01	11,99	100,00
Gorontalo	92,20	7,80	100,00
Sulawesi Barat	83,60	16,40	100,00
Maluku	94,52	5,48	100,00
Maluku Utara	93,58	6,42	100,00
Papua Barat	94,98	5,02	100,00
Papua	93,70	6,30	100,00
Indonesia	88,81	11,19	100,00

Tabel 3.11.2 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	71,44	28,56	100,00
Sumatera Utara	78,30	21,70	100,00
Sumatera Barat	82,19	17,81	100,00
Riau	88,78	11,22	100,00
Jambi	88,01	11,99	100,00
Sumatera Selatan	86,07	13,93	100,00
Bengkulu	82,00	18,00	100,00
Lampung	79,78	20,22	100,00
Kep. Bangka Belitung	90,21	9,79	100,00
Kepulauan Riau	90,72	9,28	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	80,42	19,58	100,00
Jawa Tengah	74,98	25,02	100,00
DI Yogyakarta	66,27	33,73	100,00
Jawa Timur	80,95	19,05	100,00
Banten	71,00	29,00	100,00
Bali	83,81	16,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	76,69	23,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,75	40,25	100,00
Kalimantan Barat	88,15	11,85	100,00
Kalimantan Tengah	88,23	11,77	100,00
Kalimantan Selatan	86,38	13,62	100,00
Kalimantan Timur	91,54	8,46	100,00
Sulawesi Utara	81,61	18,39	100,00
Sulawesi Tengah	75,22	24,78	100,00
Sulawesi Selatan	79,53	20,47	100,00
Sulawesi Tenggara	73,35	26,65	100,00
Gorontalo	80,67	19,33	100,00
Sulawesi Barat	65,00	35,00	100,00
Maluku	76,64	23,36	100,00
Maluku Utara	82,05	17,95	100,00
Papua Barat	86,11	13,89	100,00
Papua	71,23	28,77	100,00
Indonesia	79,12	20,88	100,00

Tabel 3.11.3 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Lantai Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,70	24,30	100,00
Sumatera Utara	83,62	16,38	100,00
Sumatera Barat	84,17	15,83	100,00
Riau	91,08	8,92	100,00
Jambi	88,82	11,18	100,00
Sumatera Selatan	86,73	13,27	100,00
Bengkulu	85,62	14,38	100,00
Lampung	81,84	18,16	100,00
Kep. Bangka Belitung	92,00	8,00	100,00
Kepulauan Riau	94,79	5,21	100,00
DKI Jakarta	92,36	7,64	100,00
Jawa Barat	85,72	14,28	100,00
Jawa Tengah	79,19	20,81	100,00
DI Yogyakarta	80,31	19,69	100,00
Jawa Timur	84,70	15,30	100,00
Banten	83,17	16,83	100,00
Bali	88,07	11,93	100,00
Nusa Tenggara Barat	81,30	18,70	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,35	35,65	100,00
Kalimantan Barat	89,56	10,44	100,00
Kalimantan Tengah	88,18	11,82	100,00
Kalimantan Selatan	86,61	13,39	100,00
Kalimantan Timur	93,82	6,18	100,00
Sulawesi Utara	84,34	15,66	100,00
Sulawesi Tengah	79,44	20,56	100,00
Sulawesi Selatan	81,54	18,46	100,00
Sulawesi Tenggara	77,42	22,58	100,00
Gorontalo	84,63	15,37	100,00
Sulawesi Barat	68,97	31,03	100,00
Maluku	83,76	16,24	100,00
Maluku Utara	85,24	14,76	100,00
Papua Barat	88,66	11,34	100,00
Papua	76,79	23,21	100,00
Indonesia	83,96	16,04	100,00

Tabel 3.12.1 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	83,81	16,19	100,00
Sumatera Utara	88,63	11,37	100,00
Sumatera Barat	84,97	15,03	100,00
Riau	95,34	4,66	100,00
Jambi	90,43	9,57	100,00
Sumatera Selatan	86,39	13,61	100,00
Bengkulu	94,97	5,03	100,00
Lampung	89,16	10,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	90,31	9,69	100,00
Kepulauan Riau	93,28	6,72	100,00
DKI Jakarta	90,30	9,70	100,00
Jawa Barat	87,54	12,46	100,00
Jawa Tengah	85,45	14,55	100,00
DI Yogyakarta	88,65	11,35	100,00
Jawa Timur	89,03	10,97	100,00
Banten	87,97	12,03	100,00
Bali	91,03	8,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,68	11,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,36	17,64	100,00
Kalimantan Barat	94,38	5,62	100,00
Kalimantan Tengah	87,60	12,40	100,00
Kalimantan Selatan	86,46	13,54	100,00
Kalimantan Timur	94,75	5,25	100,00
Sulawesi Utara	88,47	11,53	100,00
Sulawesi Tengah	93,63	6,37	100,00
Sulawesi Selatan	84,25	15,75	100,00
Sulawesi Tenggara	86,56	13,44	100,00
Gorontalo	92,04	7,96	100,00
Sulawesi Barat	83,02	16,98	100,00
Maluku	94,23	5,77	100,00
Maluku Utara	94,83	5,17	100,00
Papua Barat	91,84	8,16	100,00
Papua	92,70	7,30	100,00
Indonesia	88,37	11,63	100,00

Tabel 3.12.2 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	70,88	29,12	100,00
Sumatera Utara	76,91	23,09	100,00
Sumatera Barat	82,87	17,13	100,00
Riau	89,59	10,41	100,00
Jambi	87,90	12,10	100,00
Sumatera Selatan	86,05	13,95	100,00
Bengkulu	81,52	18,48	100,00
Lampung	81,35	18,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	86,94	13,06	100,00
Kepulauan Riau	88,95	11,05	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	78,78	21,22	100,00
Jawa Tengah	80,13	19,87	100,00
DI Yogyakarta	68,85	31,15	100,00
Jawa Timur	85,07	14,93	100,00
Banten	72,33	27,67	100,00
Bali	84,60	15,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,32	20,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,52	35,48	100,00
Kalimantan Barat	85,98	14,02	100,00
Kalimantan Tengah	87,05	12,95	100,00
Kalimantan Selatan	82,94	17,06	100,00
Kalimantan Timur	87,31	12,69	100,00
Sulawesi Utara	80,71	19,29	100,00
Sulawesi Tengah	75,14	24,86	100,00
Sulawesi Selatan	75,26	24,74	100,00
Sulawesi Tenggara	72,38	27,62	100,00
Gorontalo	81,15	18,85	100,00
Sulawesi Barat	65,12	34,88	100,00
Maluku	78,87	21,13	100,00
Maluku Utara	82,45	17,55	100,00
Papua Barat	86,18	13,82	100,00
Papua	73,66	26,34	100,00
Indonesia	80,34	19,66	100,00

Tabel 3.12.3 Persentase Rumah tangga menurut Kondisi Dinding Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Baik	Rusak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	74,54	25,46	100,00
Sumatera Utara	82,59	17,41	100,00
Sumatera Barat	83,68	16,32	100,00
Riau	91,83	8,17	100,00
Jambi	88,65	11,35	100,00
Sumatera Selatan	86,17	13,83	100,00
Bengkulu	85,76	14,24	100,00
Lampung	83,22	16,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	88,56	11,44	100,00
Kepulauan Riau	92,58	7,42	100,00
DKI Jakarta	90,30	9,70	100,00
Jawa Barat	84,43	15,57	100,00
Jawa Tengah	82,54	17,46	100,00
DI Yogyakarta	82,37	17,63	100,00
Jawa Timur	86,93	13,07	100,00
Banten	83,06	16,94	100,00
Bali	88,60	11,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	83,33	16,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,95	32,05	100,00
Kalimantan Barat	88,40	11,60	100,00
Kalimantan Tengah	87,24	12,76	100,00
Kalimantan Selatan	84,46	15,54	100,00
Kalimantan Timur	91,93	8,07	100,00
Sulawesi Utara	84,26	15,74	100,00
Sulawesi Tengah	79,66	20,34	100,00
Sulawesi Selatan	78,49	21,51	100,00
Sulawesi Tenggara	76,31	23,69	100,00
Gorontalo	84,89	15,11	100,00
Sulawesi Barat	68,93	31,07	100,00
Maluku	84,99	15,01	100,00
Maluku Utara	85,88	14,12	100,00
Papua Barat	87,80	12,20	100,00
Papua	78,37	21,63	100,00
Indonesia	84,35	15,65	100,00



FASILITAS DAN PERLENGKAPAN RUMAH

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan tempat berlindung. Lingkungan dari struktur fisik bangunan tersebut berguna untuk kesehatan jasmani, rohani serta keadaan sosial, baik untuk kesehatan keluarga maupun individu (Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001). Rumah yang ideal bukanlah rumah yang besar dan mewah melainkan rumah dengan kualitas yang baik dan memiliki kelengkapan fasilitas. Kualitas yang baik berkaitan dengan kesehatan, sementara kelengkapan fasilitas berkaitan dengan kenyamanan rumah bagi penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah dikatakan baik bila memenuhi kriteria rumah sehat. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi syarat luasan yang cukup, memiliki sirkulasi udara yang baik, cukup cahaya matahari, kelembaban dan suhu, serta sanitasi, kamar mandi, dan dapur yang baik. Bila sebuah rumah termasuk dalam kategori rumah sehat, maka penghuninya juga akan sehat dan dapat menjalankan aktivitas secara layak.

Selain kualitas rumah tinggal, rumah yang ideal dapat diukur melalui kelengkapan fasilitas yang tersedia di dalam rumah. Fasilitas rumah yang lengkap akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Fasilitas rumah yang mendasar dan diperlukan untuk kenyamanan penghuninya adalah penerangan, air minum, tempat mandi, dan perabotan. Selain itu, rumah yang ideal bila memiliki kelengkapan ruangan untuk melakukan kegiatan, seperti ruang tidur, ruang makan, kamar mandi, dan dapur.

Bab ini menyajikan informasi mengenai jumlah dan jenis ruangan, kecukupan cahaya alami, kecukupan sirkulasi udara, penggunaan AC, dan fasilitas kamar mandi serta dapur.

4.1 Jumlah dan Jenis Ruangan

Ruangan adalah bagian dari rumah dengan luas minimal 3 m², yang dibatasi dinding penyekat yang tetap dari lantai hingga langit-langit atau tinggi sekat minimal

2 meter. Tidak termasuk sebagai ruangan adalah kamar mandi/WC dan koridor. Idealnya, sebuah rumah memiliki ruang tidur, ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi dan dapur yang terpisah satu sama lain. Terkait dengan fungsinya, pemisahan ruangan-ruangan tersebut memberikan kenyamanan dan menjamin kesehatan penghuninya. Jumlah ruangan yang dimiliki dalam sebuah rumah, kualitas udara, serta frekuensi cahaya yang masuk dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 4.1 menyajikan persentase rumah tangga menurut jumlah ruangan dan tipe daerah tempat tinggal. Secara nasional, sekitar 19 persen rumah tangga memiliki rumah dengan empat ruangan, bahkan ada 35,22 persen rumah tangga yang memiliki rumah dengan enam ruangan atau lebih. Sementara rumah tangga yang memiliki rumah dengan satu ruangan hanya sekitar 3,54 persen.

Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jumlah Ruangan dan Tipe Daerah, 2007 dan 2013

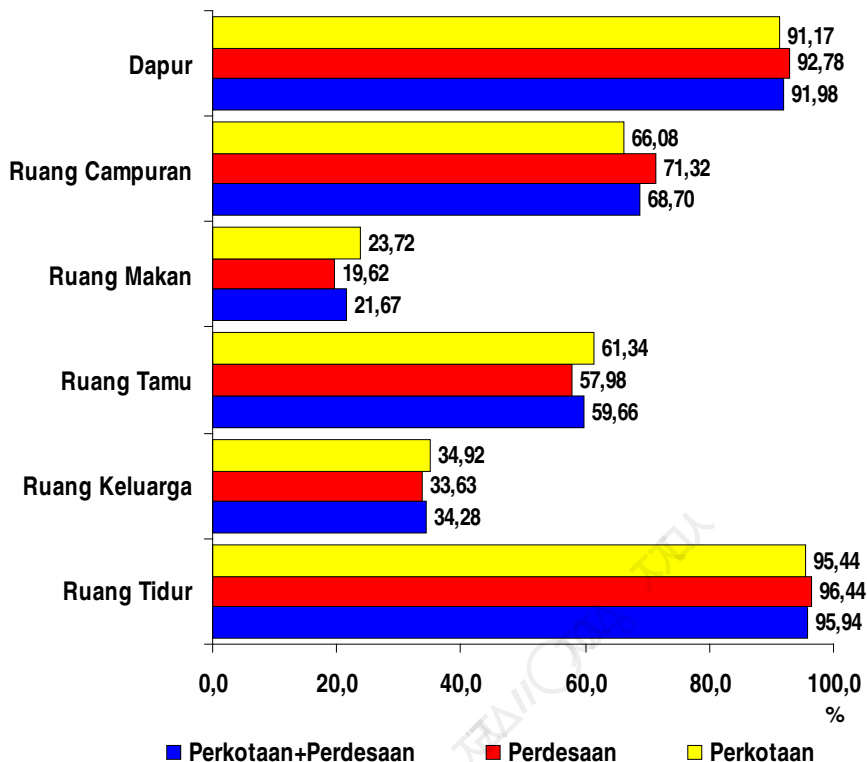
Jumlah Ruangan	2007			2013		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	5,78	2,77	4,07	4.61	2.46	3.54
2	10,64	10,06	10,31	8.88	7.31	8.09
3	16,00	19,78	18,15	13.38	16.57	14.97
4	19,24	24,28	22,10	17.46	20.76	19.11
5	19,13	20,80	20,08	18.11	20.01	19.06
6+	29,21	22,31	25,29	37.55	32.89	35.22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 4.1 memperlihatkan, persentase rumah tangga yang memiliki bangunan tempat tinggal (rumah) dengan jumlah ruangan sebanyak enam dan lebih mengalami kenaikan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007. Sementara rumah tangga yang menempati rumah dengan

jumlah ruangan kurang dari 6 ruangan, persentasenya menurun pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2007. Distribusi menurut wilayah perkotaan dan perdesaan menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki satu ruangan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Sementara, persentase rumah tangga yang memiliki enam ruangan dan lebih di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Sebaran data rumah tangga menurut jumlah ruangan dalam rumah per provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.6.3. Pada tahun 2013, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki rumah dengan hanya satu ruangan ada di Provinsi Papua (32,91 persen). Sedangkan persentase tertinggi rumah tangga dengan lebih dari enam ruangan ada di Provinsi Lampung yaitu sebesar 52,05 persen. Di daerah perkotaan, Provinsi Bali memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki rumah dengan hanya satu ruangan, yaitu sebesar 22,69 persen, sedangkan persentase terendah ada di Provinsi Lampung (0,27 persen) (Tabel 4.6.1).

Gambar 4.1 menunjukkan persentase rumah tangga menurut jenis ruangan yang dimiliki dalam bangunan tempat tinggal. Gambar di atas memperlihatkan bahwa lebih dari 91 persen rumah tangga memiliki dapur tersendiri, dan sekitar 21,67 persen rumah tangga tinggal di rumah yang mempunyai ruang makan. Terbatasnya luas rumah tinggal mempengaruhi jumlah ruangan, yang tercermin pada gambar 4.1. Persentase kepemilikan jenis ruangan campuran relatif masih tinggi (68,70 persen) dibandingkan dengan ruang tamu (59,66 persen), ruang keluarga (34,28 persen), dan ruang makan (21,67 persen). Ini menunjukkan masih cukup banyak rumah tangga yang tinggal di rumah dengan ruang campuran yang memiliki fungsi ganda, contohnya satu ruangan berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang keluarga.



Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Ruangan yang Dimiliki, 2013

4.2 Kecukupan Sirkulasi Udara

Rumah yang sehat harus memiliki ventilasi udara yang cukup agar sirkulasi udara menjadi lancar dan udara menjadi segar. Ventilasi (lubang angin) merupakan tempat keluar/masuk udara/sinar dari luar rumah ke dalam ruangan. Lancarnya sirkulasi udara sangat penting dalam menjaga kualitas udara dalam rumah. Kualitas udara yang baik adalah apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinu melalui ruangan-ruangan dalam rumah yang akan membuat sehat penghuninya. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan UU No. 4 tahun 2002 tentang perumahan dan pemukiman, syarat ventilasi yang baik adalah minimal 5 persen dari luas lantai ruangan.

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga menurut Kecukupan Sirkulasi Udara, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, Tahun 2013

Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan yang Cukup Sirkulasi Udara			
	0	1	2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ruangan Tidur	9,90	33,70	28,97	27,43
Ruangan Keluarga	67,95	31,49	0,55	0,01
Ruangan Tamu	43,27	56,30	0,42	0,01
Ruangan Makan	80,44	19,33	0,23	0,00
Ruangan Campuran	36,92	60,24	2,69	015
Dapur	16,34	83,37	0,27	0,01
Kamar Mandi	30,82	65,27	3,17	0,74

Tabel 4.2 menyajikan persentase kecukupan sirkulasi udara dalam rumah menurut jenis ruangan. Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa masih cukup banyak rumah yang memiliki ruangan tanpa sirkulasi udara yang cukup. Hal ini ditandai dengan tingginya persentase ruang makan yang tidak cukup sirkulasi udara (80,44 persen), ruang keluarga yang tidak cukup sirkulasi udara (67,95 persen), ruangan tamu yang tidak cukup sirkulasi udara (43,27 persen), dan ruangan campuran yang tidak cukup sirkulasi udara (36,92 persen). Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa sebagian besar rumah memiliki satu dapur (83,37 persen), satu kamar mandi (65,27 persen), dan satu ruang campuran (60,24 persen) yang cukup sirkulasi udara.

4.3 Kecukupan Cahaya Alami

Seperti halnya sirkulasi udara, pencahayaan ruangan sebaiknya bersumber pada cahaya alami sehingga selain sehat juga dapat menghemat energi sehingga siang hari tidak perlu menyalakan lampu. Selain itu, cahaya alami dari sinar matahari juga dapat membersihkan dan menghangatkan ruangan sehingga ruangan menjadi tidak lembab dan dapat meminimalisir timbulnya bibit penyakit. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999, dimana salah satu persyaratan kesehatan rumah adalah adanya pencahayaan berupa cahaya alam dan/atau buatan langsung maupun tidak langsung yang dapat menerangi seluruh ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan.

UU No. 4 tahun 2002 tentang perumahan dan pemukiman, menyebutkan bahwa syarat lubang cahaya yang baik adalah minimal 10 persen dari luas lantai ruangan. Dalam Susenas MKP, cukup cahaya alami didefinisikan bila pada siang hari dapat membaca secara jelas di dalam ruangan, tanpa bantuan alat ruangan. Pencahayaan alami sangat penting karena dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, terutama untuk kesehatan yang kaya akan vitamin D untuk membantu pertumbuhan tulang. Tabel 4.3 memberikan gambaran rumah tangga yang memiliki ruangan yang cukup cahaya alami.

Tabel 4.3. Persentase Rumah Tangga menurut Kecukupan Cahaya Alami Rumah, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, Tahun 2013

Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan yang Cukup Cahaya Alami			
	0	1	2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ruangan Tidur	15,28	32,65	27,35	24,72
Ruangan Keluarga	70,23	29,26	0,50	0,01
Ruangan Tamu	46,07	53,50	0,42	0,01
Ruangan Makan	82,12	17,66	0,22	0,00
Ruangan Campuran	41,00	56,34	2,51	0,14
Dapur	23,28	76,39	0,32	0,01
Kamar Mandi	37,97	58,60	2,80	0,64

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga yang tidak memiliki ruang keluarga, dan tidak memiliki ruang makan yang cukup cahaya alami relatif masih sangat tinggi (70,23 persen ruang keluarga dan 82,12 persen ruang makan). Namun, mayoritas rumah tangga memiliki satu ruang tamu (53,50 persen), satu ruang campuran (56,34 persen), satu dapur (76,39 persen), dan satu kamar mandi (58,60 persen) yang cukup cahaya alami.

4.4 Penggunaan AC

Rumah yang sehat juga ditandai dengan udara dan kelembaban udara dalam ruangan yang sesuai dengan suhu tubuh normal. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999, kualitas udara pada rumah sehat adalah memiliki suhu udara yang nyaman berkisar antara 18 sampai 30

derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 40 sampai 70 persen. Kualitas udara dalam ruangan dapat dijaga dengan menggunakan *air conditioning* (AC) untuk mengatur suhu, dan kelembaban udara.

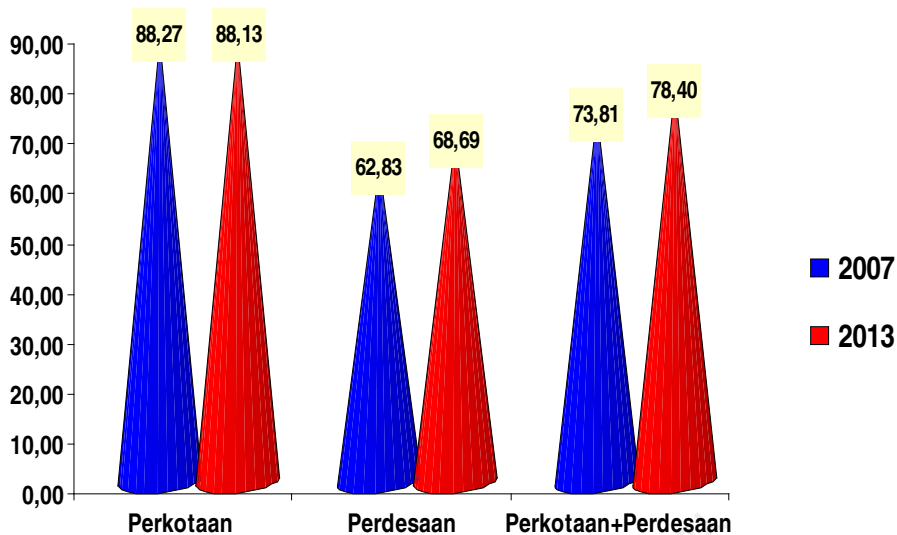
Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan AC, Jenis Ruangan, dan Jumlah Ruangan, Tahun 2013

Jenis Ruangan	Jumlah Ruangan yang Menggunakan AC			
	0	1	2	3+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ruangan Tidur	93,00	3,26	2,96	0,72
Ruangan Keluarga	98,81	0,91	0,28	0,00
Ruangan Tamu	98,24	1,41	0,35	0,00
Ruangan Makan	99,38	0,46	0,16	0,00
Ruangan Campuran	97,87	1,71	0,42	0,00

Tabel 4.4 memberikan gambaran mengenai rumah tangga yang menggunakan AC pada ruangan dalam rumah. Hasil Susenas MKP menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak menggunakan AC untuk mengatur suhu dan kelembaban udara dalam ruangan. Hanya ruangan tidur yang memiliki persentase yang cukup tinggi dalam penggunaan AC. Terlihat dari Tabel 4.4 bahwa persentase rumah tangga yang memiliki satu ruangan tidur menggunakan AC sekitar 3,26 persen, dua ruangan tidur menggunakan AC sekitar 2,96 persen, dan lebih dari 2 ruangan tidur menggunakan AC sekitar 0,72 persen.

4.5 Fasilitas Kamar Mandi dan Dapur

Kamar mandi merupakan salah satu fasilitas penting yang harus dimiliki rumah karena ruangan ini digunakan untuk kebutuhan dasar manusia, seperti mandi, buang air besar, buang air kecil, dan kegiatan mencuci pakaian/piring. Oleh karena itu, ketersediaan kamar mandi sangatlah mempengaruhi kesehatan penghuninya. Sudah selayaknya setiap rumah memiliki kamar mandi yang terjamin kebersihannya. Untuk menunjang kebersihan dan kenyamanan dalam penggunaannya, kamar mandi memerlukan ventilasi. Ventilasi ini berfungsi untuk mengalirkan udara keluar dan masuk, sehingga udara dalam kamar mandi akan selalu bersih dan segar.



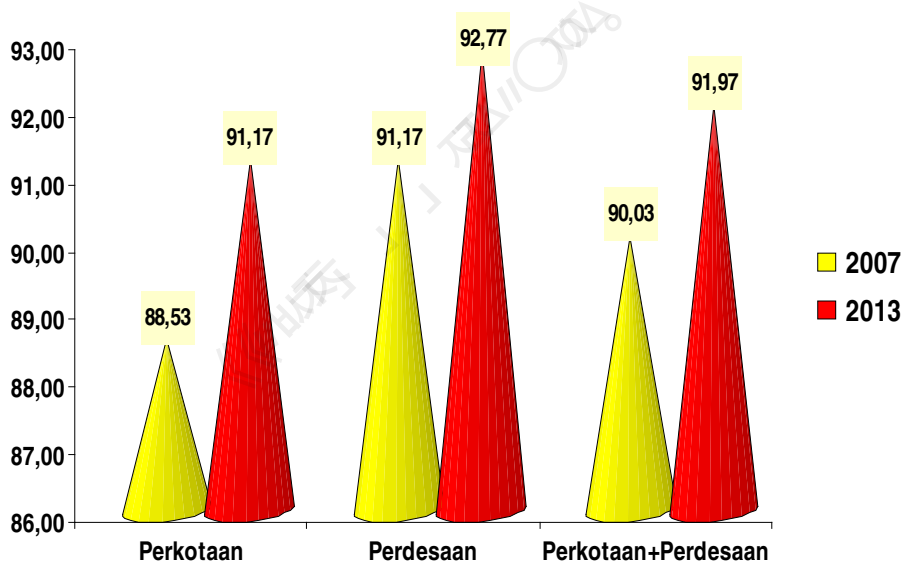
Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Kamar Mandi, 2007 dan 2013

Gambar 4.2 memperlihatkan persentase rumah tangga yang memiliki kamar mandi pada tahun 2007 dan 2013. Secara nasional, sejak tahun 2007 sebagian besar rumah tangga (73,81 persen) tinggal dalam rumah yang memiliki fasilitas kamar mandi sendiri. Persentase ini meningkat pada tahun 2013 menjadi 78,40 persen. Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang tinggal di rumah dengan fasilitas kamar mandi lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan fasilitas kamar mandi sendiri di daerah perkotaan pada tahun 2007 sebesar 88,27 persen relatif sama dengan persentase pada tahun 2013 (88,13 persen). Sebaliknya, di daerah perdesaan, persentasenya mengalami peningkatan pada tahun 2013 (68,69 persen) dibandingkan dengan tahun 2007 (62,83 persen).

Persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan fasilitas kamar mandi antar provinsi sangat bervariasi (Tabel 4.8). Provinsi di pulau Jawa cenderung memiliki persentase tinggi. Di beberapa provinsi di luar Jawa, persentasenya relatif masih rendah, yaitu di bawah 50 persen, seperti di Provinsi Papua (40,70 persen), Gorontalo (47,48 persen), dan Sulawesi Barat (48,09 persen).

Selain kamar mandi, dapur juga merupakan fasilitas rumah yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dikarenakan dapur berfungsi sebagai tempat

pengolahan makanan sebelum dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Oleh karena itu, ketersediaan dan kebersihan dapur sangat mempengaruhi kualitas makanan yang dikonsumsi anggota rumah tangga. Gambar 4.3 menyajikan persentase rumah tangga yang memiliki dapur pada tahun 2007 dan 2013. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan fasilitas dapur relative tinggi, persentasenya mengalami kenaikan dari 90,03 persen pada tahun 2007 menjadi 91,97 persen pada tahun 2013. Persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang memiliki dapur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Keadaan ini terjadi baik pada tahun 2007 maupun tahun 2013. Persentase rumah tangga yang memiliki dapur di daerah perdesaan pada tahun 2007 sebesar 91,17 persen naik menjadi 92,27 persen pada tahun 2013. Sedangkan di daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang memiliki dapur pada tahun 2007 sebesar 88,53 persen naik menjadi 91,17 persen pada tahun 2013.



Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Dapur, 2013

Mengingat pentingnya peran dan fungsi dapur sebagai tempat pengolahan bahan makanan, lokasi dapur menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan lokasi dapur juga dapat mempengaruhi kualitas bahan makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan penghuni rumah. Selain itu, lokasi dapur yang menyatu dengan ruangan lainnya dalam rumah dapat mempengaruhi kesehatan

penghuni rumah disebabkan udara atau asap yang dihasilkan oleh rumah tangga saat memasak. Namun, asap atau udara yang kurang baik ini dapat diminimalisir dengan ventilasi udara yang baik. Ketersediaan ventilasi udara dapat membuat asap yang dihasilkan dari proses memasak tidak akan mencemari udara di dalam rumah.

Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Dapur Terpisah dari Bangunan Utama Menurut Tipe Daerah, 2013

Dapur Terpisah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	12,18	18,65	15,45
Tidak	87,82	81,35	84,55
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Table 4.5 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga, baik di perkotaan maupun di perdesaan, memiliki dapur yang tidak terpisah dari bangunan utama atau dapurnya bercampur dengan bangunan utama. Sebaliknya, hanya 15,45 persen rumah tangga yang memiliki dapur terpisah dari bangunan utama. Persentase rumah tangga di perdesaan yang memiliki dapur terpisah lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (18,65 persen berbanding 12,18 persen). Hal ini kemungkinan disebabkan lebih terbatasnya lahan di perkotaan untuk membangun rumah sehingga mayoritas rumah memiliki dapur yang menjadi satu dengan bangunan utama.

Tabel 4.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Ruangan, 2013

							Perkotaan
Provinsi	1	2	3	4	5	6+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1,78	6,46	23,76	22,40	17,78	27,82	100,00
Sumatera Utara	1,91	7,53	13,43	23,36	19,66	34,11	100,00
Sumatera Barat	2,36	6,77	15,18	19,56	17,54	38,59	100,00
Riau	0,96	8,64	12,90	23,16	17,81	36,53	100,00
Jambi	1,22	3,61	19,01	19,67	14,62	41,87	100,00
Sumatera Selatan	3,11	12,17	14,93	17,35	17,86	34,59	100,00
Bengkulu	1,23	7,37	13,84	17,17	18,59	41,80	100,00
Lampung	0,27	5,28	10,60	12,31	16,89	54,64	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,37	8,58	9,85	24,06	17,08	40,06	100,00
Kepulauan Riau	4,01	4,74	15,47	18,32	19,23	38,22	100,00
DKI Jakarta	14,60	22,65	17,17	14,46	11,70	19,42	100,00
Jawa Barat	2,99	7,90	14,54	17,41	18,17	38,98	100,00
Jawa Tengah	2,32	4,06	10,29	17,75	20,92	44,66	100,00
DI Yogyakarta	13,30	9,47	13,44	15,59	18,93	29,27	100,00
Jawa Timur	2,82	5,96	10,02	16,86	20,94	43,40	100,00
Banten	3,78	9,62	14,30	15,65	17,68	38,97	100,00
Bali	22,69	13,87	18,13	17,07	11,30	16,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,85	14,08	18,92	23,18	16,86	21,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,93	9,42	10,30	13,42	15,50	40,43	100,00
Kalimantan Barat	1,30	2,78	9,69	14,24	15,86	56,13	100,00
Kalimantan Tengah	3,31	15,16	22,56	21,53	15,38	22,06	100,00
Kalimantan Selatan	8,19	19,58	16,13	17,16	13,51	25,43	100,00
Kalimantan Timur	1,37	12,02	13,27	22,05	20,16	31,14	100,00
Sulawesi Utara	1,53	3,02	9,31	14,84	19,86	51,45	100,00
Sulawesi Tengah	5,39	11,59	14,40	13,06	19,90	35,66	100,00
Sulawesi Selatan	3,35	7,72	11,12	13,62	14,99	49,21	100,00
Sulawesi Tenggara	9,94	7,55	7,97	17,21	15,58	41,74	100,00
Gorontalo	4,03	3,11	7,18	21,04	16,63	48,00	100,00
Sulawesi Barat	3,38	8,72	12,56	26,64	18,73	29,97	100,00
Maluku	6,53	5,16	9,11	12,66	19,18	47,36	100,00
Maluku Utara	6,94	0,30	3,67	8,08	20,50	60,51	100,00
Papua Barat	7,52	16,17	12,56	24,46	20,02	19,27	100,00
Papua	6,87	10,00	12,02	17,30	20,55	33,25	100,00
Indonesia	4,61	8,88	13,38	17,46	18,11	37,55	100,00

Tabel 4.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Ruangan, 2013

							Perdesaan
Provinsi	1	2	3	4	5	6+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2,01	9,30	25,51	24,14	17,48	21,56	100,00
Sumatera Utara	2,96	11,60	20,53	22,02	19,72	23,17	100,00
Sumatera Barat	1,96	8,55	21,64	23,97	19,47	24,41	100,00
Riau	1,34	9,10	21,55	19,96	19,23	28,82	100,00
Jambi	0,89	7,30	20,75	20,73	20,28	30,05	100,00
Sumatera Selatan	1,71	12,36	18,56	18,04	16,68	32,65	100,00
Bengkulu	0,45	7,25	15,19	22,36	19,64	35,10	100,00
Lampung	0,26	3,29	10,10	15,04	20,07	51,24	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,32	6,01	16,56	20,92	19,11	37,08	100,00
Kepulauan Riau	2,55	12,93	7,83	16,46	14,34	45,89	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,47	4,74	18,33	20,30	22,52	33,63	100,00
Jawa Tengah	0,65	3,93	12,73	20,30	21,98	40,41	100,00
DI Yogyakarta	3,03	4,28	14,77	22,82	22,46	32,63	100,00
Jawa Timur	0,88	4,31	12,81	19,99	20,75	41,26	100,00
Banten	1,03	3,26	13,39	21,48	23,48	37,36	100,00
Bali	7,26	18,55	24,90	25,71	13,03	10,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,16	18,52	20,78	26,88	15,49	15,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,44	11,19	20,72	24,46	20,72	15,47	100,00
Kalimantan Barat	1,31	6,18	18,07	25,57	19,19	29,68	100,00
Kalimantan Tengah	3,96	17,09	30,31	21,23	12,82	14,59	100,00
Kalimantan Selatan	5,22	13,38	21,53	23,58	16,18	20,11	100,00
Kalimantan Timur	3,52	15,03	19,83	18,28	16,27	27,06	100,00
Sulawesi Utara	0,12	3,67	12,60	26,60	22,67	34,34	100,00
Sulawesi Tengah	1,01	8,00	19,93	21,76	18,49	30,81	100,00
Sulawesi Selatan	4,06	9,00	15,33	19,68	20,14	31,79	100,00
Sulawesi Tenggara	2,03	10,12	18,96	18,48	22,39	28,02	100,00
Gorontalo	1,01	11,83	22,36	21,26	22,49	21,06	100,00
Sulawesi Barat	12,12	19,86	20,47	22,31	11,57	13,67	100,00
Maluku	0,57	3,29	13,00	23,57	21,79	37,78	100,00
Maluku Utara	0,98	2,22	4,82	23,73	24,18	44,07	100,00
Papua Barat	1,57	6,62	21,51	24,37	18,98	26,95	100,00
Papua	42,02	17,87	13,51	14,68	7,76	4,16	100,00
Indonesia	2,46	7,31	16,57	20,76	20,01	32,89	100,00

Table 4.6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, dan Banyaknya Ruang, 2013

Perkotaan+ Perdesaan							
Provinsi	1	2	3	4	5	6+	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1,94	8,49	25,02	23,65	17,56	23,33	100,00
Sumatera Utara	2,45	9,62	17,09	22,67	19,69	28,48	100,00
Sumatera Barat	2,11	7,86	19,17	22,28	18,73	29,85	100,00
Riau	1,19	8,92	18,18	21,21	18,68	31,82	100,00
Jambi	0,99	6,21	20,23	20,42	18,60	33,55	100,00
Sumatera Selatan	2,21	12,29	17,27	17,79	17,10	33,34	100,00
Bengkulu	0,69	7,29	14,77	20,73	19,31	37,21	100,00
Lampung	0,26	3,77	10,22	14,38	19,31	52,05	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,35	7,25	13,32	22,43	18,14	38,51	100,00
Kepulauan Riau	3,77	6,08	14,22	18,02	18,44	39,47	100,00
DKI Jakarta	14,60	22,65	17,17	14,46	11,70	19,42	100,00
Jawa Barat	2,09	6,78	15,88	18,44	19,72	37,09	100,00
Jawa Tengah	1,41	3,99	11,62	19,14	21,50	42,34	100,00
DI Yogyakarta	10,04	7,82	13,87	17,88	20,05	30,34	100,00
Jawa Timur	1,79	5,09	11,50	18,52	20,84	42,26	100,00
Banten	2,92	7,62	14,01	17,48	19,51	38,46	100,00
Bali	16,86	15,64	20,69	20,34	11,96	14,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,31	16,62	19,99	25,30	16,08	17,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	8,11	10,85	18,72	22,34	19,71	20,26	100,00
Kalimantan Barat	1,31	5,20	15,64	22,29	18,23	37,33	100,00
Kalimantan Tengah	3,74	16,43	27,67	21,33	13,69	17,13	100,00
Kalimantan Selatan	6,50	16,05	19,20	20,81	15,03	22,41	100,00
Kalimantan Timur	2,19	13,16	15,76	20,62	18,68	29,59	100,00
Sulawesi Utara	0,77	3,37	11,09	21,21	21,38	42,18	100,00
Sulawesi Tengah	2,08	8,88	18,58	19,63	18,83	32,00	100,00
Sulawesi Selatan	3,80	8,54	13,81	17,50	18,29	38,05	100,00
Sulawesi Tenggara	4,22	9,41	15,91	18,13	20,50	31,82	100,00
Gorontalo	2,04	8,84	17,15	21,18	20,48	30,31	100,00
Sulawesi Barat	10,26	17,48	18,78	23,24	13,10	17,15	100,00
Maluku	2,94	4,03	11,45	19,23	20,75	41,59	100,00
Maluku Utara	2,63	1,69	4,50	19,40	23,16	48,62	100,00
Papua Barat	3,27	9,36	18,94	24,40	19,28	24,75	100,00
Papua	32,91	15,83	13,12	15,36	11,07	11,70	100,00
Indonesia	3,54	8,09	14,97	19,11	19,06	35,22	100,00

Table 4.7.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangannya Tersendiri Menurut Provinsi dan Jenis Ruangannya, 2013

Provinsi	Perkotaan						
	Ruang tidur	Ruang keluarga	Ruang tamu	Ruang makan	Ruang Campuran	Dapur	Kamar mandi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	99,04	33,72	58,25	23,47	65,85	87,92	88,77
Sumatera Utara	98,00	25,45	59,62	21,73	61,60	92,95	95,00
Sumatera Barat	98,53	25,35	47,84	25,81	73,97	95,77	85,70
Riau	99,21	44,37	57,55	26,85	77,23	96,85	95,64
Jambi	98,85	47,24	64,18	26,50	68,59	94,58	87,78
Sumatera Selatan	94,89	39,99	67,39	26,59	65,51	92,12	84,90
Bengkulu	98,24	50,71	67,27	33,21	60,60	89,86	89,70
Lampung	98,78	54,72	81,90	35,43	60,97	87,33	87,30
Kep. Bangka Belitung	98,96	51,32	74,69	38,37	60,50	95,84	90,36
Kepulauan Riau	98,47	39,68	66,26	33,39	53,29	91,14	95,03
DKI Jakarta	84,34	21,51	47,23	20,08	66,89	80,77	85,44
Jawa Barat	96,10	35,88	53,70	19,60	66,50	95,11	87,44
Jawa Tengah	98,30	38,43	69,13	28,66	71,21	92,64	89,55
DI Yogyakarta	93,17	30,58	56,43	25,19	68,28	82,56	91,80
Jawa Timur	96,22	38,58	75,79	25,13	66,58	92,12	90,32
Banten	95,70	32,21	56,06	22,04	68,24	93,85	86,80
Bali	97,53	18,15	32,58	10,23	31,00	90,14	90,13
Nusa Tenggara Barat	95,72	34,87	45,12	7,51	63,65	87,41	63,14
Nusa Tenggara Timur	87,56	29,14	65,91	27,47	69,75	83,53	88,98
Kalimantan Barat	97,99	49,32	78,00	28,19	61,34	92,96	81,63
Kalimantan Tengah	93,22	28,48	52,19	23,91	79,50	93,44	83,81
Kalimantan Selatan	87,16	24,46	50,65	20,02	80,45	85,18	82,63
Kalimantan Timur	98,35	38,38	72,63	24,12	55,06	92,94	95,89
Sulawesi Utara	99,31	35,69	78,54	46,30	59,16	91,46	90,18
Sulawesi Tengah	94,16	45,32	67,98	32,23	68,12	85,60	80,67
Sulawesi Selatan	94,06	35,87	73,77	29,19	68,57	77,05	81,62
Sulawesi Tenggara	88,77	47,01	76,81	28,79	74,46	85,23	86,20
Gorontalo	99,48	50,13	78,29	41,68	64,11	87,28	75,02
Sulawesi Barat	93,90	39,47	75,15	21,45	80,68	77,92	79,44
Maluku	96,14	39,95	74,28	43,39	46,67	88,84	91,42
Maluku Utara	97,90	52,13	76,53	53,98	50,08	92,98	93,67
Papua Barat	97,05	32,88	67,98	22,69	41,57	86,97	87,43
Papua	91,83	31,78	68,09	28,77	64,33	83,11	88,98
Indonesia	95,44	34,92	61,34	23,72	66,08	91,17	88,13

Tabel 4.7.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangan Tersendiri Menurut Provinsi dan Jenis Ruangan, 2013

Perdesaan							
Provinsi	Ruang tidur	Ruang keluarga	Ruang tamu	Ruang makan	Ruang Campuran	Dapur	Kamar mandi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	98,19	27,04	53,28	15,11	69,39	91,52	62,94
Sumatera Utara	95,38	23,77	44,28	15,58	64,40	92,22	67,52
Sumatera Barat	97,12	22,46	35,41	15,32	78,53	94,72	58,81
Riau	98,18	37,35	50,06	21,80	72,21	92,55	73,49
Jambi	97,63	40,21	57,03	19,81	74,28	91,53	69,96
Sumatera Selatan	96,40	38,21	52,65	27,86	71,05	92,14	58,50
Bengkulu	98,51	45,66	64,93	25,74	63,77	86,20	59,25
Lampung	99,00	51,97	74,08	25,34	70,56	87,65	74,14
Kep. Bangka Belitung	98,97	49,24	71,27	26,57	76,71	94,48	70,75
Kepulauan Riau	97,07	45,95	71,09	21,26	62,75	90,44	73,87
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	99,37	36,11	44,11	15,31	69,61	97,40	71,87
Jawa Tengah	98,96	34,26	67,84	24,64	76,46	94,65	80,77
DI Yogyakarta	96,21	32,15	57,08	24,53	75,60	96,94	78,41
Jawa Timur	98,01	34,87	73,71	18,46	70,33	97,36	80,29
Banten	98,80	33,85	40,44	14,44	75,32	94,59	68,95
Bali	98,86	21,49	18,79	7,26	37,59	97,92	78,06
Nusa Tenggara Barat	97,13	37,42	41,91	6,08	64,74	87,99	51,59
Nusa Tenggara Timur	90,65	13,55	59,41	20,48	68,63	90,08	51,76
Kalimantan Barat	97,63	33,73	63,44	10,91	71,82	87,79	47,19
Kalimantan Tengah	93,90	23,45	37,61	17,34	80,76	96,84	47,70
Kalimantan Selatan	91,67	24,31	45,23	20,26	83,90	90,35	54,89
Kalimantan Timur	95,40	35,53	60,34	23,05	61,76	95,71	74,59
Sulawesi Utara	99,95	33,31	68,79	37,83	58,30	92,13	75,98
Sulawesi Tengah	97,75	40,03	64,86	25,09	68,71	76,77	56,08
Sulawesi Selatan	89,52	31,89	63,26	22,64	80,07	78,04	57,12
Sulawesi Tenggara	96,77	43,38	72,12	20,56	78,01	89,39	52,06
Gorontalo	99,22	23,24	52,97	25,96	75,70	94,97	33,08
Sulawesi Barat	86,16	24,38	52,19	12,69	68,96	84,29	39,58
Maluku	99,41	44,74	75,94	40,13	51,39	86,96	64,26
Maluku Utara	98,99	37,00	78,80	49,47	57,72	91,87	63,01
Papua Barat	98,34	31,33	60,90	19,91	52,84	88,24	52,81
Papua	49,18	9,68	26,86	5,23	81,45	80,12	25,23
Indonesia	96,44	33,63	57,98	19,62	71,32	92,78	68,76

Tabel 4.7.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Ruangan Tersendiri menurut Provinsi dan Jenis Ruangan, Tahun 2013

Perkotaan+ Perdesaan							
Provinsi	Ruang tidur	Ruang keluarga	Ruang tamu	Ruang makan	Ruang Campuran	Dapur	Kamar mandi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	98,43	28,93	54,69	17,48	68,39	90,50	70,26
Sumatera Utara	96,65	24,58	51,72	18,56	63,04	92,57	80,85
Sumatera Barat	97,66	23,57	40,17	19,34	76,78	95,12	69,12
Riau	98,58	40,08	52,98	23,76	74,16	94,22	82,11
Jambi	97,99	42,29	59,15	21,79	72,60	92,43	75,24
Sumatera Selatan	95,87	38,84	57,88	27,41	69,08	92,14	67,88
Bengkulu	98,43	47,25	65,67	28,09	62,77	87,35	68,84
Lampung	98,95	52,63	75,96	27,76	68,26	87,57	77,30
Kep. Bangka Belitung	98,96	50,24	72,92	32,26	68,89	95,13	80,20
Kepulauan Riau	98,24	40,70	67,04	31,41	54,83	91,03	91,58
DKI Jakarta	84,34	21,51	47,23	20,08	66,89	80,77	85,44
Jawa Barat	97,26	35,96	50,30	18,08	67,60	95,92	81,91
Jawa Tengah	98,66	36,15	68,43	26,46	74,08	93,74	84,75
DI Yogyakarta	94,13	31,08	56,63	24,98	70,61	87,13	87,55
Jawa Timur	97,17	36,61	74,68	21,59	68,57	94,90	85,00
Banten	96,67	32,73	51,15	19,65	70,47	94,08	81,19
Bali	98,03	19,41	27,37	9,10	33,49	93,08	85,57
Nusa Tenggara Barat	96,53	36,33	43,29	6,69	64,27	87,74	56,54
Nusa Tenggara Timur	90,05	16,54	60,66	21,82	68,84	88,82	58,91
Kalimantan Barat	97,74	38,24	67,65	15,91	68,79	89,28	57,15
Kalimantan Tengah	93,67	25,16	42,57	19,58	80,33	95,69	59,99
Kalimantan Selatan	89,73	24,37	47,56	20,16	82,41	88,12	66,85
Kalimantan Timur	97,24	37,30	67,97	23,71	57,60	93,99	87,81
Sulawesi Utara	99,65	34,40	73,25	41,71	58,69	91,82	82,48
Sulawesi Tengah	96,87	41,32	65,62	26,83	68,57	78,93	62,10
Sulawesi Selatan	91,15	33,32	67,04	24,99	75,94	77,68	65,92
Sulawesi Tenggara	94,55	44,39	73,42	22,85	77,03	88,24	61,54
Gorontalo	99,31	32,47	61,66	31,36	71,72	92,33	47,48
Sulawesi Barat	87,81	27,60	57,09	14,56	71,46	82,93	48,09
Maluku	98,11	42,83	75,28	41,42	49,51	87,71	75,07
Maluku Utara	98,69	41,19	78,17	50,72	55,60	92,18	71,50
Papua Barat	97,97	31,77	62,93	20,71	49,61	87,88	62,73
Papua	60,23	15,41	37,55	11,33	77,01	80,90	4F1,76
Indonesia	95,94	34,28	59,66	21,67	68,70	91,98	78,44

Tabel 4.8 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Mandi Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,77	62,94	70,26
Sumatera Utara	95,00	67,52	80,85
Sumatera Barat	85,70	58,81	69,12
Riau	95,64	73,49	82,11
Jambi	87,78	69,96	75,24
Sumatera Selatan	84,90	58,50	67,88
Bengkulu	89,70	59,25	68,84
Lampung	87,31	74,14	77,30
Kep. Bangka Belitung	90,36	70,76	80,20
Kepulauan Riau	95,03	73,87	91,58
DKI Jakarta	85,44	-	85,44
Jawa Barat	87,44	71,87	81,91
Jawa Tengah	89,55	80,77	84,75
DI Yogyakarta	91,80	78,41	87,55
Jawa Timur	90,32	80,30	85,00
Banten	86,82	68,95	81,21
Bali	90,13	78,06	85,57
Nusa Tenggara Barat	63,14	51,59	56,54
Nusa Tenggara Timur	88,98	51,76	58,91
Kalimantan Barat	81,63	47,20	57,16
Kalimantan Tengah	83,81	47,70	59,99
Kalimantan Selatan	82,63	54,89	66,85
Kalimantan Timur	95,89	74,59	87,81
Sulawesi Utara	90,18	75,98	82,48
Sulawesi Tengah	80,67	56,08	62,10
Sulawesi Selatan	81,62	57,12	65,92
Sulawesi Tenggara	86,20	52,06	61,54
Gorontalo	75,02	33,08	47,48
Sulawesi Barat	79,44	39,58	48,09
Maluku	91,42	64,26	75,07
Maluku Utara	93,67	63,01	71,50
Papua Barat	87,42	52,81	62,75
Papua	88,98	24,83	40,70
Indonesia	88,13	68,69	78,40

Tabel 4.9 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Dapur menurut Provinsi, dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	87,92	91,52	90,50
Sumatera Utara	92,96	92,22	92,57
Sumatera Barat	95,77	94,72	95,12
Riau	96,85	92,55	94,22
Jambi	94,58	91,53	92,43
Sumatera Selatan	92,12	92,14	92,14
Bengkulu	89,86	86,20	87,35
Lampung	87,34	87,65	87,58
Kep. Bangka Belitung	95,84	94,47	95,13
Kepulauan Riau	91,14	90,44	91,03
DKI Jakarta	80,77	-	80,77
Jawa Barat	95,11	97,40	95,92
Jawa Tengah	92,64	94,65	93,74
DI Yogyakarta	82,56	96,94	87,13
Jawa Timur	92,12	97,36	94,90
Banten	93,84	94,59	94,08
Bali	90,14	97,92	93,08
Nusa Tenggara Barat	87,41	87,99	87,74
Nusa Tenggara Timur	83,53	90,08	88,82
Kalimantan Barat	92,96	87,79	89,29
Kalimantan Tengah	93,44	96,84	95,69
Kalimantan Selatan	85,18	90,35	88,12
Kalimantan Timur	92,94	95,71	93,99
Sulawesi Utara	91,46	92,14	91,83
Sulawesi Tengah	85,60	76,77	78,93
Sulawesi Selatan	77,05	78,04	77,68
Sulawesi Tenggara	85,23	89,39	88,24
Gorontalo	87,28	94,97	92,33
Sulawesi Barat	77,92	84,29	82,93
Maluku	88,84	86,96	87,71
Maluku Utara	92,98	91,87	92,18
Papua Barat	86,95	88,24	87,87
Papua	83,08	80,51	81,14
Indonesia	91,17	92,77	91,97

Tabel 4.10 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kamar Dapur Terpisah dari Bangunan Utama menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	8,51	14,35	12,74
Sumatera Utara	8,06	8,99	8,53
Sumatera Barat	16,58	21,60	19,66
Riau	6,62	11,35	9,45
Jambi	8,66	11,65	10,74
Sumatera Selatan	6,22	9,30	8,21
Bengkulu	8,49	11,61	10,60
Lampung	16,05	20,12	19,15
Kep. Bangka Belitung	7,29	11,35	9,38
Kepulauan Riau	3,51	8,07	4,25
DKI Jakarta	11,06	-	11,06
Jawa Barat	9,82	9,09	9,56
Jawa Tengah	12,55	16,96	14,98
DI Yogyakarta	22,95	25,19	23,74
Jawa Timur	14,08	23,94	19,45
Banten	8,05	14,35	10,04
Bali	51,47	72,54	59,85
Nusa Tenggara Barat	33,57	31,64	32,46
Nusa Tenggara Timur	39,50	67,19	62,19
Kalimantan Barat	5,97	15,03	12,30
Kalimantan Tengah	5,33	12,99	10,44
Kalimantan Selatan	12,23	7,02	9,19
Kalimantan Timur	4,14	12,44	7,34
Sulawesi Utara	11,97	17,05	14,73
Sulawesi Tengah	9,39	12,24	11,49
Sulawesi Selatan	6,18	7,50	7,03
Sulawesi Tenggara	7,45	11,24	10,22
Gorontalo	6,52	13,61	11,31
Sulawesi Barat	2,66	5,58	4,99
Maluku	11,37	34,63	25,25
Maluku Utara	7,27	12,16	10,80
Papua Barat	11,27	29,40	24,24
Papua	13,31	57,41	46,24
Indonesia	12,18	18,65	15,45

5 PEMANFAATAN AIR

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa air karena air terutama dibutuhkan untuk minum, masak, mandi, dan mencuci. Dari sisi kesehatan, air bersih harus tersedia untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Air yang tidak bersih akan mengganggu kesehatan dan menimbulkan penyakit. Mengingat pentingnya air tersebut, ketersediaan air bersih menjadi salah satu target dalam sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs).

Bab ini akan mendeskripsikan tentang perilaku rumah tangga dalam memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Hasil Susenas MKP 2013 mengumpulkan informasi mengenai ini, meliputi penggunaan air, akses terhadap sumber air, kualitas air minum, kebiasaan yang dilakukan oleh rumah tangga agar air menjadi aman untuk diminum, dan perilaku penghematan air.

5.1 Sumber Air Untuk Minum, Masak, dan Mandi/ cuci

Sumber air yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dapat berbeda-beda. Sumber air yang digunakan oleh rumah tangga dapat berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, mata air, sungai, danau, waduk, air hujan, dan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas MKP 2013, seluruh rumah tangga (100 persen) yang menggunakan air kemasan bermerek mengatakan bahwa air tersebut digunakan untuk minum. Hanya 9,83 persen rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerek selain digunakan untuk minum juga digunakan untuk masak, dan sekitar 1,51 persen rumah tangga menyatakan air ini digunakan selain untuk minum juga digunakan untuk mandi/cuci (Tabel 5.6.3). Menurut Tabel 5.7.3, rumah tangga yang sumber airnya adalah air isi ulang juga menggunakan air tersebut untuk masak (22,88 persen), dan untuk mandi/cuci (2,02 persen).

Rumah tangga yang sumber airnya berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, air sungai, dan lainnya cenderung memakainya untuk keperluan mandi/cuci (Tabel 5.8.3 sampai Tabel 5.18.3). Contohnya sumber air leding meteran, sekitar 61,38 persen rumah tangga

menggunakan air dari leding meteran untuk minum, sekitar 88,85 persen menggunakannya untuk masak, dan 91,53 persen menggunakannya untuk mandi/cuci. Sedangkan rumah tangga yang sumber air nya berasal dari hidran umum, leding eceran, mata air terlindung, dan air hujan cenderung memakainya untuk keperluan memasak dibanding untuk keperluan lainnya. Contohnya, sekitar 90,52 persen rumah tangga menggunakan leding eceran untuk memasak, sekitar 59,85 persen memakainya untuk minum, dan sekitar 36,19 persen menggunakannya untuk mandi/cuci.

5.2 Lokasi Sumber Air Minum Utama

Kemudahan dalam mendapatkan air menjadi hal yang sangat penting bagi rumah tangga. Kemudahan ini ditentukan dari lokasi sumber air minum utama. Bila lokasi sumber air minum utama berada jauh dari rumah maka rumah tangga memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya dibandingkan bila lokasinya dekat dari rumah seperti di halaman atau di dalam rumah. Susenas MKP 2013 menunjukkan bahwa sekitar 35,33 persen rumah tangga memiliki sumber air minum yang lokasinya di dalam rumah, dan 23,63 persen yang lokasi sumber air minum utamanya berada di halaman rumah (Tabel 5.1). Hasil Susenas MKP menunjukkan masih ada sekitar 41,05 persen rumah tangga yang lokasi sumber air minum utamanya berada di tempat lainnya.

Bila dibandingkan menurut tipe daerah, persentase rumah tangga di perkotaan yang lokasi sumber air minum utamanya di tempat lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (46,50 persen berbanding 35,61 persen). Lokasi sumber air minum utama relatif bervariasi antar provinsi. Menurut Tabel 5.19.3, provinsi yang sebagian besar (60 persen) rumah tangga mengambil air minum utamanya dari tempat lainnya adalah Nusa Tenggara Timur (69,97 persen), Kepulauan Bangka Belitung (68,61 persen), Kepulauan Riau (68,30), DKI Jakarta (64,94), Kalimantan Timur (63,68), dan Gorontalo (60,15). Sedangkan provinsi dengan persentase tertinggi rumah yang lokasi sumber air minum utama di dalam atau di halaman rumah adalah Provinsi DI Yogyakarta (74,88 persen), Provinsi Lampung (73,83 persen), dan Provinsi Sumatera Selatan (72,23 persen).

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013

Tipe Daerah	Di dalam rumah	Di halaman	Tempat lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	37,50	16,01	46,50	100,00
Perdesaan	33,16	31,23	35,61	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	35,33	23,63	41,05	100,00

5.3 Rata-Rata Waktu yang Digunakan untuk Memperoleh Air Minum

Selain lokasi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan air merupakan salah satu indikator akses terhadap air minum. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan air menurut Susenas MKP 2013 adalah waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk mengambil air termasuk waktu untuk mengantri atau menunggu dan perjalanan pulang pergi ke lokasi sumber air. Semakin lama waktu yang digunakan anggota rumah tangga (art) untuk memperoleh air maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses yang rendah terhadap air minum.

Menurut Susenas MKP 2013 (Tabel 5.2), persentase tertinggi dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh air minum adalah 5 menit atau kurang (78,48 persen). Kemudahan akses terhadap air minum ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Dari Tabel 5.2 terlihat bahwa persentase lamanya waktu rumah tangga untuk memperoleh air minum lebih dari 15 menit di perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (4,57 persen berbanding 3,58 persen). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap air minum di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan di perdesaan. Bila dilihat menurut provinsi, persentase tertinggi rumah tangga yang membutuhkan waktu untuk memperoleh air 5 menit atau kurang adalah Provinsi D.I Yogyakarta (91,34 persen) (Tabel 5.20.3). Sedangkan persentase tertinggi rumah tangga yang membutuhkan waktu untuk memperoleh air lebih dari 30 menit adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (9,01 persen).

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Lamanya waktu Untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013

Tipe Daerah	≤5	6-15	16-30	> 30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	74,97	21,45	3,00	0,58	100,00
Perdesaan	81,98	13,45	3,63	0,94	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	78,48	17,44	3,31	0,76	100,00

5.4 Kualitas Air Minum

Air minum harus memenuhi syarat kesehatan agar tidak menimbulkan penyakit. Kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan dapat diketahui melalui pemeriksaan mikrobiologi dan kimia, serta pemeriksaan fisik air. Susenas MKP 2013 mengumpulkan informasi mengenai kualitas air minum melalui pemeriksaan fisik air rumah tangga. Pada Tabel 5.3 ditunjukkan hasil Susenas MKP 2013 bahwa masih ada sebesar 2,84 persen rumah tangga yang menggunakan air tidak jernih/bening atau dengan kata lain lebih dari 90 persen rumah tangga sudah menggunakan air minum dengan kualitas fisik air yang jernih atau bening. Pada tabel tersebut juga ditunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang menggunakan air minum yang berwarna (3,33 persen), berasa (2,11 persen), berbusa (0,65 persen), dan berbau (1,50 persen). Kualitas air minum per provinsi yang dapat dilihat pada Tabel 5.21.3, semua provinsi sudah memiliki persentase rumah tangga yang menggunakan air minum dengan kualitas jernih atau bening lebih dari 90 persen. Provinsi yang memiliki persentase tertinggi kualitas air minumnya jernih/bening adalah Provinsi Bali (99,09 persen), sedangkan provinsi yang memiliki persentase tertinggi air minumnya berwarna adalah Provinsi Kalimantan Tengah (18,48 persen), air minumnya berasa adalah Provinsi Kalimantan Tengah (8,12 persen), air minumnya berbusa adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2,70 persen), air minumnya berbau adalah Provinsi Kalimantan Tengah (5,49 persen).

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kualitas Air Minum, 2013

Tipe Daerah	Tidak jernih atau tidak bening	Berwarna	Berasa	Berbusa	Berbau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	1,91	1,97	1,45	0,57	1,45
Perdesaan	3,76	4,69	2,76	0,72	1,54
Perkotaan+ Perdesaan	2,84	3,33	2,11	0,65	1,50

5.5 Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum

Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum secara fisik belum tentu aman untuk diminum. Oleh karena itu Susenas MKP 2013 mengumpulkan informasi mengenai perilaku rumah tangga terhadap air agar menjadi lebih aman untuk diminum. Berbagai cara yang dilakukan diantaranya adalah merebus atau memasak, menambah penjernih, menyaring dengan kain, menggunakan filter, mengendapkan, dan menjemur menggunakan sinar matahari. Tabel 5.4 memperlihatkan persentase tertinggi adalah rumah tangga yang merebus atau memasak air agar menjadi lebih aman untuk diminum (86,25 persen). Cara lainnya adalah dengan mengendapkan (23,14 persen), atau menyaring dengan kain (7,87 persen). Tidak ada perbedaan antar daerah terhadap perilaku rumah tangga dalam membuat air agar menjadi lebih aman untuk diminum. Kebiasaan merebus atau memasak air agar menjadi lebih aman untuk diminum merupakan kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan. Persentase rumah tangga yang merebus atau memasak air di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (91,15 persen berbanding 81,35 persen).

Tabel 5.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman untuk Diminum, 2013

Tipe Daerah	Merebus atau memasak	Menambah penjernih	Menyaring dengan kain	Menggunakan filter	Mengendapkan	Menggunakan sinar matahari	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	81,35	2,48	7,11	4,00	18,41	1,79	1,06
Perdesaan	91,15	1,63	8,64	2,61	27,86	1,34	0,61
Perkotaan+ Perdesaan	86,25	2,06	7,87	3,30	23,14	1,57	0,83

5.6 Penghematan Air

Penggunaan air yang berlebihan menyebabkan pemborosan. Oleh karenanya perlu dilakukan penghematan air yang dapat dilakukan dengan penggunaan *shower* saat mandi, penyiraman tanaman dengan air yang dilakukan saat pagi hari, dan pemanfaatan air bekas untuk keperluan lainnya. Tabel 5.5 menyajikan informasi mengenai perilaku penghematan air yang dilakukan oleh rumah tangga. Perilaku penghematan air yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga adalah dalam bentuk menyiram tanaman saat pagi hari (17,62 persen). Persentase rumah tangga yang menyiram tanaman di pagi hari di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan (21,80 persen berbanding 13,46 persen). Perilaku penghematan air yang lainnya adalah memanfaatkan air bekas yang lebih banyak dilakukan oleh rumah tangga di daerah perkotaan (9,28 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (6,03 persen). Sedangkan perilaku mandi dengan *shower*, yang merupakan persentase terkecil perilaku penghematan air dibandingkan dengan dua perilaku lainnya, di daerah perkotaan (6,53 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (1,03 persen).

Tabel 5.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah dan Perilaku Hemat Air, 2013

Tipe Daerah	Mandi dengan shower	Menyiram di pagi hari	Memanfaatkan air bekas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	6,53	21,80	9,28
Perdesaan	1,03	13,46	6,03
Perkotaan+ Perdesaan	3,78	17,62	7,65

Tabel 5.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	19,03	-
Sumatera Utara	100,00	17,58	4,67
Sumatera Barat	100,00	16,68	-
Riau	100,00	29,43	-
Jambi	100,00	11,22	1,26
Sumatera Selatan	100,00	16,70	2,11
Bengkulu	100,00	16,07	3,75
Lampung	100,00	12,00	1,74
Kep. Bangka Belitung	100,00	22,72	1,59
Kepulauan Riau	100,00	-	-
DKI Jakarta	100,00	14,72	1,74
Jawa Barat	100,00	12,49	2,67
Jawa Tengah	100,00	7,70	0,41
DI Yogyakarta	100,00	3,74	-
Jawa Timur	100,00	5,07	0,47
Banten	100,00	16,10	3,40
Bali	100,00	5,20	0,11
Nusa Tenggara Barat	100,00	2,11	1,67
Nusa Tenggara Timur	100,00	8,02	3,49
Kalimantan Barat	100,00	20,86	-
Kalimantan Tengah	100,00	10,94	-
Kalimantan Selatan	100,00	8,38	1,47
Kalimantan Timur	100,00	4,86	-
Sulawesi Utara	100,00	6,67	0,70
Sulawesi Tengah	100,00	-	-
Sulawesi Selatan	100,00	-	-
Sulawesi Tenggara	100,00	10,32	-
Gorontalo	100,00	6,38	-
Sulawesi Barat	100,00	-	-
Maluku	100,00	-	-
Maluku Utara	100,00	-	-
Papua Barat	100,00	19,74	-
Papua	100,00	10,95	-
Indonesia	100,00	10,67	1,59

Tabel 5.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	16,57	-
Sumatera Utara	100,00	-	-
Sumatera Barat	100,00	-	-
Riau	100,00	22,51	-
Jambi	100,00	33,59	7,66
Sumatera Selatan	100,00	15,07	7,78
Bengkulu	100,00	-	-
Lampung	100,00	2,93	1,70
Kep. Bangka Belitung	100,00	16,72	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	100,00	4,05	3,19
Jawa Tengah	100,00	6,52	0,79
DI Yogyakarta	100,00	-	-
Jawa Timur	100,00	3,43	-
Banten	100,00	-	-
Bali	100,00	-	-
Nusa Tenggara Barat	100,00	5,02	-
Nusa Tenggara Timur	100,00	-	-
Kalimantan Barat	100,00	10,56	2,87
Kalimantan Tengah	100,00	4,00	-
Kalimantan Selatan	100,00	13,80	-
Kalimantan Timur	100,00	31,40	5,06
Sulawesi Utara	100,00	4,41	-
Sulawesi Tengah	100,00	20,46	12,46
Sulawesi Selatan	100,00	14,64	-
Sulawesi Tenggara	100,00	-	-
Gorontalo	100,00	-	-
Sulawesi Barat	100,00	-	-
Maluku	100,00	-	-
Maluku Utara	100,00	-	-
Papua Barat	100,00	54,97	-
Papua	100,00	18,17	-
Indonesia	100,00	5,32	1,09

Tabel 5.6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Kemasan Bermerek , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	18,26	-
Sumatera Utara	100,00	15,40	4,09
Sumatera Barat	100,00	9,92	-
Riau	100,00	28,28	-
Jambi	100,00	17,63	3,10
Sumatera Selatan	100,00	16,30	3,52
Bengkulu	100,00	6,83	1,59
Lampung	100,00	8,04	1,72
Kep. Bangka Belitung	100,00	20,26	0,94
Kepulauan Riau	100,00	-	-
DKI Jakarta	100,00	14,72	1,74
Jawa Barat	100,00	11,45	2,74
Jawa Tengah	100,00	7,39	0,51
DI Yogyakarta	100,00	3,25	-
Jawa Timur	100,00	4,66	0,35
Banten	100,00	15,73	3,33
Bali	100,00	4,63	0,10
Nusa Tenggara Barat	100,00	2,97	1,18
Nusa Tenggara Timur	100,00	5,71	2,49
Kalimantan Barat	100,00	18,35	0,70
Kalimantan Tengah	100,00	8,59	-
Kalimantan Selatan	100,00	10,55	0,88
Kalimantan Timur	100,00	8,07	0,61
Sulawesi Utara	100,00	6,12	0,53
Sulawesi Tengah	100,00	6,17	3,76
Sulawesi Selatan	100,00	3,34	-
Sulawesi Tenggara	100,00	9,92	-
Gorontalo	100,00	5,12	-
Sulawesi Barat	100,00	-	-
Maluku	100,00	-	-
Maluku Utara	100,00	-	-
Papua Barat	100,00	26,88	-
Papua	100,00	12,12	-
Indonesia	100,00	9,83	1,51

Tabel 5.7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang, 2013

Provinsi	Perkotaan		
	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,77	18,33	0,04
Sumatera Utara	99,83	11,97	0,41
Sumatera Barat	100,00	20,41	3,23
Riau	100,00	37,30	0,89
Jambi	97,34	15,35	0,31
Sumatera Selatan	99,79	23,06	3,58
Bengkulu	100,00	4,97	-
Lampung	99,23	7,08	0,80
Kep. Bangka Belitung	99,55	43,34	1,04
Kepulauan Riau	99,90	28,79	0,37
DKI Jakarta	96,53	24,61	2,92
Jawa Barat	95,17	31,14	3,78
Jawa Tengah	94,66	23,20	0,52
DI Yogyakarta	97,05	13,03	-
Jawa Timur	92,21	21,67	0,21
Banten	93,81	29,07	1,43
Bali	85,70	33,23	0,42
Nusa Tenggara Barat	99,01	7,51	1,76
Nusa Tenggara Timur	99,26	7,55	1,33
Kalimantan Barat	99,53	36,95	-
Kalimantan Tengah	99,66	13,98	0,64
Kalimantan Selatan	99,28	14,84	0,55
Kalimantan Timur	98,59	21,55	1,06
Sulawesi Utara	98,81	20,28	7,22
Sulawesi Tengah	100,00	19,15	2,33
Sulawesi Selatan	99,48	19,69	1,11
Sulawesi Tenggara	99,44	32,27	2,23
Gorontalo	97,60	7,82	-
Sulawesi Barat	98,14	34,81	-
Maluku	100,00	7,15	-
Maluku Utara	100,00	3,74	1,67
Papua Barat	100,00	38,66	0,15
Papua	100,00	62,55	0,09
Indonesia	96,61	25,19	1,89

Tabel 5.7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,54	16,22	1,34
Sumatera Utara	100,00	13,79	1,09
Sumatera Barat	100,00	10,71	1,91
Riau	100,00	21,80	0,86
Jambi	98,74	20,54	0,47
Sumatera Selatan	100,00	23,98	6,69
Bengkulu	100,00	17,10	1,68
Lampung	99,83	10,99	1,21
Kep. Bangka Belitung	100,00	13,97	-
Kepulauan Riau	100,00	26,43	6,38
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	100,00	12,74	4,40
Jawa Tengah	97,03	20,68	0,44
DI Yogyakarta	100,00	32,10	-
Jawa Timur	94,68	13,36	0,11
Banten	100,00	45,81	9,20
Bali	100,00	23,79	23,79
Nusa Tenggara Barat	100,00	7,57	6,53
Nusa Tenggara Timur	100,00	3,82	2,59
Kalimantan Barat	100,00	25,33	2,37
Kalimantan Tengah	100,00	17,39	-
Kalimantan Selatan	99,62	15,03	1,07
Kalimantan Timur	99,86	36,52	3,57
Sulawesi Utara	99,74	13,68	1,60
Sulawesi Tengah	100,00	8,82	0,59
Sulawesi Selatan	100,00	13,52	1,25
Sulawesi Tenggara	100,00	11,86	-
Gorontalo	100,00	9,81	-
Sulawesi Barat	100,00	21,55	-
Maluku	98,61	14,84	-
Maluku Utara	100,00	3,72	3,72
Papua Barat	98,28	32,74	-
Papua	100,00	40,05	-
Indonesia	98,98	17,76	2,30

Tabel 5.7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Isi Ulang, 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	99,66	17,27	0,69
Sumatera Utara	99,89	12,54	0,62
Sumatera Barat	100,00	16,34	2,68
Riau	100,00	31,09	0,88
Jambi	98,02	17,87	0,38
Sumatera Selatan	99,88	23,45	4,90
Bengkulu	100,00	10,75	0,80
Lampung	99,51	8,85	0,98
Kep. Bangka Belitung	99,75	30,25	0,57
Kepulauan Riau	99,90	28,68	0,67
DKI Jakarta	96,53	24,61	2,92
Jawa Barat	96,43	26,34	3,94
Jawa Tengah	95,76	22,02	0,48
DI Yogyakarta	97,42	15,45	-
Jawa Timur	93,06	18,84	0,18
Banten	95,23	32,91	3,21
Bali	86,21	32,89	1,27
Nusa Tenggara Barat	99,38	7,53	3,53
Nusa Tenggara Timur	99,48	6,43	1,71
Kalimantan Barat	99,73	32,02	1,00
Kalimantan Tengah	99,77	15,07	0,43
Kalimantan Selatan	99,44	14,93	0,79
Kalimantan Timur	98,96	25,87	1,78
Sulawesi Utara	99,12	18,11	5,37
Sulawesi Tengah	100,00	14,70	1,58
Sulawesi Selatan	99,67	17,46	1,16
Sulawesi Tenggara	99,65	24,79	1,41
Gorontalo	98,72	8,75	-
Sulawesi Barat	98,97	28,86	-
Maluku	99,66	9,02	-
Maluku Utara	100,00	3,74	2,40
Papua Barat	99,37	36,49	0,09
Papua	100,00	59,65	0,08
Indonesia	97,35	22,88	2,02

Tabel 5.8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,67	88,57	93,68
Sumatera Utara	63,77	91,89	95,75
Sumatera Barat	57,00	93,11	89,58
Riau	9,39	35,54	100,00
Jambi	57,02	96,33	95,84
Sumatera Selatan	82,51	95,26	93,84
Bengkulu	55,23	91,48	99,06
Lampung	50,88	87,98	90,20
Kep. Bangka Belitung	4,19	34,56	100,00
Kepulauan Riau	24,37	85,70	95,69
DKI Jakarta	34,70	83,88	87,43
Jawa Barat	55,62	82,99	92,57
Jawa Tengah	74,34	89,22	90,23
DI Yogyakarta	66,45	73,82	98,18
Jawa Timur	48,97	87,61	88,94
Banten	34,05	78,30	92,80
Bali	53,79	89,39	95,60
Nusa Tenggara Barat	72,05	90,11	82,68
Nusa Tenggara Timur	81,09	97,07	91,48
Kalimantan Barat	20,86	31,38	95,16
Kalimantan Tengah	49,81	93,84	94,87
Kalimantan Selatan	78,23	95,17	94,78
Kalimantan Timur	49,28	91,27	96,66
Sulawesi Utara	58,64	98,91	98,03
Sulawesi Tengah	49,44	78,44	87,73
Sulawesi Selatan	69,50	94,97	87,97
Sulawesi Tenggara	79,22	98,36	99,25
Gorontalo	60,46	94,66	81,59
Sulawesi Barat	88,11	97,63	75,34
Maluku	67,45	96,63	99,14
Maluku Utara	85,91	99,61	93,59
Papua Barat	47,32	85,21	84,87
Papua	58,18	89,77	91,43
Indonesia	55,62	87,38	91,73

Tabel 5.8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	75,90	93,57	86,89
Sumatera Utara	84,51	85,98	81,87
Sumatera Barat	83,33	96,60	88,28
Riau	58,07	74,89	91,56
Jambi	83,23	97,70	95,61
Sumatera Selatan	88,26	95,94	81,96
Bengkulu	61,24	72,19	92,84
Lampung	100,00	93,19	83,86
Kep. Bangka Belitung	77,68	100,00	85,59
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	72,81	94,77	90,63
Jawa Tengah	88,21	95,86	91,56
DI Yogyakarta	91,68	95,56	98,67
Jawa Timur	87,69	97,03	91,66
Banten	47,00	74,18	88,97
Bali	85,53	97,02	96,10
Nusa Tenggara Barat	87,80	98,58	93,49
Nusa Tenggara Timur	94,08	98,65	94,11
Kalimantan Barat	77,34	89,01	84,20
Kalimantan Tengah	83,34	96,45	91,32
Kalimantan Selatan	87,18	96,00	93,43
Kalimantan Timur	70,68	94,09	95,37
Sulawesi Utara	69,79	81,40	87,83
Sulawesi Tengah	82,81	94,90	85,64
Sulawesi Selatan	77,26	93,57	89,60
Sulawesi Tenggara	79,81	88,60	87,00
Gorontalo	72,02	90,35	83,71
Sulawesi Barat	98,10	84,81	68,57
Maluku	100,00	100,00	78,65
Maluku Utara	78,74	87,43	100,00
Papua Barat	66,90	81,65	99,94
Papua	81,42	100,00	100,00
Indonesia	83,81	94,60	90,75

Tabel 5.8.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Meteran , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,21	90,61	90,91
Sumatera Utara	66,10	91,23	94,18
Sumatera Barat	65,50	94,24	89,16
Riau	14,83	39,93	99,06
Jambi	66,69	96,84	95,76
Sumatera Selatan	83,67	95,40	91,44
Bengkulu	58,37	81,40	95,81
Lampung	67,31	89,72	88,08
Kep. Bangka Belitung	26,78	54,67	95,57
Kepulauan Riau	24,16	84,94	95,73
DKI Jakarta	34,70	83,88	87,43
Jawa Barat	57,73	84,44	92,33
Jawa Tengah	78,69	91,31	90,65
DI Yogyakarta	77,10	83,00	98,39
Jawa Timur	57,92	89,78	89,57
Banten	34,59	78,12	92,64
Bali	63,54	91,74	95,76
Nusa Tenggara Barat	76,46	92,49	85,71
Nusa Tenggara Timur	84,75	97,52	92,22
Kalimantan Barat	33,41	44,19	92,72
Kalimantan Tengah	57,27	94,42	94,08
Kalimantan Selatan	80,88	95,42	94,38
Kalimantan Timur	51,61	91,57	96,52
Sulawesi Utara	61,04	95,14	95,83
Sulawesi Tengah	65,21	86,21	86,74
Sulawesi Selatan	71,00	94,70	88,29
Sulawesi Tenggara	79,45	94,53	94,45
Gorontalo	65,86	92,64	82,58
Sulawesi Barat	92,29	92,27	72,51
Maluku	68,39	96,72	98,55
Maluku Utara	84,51	97,23	94,84
Papua Barat	52,67	84,24	88,99
Papua	61,99	91,45	92,83
Indonesia	61,38	88,85	91,53

Tabel 5.9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/ Terminal Air , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	-	-	100,00
Sumatera Barat	-	-	-
Riau	37,20	91,36	24,95
Jambi	100,00	100,00	100,00
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	23,53	100,00	100,00
DKI Jakarta	9,68	100,00	84,97
Jawa Barat	41,47	62,63	100,00
Jawa Tengah	92,39	100,00	24,26
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	100,00	100,00	-
Banten	100,00	100,00	100,00
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	100,00	100,00
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	100,00
Kalimantan Timur	41,18	89,31	89,31
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tengah	-	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	-	-	100,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Indonesia	57,58	87,82	63,71

Tabel 5.9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/ Terminal Air , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	100,00	26,05
Sumatera Utara	100,00	66,61	-
Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00
Riau	-	-	-
Jambi	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	100,00	55,64	55,64
Jawa Tengah	-	-	-
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	-	54,32	100,00
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	100,00	-	-
Nusa Tenggara Timur	100,00	77,95	77,95
Kalimantan Barat	100,00	65,20	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	-
Kalimantan Timur	61,23	99,75	99,75
Sulawesi Utara	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	52,02	100,00	61,04
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	57,41	100,00	85,96
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	100,00	100,00	88,01
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	100,00	100,00	100,00
Papua	38,05	38,05	100,00
Indonesia	73,39	75,75	60,30

Tabel 5.9.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Hidran Umum/ Terminal Air , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	100,00	100,00	26,05
Sumatera Utara	46,21	30,78	53,79
Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00
Riau	37,20	91,36	24,95
Jambi	100,00	100,00	100,00
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	100,00
Kepulauan Riau	23,53	100,00	100,00
DKI Jakarta	9,68	100,00	84,97
Jawa Barat	65,80	59,72	81,56
Jawa Tengah	92,39	100,00	24,26
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	55,51	79,68	44,49
Banten	100,00	100,00	100,00
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	100,00	-	-
Nusa Tenggara Timur	87,21	80,77	80,77
Kalimantan Barat	100,00	65,20	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	100,00	100,00	53,31
Kalimantan Timur	50,61	94,22	94,22
Sulawesi Utara	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Tengah	30,66	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	45,39	87,24	66,01
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	57,41	100,00	85,96
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	100,00	100,00	88,01
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	100,00	100,00	100,00
Papua	38,05	38,05	100,00
Indonesia	63,80	83,07	62,37

Tabel 5.10.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,35	83,07	39,63
Sumatera Utara	79,74	96,63	37,32
Sumatera Barat	8,91	71,87	87,91
Riau	1,60	39,96	72,64
Jambi	62,27	100,00	100,00
Sumatera Selatan	89,40	100,00	44,82
Bengkulu	100,00	100,00	100,00
Lampung	70,92	100,00	28,23
Kep. Bangka Belitung	32,26	67,74	32,26
Kepulauan Riau	22,23	83,90	63,33
DKI Jakarta	39,17	90,44	27,75
Jawa Barat	48,76	88,01	43,02
Jawa Tengah	80,57	94,31	13,16
DI Yogyakarta	20,10	44,36	79,90
Jawa Timur	48,41	95,14	22,33
Banten	40,97	90,90	29,88
Bali	26,62	73,41	90,14
Nusa Tenggara Barat	93,43	20,95	16,55
Nusa Tenggara Timur	26,86	87,67	45,08
Kalimantan Barat	27,43	51,17	65,24
Kalimantan Tengah	21,34	100,00	52,79
Kalimantan Selatan	91,86	98,18	44,34
Kalimantan Timur	52,49	90,10	87,64
Sulawesi Utara	44,14	92,10	88,09
Sulawesi Tengah	29,94	56,47	70,06
Sulawesi Selatan	72,26	92,24	43,18
Sulawesi Tenggara	23,51	65,13	100,00
Gorontalo	84,32	92,24	79,78
Sulawesi Barat	53,82	100,00	-
Maluku	100,00	86,41	38,04
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	54,09	55,41	42,88
Papua	36,01	74,85	75,17
Indonesia	54,19	89,80	34,73

Tabel 5.10.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	92,23	83,59	19,73
Sumatera Utara	92,98	100,00	48,50
Sumatera Barat	59,72	82,93	45,80
Riau	-	37,43	100,00
Jambi	100,00	100,00	71,46
Sumatera Selatan	100,00	100,00	84,37
Bengkulu	49,97	68,47	79,50
Lampung	64,40	64,40	90,53
Kep. Bangka Belitung	32,58	32,58	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	65,72	95,83	25,35
Jawa Tengah	91,41	92,49	17,29
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	86,92	97,37	57,80
Banten	47,48	88,05	51,67
Bali	80,23	87,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	80,53	90,79	54,95
Nusa Tenggara Timur	84,54	90,77	64,80
Kalimantan Barat	47,26	89,63	64,88
Kalimantan Tengah	100,00	-	-
Kalimantan Selatan	87,54	95,94	32,11
Kalimantan Timur	18,11	93,79	83,50
Sulawesi Utara	100,00	65,04	65,04
Sulawesi Tengah	73,99	85,10	100,00
Sulawesi Selatan	82,26	80,57	17,13
Sulawesi Tenggara	93,34	97,71	84,12
Gorontalo	90,39	96,40	66,77
Sulawesi Barat	100,00	100,00	30,63
Maluku	86,56	82,62	33,10
Maluku Utara	79,34	79,34	100,00
Papua Barat	53,65	53,65	46,35
Papua	-	-	-
Indonesia	76,89	92,70	40,58

Tabel 5.10.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Leding Eceran , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	69,67	83,35	28,73
Sumatera Utara	81,76	97,14	39,02
Sumatera Barat	38,73	78,36	63,20
Riau	1,24	39,39	78,84
Jambi	66,93	100,00	96,48
Sumatera Selatan	91,21	100,00	51,59
Bengkulu	53,14	70,46	80,80
Lampung	68,63	87,49	50,11
Kep. Bangka Belitung	32,48	43,57	78,84
Kepulauan Riau	22,23	83,90	63,33
DKI Jakarta	39,17	90,44	27,75
Jawa Barat	54,13	90,49	37,42
Jawa Tengah	84,10	93,72	14,51
DI Yogyakarta	76,00	83,28	93,96
Jawa Timur	57,32	95,66	30,54
Banten	42,09	90,40	33,64
Bali	47,77	79,01	94,03
Nusa Tenggara Barat	89,02	44,80	29,66
Nusa Tenggara Timur	66,05	89,77	58,48
Kalimantan Barat	33,39	62,73	65,13
Kalimantan Tengah	25,87	94,25	49,75
Kalimantan Selatan	89,98	97,20	39,01
Kalimantan Timur	46,55	90,74	86,92
Sulawesi Utara	48,04	90,21	86,48
Sulawesi Tengah	64,31	78,80	93,42
Sulawesi Selatan	74,47	89,66	37,42
Sulawesi Tenggara	62,42	83,28	91,15
Gorontalo	87,20	94,21	73,61
Sulawesi Barat	79,55	100,00	17,07
Maluku	95,45	85,13	36,36
Maluku Utara	79,34	79,34	100,00
Papua Barat	53,94	54,82	44,04
Papua	34,13	70,94	76,47
Indonesia	59,85	90,52	36,19

Tabel 5.11.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/ Pompa , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	27,95	75,86	93,17
Sumatera Utara	62,15	93,24	97,28
Sumatera Barat	32,15	76,11	92,86
Riau	24,41	70,82	97,25
Jambi	17,42	54,29	97,15
Sumatera Selatan	60,90	71,31	98,54
Bengkulu	65,86	99,16	100,00
Lampung	44,67	87,11	93,97
Kep. Bangka Belitung	39,74	84,46	90,06
Kepulauan Riau	39,17	85,80	100,00
DKI Jakarta	27,09	60,23	98,59
Jawa Barat	49,97	78,49	98,43
Jawa Tengah	62,66	77,76	94,56
DI Yogyakarta	62,65	82,38	96,24
Jawa Timur	64,36	84,59	95,79
Banten	41,51	80,72	98,68
Bali	25,03	75,23	97,33
Nusa Tenggara Barat	57,61	94,51	93,98
Nusa Tenggara Timur	44,91	84,63	94,76
Kalimantan Barat	15,86	34,74	97,12
Kalimantan Tengah	37,60	91,13	89,58
Kalimantan Selatan	71,92	87,89	100,00
Kalimantan Timur	21,32	54,26	98,72
Sulawesi Utara	44,51	89,98	96,77
Sulawesi Tengah	47,63	85,68	97,36
Sulawesi Selatan	48,91	77,98	99,15
Sulawesi Tenggara	43,57	71,76	96,19
Gorontalo	38,67	75,32	92,33
Sulawesi Barat	29,86	60,05	87,69
Maluku	63,71	97,84	100,00
Maluku Utara	96,19	96,19	100,00
Papua Barat	26,01	47,02	98,47
Papua	12,34	36,93	97,49
Indonesia	47,38	77,05	97,34

Tabel 5.11.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/ Pompa , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	66,79	90,38	89,69
Sumatera Utara	77,14	90,07	93,83
Sumatera Barat	77,14	90,05	93,81
Riau	48,92	78,05	94,72
Jambi	47,51	55,17	94,67
Sumatera Selatan	73,65	83,16	88,49
Bengkulu	86,45	100,00	95,60
Lampung	81,59	90,22	90,06
Kep. Bangka Belitung	64,98	97,36	90,26
Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	74,65	93,51	97,64
Jawa Tengah	76,24	85,81	94,59
DI Yogyakarta	95,57	95,57	100,00
Jawa Timur	81,64	93,68	96,52
Banten	71,26	88,95	91,59
Bali	78,19	98,02	98,40
Nusa Tenggara Barat	91,41	96,15	92,52
Nusa Tenggara Timur	91,07	94,68	94,25
Kalimantan Barat	58,38	67,06	98,06
Kalimantan Tengah	77,61	90,49	92,67
Kalimantan Selatan	83,39	91,75	84,58
Kalimantan Timur	57,30	77,21	87,29
Sulawesi Utara	70,31	92,42	95,40
Sulawesi Tengah	82,17	92,52	82,83
Sulawesi Selatan	83,23	96,22	97,43
Sulawesi Tenggara	86,85	92,49	95,59
Gorontalo	75,36	93,26	98,94
Sulawesi Barat	75,20	77,39	88,40
Maluku	92,31	100,00	95,52
Maluku Utara	92,69	92,69	95,78
Papua Barat	-	19,28	96,02
Papua	52,31	80,95	98,05
Indonesia	76,95	90,65	94,97

Tabel 5.11.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Bor/ Pompa , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	52,05	84,87	91,01
Sumatera Utara	69,83	91,62	95,51
Sumatera Barat	51,15	82,00	93,26
Riau	33,25	73,43	96,33
Jambi	27,93	54,59	96,29
Sumatera Selatan	70,34	80,08	91,11
Bengkulu	72,68	99,44	98,54
Lampung	63,88	88,73	91,94
Kep. Bangka Belitung	49,02	89,21	90,13
Kepulauan Riau	40,21	86,05	100,00
DKI Jakarta	27,09	60,23	98,59
Jawa Barat	55,71	81,98	98,25
Jawa Tengah	68,66	81,31	94,57
DI Yogyakarta	67,67	84,39	96,81
Jawa Timur	73,31	89,30	96,17
Banten	46,50	82,10	97,49
Bali	33,92	79,04	97,51
Nusa Tenggara Barat	80,50	95,62	92,99
Nusa Tenggara Timur	73,60	90,88	94,44
Kalimantan Barat	46,20	57,80	97,79
Kalimantan Tengah	54,39	90,86	90,87
Kalimantan Selatan	81,48	91,11	87,15
Kalimantan Timur	37,63	64,67	93,54
Sulawesi Utara	53,89	90,87	96,27
Sulawesi Tengah	64,36	88,99	90,32
Sulawesi Selatan	70,00	89,19	98,10
Sulawesi Tenggara	61,73	80,46	95,94
Gorontalo	51,93	81,80	94,72
Sulawesi Barat	49,61	67,61	88,00
Maluku	79,90	99,06	97,47
Maluku Utara	93,37	93,37	96,60
Papua Barat	14,19	34,41	97,36
Papua	21,19	46,67	97,61
Indonesia	57,61	81,75	96,52

Tabel 5.12.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	43,56	79,98	98,83
Sumatera Utara	46,94	85,46	98,72
Sumatera Barat	49,69	86,33	95,71
Riau	33,83	68,48	98,15
Jambi	57,83	89,15	95,31
Sumatera Selatan	69,13	84,34	98,59
Bengkulu	52,94	96,03	99,15
Lampung	78,46	94,90	96,03
Kep. Bangka Belitung	51,89	74,24	93,26
Kepulauan Riau	47,23	78,61	97,93
DKI Jakarta	3,17	18,12	100,00
Jawa Barat	75,60	91,11	96,63
Jawa Tengah	75,92	82,19	97,43
DI Yogyakarta	77,71	86,24	99,49
Jawa Timur	65,07	77,08	95,43
Banten	69,30	82,58	98,42
Bali	53,31	85,07	89,50
Nusa Tenggara Barat	68,05	91,20	86,69
Nusa Tenggara Timur	62,23	93,82	100,00
Kalimantan Barat	17,06	35,29	94,62
Kalimantan Tengah	27,57	47,25	93,79
Kalimantan Selatan	62,91	86,99	98,90
Kalimantan Timur	37,10	59,76	89,40
Sulawesi Utara	52,80	87,46	95,81
Sulawesi Tengah	49,23	81,16	92,51
Sulawesi Selatan	53,29	72,90	97,97
Sulawesi Tenggara	71,11	89,01	94,94
Gorontalo	61,84	81,77	95,36
Sulawesi Barat	54,11	75,43	95,60
Maluku	49,08	91,51	93,80
Maluku Utara	68,54	77,51	98,88
Papua Barat	30,82	51,88	99,53
Papua	12,35	36,58	96,33
Indonesia	66,58	83,03	96,48

Tabel 5.12.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,01	92,48	96,89
Sumatera Utara	81,50	94,01	88,65
Sumatera Barat	79,46	94,41	89,95
Riau	76,40	88,01	90,78
Jambi	88,63	97,93	93,69
Sumatera Selatan	90,19	96,24	90,29
Bengkulu	89,18	98,05	96,30
Lampung	93,08	97,34	97,58
Kep. Bangka Belitung	70,50	94,99	72,96
Kepulauan Riau	91,39	91,66	88,62
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	85,28	91,08	96,05
Jawa Tengah	83,62	89,63	95,99
DI Yogyakarta	98,10	98,10	98,52
Jawa Timur	89,76	95,96	93,99
Banten	85,98	91,03	88,03
Bali	73,44	97,84	95,45
Nusa Tenggara Barat	89,85	97,03	93,78
Nusa Tenggara Timur	90,33	92,80	93,24
Kalimantan Barat	52,01	66,22	93,55
Kalimantan Tengah	82,06	96,95	82,01
Kalimantan Selatan	77,80	95,65	85,67
Kalimantan Timur	61,52	77,71	85,19
Sulawesi Utara	80,08	97,76	97,24
Sulawesi Tengah	74,40	83,52	90,39
Sulawesi Selatan	85,10	92,20	97,27
Sulawesi Tenggara	90,99	91,98	96,59
Gorontalo	76,33	88,55	91,04
Sulawesi Barat	84,47	89,45	93,87
Maluku	85,03	89,54	77,31
Maluku Utara	90,46	92,78	94,36
Papua Barat	50,46	71,71	99,03
Papua	68,95	76,35	94,74
Indonesia	85,40	92,91	93,98

Tabel 5.12.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Terlindung , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	68,36	89,25	97,39
Sumatera Utara	63,31	89,51	93,94
Sumatera Barat	67,93	91,28	92,18
Riau	62,81	81,77	93,14
Jambi	82,54	96,19	94,01
Sumatera Selatan	83,38	92,39	92,97
Bengkulu	75,56	97,29	97,37
Lampung	89,32	96,71	97,18
Kep. Bangka Belitung	61,49	84,94	82,79
Kepulauan Riau	57,92	81,77	95,68
DKI Jakarta	3,17	18,12	100,00
Jawa Barat	79,32	91,10	96,41
Jawa Tengah	79,92	86,05	96,68
DI Yogyakarta	82,53	89,04	99,26
Jawa Timur	78,29	87,19	94,66
Banten	79,42	87,71	92,11
Bali	57,89	87,98	90,86
Nusa Tenggara Barat	80,01	94,40	90,58
Nusa Tenggara Timur	83,12	93,06	94,98
Kalimantan Barat	39,18	54,86	93,94
Kalimantan Tengah	71,49	87,31	84,30
Kalimantan Selatan	71,09	91,74	91,64
Kalimantan Timur	51,42	70,29	86,93
Sulawesi Utara	69,38	93,72	96,68
Sulawesi Tengah	70,50	83,16	90,72
Sulawesi Selatan	76,66	87,08	97,45
Sulawesi Tenggara	87,15	91,41	96,27
Gorontalo	72,20	86,62	92,27
Sulawesi Barat	75,56	85,33	94,38
Maluku	74,93	90,09	81,94
Maluku Utara	86,86	90,28	95,10
Papua Barat	43,35	64,54	99,21
Papua	36,40	53,48	95,66
Indonesia	76,75	88,37	95,13

Tabel 5.13.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,44	93,50	100,00
Sumatera Utara	52,98	72,74	91,34
Sumatera Barat	48,01	69,50	87,15
Riau	34,35	56,34	96,33
Jambi	84,53	92,84	96,68
Sumatera Selatan	57,96	72,68	95,82
Bengkulu	80,54	95,07	100,00
Lampung	81,52	98,30	94,79
Kep. Bangka Belitung	51,13	58,88	94,41
Kepulauan Riau	61,67	70,78	88,97
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	82,04	92,28	94,34
Jawa Tengah	78,81	86,12	99,32
DI Yogyakarta	94,31	89,57	85,84
Jawa Timur	61,60	72,74	92,50
Banten	58,05	88,85	62,17
Bali	62,98	90,28	88,94
Nusa Tenggara Barat	64,69	77,37	98,64
Nusa Tenggara Timur	61,74	76,33	100,00
Kalimantan Barat	15,38	23,56	99,81
Kalimantan Tengah	35,78	45,48	79,83
Kalimantan Selatan	36,73	67,14	98,30
Kalimantan Timur	22,50	59,61	100,00
Sulawesi Utara	57,97	75,44	93,41
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	39,57	48,37	100,00
Sulawesi Tenggara	41,75	64,82	100,00
Gorontalo	46,80	55,26	100,00
Sulawesi Barat	32,50	52,81	100,00
Maluku	22,81	29,04	100,00
Maluku Utara	18,16	75,65	100,00
Papua Barat	1,47	7,68	100,00
Papua	31,61	33,91	86,34
Indonesia	63,07	78,29	92,68

Tabel 5.13.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,23	88,18	95,63
Sumatera Utara	73,04	77,25	87,96
Sumatera Barat	81,52	90,22	89,54
Riau	47,15	53,06	92,86
Jambi	76,70	88,31	85,68
Sumatera Selatan	89,43	92,06	82,81
Bengkulu	89,85	95,58	91,85
Lampung	91,50	95,72	96,78
Kep. Bangka Belitung	55,95	83,26	90,99
Kepulauan Riau	91,68	90,22	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	83,40	88,71	91,66
Jawa Tengah	82,78	92,10	93,13
DI Yogyakarta	96,76	96,76	100,00
Jawa Timur	91,27	91,19	87,15
Banten	86,38	96,03	92,02
Bali	70,05	100,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	76,19	79,45	91,22
Nusa Tenggara Timur	82,44	84,40	91,98
Kalimantan Barat	36,05	37,97	92,92
Kalimantan Tengah	75,87	88,32	84,38
Kalimantan Selatan	70,63	82,26	92,66
Kalimantan Timur	45,17	63,98	97,28
Sulawesi Utara	80,91	91,62	97,08
Sulawesi Tengah	68,11	82,62	91,95
Sulawesi Selatan	81,93	90,18	97,59
Sulawesi Tenggara	88,79	92,06	97,89
Gorontalo	56,00	73,34	93,79
Sulawesi Barat	53,38	59,77	96,75
Maluku	42,16	39,41	95,66
Maluku Utara	74,39	76,41	95,44
Papua Barat	45,09	55,24	98,08
Papua	57,81	57,94	98,74
Indonesia	77,64	84,19	92,14

Tabel 5.13.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumur Tak Terlindung , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	73,77	89,07	96,36
Sumatera Utara	68,37	76,20	88,74
Sumatera Barat	72,02	84,35	88,86
Riau	45,58	53,46	93,28
Jambi	77,53	88,79	86,85
Sumatera Selatan	83,75	88,57	85,16
Bengkulu	88,34	95,50	93,17
Lampung	90,36	96,01	96,55
Kep. Bangka Belitung	54,64	76,64	91,92
Kepulauan Riau	75,40	79,67	94,01
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	82,84	90,17	92,75
Jawa Tengah	81,72	90,50	94,78
DI Yogyakarta	95,45	92,93	92,45
Jawa Timur	83,60	86,42	88,53
Banten	76,74	93,58	81,86
Bali	65,61	93,91	93,07
Nusa Tenggara Barat	73,03	78,88	93,26
Nusa Tenggara Timur	81,09	83,87	92,50
Kalimantan Barat	30,64	34,20	94,73
Kalimantan Tengah	71,23	83,37	83,86
Kalimantan Selatan	56,99	76,18	94,93
Kalimantan Timur	39,92	62,97	97,91
Sulawesi Utara	74,53	87,12	96,05
Sulawesi Tengah	67,26	81,59	92,05
Sulawesi Selatan	76,29	84,61	97,91
Sulawesi Tenggara	83,01	88,71	98,15
Gorontalo	54,77	70,92	94,62
Sulawesi Barat	50,40	58,78	97,21
Maluku	40,05	38,28	96,13
Maluku Utara	70,71	76,36	95,74
Papua Barat	38,28	47,82	98,38
Papua	50,75	51,45	95,40
Indonesia	74,16	82,78	92,27

Tabel 5.14.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	91,77	93,35	70,31
Sumatera Utara	86,74	96,22	89,67
Sumatera Barat	62,57	88,70	89,19
Riau	86,60	84,02	40,83
Jambi	6,65	6,65	100,00
Sumatera Selatan	60,59	60,59	100,00
Bengkulu	88,46	99,06	99,06
Lampung	61,10	93,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,18	59,78	68,73
Kepulauan Riau	70,92	85,62	97,18
DKI Jakarta	28,76	28,76	100,00
Jawa Barat	91,94	98,12	84,68
Jawa Tengah	86,79	94,13	83,52
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	87,90	92,38	48,24
Banten	80,32	100,00	100,00
Bali	98,43	39,70	38,04
Nusa Tenggara Barat	97,71	96,98	89,04
Nusa Tenggara Timur	87,65	83,75	80,71
Kalimantan Barat	47,83	47,83	100,00
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	82,60	86,48	32,81
Sulawesi Utara	81,16	93,33	98,86
Sulawesi Tengah	59,36	89,04	100,00
Sulawesi Selatan	74,51	94,05	89,94
Sulawesi Tenggara	85,26	93,29	91,50
Gorontalo	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Barat	85,18	85,18	100,00
Maluku	94,19	95,75	62,38
Maluku Utara	89,57	100,00	100,00
Papua Barat	65,02	86,70	94,03
Papua	64,52	76,45	100,00
Indonesia	88,47	91,27	74,18

Tabel 5.14.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,24	91,53	80,41
Sumatera Utara	98,25	98,43	88,36
Sumatera Barat	89,52	94,30	78,51
Riau	71,74	87,11	48,99
Jambi	85,42	60,63	63,48
Sumatera Selatan	95,67	95,67	96,46
Bengkulu	92,71	97,21	69,19
Lampung	90,88	91,47	85,85
Kep. Bangka Belitung	24,77	24,90	84,37
Kepulauan Riau	76,50	86,92	92,13
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	96,57	97,54	95,00
Jawa Tengah	94,36	95,00	95,85
DI Yogyakarta	98,45	98,45	100,00
Jawa Timur	95,36	96,68	90,36
Banten	98,32	100,00	100,00
Bali	94,77	89,85	87,17
Nusa Tenggara Barat	93,68	92,98	89,92
Nusa Tenggara Timur	99,01	98,74	91,07
Kalimantan Barat	94,20	94,95	86,37
Kalimantan Tengah	96,36	99,18	84,97
Kalimantan Selatan	84,19	84,19	47,23
Kalimantan Timur	88,27	98,68	95,81
Sulawesi Utara	91,06	96,68	96,98
Sulawesi Tengah	90,53	94,02	88,01
Sulawesi Selatan	97,54	97,62	94,88
Sulawesi Tenggara	90,85	98,37	95,24
Gorontalo	87,58	94,67	81,14
Sulawesi Barat	96,83	95,85	90,13
Maluku	94,18	98,08	92,31
Maluku Utara	91,45	96,58	87,18
Papua Barat	91,70	95,63	74,84
Papua	97,15	96,70	57,60
Indonesia	94,78	95,93	91,04

Tabel 5.14.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Terlindung , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	90,43	91,74	79,21
Sumatera Utara	96,85	98,16	88,52
Sumatera Barat	86,46	93,67	79,72
Riau	77,89	85,83	45,61
Jambi	80,42	57,20	65,80
Sumatera Selatan	94,71	94,71	96,56
Bengkulu	91,96	97,53	74,42
Lampung	88,97	91,62	86,75
Kep. Bangka Belitung	11,08	49,28	73,44
Kepulauan Riau	74,20	86,38	94,21
DKI Jakarta	28,76	28,76	100,00
Jawa Barat	94,60	97,79	90,60
Jawa Tengah	93,26	94,88	94,06
DI Yogyakarta	98,50	98,50	100,00
Jawa Timur	93,44	95,57	79,49
Banten	93,22	100,00	100,00
Bali	96,14	71,07	68,77
Nusa Tenggara Barat	94,76	94,04	89,68
Nusa Tenggara Timur	98,76	98,41	90,85
Kalimantan Barat	90,50	91,19	87,46
Kalimantan Tengah	96,36	99,18	84,97
Kalimantan Selatan	84,19	84,19	47,23
Kalimantan Timur	87,72	97,49	89,66
Sulawesi Utara	88,93	95,96	97,39
Sulawesi Tengah	87,63	93,56	89,12
Sulawesi Selatan	95,93	97,37	94,54
Sulawesi Tenggara	90,09	97,68	94,73
Gorontalo	87,77	94,75	81,43
Sulawesi Barat	95,77	94,87	91,03
Maluku	94,18	97,35	82,95
Maluku Utara	91,41	96,65	87,43
Papua Barat	79,86	91,66	83,36
Papua	95,19	95,48	60,15
Indonesia	93,33	94,86	87,17

Tabel 5.15.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	54,56	96,24	98,11
Sumatera Utara	88,82	96,65	93,81
Sumatera Barat	81,52	81,22	78,56
Riau	64,06	64,06	35,94
Jambi	100,00	100,00	100,00
Sumatera Selatan	78,60	100,00	100,00
Bengkulu	100,00	100,00	100,00
Lampung	100,00	100,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,09	68,67	92,10
Kepulauan Riau	43,56	78,25	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	72,14	72,14	95,44
Jawa Tengah	66,70	77,18	82,12
DI Yogyakarta	48,36	48,36	83,42
Jawa Timur	68,07	77,54	52,36
Banten	100,00	100,00	100,00
Bali	81,24	78,25	44,80
Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	90,03
Nusa Tenggara Timur	38,92	38,92	100,00
Kalimantan Barat	58,59	58,59	93,41
Kalimantan Tengah	90,60	40,51	2,73
Kalimantan Selatan	91,93	83,97	92,04
Kalimantan Timur	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Utara	24,65	61,62	100,00
Sulawesi Tengah	65,72	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	75,32	93,12	78,48
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	100,00	100,00	100,00
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	74,71	74,71	100,00
Indonesia	72,35	77,90	85,45

Tabel 5.15.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	81,82	89,01	95,26
Sumatera Utara	96,65	96,38	80,69
Sumatera Barat	87,87	89,77	77,01
Riau	56,31	11,91	54,14
Jambi	94,40	87,66	84,15
Sumatera Selatan	94,49	89,55	88,71
Bengkulu	89,14	90,05	82,57
Lampung	78,32	80,10	94,61
Kep. Bangka Belitung	17,34	17,28	100,00
Kepulauan Riau	83,98	100,00	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	87,65	88,20	94,30
Jawa Tengah	89,25	89,75	92,10
DI Yogyakarta	80,28	80,28	100,00
Jawa Timur	92,24	93,33	83,81
Banten	90,89	92,45	80,87
Bali	97,00	92,59	83,04
Nusa Tenggara Barat	23,15	24,75	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,65	96,33	92,87
Kalimantan Barat	79,32	81,85	77,06
Kalimantan Tengah	90,75	81,19	70,80
Kalimantan Selatan	74,21	74,21	86,82
Kalimantan Timur	85,00	94,07	96,81
Sulawesi Utara	98,25	95,48	90,00
Sulawesi Tengah	97,11	92,70	90,65
Sulawesi Selatan	98,70	98,70	98,83
Sulawesi Tenggara	94,54	94,54	96,87
Gorontalo	89,32	89,32	86,56
Sulawesi Barat	96,70	97,96	65,59
Maluku	82,60	82,60	100,00
Maluku Utara	81,42	96,52	100,00
Papua Barat	73,00	73,00	81,07
Papua	94,62	90,75	69,13
Indonesia	89,61	89,44	86,54

Tabel 5.15.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Mata Air Tak Terlindung , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	78,61	89,86	95,59
Sumatera Utara	96,40	96,39	81,12
Sumatera Barat	87,20	88,87	77,17
Riau	57,37	19,03	51,65
Jambi	94,46	87,79	84,32
Sumatera Selatan	93,67	90,09	89,29
Bengkulu	89,21	90,11	82,69
Lampung	78,52	80,29	94,66
Kep. Bangka Belitung	20,12	28,48	98,28
Kepulauan Riau	66,64	90,67	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	85,39	85,86	94,46
Jawa Tengah	85,98	87,93	90,66
DI Yogyakarta	72,84	72,84	96,14
Jawa Timur	89,89	91,79	80,74
Banten	91,90	93,29	83,00
Bali	94,51	90,33	77,01
Nusa Tenggara Barat	62,00	62,80	94,96
Nusa Tenggara Timur	95,20	95,87	92,93
Kalimantan Barat	77,76	80,09	78,29
Kalimantan Tengah	90,72	73,51	57,95
Kalimantan Selatan	80,84	77,86	88,78
Kalimantan Timur	87,38	95,01	97,31
Sulawesi Utara	94,14	93,59	90,56
Sulawesi Tengah	94,91	93,22	91,30
Sulawesi Selatan	96,06	98,07	96,53
Sulawesi Tenggara	94,54	94,54	96,87
Gorontalo	89,32	89,32	86,56
Sulawesi Barat	96,70	97,96	65,59
Maluku	84,51	84,51	100,00
Maluku Utara	81,42	96,52	100,00
Papua Barat	73,00	73,00	81,07
Papua	94,59	90,72	69,18
Indonesia	87,83	88,25	86,43

Tabel 5.16.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,43	29,10	100,00
Sumatera Utara	6,84	12,14	97,88
Sumatera Barat	6,36	25,79	100,00
Riau	6,49	21,63	95,06
Jambi	-	3,93	100,00
Sumatera Selatan	4,72	31,19	100,00
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,12	27,03	100,00
Kepulauan Riau	41,10	41,10	58,90
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	11,86	11,86	100,00
Jawa Tengah	13,06	33,08	100,00
DI Yogyakarta	41,66	41,66	100,00
Jawa Timur	0,29	1,83	100,00
Banten	6,82	10,04	100,00
Bali	0,57	1,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	-	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,70	22,70	100,00
Kalimantan Barat	4,47	10,93	100,00
Kalimantan Tengah	30,52	44,30	97,59
Kalimantan Selatan	32,00	34,39	98,28
Kalimantan Timur	18,27	36,95	99,05
Sulawesi Utara	-	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	46,91	74,13	100,00
Sulawesi Selatan	48,94	48,50	66,04
Sulawesi Tenggara	-	-	100,00
Gorontalo	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	100,00
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	16,67	100,00	12,73
Papua	87,08	91,12	100,00
Indonesia	9,01	15,29	99,40

Tabel 5.16.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	43,94	41,60	93,06
Sumatera Utara	29,72	37,24	98,20
Sumatera Barat	25,42	28,86	98,80
Riau	4,14	6,28	98,69
Jambi	24,77	31,96	99,32
Sumatera Selatan	26,60	30,04	99,09
Bengkulu	24,67	25,06	100,00
Lampung	22,33	23,24	99,53
Kep. Bangka Belitung	6,48	10,55	100,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	28,48	32,02	100,00
Jawa Tengah	27,36	40,44	95,78
DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00
Jawa Timur	4,55	5,76	100,00
Banten	13,16	20,02	98,11
Bali	29,46	29,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,58	3,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,65	44,25	97,28
Kalimantan Barat	41,41	40,57	98,00
Kalimantan Tengah	73,09	78,12	99,31
Kalimantan Selatan	51,98	56,61	100,00
Kalimantan Timur	33,13	49,02	99,16
Sulawesi Utara	15,88	12,19	93,91
Sulawesi Tengah	63,10	71,83	98,21
Sulawesi Selatan	43,42	43,04	97,91
Sulawesi Tenggara	31,22	32,64	100,00
Gorontalo	36,46	33,74	94,10
Sulawesi Barat	41,58	46,18	95,84
Maluku	35,77	35,77	98,90
Maluku Utara	63,67	65,36	95,13
Papua Barat	82,02	81,13	95,92
Papua	17,96	25,82	99,56
Indonesia	30,61	34,57	98,70

Tabel 5.16.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Sungai, 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,28	40,64	93,60
Sumatera Utara	27,27	34,55	98,17
Sumatera Barat	23,43	28,53	98,93
Riau	4,37	7,78	98,34
Jambi	23,21	30,20	99,36
Sumatera Selatan	23,32	30,22	99,22
Bengkulu	24,67	25,06	100,00
Lampung	20,66	21,50	99,57
Kep. Bangka Belitung	6,96	11,73	100,00
Kepulauan Riau	41,10	41,10	58,90
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	21,85	23,98	100,00
Jawa Tengah	22,35	37,86	97,26
DI Yogyakarta	44,05	44,05	100,00
Jawa Timur	3,15	4,46	100,00
Banten	10,67	16,10	98,85
Bali	12,81	13,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,04	2,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,00	43,64	97,36
Kalimantan Barat	35,61	35,92	98,32
Kalimantan Tengah	67,57	73,74	99,09
Kalimantan Selatan	48,37	52,60	99,69
Kalimantan Timur	30,33	46,75	99,14
Sulawesi Utara	13,21	10,13	94,93
Sulawesi Tengah	62,73	71,89	98,25
Sulawesi Selatan	43,89	43,51	95,19
Sulawesi Tenggara	27,25	28,49	100,00
Gorontalo	34,73	32,15	94,38
Sulawesi Barat	41,58	46,18	95,84
Maluku	20,40	20,40	99,37
Maluku Utara	63,67	65,36	95,13
Papua Barat	80,89	81,46	94,48
Papua	19,33	27,11	99,57
Indonesia	26,48	30,88	98,83

Tabel 5.17.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	49,66	57,09	78,57
Sumatera Utara	43,94	48,08	65,11
Sumatera Barat	47,86	77,53	97,91
Riau	65,19	89,27	42,68
Jambi	76,72	92,42	47,93
Sumatera Selatan	70,80	76,39	57,77
Bengkulu	-	-	100,00
Lampung	100,00	100,00	43,39
Kep. Bangka Belitung	22,76	42,42	77,20
Kepulauan Riau	22,60	27,03	90,38
DKI Jakarta	76,20	100,00	-
Jawa Barat	12,43	12,43	100,00
Jawa Tengah	27,57	27,57	72,43
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	45,28	70,58	93,51
Banten	30,08	30,08	83,62
Bali	-	40,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,44	11,44	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,97	23,99	88,48
Kalimantan Barat	71,47	90,35	24,90
Kalimantan Tengah	64,81	65,62	41,02
Kalimantan Selatan	7,78	23,82	83,96
Kalimantan Timur	20,10	40,59	94,73
Sulawesi Utara	48,87	48,87	100,00
Sulawesi Tengah	-	100,00	-
Sulawesi Selatan	45,85	48,80	79,78
Sulawesi Tenggara	2,21	6,27	100,00
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	100,00
Maluku	74,24	72,11	100,00
Maluku Utara	72,08	79,67	62,17
Papua Barat	31,29	67,82	60,22
Papua	49,77	54,97	69,51
Indonesia	50,39	65,65	62,49

Tabel 5.17.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	45,85	50,61	67,40
Sumatera Utara	64,49	63,85	68,55
Sumatera Barat	52,84	60,18	70,86
Riau	87,27	96,07	42,92
Jambi	86,36	89,97	32,85
Sumatera Selatan	84,60	89,23	38,96
Bengkulu	9,66	8,87	96,74
Lampung	30,59	64,29	59,56
Kep. Bangka Belitung	11,57	19,74	93,80
Kepulauan Riau	72,85	72,85	93,98
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	16,46	24,18	93,20
Jawa Tengah	53,52	63,79	89,78
DI Yogyakarta	69,84	69,84	98,48
Jawa Timur	34,38	52,62	84,86
Banten	58,13	48,94	56,55
Bali	66,41	74,37	95,38
Nusa Tenggara Barat	55,41	73,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,26	52,97	98,25
Kalimantan Barat	90,77	96,29	16,52
Kalimantan Tengah	64,46	62,61	47,53
Kalimantan Selatan	59,86	65,26	53,92
Kalimantan Timur	50,91	67,25	82,59
Sulawesi Utara	86,18	84,64	77,00
Sulawesi Tengah	74,48	57,73	65,65
Sulawesi Selatan	52,27	49,88	72,61
Sulawesi Tenggara	60,38	61,06	95,32
Gorontalo	21,47	27,00	92,47
Sulawesi Barat	61,85	68,89	40,52
Maluku	61,90	60,26	79,00
Maluku Utara	69,97	73,79	72,55
Papua Barat	91,88	92,66	44,30
Papua	94,90	91,88	36,64
Indonesia	65,29	71,57	59,79

Tabel 5.17.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Air Hujan, 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	46,70	52,05	69,89
Sumatera Utara	62,43	62,27	68,20
Sumatera Barat	51,84	63,68	76,31
Riau	82,54	94,61	42,87
Jambi	84,04	90,56	36,48
Sumatera Selatan	81,96	86,77	42,56
Bengkulu	9,18	8,43	96,90
Lampung	35,04	66,58	58,52
Kep. Bangka Belitung	17,27	31,29	85,34
Kepulauan Riau	47,15	49,42	92,14
DKI Jakarta	76,20	100,00	-
Jawa Barat	16,04	22,97	93,90
Jawa Tengah	52,88	62,90	89,35
DI Yogyakarta	69,84	69,84	98,48
Jawa Timur	36,41	55,97	86,47
Banten	46,26	40,96	68,00
Bali	63,62	72,95	95,57
Nusa Tenggara Barat	40,11	52,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,92	51,31	97,69
Kalimantan Barat	84,15	94,25	19,40
Kalimantan Tengah	64,51	63,03	46,62
Kalimantan Selatan	50,84	58,08	59,13
Kalimantan Timur	36,67	54,93	88,20
Sulawesi Utara	79,41	78,15	81,17
Sulawesi Tengah	72,19	59,03	63,63
Sulawesi Selatan	51,47	49,74	73,51
Sulawesi Tenggara	44,89	46,47	96,57
Gorontalo	21,47	27,00	92,47
Sulawesi Barat	61,48	68,47	40,88
Maluku	69,14	67,21	91,32
Maluku Utara	70,43	75,09	70,26
Papua Barat	75,53	85,96	48,60
Papua	87,38	85,73	42,11
Indonesia	62,04	70,28	60,38

Tabel 5.18.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya , 2013

Perkotaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	68,33	100,00
Sumatera Utara	43,99	43,99	100,00
Sumatera Barat	28,49	52,49	68,05
Riau	-	19,89	80,11
Jambi	-	-	-
Sumatera Selatan	37,13	94,39	31,53
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	100,00
Kepulauan Riau	38,18	38,18	100,00
DKI Jakarta	-	100,00	-
Jawa Barat	83,34	71,40	95,43
Jawa Tengah	85,24	14,76	14,76
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	43,01	95,65	86,42
Banten	-	100,00	100,00
Bali	100,00	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	73,27
Kalimantan Barat	-	-	100,00
Kalimantan Tengah	-	100,00	100,00
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	71,46	100,00	79,27
Sulawesi Utara	80,14	100,00	69,21
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Selatan	-	100,00	100,00
Sulawesi Tenggara	88,46	62,12	73,66
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	100,00	100,00	100,00
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Indonesia	54,02	65,56	82,45

Tabel 5.18.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya , 2013

Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	39,13	39,62	96,72
Sumatera Utara	41,07	41,07	93,30
Sumatera Barat	27,75	17,34	81,11
Riau	51,22	37,37	100,00
Jambi	-	-	100,00
Sumatera Selatan	18,00	86,23	100,00
Bengkulu	28,78	-	71,22
Lampung	42,16	42,16	69,24
Kep. Bangka Belitung	6,60	16,51	100,00
Kepulauan Riau	100,00	100,00	100,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00
Jawa Tengah	-	-	100,00
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	47,69	81,84	81,40
Banten	21,29	21,29	100,00
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	39,38	39,38	60,62
Nusa Tenggara Timur	41,29	27,59	68,79
Kalimantan Barat	2,43	2,43	97,57
Kalimantan Tengah	82,37	89,44	100,00
Kalimantan Selatan	11,87	27,98	100,00
Kalimantan Timur	23,67	23,08	92,53
Sulawesi Utara	-	-	100,00
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	18,60
Sulawesi Selatan	-	-	100,00
Sulawesi Tenggara	4,95	4,95	100,00
Gorontalo	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	-	100,00
Maluku	100,00	100,00	100,00
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	52,18	22,56	67,51
Indonesia	37,37	49,25	86,68

Tabel 5.18.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Sumber Air Lainnya , 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Untuk Minum	Untuk Masak	Untuk Mandi/cuci
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	35,36	42,39	97,04
Sumatera Utara	42,13	42,13	95,73
Sumatera Barat	27,87	22,92	79,04
Riau	24,16	28,13	89,49
Jambi	-	-	100,00
Sumatera Selatan	23,69	88,66	79,64
Bengkulu	28,78	-	71,22
Lampung	42,16	42,16	69,24
Kep. Bangka Belitung	6,00	15,00	100,00
Kepulauan Riau	38,88	38,88	100,00
DKI Jakarta	-	100,00	-
Jawa Barat	84,41	73,23	95,72
Jawa Tengah	63,69	11,03	36,31
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	46,18	86,29	83,02
Banten	16,16	40,27	100,00
Bali	100,00	-	-
Nusa Tenggara Barat	39,38	39,38	60,62
Nusa Tenggara Timur	52,53	41,45	69,65
Kalimantan Barat	1,51	1,51	98,49
Kalimantan Tengah	78,43	89,95	100,00
Kalimantan Selatan	11,87	27,98	100,00
Kalimantan Timur	30,23	33,64	90,71
Sulawesi Utara	70,93	88,52	72,74
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	38,45
Sulawesi Selatan	-	34,53	100,00
Sulawesi Tenggara	50,75	36,30	85,55
Gorontalo	-	-	100,00
Sulawesi Barat	-	-	100,00
Maluku	100,00	100,00	100,00
Maluku Utara	100,00	100,00	100,00
Papua Barat	-	-	-
Papua	52,18	22,56	67,51
Indonesia	43,79	55,54	85,05

Tabel 5.19.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013

Provinsi	Perkotaan			
	Di dalam rumah	Di halaman	Tempat lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	23,68	11,92	64,41	100,00
Sumatera Utara	48,89	5,62	45,49	100,00
Sumatera Barat	34,91	9,03	56,06	100,00
Riau	19,44	9,67	70,89	100,00
Jambi	42,55	17,88	39,58	100,00
Sumatera Selatan	41,22	29,06	29,72	100,00
Bengkulu	39,53	26,35	34,12	100,00
Lampung	34,41	22,55	43,04	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,14	20,81	73,05	100,00
Kepulauan Riau	17,54	9,07	73,40	100,00
DKI Jakarta	31,22	3,84	64,94	100,00
Jawa Barat	38,59	15,23	46,18	100,00
Jawa Tengah	49,65	20,42	29,93	100,00
DI Yogyakarta	41,37	31,84	26,79	100,00
Jawa Timur	37,24	22,30	40,46	100,00
Banten	37,26	8,57	54,17	100,00
Bali	20,42	19,31	60,27	100,00
Nusa Tenggara Barat	22,22	31,24	46,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,61	41,64	44,75	100,00
Kalimantan Barat	39,04	29,12	31,84	100,00
Kalimantan Tengah	28,66	13,95	57,39	100,00
Kalimantan Selatan	46,63	14,27	39,10	100,00
Kalimantan Timur	31,21	3,01	65,78	100,00
Sulawesi Utara	23,18	13,46	63,36	100,00
Sulawesi Tengah	32,19	8,60	59,20	100,00
Sulawesi Selatan	41,81	12,62	45,57	100,00
Sulawesi Tenggara	41,95	10,21	47,84	100,00
Gorontalo	27,79	13,67	58,54	100,00
Sulawesi Barat	25,22	20,78	53,99	100,00
Maluku	36,85	15,58	47,57	100,00
Maluku Utara	70,67	14,72	14,60	100,00
Papua Barat	16,42	13,22	70,36	100,00
Papua	26,83	12,06	61,12	100,00
Indonesia	37,50	16,01	46,50	100,00

Tabel 5.19.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013

Provinsi	Perdesaan			
	Di dalam rumah	Di halaman	Tempat lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,71	28,28	37,01	100,00
Sumatera Utara	41,87	16,63	41,50	100,00
Sumatera Barat	31,51	23,28	45,21	100,00
Riau	31,58	38,94	29,48	100,00
Jambi	35,33	40,28	24,39	100,00
Sumatera Selatan	19,69	53,61	26,70	100,00
Bengkulu	30,74	40,81	28,45	100,00
Lampung	25,91	53,25	20,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	7,14	28,38	64,48	100,00
Kepulauan Riau	30,40	27,51	42,09	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	41,01	22,26	36,73	100,00
Jawa Tengah	44,28	27,71	28,01	100,00
DI Yogyakarta	27,86	50,62	21,52	100,00
Jawa Timur	35,91	33,68	30,41	100,00
Banten	40,49	11,73	47,78	100,00
Bali	35,22	38,64	26,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,29	38,37	41,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,15	21,89	75,96	100,00
Kalimantan Barat	26,27	40,92	32,81	100,00
Kalimantan Tengah	27,42	27,13	45,46	100,00
Kalimantan Selatan	37,02	25,08	37,89	100,00
Kalimantan Timur	18,63	21,13	60,24	100,00
Sulawesi Utara	22,07	38,84	39,09	100,00
Sulawesi Tengah	32,86	31,35	35,78	100,00
Sulawesi Selatan	32,82	32,61	34,57	100,00
Sulawesi Tenggara	26,49	30,02	43,49	100,00
Gorontalo	12,89	26,12	60,99	100,00
Sulawesi Barat	27,73	32,33	39,94	100,00
Maluku	9,86	28,99	61,15	100,00
Maluku Utara	10,43	44,92	44,65	100,00
Papua Barat	10,12	36,20	53,68	100,00
Papua	6,42	37,13	56,45	100,00
Indonesia	33,16	31,23	35,61	100,00

Tabel 5.19.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi Sumber Air Minum Utama, 2013

Perkotaan+ Perdesaan				
Provinsi	Di dalam rumah	Di halaman	Tempat lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	31,59	23,64	44,77	100,00
Sumatera Utara	45,28	11,29	43,43	100,00
Sumatera Barat	32,81	17,82	49,37	100,00
Riau	26,85	27,54	45,60	100,00
Jambi	37,47	33,65	28,89	100,00
Sumatera Selatan	27,34	44,89	27,77	100,00
Bengkulu	33,51	36,26	30,24	100,00
Lampung	27,96	45,87	26,17	100,00
Kep. Bangka Belitung	6,66	24,73	68,61	100,00
Kepulauan Riau	19,63	12,07	68,30	100,00
DKI Jakarta	31,22	3,84	64,94	100,00
Jawa Barat	39,45	17,72	42,83	100,00
Jawa Tengah	46,71	24,41	28,88	100,00
DI Yogyakarta	37,08	37,80	25,12	100,00
Jawa Timur	36,53	28,34	35,13	100,00
Banten	38,27	9,56	52,16	100,00
Bali	26,02	26,62	47,37	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,12	35,31	43,57	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,35	25,68	69,97	100,00
Kalimantan Barat	29,96	37,51	32,53	100,00
Kalimantan Tengah	27,84	22,64	49,52	100,00
Kalimantan Selatan	41,17	20,42	38,41	100,00
Kalimantan Timur	26,44	9,88	63,68	100,00
Sulawesi Utara	22,58	27,22	50,20	100,00
Sulawesi Tengah	32,70	25,79	41,51	100,00
Sulawesi Selatan	36,05	25,43	38,52	100,00
Sulawesi Tenggara	30,78	24,52	44,70	100,00
Gorontalo	18,01	21,85	60,15	100,00
Sulawesi Barat	27,19	29,87	42,94	100,00
Maluku	20,61	23,65	55,74	100,00
Maluku Utara	27,12	36,55	36,33	100,00
Papua Barat	11,93	29,60	58,47	100,00
Papua	11,47	30,93	57,61	100,00
Indonesia	35,33	23,63	41,05	100,00

Tabel 5.20.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Lamanya Waktu Untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013

Provinsi	Perkotaan				
	<= 5	6-15	16-30	> 30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,89	30,39	5,96	0,77	100,00
Sumatera Utara	76,42	20,29	2,41	0,89	100,00
Sumatera Barat	65,81	28,09	5,75	0,35	100,00
Riau	66,35	26,96	6,20	0,49	100,00
Jambi	71,32	22,66	4,58	1,44	100,00
Sumatera Selatan	83,69	12,50	3,24	0,57	100,00
Bengkulu	85,63	11,28	3,09	0,00	100,00
Lampung	78,31	18,98	2,47	0,24	100,00
Kep. Bangka Belitung	70,62	28,05	0,93	0,40	100,00
Kepulauan Riau	45,35	44,06	10,23	0,36	100,00
DKI Jakarta	60,88	32,46	5,73	0,94	100,00
Jawa Barat	75,02	22,43	2,26	0,30	100,00
Jawa Tengah	86,48	11,45	1,52	0,56	100,00
DI Yogyakarta	90,84	7,83	1,21	0,12	100,00
Jawa Timur	78,53	19,19	1,86	0,41	100,00
Banten	70,87	24,89	3,25	0,99	100,00
Bali	71,49	26,21	1,87	0,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,71	18,94	1,26	0,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	68,82	20,74	6,57	3,87	100,00
Kalimantan Barat	84,40	13,78	1,26	0,56	100,00
Kalimantan Tengah	66,91	29,98	2,84	0,27	100,00
Kalimantan Selatan	83,77	14,08	2,02	0,13	100,00
Kalimantan Timur	61,21	33,16	5,24	0,38	100,00
Sulawesi Utara	68,04	27,82	2,68	1,47	100,00
Sulawesi Tengah	65,36	23,77	9,43	1,45	100,00
Sulawesi Selatan	75,37	21,26	2,82	0,55	100,00
Sulawesi Tenggara	64,74	17,52	10,53	7,21	100,00
Gorontalo	63,83	29,43	6,62	0,12	100,00
Sulawesi Barat	64,22	28,88	3,32	3,59	100,00
Maluku	63,09	20,78	15,01	1,13	100,00
Maluku Utara	90,50	6,18	3,32	0,00	100,00
Papua Barat	57,67	31,61	10,45	0,27	100,00
Papua	70,17	22,06	6,15	1,62	100,00
Indonesia	74,97	21,45	3,00	0,58	100,00

Tabel 5.20.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Lamanya Waktu Untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013

					Perdesaan
Provinsi	< = 5	6-15	16-30	> 30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	79,37	16,50	3,85	0,28	100,00
Sumatera Utara	78,95	17,36	2,91	0,78	100,00
Sumatera Barat	74,00	20,25	4,69	1,07	100,00
Riau	87,39	10,39	1,95	0,27	100,00
Jambi	88,88	7,92	2,99	0,22	100,00
Sumatera Selatan	90,16	8,35	1,37	0,12	100,00
Bengkulu	87,86	11,23	0,79	0,12	100,00
Lampung	90,90	7,05	2,05	-	100,00
Kep. Bangka Belitung	82,35	16,45	1,07	0,12	100,00
Kepulauan Riau	81,87	15,22	2,54	0,37	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	84,86	12,06	2,91	0,17	100,00
Jawa Tengah	87,65	10,41	1,77	0,17	100,00
DI Yogyakarta	92,41	6,44	0,33	0,81	100,00
Jawa Timur	84,50	12,22	2,53	0,76	100,00
Banten	77,56	18,58	3,42	0,44	100,00
Bali	78,81	11,34	6,90	2,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,25	17,01	2,89	0,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,81	28,40	20,56	10,23	100,00
Kalimantan Barat	85,49	12,68	1,41	0,43	100,00
Kalimantan Tengah	82,64	13,66	2,29	1,42	100,00
Kalimantan Selatan	84,70	12,28	2,20	0,82	100,00
Kalimantan Timur	65,19	22,67	9,33	2,80	100,00
Sulawesi Utara	81,49	14,01	4,32	0,17	100,00
Sulawesi Tengah	80,66	12,80	4,12	2,41	100,00
Sulawesi Selatan	81,51	11,70	5,33	1,47	100,00
Sulawesi Tenggara	72,99	17,54	6,74	2,73	100,00
Gorontalo	71,32	19,30	6,25	3,13	100,00
Sulawesi Barat	80,31	10,83	6,86	2,00	100,00
Maluku	64,42	25,46	9,77	0,35	100,00
Maluku Utara	74,17	13,55	8,81	3,46	100,00
Papua Barat	71,33	24,91	3,21	0,55	100,00
Papua	50,30	33,15	13,67	2,88	100,00
Indonesia	81,98	13,45	3,63	0,94	100,00

Tabel 5.20.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Lamanya Waktu Untuk Memperoleh Air Minum (Menit), 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	< = 5	6-15	16-30	> 30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,70	20,43	4,45	0,42	100,00
Sumatera Utara	77,72	18,78	2,67	0,83	100,00
Sumatera Barat	70,86	23,25	5,10	0,79	100,00
Riau	79,20	16,84	3,61	0,35	100,00
Jambi	83,67	12,29	3,46	0,58	100,00
Sumatera Selatan	87,86	9,82	2,03	0,28	100,00
Bengkulu	87,16	11,25	1,51	0,08	100,00
Lampung	87,87	9,92	2,15	0,06	100,00
Kep. Bangka Belitung	76,70	22,04	1,00	0,26	100,00
Kepulauan Riau	51,30	39,36	8,98	0,36	100,00
DKI Jakarta	60,88	32,46	5,73	0,94	100,00
Jawa Barat	78,51	18,75	2,49	0,25	100,00
Jawa Tengah	87,12	10,88	1,66	0,34	100,00
DI Yogyakarta	91,34	7,39	0,93	0,34	100,00
Jawa Timur	81,70	15,49	2,21	0,60	100,00
Banten	72,97	22,91	3,30	0,82	100,00
Bali	74,26	20,59	3,77	1,38	100,00
Nusa Tenggara Barat	79,45	17,84	2,19	0,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	46,19	26,93	17,87	9,01	100,00
Kalimantan Barat	85,17	13,00	1,36	0,47	100,00
Kalimantan Tengah	77,29	19,21	2,47	1,03	100,00
Kalimantan Selatan	84,30	13,05	2,12	0,52	100,00
Kalimantan Timur	62,72	29,18	6,79	1,30	100,00
Sulawesi Utara	75,33	20,34	3,57	0,77	100,00
Sulawesi Tengah	76,92	15,48	5,42	2,18	100,00
Sulawesi Selatan	79,30	15,13	4,43	1,14	100,00
Sulawesi Tenggara	70,70	17,54	7,79	3,97	100,00
Gorontalo	68,75	22,78	6,38	2,10	100,00
Sulawesi Barat	76,88	14,68	6,10	2,34	100,00
Maluku	63,89	23,59	11,85	0,66	100,00
Maluku Utara	78,69	11,51	7,29	2,50	100,00
Papua Barat	67,41	26,83	5,29	0,47	100,00
Papua	55,22	30,41	11,81	2,57	100,00
Indonesia	78,48	17,44	3,31	0,76	100,00

Tabel 5.21.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah Dan Kualitas Air Minum, 2013

Perkotaan					
Provinsi	Jernih/bening	Berwarna	Berasa	Berbusa	Berbau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,47	4,62	2,61	0,69	2,39
Sumatera Utara	96,64	2,12	2,37	0,69	1,49
Sumatera Barat	97,70	3,06	1,09	0,20	0,77
Riau	98,16	2,04	3,09	0,97	2,09
Jambi	99,82	1,22	3,54	-	0,44
Sumatera Selatan	97,35	4,45	2,48	0,50	2,39
Bengkulu	98,61	1,48	1,80	0,44	1,63
Lampung	99,66	2,04	1,87	1,54	1,94
Kep. Bangka Belitung	97,71	3,97	3,10	2,52	3,10
Kepulauan Riau	98,69	0,94	1,90	0,10	0,41
DKI Jakarta	98,49	1,34	0,50	0,04	1,38
Jawa Barat	98,46	1,25	0,87	0,22	0,64
Jawa Tengah	98,31	2,37	1,34	1,07	2,65
DI Yogyakarta	98,76	1,21	0,76	0,45	0,94
Jawa Timur	98,45	2,11	1,59	1,02	1,52
Banten	98,96	0,91	2,00	0,44	1,22
Bali	99,26	0,64	0,82	0,04	0,75
Nusa Tenggara Barat	97,69	3,26	0,67	0,21	0,85
Nusa Tenggara Timur	95,68	5,59	1,91	0,56	0,87
Kalimantan Barat	97,83	1,79	1,87	-	1,03
Kalimantan Tengah	94,18	4,54	4,48	0,39	3,47
Kalimantan Selatan	95,13	5,58	3,52	0,49	4,04
Kalimantan Timur	96,00	3,36	1,98	0,54	2,48
Sulawesi Utara	97,22	1,81	1,01	0,45	0,62
Sulawesi Tengah	93,46	2,46	2,17	1,82	2,41
Sulawesi Selatan	96,88	3,16	2,17	1,38	2,22
Sulawesi Tenggara	90,99	3,50	2,17	0,53	0,53
Gorontalo	97,74	3,17	2,34	0,69	1,60
Sulawesi Barat	99,68	1,72	0,32	1,40	1,99
Maluku	98,70	1,83	2,43	0,67	2,17
Maluku Utara	98,42	0,78	1,19	-	-
Papua Barat	99,51	1,89	1,27	0,19	1,13
Papua	96,58	1,76	1,24	-	0,55
Indonesia	98,09	1,97	1,45	0,57	1,45

Tabel 5.21.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah Dan Kualitas Air Minum, 2013

Perdesaan					
Provinsi	Jernih/bening	Berwarna	Berasa	Berbusa	Berbau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,17	9,24	4,89	0,78	2,86
Sumatera Utara	94,84	6,58	4,38	0,98	2,16
Sumatera Barat	96,74	3,34	2,15	0,55	1,11
Riau	96,04	4,01	2,30	1,59	0,86
Jambi	97,86	3,90	3,21	1,47	2,38
Sumatera Selatan	94,62	6,67	3,00	1,02	2,27
Bengkulu	96,38	3,57	2,15	0,23	2,29
Lampung	96,66	3,54	1,37	0,61	0,72
Kep. Bangka Belitung	99,18	2,70	2,92	2,88	3,03
Kepulauan Riau	97,95	4,62	3,89	-	1,47
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	96,98	3,57	1,92	0,85	1,04
Jawa Tengah	97,41	3,26	1,20	0,40	1,31
DI Yogyakarta	98,14	2,12	2,25	0,49	1,08
Jawa Timur	98,23	2,35	1,77	0,70	1,18
Banten	97,62	2,62	6,85	0,62	0,60
Bali	98,80	0,97	0,75	-	0,19
Nusa Tenggara Barat	98,10	3,94	3,07	1,56	2,84
Nusa Tenggara Timur	95,49	6,35	2,87	0,34	0,39
Kalimantan Barat	95,77	5,24	3,42	0,67	2,01
Kalimantan Tengah	80,52	25,67	10,00	1,34	6,53
Kalimantan Selatan	88,92	15,48	11,04	0,27	6,24
Kalimantan Timur	92,83	9,87	5,92	0,64	1,68
Sulawesi Utara	96,88	2,49	1,09	0,54	0,84
Sulawesi Tengah	96,54	4,03	2,74	0,07	0,83
Sulawesi Selatan	95,59	8,06	3,50	0,80	3,20
Sulawesi Tenggara	94,33	4,26	3,37	0,35	1,19
Gorontalo	95,13	5,32	4,18	0,16	1,08
Sulawesi Barat	94,64	4,31	1,44	1,37	1,44
Maluku	97,05	4,15	4,43	1,99	0,68
Maluku Utara	91,94	8,09	10,50	0,10	0,25
Papua Barat	95,67	3,97	3,12	0,54	1,84
Papua	89,57	8,49	2,93	-	0,03
Indonesia	96,24	4,69	2,76	0,72	1,54

Tabel 5.21.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah Dan Kualitas Air Minum, 2013

Perkotaan+ Perdesaan					
Provinsi	Jernih/bening	Berwarna	Berasa	Berbusa	Berbau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	93,82	7,93	4,25	0,75	2,73
Sumatera Utara	95,71	4,42	3,41	0,84	1,83
Sumatera Barat	97,11	3,23	1,74	0,41	0,98
Riau	96,87	3,24	2,61	1,35	1,34
Jambi	98,44	3,11	3,31	1,04	1,80
Sumatera Selatan	95,59	5,88	2,82	0,84	2,31
Bengkulu	97,08	2,91	2,04	0,30	2,08
Lampung	97,38	3,18	1,49	0,83	1,01
Kep. Bangka Belitung	98,47	3,31	3,01	2,70	3,07
Kepulauan Riau	98,57	1,54	2,22	0,08	0,59
DKI Jakarta	98,49	1,34	0,50	0,04	1,38
Jawa Barat	97,93	2,08	1,24	0,44	0,78
Jawa Tengah	97,82	2,85	1,26	0,70	1,92
DI Yogyakarta	98,56	1,50	1,23	0,46	0,99
Jawa Timur	98,33	2,24	1,69	0,85	1,34
Banten	98,54	1,44	3,52	0,50	1,02
Bali	99,09	0,76	0,79	0,03	0,54
Nusa Tenggara Barat	97,92	3,65	2,04	0,98	1,99
Nusa Tenggara Timur	95,52	6,21	2,69	0,38	0,48
Kalimantan Barat	96,37	4,24	2,97	0,48	1,73
Kalimantan Tengah	85,17	18,48	8,12	1,02	5,49
Kalimantan Selatan	91,60	11,22	7,80	0,36	5,30
Kalimantan Timur	94,80	5,83	3,48	0,58	2,18
Sulawesi Utara	97,03	2,18	1,05	0,50	0,74
Sulawesi Tengah	95,78	3,65	2,60	0,50	1,22
Sulawesi Selatan	96,05	6,30	3,02	1,00	2,84
Sulawesi Tenggara	93,40	4,05	3,04	0,40	1,01
Gorontalo	96,03	4,58	3,55	0,34	1,26
Sulawesi Barat	95,71	3,76	1,20	1,37	1,55
Maluku	97,70	3,23	3,63	1,46	1,28
Maluku Utara	93,73	6,07	7,92	0,07	0,18
Papua Barat	96,78	3,37	2,59	0,44	1,64
Papua	91,30	6,83	2,51	0,00	0,16
Indonesia	97,16	3,33	2,11	0,65	1,50

Tabel 5.22.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman Untuk Diminum, 2013

Provinsi	Merebus/ memasak	Menam- bah pen- jernih/ klorine	Menya- ring dengan kain	Menggun- akan filter/sa- rangan	Mengen- dapkan	Mem- basmi kuman dengan sinar matahari	Perkotaan
							Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	60,89	1,33	6,98	5,76	10,96	1,73	0,42
Sumatera Utara	81,48	2,11	5,39	6,49	14,96	0,62	3,77
Sumatera Barat	80,80	0,92	5,62	7,50	7,55	0,88	0,17
Riau	60,17	2,02	5,83	3,92	6,96	1,85	0,58
Jambi	85,30	1,09	5,05	2,18	24,87	3,01	0,53
Sumatera Selatan	90,90	2,71	2,56	3,95	29,28	1,98	0,09
Bengkulu	80,42	1,21	3,23	3,16	17,72	0,36	0,44
Lampung	83,38	4,54	7,56	7,61	21,25	4,81	0,34
Kep. Bangka Belitung	75,72	2,53	6,51	4,20	10,24	0,65	1,49
Kepulauan Riau	77,15	7,49	18,07	18,63	35,53	7,72	0,78
DKI Jakarta	73,82	2,83	6,10	4,75	10,50	1,62	1,12
Jawa Barat	84,65	1,65	7,07	2,44	18,04	1,91	1,09
Jawa Tengah	89,57	0,76	4,86	1,56	22,17	0,50	0,41
DI Yogyakarta	86,36	3,76	4,46	3,62	15,83	2,72	0,89
Jawa Timur	80,70	2,24	7,94	3,62	17,44	1,45	1,04
Banten	79,96	2,82	6,59	5,02	17,94	2,77	0,27
Bali	64,76	3,48	3,65	5,42	5,73	0,48	2,46
Nusa Tenggara Barat	67,55	1,43	1,74	1,92	5,94	0,36	0,71
Nusa Tenggara Timur	87,16	1,18	61,15	1,09	20,49	1,81	0,19
Kalimantan Barat	81,22	1,49	5,40	2,86	30,58	2,89	6,91
Kalimantan Tengah	75,45	10,03	5,55	2,98	29,10	0,48	-
Kalimantan Selatan	84,61	3,96	1,89	3,98	31,77	1,95	1,03
Kalimantan Timur	78,93	8,87	6,54	10,08	46,47	2,21	0,68
Sulawesi Utara	78,63	8,16	8,93	7,82	10,90	8,19	1,97
Sulawesi Tengah	79,07	4,83	26,29	9,01	25,21	0,20	1,60
Sulawesi Selatan	82,42	6,68	8,43	6,37	30,64	4,84	0,67
Sulawesi Tenggara	78,51	1,27	23,50	3,54	23,44	0,17	2,02
Gorontalo	74,56	0,73	3,23	4,32	7,27	0,73	0,47
Sulawesi Barat	72,04	0,00	4,35	2,26	17,80	-	-
Maluku	89,60	2,53	23,64	1,64	8,41	2,08	0,47
Maluku Utara	93,03	1,07	8,95	0,92	8,91	1,49	0,86
Papua Barat	61,73	1,07	15,03	10,49	20,65	0,03	4,08
Papua	70,05	8,31	19,85	9,28	15,48	2,83	1,38
Indonesia	81,35	2,48	7,11	4,00	18,41	1,79	1,06

Tabel 5.22.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman Untuk Diminum, 2013

Perdesaan							
Provinsi	Merebus/ memasak	Menam- bah pen- jernih/ klorine	Menya- ring dengan kain	Menggun- akan filter/sa- rangan	Mengen- dapkan	Mem- basmi kuman dengan sinar matahari	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	88,97	1,27	6,97	7,97	18,75	2,45	0,39
Sumatera Utara	93,70	1,47	8,48	4,95	12,73	1,57	1,03
Sumatera Barat	94,20	0,11	3,15	2,71	9,18	0,70	0,03
Riau	88,66	2,06	15,04	2,37	18,44	1,30	0,68
Jambi	92,15	1,61	6,81	3,01	36,30	2,23	0,25
Sumatera Selatan	94,78	2,75	4,94	2,68	36,41	2,32	0,33
Bengkulu	95,04	1,01	1,20	1,74	25,30	0,57	0,35
Lampung	95,70	1,66	2,89	3,25	27,84	1,28	0,24
Kep. Bangka Belitung	84,70	0,31	1,75	0,33	8,76	0,41	0,50
Kepulauan Riau	95,82	2,91	13,49	2,90	25,94	1,18	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	93,73	0,96	6,42	2,45	29,16	1,07	0,29
Jawa Tengah	94,14	1,03	7,51	1,80	35,93	1,42	0,57
DI Yogyakarta	99,29	0,29	12,80	1,93	41,80	1,28	0,81
Jawa Timur	88,71	0,66	11,45	2,67	26,28	0,64	0,99
Banten	94,75	1,11	9,34	1,14	42,66	1,73	0,83
Bali	74,97	0,31	0,57	0,89	7,79	1,02	0,08
Nusa Tenggara Barat	54,28	0,85	0,09	1,71	7,91	0,36	0,30
Nusa Tenggara Timur	94,68	0,72	33,54	1,80	19,96	0,95	0,79
Kalimantan Barat	95,84	1,42	3,90	0,84	30,90	2,08	0,48
Kalimantan Tengah	87,32	12,48	6,80	3,91	50,96	1,33	1,05
Kalimantan Selatan	95,69	16,16	3,61	1,47	49,11	1,53	1,12
Kalimantan Timur	87,88	7,68	8,55	3,08	37,90	3,94	1,40
Sulawesi Utara	89,62	1,28	6,08	0,90	10,05	3,27	0,14
Sulawesi Tengah	91,47	1,24	17,87	2,95	31,11	1,18	0,90
Sulawesi Selatan	91,18	1,46	9,52	3,55	35,00	1,50	1,14
Sulawesi Tenggara	93,50	1,46	17,08	1,81	36,06	1,06	0,09
Gorontalo	89,53	2,23	4,19	3,26	12,02	0,18	0,16
Sulawesi Barat	86,40	0,40	5,08	2,75	29,92	-	0,15
Maluku	98,34	2,35	28,03	4,00	23,35	5,06	0,00
Maluku Utara	93,75	2,87	17,02	3,84	19,35	4,31	0,80
Papua Barat	93,44	1,02	8,45	1,89	26,85	1,28	0,26
Papua	81,47	0,51	5,99	1,41	10,68	2,22	0,13
Indonesia	91,15	1,63	8,64	2,61	27,86	1,34	0,61

Tabel 5.22.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Kebiasaan Rumah Tangga Agar Air Menjadi Lebih Aman Untuk Diminum, 2013

Perkotaan+ Perdesaan							
Provinsi	Merebus/ memasak	Menam- bah pen- jernih/ klorine	Menya- ring dengan kain	Menggun- akan filter/sa- rangan	Mengen- dapkan	Mem- basmi kuman dengan sinar matahari	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	81,01	1,29	6,98	7,34	16,54	2,25	0,40
Sumatera Utara	87,77	1,78	6,98	5,70	13,81	1,11	2,36
Sumatera Barat	89,06	0,42	4,10	4,55	8,56	0,77	0,08
Riau	77,57	2,05	11,46	2,97	13,97	1,52	0,64
Jambi	90,12	1,46	6,29	2,76	32,92	2,46	0,34
Sumatera Selatan	93,40	2,73	4,10	3,13	33,88	2,20	0,25
Bengkulu	90,43	1,07	1,84	2,19	22,91	0,50	0,38
Lampung	92,74	2,35	4,01	4,30	26,26	2,13	0,27
Kep. Bangka Belitung	80,37	1,38	4,04	2,20	9,47	0,53	0,98
Kepulauan Riau	80,19	6,75	17,33	16,06	33,97	6,66	0,65
DKI Jakarta	73,82	2,83	6,10	4,75	10,50	1,62	1,12
Jawa Barat	87,87	1,40	6,84	2,45	21,99	1,61	0,81
Jawa Tengah	92,07	0,91	6,31	1,69	29,70	1,00	0,49
DI Yogyakarta	90,46	2,66	7,11	3,09	24,08	2,26	0,87
Jawa Timur	84,95	1,40	9,80	3,12	22,13	1,02	1,01
Banten	84,60	2,28	7,45	3,80	25,70	2,45	0,44
Bali	68,62	2,28	2,49	3,71	6,50	0,69	1,56
Nusa Tenggara Barat	59,96	1,10	0,80	1,80	7,07	0,36	0,47
Nusa Tenggara Timur	93,23	0,81	38,84	1,66	20,06	1,11	0,67
Kalimantan Barat	91,61	1,44	4,34	1,42	30,81	2,31	2,34
Kalimantan Tengah	83,28	11,65	6,37	3,59	43,52	1,04	0,69
Kalimantan Selatan	90,92	10,90	2,87	2,55	41,63	1,71	1,08
Kalimantan Timur	82,32	8,42	7,31	7,43	43,22	2,87	0,95
Sulawesi Utara	84,59	4,43	7,38	4,07	10,44	5,52	0,98
Sulawesi Tengah	88,44	2,12	19,93	4,43	29,67	0,94	1,07
Sulawesi Selatan	88,03	3,33	9,13	4,56	33,43	2,70	0,97
Sulawesi Tenggara	89,34	1,41	18,86	2,29	32,56	0,82	0,63
Gorontalo	84,39	1,72	3,86	3,62	10,39	0,37	0,27
Sulawesi Barat	83,34	0,32	4,92	2,65	27,33	-	0,12
Maluku	94,86	2,42	26,29	3,06	17,41	3,87	0,19
Maluku Utara	93,55	2,37	14,79	3,03	16,46	3,53	0,82
Papua Barat	84,33	1,03	10,34	4,36	25,07	0,92	1,36
Papua	78,65	2,44	9,42	3,36	11,87	2,37	0,44
Indonesia	86,25	2,06	7,87	3,30	23,14	1,57	0,83

Tabel 5.23.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Perilaku Hemat Air, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Mandi dengan shower	Menyiram tanaman di pagi hari	Memanfaatkan air bekas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,55	20,41	6,72
Sumatera Utara	3,84	22,74	11,40
Sumatera Barat	3,23	27,44	4,55
Riau	4,45	26,85	5,69
Jambi	3,68	24,35	7,86
Sumatera Selatan	3,01	20,85	4,49
Bengkulu	5,11	21,92	4,69
Lampung	4,84	23,66	9,67
Kep. Bangka Belitung	1,57	22,93	11,91
Kepulauan Riau	10,85	29,20	6,90
DKI Jakarta	13,04	19,84	7,03
Jawa Barat	6,72	21,61	10,31
Jawa Tengah	5,11	20,02	8,45
DI Yogyakarta	7,25	19,69	11,92
Jawa Timur	5,83	20,64	7,51
Banten	9,15	21,89	11,08
Bali	10,73	17,60	6,76
Nusa Tenggara Barat	2,09	14,83	12,70
Nusa Tenggara Timur	2,96	46,92	51,63
Kalimantan Barat	4,03	23,31	7,76
Kalimantan Tengah	4,42	17,52	7,91
Kalimantan Selatan	3,68	16,08	7,86
Kalimantan Timur	7,58	18,73	12,91
Sulawesi Utara	3,49	41,43	11,68
Sulawesi Tengah	2,66	29,38	7,20
Sulawesi Selatan	7,60	29,31	7,39
Sulawesi Tenggara	7,97	28,23	6,97
Gorontalo	5,66	18,12	6,19
Sulawesi Barat	0,00	34,73	7,18
Maluku	3,32	33,34	25,27
Maluku Utara	1,05	37,95	9,88
Papua Barat	1,11	18,51	12,12
Papua	6,57	26,13	12,62
Indonesia	6,53	21,80	9,28

Tabel 5.23.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Perilaku Hemat Air, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Mandi dengan shower	Menyiram tanaman di pagi hari	Memanfaatkan air bekas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,24	14,35	4,22
Sumatera Utara	0,97	17,10	6,28
Sumatera Barat	0,54	14,74	2,30
Riau	0,94	14,70	2,75
Jambi	1,19	13,11	3,74
Sumatera Selatan	1,15	9,27	3,54
Bengkulu	0,21	12,03	2,25
Lampung	0,69	11,79	2,65
Kep. Bangka Belitung	0,15	11,83	8,42
Kepulauan Riau	1,04	17,06	5,74
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	1,22	16,44	6,25
Jawa Tengah	1,22	9,76	5,64
DI Yogyakarta	0,29	4,30	5,26
Jawa Timur	0,85	13,38	5,25
Banten	1,23	8,79	9,01
Bali	4,51	11,03	10,87
Nusa Tenggara Barat	0,42	10,48	8,71
Nusa Tenggara Timur	0,33	21,05	25,35
Kalimantan Barat	0,51	8,09	4,76
Kalimantan Tengah	0,28	6,40	2,11
Kalimantan Selatan	1,82	12,72	1,97
Kalimantan Timur	1,75	11,99	5,21
Sulawesi Utara	0,91	40,94	13,81
Sulawesi Tengah	2,26	15,75	4,06
Sulawesi Selatan	1,25	24,23	9,71
Sulawesi Tenggara	0,32	13,92	4,71
Gorontalo	1,16	13,97	1,77
Sulawesi Barat	0,49	11,97	4,59
Maluku	0,57	14,28	13,17
Maluku Utara	0,12	7,52	10,87
Papua Barat	1,77	8,78	6,17
Papua	0,42	5,86	3,13
Indonesia	1,03	13,46	6,03

Tabel 5.23.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah, dan Perilaku Hemat Air, 2013

Perkotaan+ Perdesaan			
Provinsi	Mandi dengan shower	Menyiram tanaman di pagi hari	Memanfaatkan air bekas
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,89	16,07	4,93
Sumatera Utara	2,36	19,83	8,76
Sumatera Barat	1,57	19,61	3,17
Riau	2,31	19,43	3,89
Jambi	1,93	16,44	4,96
Sumatera Selatan	1,81	13,38	3,88
Bengkulu	1,75	15,15	3,02
Lampung	1,69	14,64	4,34
Kep. Bangka Belitung	0,83	17,18	10,11
Kepulauan Riau	9,25	27,22	6,71
DKI Jakarta	13,04	19,84	7,03
Jawa Barat	4,77	19,78	8,87
Jawa Tengah	2,98	14,40	6,91
DI Yogyakarta	5,04	14,80	9,81
Jawa Timur	3,19	16,78	6,31
Banten	6,67	17,77	10,43
Bali	8,38	15,12	8,32
Nusa Tenggara Barat	1,14	12,34	10,42
Nusa Tenggara Timur	0,84	26,02	30,40
Kalimantan Barat	1,52	12,49	5,63
Kalimantan Tengah	1,69	10,18	4,09
Kalimantan Selatan	2,62	14,17	4,51
Kalimantan Timur	5,37	16,17	9,99
Sulawesi Utara	2,09	41,17	12,83
Sulawesi Tengah	2,36	19,08	4,83
Sulawesi Selatan	3,53	26,05	8,88
Sulawesi Tenggara	2,45	17,89	5,33
Gorontalo	2,70	15,40	3,29
Sulawesi Barat	0,39	16,82	5,14
Maluku	1,66	21,87	17,99
Maluku Utara	0,38	15,95	10,60
Papua Barat	1,58	11,57	7,88
Papua	1,94	10,87	5,47
Indonesia	3,78	17,62	7,65

6

PEMANFAATAN ENERGI

Energi merupakan salah satu fasilitas rumah yang membantu rumah tangga melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan energi dalam rumah dipengaruhi oleh jumlah penghuni serta kualitas rumah tinggalnya. Pemanfaatan energi ini dapat menjadi indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Terbatasnya sumber energi merupakan isu penting mengingat tingginya konsumsi energi oleh masyarakat. Konsumsi energi yang tinggi bahkan cenderung berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Guna mengantisipasi permasalahan ini, penggunaan energi alternatif menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sektor energi, dimana sub program prioritas pembangunan sektor energi yang diantaranya adalah peningkatan kapasitas energi nasional, pengembangan energi alternatif, dan konversi menuju penggunaan gas.

Bab ini akan menyajikan informasi mengenai pemanfaatan energi oleh rumah tangga seperti pemakaian listrik, penghematan listrik, penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak, serta cara memperoleh kayu bakar tersebut.

6.1 Penggunaan Listrik

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh rumah tangga, terutama sebagai sumber penerangan dan sumber energi dalam penggunaan peralatan rumah tangga, seperti alat setrika, televisi, radio, kipas angin, lemari es, dan pendingin ruangan (*air conditioner/AC*). Listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah listrik yang dikelola oleh perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau bukan dari PLN. Penggunaan listrik yang berlebihan secara tidak langsung dapat menimbulkan efek negatif, diantaranya adalah membengkaknya anggaran negara guna menyediakan pasokan listrik yang selanjutnya akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang disebabkan eksploitasi sumber daya alam untuk pembangkit tenaga listrik yang berlebihan.

Tabel 6.1 memperlihatkan perilaku rumah tangga dalam penghematan pemakaian listrik dalam setahun terakhir. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentasi rumah tangga yang belum melakukan pengurangan pemakaian listrik masih sangat tinggi (60,40 persen). Rumah tangga yang sudah melakukan pengurangan pemakaian listrik hanya sekitar 33,96 persen. Kesadaran masyarakat terhadap penghematan listrik dengan mengurangi pemakaian listrik, di daerah perkotaan relatif sama dengan di daerah perdesaan (sekitar 34 persen).

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Pengurangan Pemakaian Listrik dalam Setahun Terakhir, 2013

Pengurangan Pemakaian Listrik	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	33,99	33,92	33,96
Tidak	63,18	57,63	60,40
Tidak Memakai Listrik	2,83	8,45	5,64
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Susenas MKP juga mengumpulkan informasi mengenai alasan dalam mengurangi pemakaian listrik. Ada tiga alasan utama yang dikumpulkan, yaitu penghematan biaya, keterbatasan daya/pasokan sumber listrik, dan keperdulian lingkungan. Alasan tertinggi rumah tangga melakukan upaya pengurangan pemakaian listrik adalah penghematan biaya (94,97 persen). Alasan pengurangan pemakaian listrik karena keterbatasan daya/pasokan sumber listrik hanya 3,92 persen rumah tangga, dan alasan perduli lingkungan 1,11 persen. Variasi alasan rumah tangga melakukan pengurangan pemakaian listrik per provinsi dapat dilihat pada Tabel 6.4.3. Provinsi Bengkulu memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang alasan melakukan pengurangan pemakaian listrik karena perduli lingkungan (4,01 persen), Provinsi Maluku memiliki persentase tertinggi alasan rumah tangga melakukan pengurangan pemakaian listrik karena keterbatasan daya/pasokan listrik (20,33 persen), dan Provinsi Bali memiliki persentase tertinggi alasan rumah tangga melakukan pengurangan pemakaian listrik untuk menghemat biaya (98,04 persen).

6.2 Penggunaan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak

Aspek lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan energi rumah tangga adalah penggunaan bahan bakar memasak. Sumber energi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, diantaranya adalah listrik, gas, minyak tanah, briket, arang, kayu bakar, dan lainnya. Dalam publikasi ini, akan sajikan terutama penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak.

Kayu bakar merupakan jenis bahan bakar memasak yang paling murah, dan relatif mudah didapatkan karena banyak tersedia di alam. Namun, penggunaan kayu bakar memberikan dampak yang negatif, seperti gangguan kesehatan, polusi udara, dan efek rumah kaca. Selain itu, penggunaan kayu bakar dalam jangka panjang dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya hutan.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar Memasak Menurut Tipe Daerah, 2013

Tipe Daerah	Menggunakan Kayu Bakar			Tidak	Jumlah
	Sampai sekarang	Sekarang tidak lagi	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	17,31	2,66	19,97	80,03	100,00
Perdesaan	65,06	3,86	68,92	31,08	100,00
Perkotaan+ Perdesaan	41,21	3,26	44,47	55,53	100,00

Dari Tabel 6.2 terlihat bahwa hampir separuh (44,47 persen) rumah tangga pernah menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak. Dari 44,47 persen rumah tangga yang pernah menggunakan kayu bakar untuk memasak sampai sekarang sekitar 41,21 persen rumah tangga masih menggunakan kayu bakar.

Persentase rumah tangga di perdesaan yang menggunakan kayu bakar untuk memasak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan (68,92 persen berbanding 19,97 persen). Dari 68,92 persen rumah tangga di perdesaan yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, sekitar 65,06 persen rumah tangga yang sampai saat pencacahan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Bila dilihat variasi penggunaan kayu bakar per provinsi (Tabel 6.5), masih ada beberapa provinsi

yang tingkat penggunaan kayu bakarnya relatif cukup tinggi. Persentase tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (86,48 persen), Provinsi Sulawesi Barat (83,38 persen), dan Provinsi Sulawesi Tengah (77,15 persen).

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar untuk Memasak Menurut Cara Memperolehnya, 2013

Cara Memperolehnya	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembelian	17,46	6,00	8,57
Mencari sendiri	65,58	84,49	80,25
Pemberian	3,35	0,77	1,35
Pembelian dan Mencari Sendiri	6,32	4,33	4,78
Mencari Sendiri dan Pemberian	2,51	2,32	2,37
Lebih dari satu cara lainnya	3,27	1,46	1,85
Lainnya	1,51	0,63	0,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Tabel 6.3 menyajikan informasi mengenai rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak menurut cara memperoleh kayu bakar. Persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, memperolehnya dengan cara mencari sendiri (80,25 persen). Selain dengan mencari, ada 8,57 persen rumah tangga yang memperoleh kayu bakar dengan cara membeli. Tabel 6.3 memperlihatkan ada rumah tangga yang memperoleh kayu bakar dengan lebih dari satu cara, sekitar 4,78 persen rumah tangga memperoleh kayu bakar dengan cara membeli dan mencari sendiri, sekitar 2,37 persen rumah tangga memperoleh kayu bakar dengan cara mencari sendiri dan memperolehnya dari pemberian.

Bila dilihat variasi cara memperoleh kayu bakar per provinsi (Tabel 6.6), tiga provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menggunakan kayu bakar untuk memasak, provinsi yang memperoleh kayu bakar tersebut dengan mencari sendiri, adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (88,36 persen), Provinsi Sulawesi Barat (88,54 persen), dan Provinsi Sulawesi Tengah (82,31 persen).

Tabel 6.4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013

Provinsi	Penghematan Biaya	Kepedulian Lingkungan	Perkotaan
			Keterbatasan Daya/ Pasokan Sumber Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	96,72	0,78	2,50
Sumatera Utara	94,53	0,45	5,02
Sumatera Barat	97,29	1,38	1,33
Riau	92,15	1,46	6,40
Jambi	93,70	-	6,30
Sumatera Selatan	95,26	1,58	3,16
Bengkulu	93,31	6,69	-
Lampung	97,73	0,86	1,42
Kep. Bangka Belitung	91,27	0,69	8,04
Kepulauan Riau	96,90	1,63	1,47
DKI Jakarta	93,73	1,92	4,35
Jawa Barat	94,37	1,20	4,44
Jawa Tengah	96,49	1,66	1,84
DI Yogyakarta	95,06	2,34	2,60
Jawa Timur	96,57	1,78	1,66
Banten	93,54	3,40	3,05
Bali	98,97	-	1,03
Nusa Tenggara Barat	95,78	2,54	1,68
Nusa Tenggara Timur	96,76	1,69	1,54
Kalimantan Barat	97,62	0,91	1,47
Kalimantan Tengah	97,17	0,32	2,51
Kalimantan Selatan	94,50	0,68	4,82
Kalimantan Timur	92,49	2,73	4,78
Sulawesi Utara	93,45	0,67	5,87
Sulawesi Tengah	96,34	0,65	3,01
Sulawesi Selatan	95,05	1,20	3,76
Sulawesi Tenggara	90,91	3,36	5,73
Gorontalo	95,03	2,30	2,67
Sulawesi Barat	94,01	5,99	-
Maluku	92,04	0,61	7,35
Maluku Utara	96,11	3,89	-
Papua Barat	95,69	2,49	1,82
Papua	92,72	0,38	6,90
Indonesia	95,09	1,56	3,34

Tabel 6.4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Penghematan Biaya	Kepedulian Lingkungan	Keterbatasan Daya/ Pasokan Sumber Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,30	1,05	1,65
Sumatera Utara	94,11	1,48	4,42
Sumatera Barat	96,13	0,24	3,63
Riau	93,22	0,31	6,47
Jambi	92,96	0,72	6,32
Sumatera Selatan	95,32	0,69	3,99
Bengkulu	94,23	3,22	2,55
Lampung	94,92	0,86	4,22
Kep. Bangka Belitung	90,49	0,57	8,94
Kepulauan Riau	88,22	0,78	11,00
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	94,53	0,55	4,92
Jawa Tengah	98,14	0,64	1,22
DI Yogyakarta	97,46	1,75	0,79
Jawa Timur	96,44	0,40	3,16
Banten	97,95	-	2,05
Bali	97,19	0,76	2,05
Nusa Tenggara Barat	88,02	-	11,98
Nusa Tenggara Timur	94,51	0,20	5,29
Kalimantan Barat	93,01	0,91	6,09
Kalimantan Tengah	87,73	1,05	11,22
Kalimantan Selatan	95,72	1,02	3,27
Kalimantan Timur	82,29	0,57	17,14
Sulawesi Utara	96,12	0,78	3,09
Sulawesi Tengah	92,86	0,45	6,70
Sulawesi Selatan	92,62	0,33	7,05
Sulawesi Tenggara	91,51	2,51	5,98
Gorontalo	86,93	0,47	12,60
Sulawesi Barat	79,44	0,65	19,90
Maluku	68,23	0,82	30,95
Maluku Utara	90,77	0,47	8,76
Papua Barat	94,29	-	5,71
Papua	82,56	-	17,44
Indonesia	94,86	0,66	4,49

Tabel 6.4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Alasan Utama Mengurangi Pemakaian Listrik, 2013

Provinsi	Penghematan Biaya	Kepedulian Lingkungan	Keterbatasan Daya/ Pasokan Sumber Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97,13	0,97	1,90
Sumatera Utara	94,30	0,99	4,70
Sumatera Barat	96,65	0,75	2,60
Riau	92,82	0,74	6,44
Jambi	93,23	0,46	6,31
Sumatera Selatan	95,30	0,97	3,72
Bengkulu	94,02	4,01	1,97
Lampung	95,87	0,86	3,27
Kep. Bangka Belitung	90,84	0,62	8,54
Kepulauan Riau	94,86	1,43	3,71
DKI Jakarta	93,73	1,92	4,35
Jawa Barat	94,42	0,98	4,60
Jawa Tengah	97,45	1,07	1,48
DI Yogyakarta	95,75	2,17	2,08
Jawa Timur	96,49	0,98	2,53
Banten	94,72	2,49	2,78
Bali	98,04	0,39	1,56
Nusa Tenggara Barat	90,93	0,95	8,11
Nusa Tenggara Timur	95,23	0,68	4,09
Kalimantan Barat	94,83	0,91	4,26
Kalimantan Tengah	91,58	0,75	7,66
Kalimantan Selatan	95,31	0,91	3,78
Kalimantan Timur	89,20	2,03	8,77
Sulawesi Utara	95,05	0,74	4,21
Sulawesi Tengah	93,91	0,51	5,59
Sulawesi Selatan	93,43	0,62	5,96
Sulawesi Tenggara	91,28	2,83	5,89
Gorontalo	89,66	1,09	9,26
Sulawesi Barat	83,48	2,13	14,39
Maluku	78,94	0,72	20,33
Maluku Utara	92,44	1,54	6,02
Papua Barat	94,78	0,87	4,36
Papua	89,55	0,26	10,19
Indonesia	94,97	1,11	3,92

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	26,37	53,99	46,16
Sumatera Utara	11,64	53,57	33,23
Sumatera Barat	29,34	76,61	58,48
Riau	12,11	49,57	34,99
Jambi	19,82	63,86	50,82
Sumatera Selatan	15,89	62,27	45,80
Bengkulu	18,62	69,51	53,48
Lampung	27,23	80,39	67,61
Kep. Bangka Belitung	18,45	51,31	35,48
Kepulauan Riau	4,03	46,22	10,90
DKI Jakarta	0,80	-	0,80
Jawa Barat	15,17	56,79	29,94
Jawa Tengah	32,89	70,38	53,40
DI Yogyakarta	32,98	82,77	48,79
Jawa Timur	24,94	69,66	48,68
Banten	13,71	70,61	31,58
Bali	23,63	72,06	41,93
Nusa Tenggara Barat	44,38	76,11	62,52
Nusa Tenggara Timur	46,99	95,87	86,48
Kalimantan Barat	17,15	68,18	53,43
Kalimantan Tengah	19,56	75,06	56,17
Kalimantan Selatan	25,70	63,70	47,32
Kalimantan Timur	4,62	41,98	18,79
Sulawesi Utara	28,24	83,22	58,05
Sulawesi Tengah	40,23	89,11	77,15
Sulawesi Selatan	28,30	75,77	58,72
Sulawesi Tenggara	42,51	90,00	76,82
Gorontalo	38,30	89,65	72,02
Sulawesi Barat	58,51	90,13	83,38
Maluku	28,91	89,04	65,10
Maluku Utara	33,67	91,57	75,53
Papua Barat	17,29	77,48	60,19
Papua	12,39	92,94	73,01
Indonesia	19,97	68,92	44,47

Tabel 6.6.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, Tahun 2013

Provinsi	Pembelian	Mencari Sendiri	Pembelian	Lainnya	Pembelian+ mencari sendiri	Mencari sendiri+ pembelian	Perkotaan
							Kombinasi lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	22,04	70,18	0,62	0,94	3,94	1,72	0,56
Sumatera Utara	24,62	64,07	2,80	1,41	2,61	2,77	1,71
Sumatera Barat	3,98	84,13	4,68	2,75	2,95	0,53	0,98
Riau	12,04	75,10	4,82	4,21	2,95	-	0,88
Jambi	31,82	60,18	6,60	-	0,01	-	1,38
Sumatera Selatan	9,84	81,48	1,48	1,38	3,89	0,35	1,57
Bengkulu	23,08	61,92	7,23	0,95	4,11	1,53	1,17
Lampung	15,34	78,42	2,62	0,47	2,24	-	0,91
Kep. Bangka Belitung	13,12	81,58	1,63	-	2,78	0,89	-
Kepulauan Riau	7,53	85,00	-	-	7,47	-	-
DKI Jakarta	56,93	28,32	14,75	-	-	-	-
Jawa Barat	11,97	67,26	3,03	1,69	8,35	2,89	4,81
Jawa Tengah	24,11	56,56	4,12	1,49	7,13	2,81	3,78
DI Yogyakarta	27,26	51,97	4,18	1,89	4,69	2,50	7,51
Jawa Timur	12,23	68,19	1,95	1,48	9,84	2,65	3,66
Banten	15,35	76,02	0,98	0,17	4,36	2,05	1,08
Bali	8,44	71,09	7,87	3,74	1,27	5,61	1,98
Nusa Tenggara Barat	11,13	70,72	3,42	0,55	3,56	5,21	5,42
Nusa Tenggara Timur	37,79	38,76	4,83	0,59	16,19	1,30	0,55
Kalimantan Barat	2,03	94,59	-	-	1,53	1,85	-
Kalimantan Tengah	24,72	72,66	1,26	0,08	1,16	-	0,12
Kalimantan Selatan	46,69	43,52	6,05	0,62	2,62	0,31	0,19
Kalimantan Timur	7,69	85,11	2,77	3,73	-	0,70	-
Sulawesi Utara	17,12	76,07	2,43	2,00	1,30	0,88	0,21
Sulawesi Tengah	25,62	59,84	4,96	0,71	6,52	1,33	1,02
Sulawesi Selatan	11,16	69,05	5,27	3,72	2,26	4,76	3,77
Sulawesi Tenggara	34,02	56,23	2,53	2,32	2,36	2,53	-
Gorontalo	40,82	53,81	1,42	-	3,96	-	-
Sulawesi Barat	27,28	64,93	7,11	0,68	-	-	-
Maluku	3,75	92,11	3,33	-	0,81	-	-
Maluku Utara	17,73	73,93	6,29	0,36	-	-	1,69
Papua Barat	28,40	70,33	-	1,27	-	-	-
Papua	20,32	67,49	4,66	1,14	-	1,09	5,29
Indonesia	17,46	65,58	3,35	1,51	6,32	2,51	3,27

Tabel 6.6.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, Tahun 2013

Provinsi	Perdesaan						
	Pembe- lian	Mencari Sendiri	Pembe- rian	Lainnya	Pembe- lian+ mencari sendiri	Mencari sendiri+ pembe- rian	Kombi- nasi lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,49	89,82	0,81	0,24	2,88	1,95	0,82
Sumatera Utara	5,71	88,14	0,56	0,97	2,86	1,50	0,26
Sumatera Barat	4,95	90,81	0,38	-	1,63	1,83	0,41
Riau	8,43	88,36	-	1,01	1,70	0	0,49
Jambi	9,63	85,23	0,63	0,18	2,81	0,53	0,98
Sumatera Selatan	7,45	90,16	0,39	0,16	1,29	0,42	0,12
Bengkulu	3,58	93,71	1,11	-	1,01	0,11	0,48
Lampung	3,77	92,31	0,24	0,12	1,78	1,20	0,59
Kep. Bangka Belitung	2,77	95,31	0,65	0,86	0,42	-	-
Kepulauan Riau	11,17	82,72	-	0,41	0,66	2,97	2,07
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,63	80,94	1,64	0,79	5,11	3,96	1,94
Jawa Tengah	8,23	79,46	0,78	0,85	6,18	2,38	2,13
DI Yogyakarta	5,47	85,19	0	0,10	7,37	1,27	0,59
Jawa Timur	6,49	78,16	0,81	0,80	7,83	3,17	2,74
Banten	7,50	78,07	2,26	0,26	5,34	3,04	3,53
Bali	3,63	92,70	0,56	-	2,91	0,20	-
Nusa Tenggara Barat	6,68	83,73	0,57	0,78	3,41	4,38	0,44
Nusa Tenggara Timur	2,10	94,14	0,22	0,31	1,55	1,09	0,59
Kalimantan Barat	1,79	93,31	0,80	0,39	1,18	1,60	0,93
Kalimantan Tengah	7,37	85,48	0,05	-	6,09	0,28	0,73
Kalimantan Selatan	24,87	56,70	0,55	0,38	13,27	2,28	1,95
Kalimantan Timur	3,41	89,18	0,21	0,36	2,97	2,56	1,30
Sulawesi Utara	2,66	90,41	0,60	1,46	1,37	2,43	1,08
Sulawesi Tengah	5,78	85,60	0,67	1,11	2,70	2,37	1,76
Sulawesi Selatan	2,02	90,92	1,21	0,88	0,93	3,56	0,48
Sulawesi Tenggara	4,37	90,94	0,34	1,18	2,22	0,10	0,86
Gorontalo	5,15	89,65	0,49	1,85	2,26	-	0,60
Sulawesi Barat	2,49	92,69	0,19	1,02	0,70	1,57	1,33
Maluku	2,80	94,31	0,78	0,16	0,47	1,19	0,30
Maluku Utara	5,85	87,31	0,25	0,37	2,58	3,37	0,27
Papua Barat	3,56	95,41	0,80	-	0,05	-	0,18
Papua	2,67	92,01	0,29	0,43	0,91	3,50	0,19
Indonesia	6,00	84,49	0,77	0,63	4,33	2,32	1,45

Tabel 6.6.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kayu Bakar sebagai Bahan Bakar untuk Memasak menurut Provinsi dan Cara Memperolehnya, Tahun 2013

Provinsi	Perkotaan+ Perdesaan						
	Pembe- lian	Mencari Sendiri	Pembe- rian	Lainnya	Pembe- lian+ mencari sendiri	Mencari sendiri+ pembe- rian	Kombi- nasi lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,49	86,64	0,78	0,35	3,05	1,91	0,78
Sumatera Utara	8,92	84,05	0,94	1,04	2,82	1,71	0,51
Sumatera Barat	4,76	89,52	1,21	0,53	1,88	1,58	0,52
Riau	8,92	86,57	0,65	1,44	1,87	-	0,55
Jambi	12,20	82,34	1,31	0,16	2,49	0,47	1,03
Sumatera Selatan	7,75	89,09	0,53	0,31	1,61	0,42	0,31
Bengkulu	5,72	90,23	1,78	0,10	1,35	0,26	0,56
Lampung	4,89	90,96	0,47	0,15	1,82	1,09	0,62
Kep. Bangka Belitung	5,36	91,87	0,89	0,64	1,01	0,22	0,00
Kepulauan Riau	10,05	83,43	-	0,28	2,76	2,05	1,44
DKI Jakarta	56,93	28,32	14,75	-	-	-	0,00
Jawa Barat	7,70	76,46	2,10	1,08	6,17	3,61	2,87
Jawa Tengah	12,66	73,07	1,71	1,03	6,45	2,50	2,59
DI Yogyakarta	15,53	69,86	1,93	0,93	6,13	1,84	3,79
Jawa Timur	7,87	75,77	1,09	0,96	8,31	3,04	2,96
Banten	9,84	77,46	1,88	0,23	5,05	2,74	2,80
Bali	5,32	85,12	3,12	1,31	2,33	2,10	0,69
Nusa Tenggara Barat	8,03	79,78	1,44	0,71	3,46	4,63	1,95
Nusa Tenggara Timur	5,82	88,36	0,70	0,34	3,08	1,12	0,59
Kalimantan Barat	1,81	93,43	0,72	0,36	1,21	1,62	0,85
Kalimantan Tengah	9,43	83,96	0,20	0,01	5,51	0,25	0,66
Kalimantan Selatan	29,98	53,61	1,84	0,44	10,78	1,82	1,54
Kalimantan Timur	4,07	88,56	0,61	0,88	2,52	2,28	1,10
Sulawesi Utara	5,88	87,22	1,00	1,58	1,35	2,08	0,89
Sulawesi Tengah	8,31	82,31	1,22	1,06	3,19	2,24	1,67
Sulawesi Selatan	3,60	87,14	1,92	1,37	1,16	3,76	1,05
Sulawesi Tenggara	8,92	85,61	0,67	1,35	2,24	0,48	0,73
Gorontalo	11,66	83,10	0,66	1,51	2,57	-	0,49
Sulawesi Barat	6,20	88,54	1,22	0,97	0,60	1,34	1,13
Maluku	2,97	93,92	1,23	0,13	0,53	0,98	0,24
Maluku Utara	7,32	85,66	0,99	0,37	2,26	2,96	0,45
Papua Barat	5,61	93,34	0,74	0,11	0,05	-	0,16
Papua	3,41	90,98	0,47	0,46	0,87	3,40	0,41
Indonesia	8,57	80,25	1,35	0,83	4,78	2,37	1,85

7

KONDISI LINGKUNGAN

Rasa nyaman merupakan salah satu komponen kualitas hidup yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada suatu wilayah. Kenyamanan yang dimaksud di sini adalah kesempatan seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, memiliki akses terhadap fasilitas yang memadai sehingga kegiatan bermasyarakat dapat berlangsung dengan baik. Semua kondisi tersebut menjadi dasar dalam menentukan pilihan akan tempat tinggal. Dalam bab ini akan disajikan kondisi lingkungan yang meliputi lokasi rumah, tempat penampungan air limbah, polusi, pembuangan sampah, dan fasilitas umum yang tersedia di sekitar rumah.

7.1. Lokasi Rumah

Rumah atau tempat tinggal memiliki beberapa persyaratan untuk menjadi rumah sehat, diantaranya adalah lokasi rumah. Lokasi rumah sehat adalah bila rumah terletak di dalam kawasan permukiman, aman dari ancaman kejahatan, serta aman dari bencana alam. Lokasi rumah yang terletak di daerah rawan banjir atau rawan bencana alam perlu di realokasi dan ditata kembali, karena hal ini dapat membahayakan penghuninya. Selain itu rumah juga harus memiliki infrastruktur seperti jalan, fasilitas listrik dan fasilitas air bersih.

Ketersediaan jalan merupakan infrastruktur yang biasanya diperhitungkan saat memilih lokasi rumah. Semakin banyak akses jalan, semakin mudah mobilitas penghuninya. Ketersediaan jalan biasanya menjadi penentu harga rumah, rumah yang memiliki akses jalan biasanya memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak memiliki akses jalan atau terletak di dalam gang. Tabel 7.1 menggambarkan persentase rumah tangga yang berlokasi di pinggir jalan/gang/lorong menurut jenis permukaan jalan/gang/lorong. Sekitar 36,69 persen rumah tangga tinggal di rumah yang jenis permukaan jalan/gang/lorong terbuat dari aspal, dan sekitar 30,77 persen rumah tangga yang jenis permukaan jalan/gang/lorong terbuat semen/konblok.

Menurut tipe daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga di perkotaan yang permukaan jalan/gang/lorong terbuat dari tanah/pasir sekitar 11,86 persen, yang terbuat dari aspal sekitar 38,91 persen, dan yang terbuat dari semen/konblok sekitar 41,01 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang permukaan jalan/gang/lorong terbuat dari semen/konblok sekitar 19,55 persen, yang terbuat dari tanah/pasir sekitar 25,74 persen, dan yang terbuat dari aspal sekitar 34,24 persen.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/ Gang/ Lorong Menurut Jenis Permukaan Jalan/ Gang/ Lorong dan Tipe Daerah, 2013

Jenis permukaan jalan/ gang/lorong	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal	38,91	34,24	36,69
Semen/konblok	41,01	19,55	30,77
Kerikil/diperkeras	7,07	19,24	12,88
Kayu/bambu	0,36	0,51	0,43
Tanah/pasir	11,86	25,74	18,48
Lainnya	0,78	0,72	0,75

Jalan di lingkungan sekitar rumah biasanya memiliki penerangan jalan. Seperlima rumah tangga tinggal di jalan/gang/lorong yang diperlengkapi dengan lampu penerangan jalan (21,85 persen) yang disediakan pemerintah, sedangkan 30,08 persen berasal dari swadaya masyarakat, dan sekitar 48,06 persen tidak memiliki lampu penerangan jalan. Persentase penerangan jalan yang berasal dari swadaya masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan yang disediakan oleh pemerintah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan, persentase rumah tangga yang lampu penerangan jalannya disediakan oleh pemerintah mencapai sekitar 29,31 persen, sedangkan yang dari swadaya masyarakat mencapai 34,52 persen. Sedangkan di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang lampu penerangan jalannya disediakan oleh pemerintah hanya 14,41 persen, dan yang berasal dari swadaya masyarakat mencapai sekitar 25,66 persen.

Keamanan rumah dari sisi lokasi rumah di daerah rawan bencana hasil Susenas MKP 2013 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang pernah mengalami banjir ada sekitar 9,82 persen. Bencana banjir merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di perkotaan (mencapai 12,62 persen), sedangkan di daerah perdesaan hanya mencapai 7,02 persen. Penyebab banjir dapat berupa hujan, luapan sungai, rob, dan lainnya. Dari kelima kategori penyebab banjir tersebut, hujan merupakan persentase tertinggi penyebab banjir (mencapai 63,14 persen). Penyebab banjir yang lainnya seperti karena luapan sungai mencapai 31,71 persen, dan rob sekitar 3,43 persen.

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Menurut Penyebab Banjir dan Tipe Daerah, 2013

Penyebab banjir	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Hujan	71,75	47,69	63,14
Luapan Sungai	22,84	47,61	31,71
Rob	3,58	3,16	3,43
Lainnya	1,83	1,54	1,72

7.2. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kebersihan merupakan faktor penting dalam kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman. Lingkungan yang tidak bersih dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, sakit perut, dan penyakit kulit. Masyarakat biasanya secara bergotong royongnya melakukan berbagai cara untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membersihkan selokan, membersihkan pekarangan rumah dan lingkungan sekitar rumah.

Kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pembuangan limbah rumah tangga. Pembuangan limbah rumah tangga sebaiknya disalurkan dengan menggunakan saluran tertutup agar limbah rumah tangga tersebut tidak mencemari lingkungan. Tabel 7.3 memperlihatkan bahwa hanya sekitar 34,05 persen rumah

tangga yang menggunakan saluran tertutup dalam membuang air limbah/mandi/dapur/cuci. Masih banyak rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka untuk membuang air limbahnya (43,10 persen), bahkan sekitar 22,85 persen rumah tangga tidak menggunakan saluran dalam membuang air limbahnya. Air limbah yang dibuang tanpa menggunakan saluran, ataupun menggunakan saluran terbuka akan sangat membahayakan kesehatan penduduk sekitar rumah, dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Persentase rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka (46,26 persen) atau bahkan tidak menggunakan saluran (35,01 persen) dalam membuang air limbah/mandi/cuci relatif tinggi di daerah perdesaan. Sedangkan di daerah perkotaan, persentase rumah tangga yang menggunakan saluran terbuka sekitar 39,93 persen, dan tidak menggunakan saluran dalam membuang air limbah/mandi/cuci sekitar 10,66 persen.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Saluran Pembuangan Air Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci dan Tipe Daerah, 2013

Saluran Pembuangan air limbah/mandi/dapur/cuci	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Saluran terbuka	39,93	46,26	43,10
Saluran tertutup	49,41	18,73	34,05
Tanpa Saluran	10,66	35,01	22,85

Selain saluran pembuangan air limbah/mandi/cuci, tempat pembuangan akhir limbah juga perlu diperhatikan. Tabel 7.4 menunjukkan bahwa sekitar 55 persen rumah tangga yang tempat pembuangan akhir air limbah/mandi/dapur/cuci adalah got/selokan/sungai. Keadaan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat pembuangan akhir air limbah yang aman untuk kesehatan adalah di buang ke penampungan air limbah, seperti perpipaan air limbah, tangki septik, atau sumur resapan, relatif masih kecil. Provinsi yang persentase rumah tangga membuang air limbah/mandi/dapur/cuci ke got/selokan/sungai masih cukup tinggi adalah DKI Jakarta (80,97 persen), Sulawesi Utara (71,46 persen), dan Kalimantan Timur (69,24 persen) (Tabel 7.16.3).

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Air Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci dan Tipe Daerah, 2013

Tempat pembuangan akhir air limbah/mandi/dapur/cuci	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perpipaan air limbah	2,99	1,44	2,22
Tangki septik	11,25	4,74	7,99
Sumur resapan	2,76	1,41	2,08
Lubang tanah	9,73	26,28	18,02
Got/selokan/ sungai	66,20	43,89	55,03
Lainnya	7,07	22,24	14,07

Keadaan air got/selokan yang ada di sekitar rumah juga perlu diperhatikan, terutama bila rumah tangga membuang air limbahnya langsung ke got. Air got/selokan yang tidak mengalir akan mengundang berbagai macam penyakit seperti diare, demam berdarah, dan lainnya. Tabel 7.5 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga keadaan air got/selokan di sekitar rumahnya mengalir dengan lancar (57,08 persen). Namun, sekitar 12,46 persen yang air got/selokannya mengalir lambat, dan masih sekitar 3,63 persen rumah tangga yang air got/selokannya tergenang, bahkan sekitar 26,83 persen rumah tangga tidak memiliki got. Di daerah perkotaan, sebagian besar keadaan air got/selokannya mengalir dengan lancar (65,90 persen), sekitar 14,91 persen keadaan air got/selokannya mengalir lambat, sekitar 3,72 persen keadaan air got/selokannya tergenang, dan 15,47 persen yang tidak ada got/selokan. Sedangkan di perdesaan, sekitar 48,28 persen rumah tangga yang keadaan air got/selokannya mengalir lancar, dan 38,17 persen yang tidak ada air got/selokan.

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Keadaan Air Got/ Selokan Di Sekitar Rumah dan Tipe Daerah, 2013

Keadaan air got/selokan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lancar	65,90	48,28	57,08
Mengalir lambat	14,91	10,01	12,46
Tergenang	3,72	3,54	3,63
Tidak ada got	15,47	38,17	26,83

Keberadaan MCK komunal atau umum merupakan program pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan menyediakan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang belum tersedia fasilitas sanitasi layak di rumah maupun lingkungan perumahannya. MCK komunal/umum adalah sarana umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan buang air yang terletak di lokasi pemukiman. Tabel 7.6 memperlihatkan bahwa sekitar 10,57 persen rumah tangga ada fasilitas MCK komunal/umum di lingkungan perumahannya. Persentase keberadaan MKC komunal/umum relatif sama baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu sekitar 10 persen.

Tabel 7.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan MCK Komunal/ Umum dan Tipe Daerah, 2013

Terdapat MCK komunal/umum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	10,40	10,74	10,57
Tidak	89,60	89,26	89,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Salah satu perilaku hidup sehat yang sangat berpengaruh terhadap kebersihan lingkungan adalah cara pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat kesehatan adalah dengan cara dibuang ke tempat penampungan akhir (TPA) baik dilakukan sendiri oleh rumah tangga maupun di

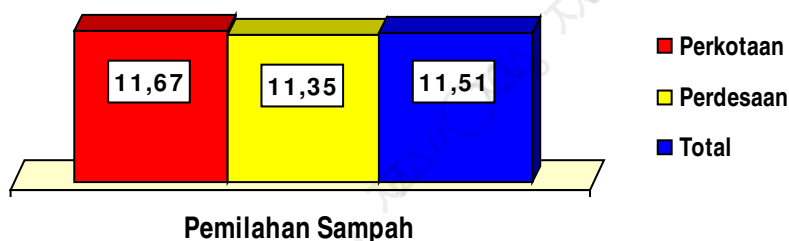
angkut oleh petugas sampah, di setor ke bank sampah, didaur ulang, atau dibuat kompos. Tabel 7.7 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga membuang sampah dengan cara membakar (63,06 persen), dan masih cukup banyak rumah tangga yang membuang sampahnya sembarangan (16,90 persen), atau membuang sampah ke kali/selokan (11,91 persen). Hanya sekitar 25,02 persen rumah tangga yang sampahnya diangkut petugas, sekitar 5,79 persen dibuang ke TPA, 0,33 persen di daur ulang, 2,18 persen dibuat kompos, 1,21 persen disetor ke bank sampah.

Tabel 7.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Pembuangan Sampah dan Tipe Daerah, 2013

Cara pembuangan sampah	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Diangkut petugas	46,85	3,25	25,02
Dibuang ke TPA	59,21	2,38	5,79
Didaur ulang	0,34	0,32	0,33
Dibuat kompos	1,17	3,18	2,18
Disetor ke bank sampah	1,88	0,54	1,21
Dibuang ke kali/selokan	8,26	15,55	11,91
Dibuang sembarangan	7,83	25,95	16,90
Dibakar	45,31	80,76	63,06
Ditimbun	10,36	24,55	17,46
Lainnya	5,03	9,36	7,20

Sebelum sampah dibuang, sebaiknya rumah tangga melakukan pemilahan sampah dengan tujuan untuk membedakan sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Sampah organik bisa dibuat menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat di daur ulang. Persentase rumah tangga yang sudah melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik mencapai 11,51 persen (Gambar 7.1). Bila dilihat menurut daerah, persentase rumah tangga di daerah perkotaan yang sudah melakukan pemilahan sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik) relatif sama dengan di daerah perdesaan (11,67 persen berbanding 11,35 persen). Provinsi yang memiliki persentase tertinggi rumah tangga yang memilah sampah organik dan anorganik adalah DI Yogyakarta (19,48 persen), Sulawesi Utara (18,45 persen), dan Papua Barat (18,36 persen) (Tabel 7.20).

Selain cara pembuangan sampah, kesehatan lingkungan juga dipengaruhi oleh polusi. Polusi yang timbul di lingkungan perumahan dan permukiman dapat mengganggu kesehatan seperti polusi asap, bau, suara, dan debu. Tabel 7.8 memperlihatkan bahwa jenis gangguan/polusi yang paling banyak dialami oleh rumah tangga adalah polusi suara/bunyi-bunyian (7,89 persen), terutama banyak dialami oleh rumah tangga di daerah perkotaan yang mencapai 10,19 persen sedangkan di perdesaan hanya 5,59 persen. Tiga provinsi, pada Tabel 7.21.3, yang memiliki jenis polusi suara/bunyi-bunyian tertinggi adalah Maluku (19,75 persen), Sulawesi Utara (14,80 persen), dan Maluku Utara (14,55 persen).



Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Tipe Daerah, 2013

Selain polusi suara, polusi lainnya yang dirasakan cukup mengganggu rumah tangga adalah polusi bau (7,71 persen), polusi debu (5,11 persen), dan polusi asap (3,50 persen). Keseluruhan jenis polusi ini lebih banyak dirasakan mengganggu rumah tangga di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Dan keempat jenis polusi ini, polusi yang sangat mengganggu kesehatan adalah polusi asap. Tiga provinsi yang mengalami polusi asap tertinggi (Tabel 7.21.3) adalah Maluku (7,57 persen), Banten (6,68 persen), dan DKI Jakarta (5,41 persen). Tiga provinsi yang mengalami polusi bau tertinggi adalah Banten (12,82 persen), NTT (10,59 persen), dan DKI Jakarta (10,68 persen). Polusi debu paling banyak dialami oleh provinsi Kalimantan Timur (11,98 persen), Sumatera utara (11,94 persen), dan Jambi (10,35 persen).

Tabel 7.8 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Jenis Polusi dan Tipe Daerah, 2013

Jenis polusi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Asap	5,01	2,00	3,50
Bau	10,14	5,29	7,71
Suara/bunyi-bunyian	10,19	5,59	7,89
Debu	6,08	4,14	5,11

Sumber polusi dari keempat jenis polusi yang mengganggu rumah tangga dapat berasal dari pabrik, terminal, pasar, bengkel, kendaraan bermotor, kandang hewan, selokan/sungai, dan sampah. Tabel 7.9 memperlihatkan bahwa polusi asap/bau/suara bersumber dari kendaraan bermotor (46,16 persen) merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber polusi lainnya. Sumber polusi lainnya adalah sumber polusi bau/suara dari kandang hewan (16,35 persen), polusi asap/bau/suara yang berasal dari pabrik (15,17 persen), polusi bau yang berasal dari got/selokan/sungai (14,05 persen), dan polusi asap/bau yang berasal dari sampah (12,50 persen). Di daerah perkotaan, persentase tertinggi rumah tangga mengalami polusi asap/bau/suara yang berasal dari kendaraan bermotor (43,35 persen), polusi asap/bau/suara dari pabrik (16,78 persen), polusi bau yang berasal dari got/selokan/sungai (15,56 persen), polusi asap/bau yang berasal dari sampah (13,05 persen). Di daerah perdesaan, polusi asap/bau/suara yang berasal dari kendaraan bermotor mencapai 51,16 persen, dan polusi bau/suara yang berasal dari kandang hewan mencapai 23,39 persen

Tabel 7.9 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Sumber Polusi dan Tipe Daerah, 2013

Sumber polusi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Asap/bau/suara pabrik	16,78	12,31	15,17
Asap/bau/suara terminal	0,53	0,31	0,45
Asap/bau/suara pasar	3,12	2,08	2,75
Asap/bau/suara bengkel	4,33	3,92	4,18
Asap/bau/suara kendaraan bermotor	43,35	51,16	46,16
Bau/suara kandang hewan	12,40	23,39	16,35
Bau got/selokan/sungai	15,56	11,37	14,05
Asap/bau/suara tetangga	14,36	13,38	14,00
Asap/bau sampah	13,05	11,50	12,50
Lainnya	13,58	13,31	13,49

7.3 Fasilitas Umum

Keberadaan fasilitas umum dalam lingkungan perumahan merupakan salah satu syarat permukiman yang baik dan merupakan program pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan. Sarana dan prasarana perumahan yang dibangun dalam wilayah perumahan dan permukiman adalah angkutan, gedung sekolah, pasar, sarana kesehatan, ruang publik, dan lainnya.

Sarana sekolah, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar pendidikan, cukup banyak yang berjarak antara 1 sampai 2 km dari rumah. Persentase rumah tangga yang jarak antara rumah dan sarana sekolah dasar kurang dari 1 km sebesar 35,29 persen, dan yang jarak dari rumah ke sarana sekolah dasar antara 1 sampai 2 km sebesar 57,33 persen. Sekitar 3,87 persen rumah tangga yang jarak ke sarana sekolah dasarnya antara 3 sampai 4 km, dan yang jaraknya lebih dari 5 km sekitar 3,52 persen. Dari Tabel 7.10 terlihat bahwa semakin tinggi jenjang sekolah, semakin jauh jarak dari rumah ke sekolah.

Fasilitas umum yang jaraknya relatif dekat dari rumah adalah tempat ibadah dimana persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke tempat ibadah kurang dari 1 km mencapai 63,98 persen, dan yang jarak dari rumah ke tempat ibadah antara 1 sampai 2 km mencapai 31,93 persen. Fasilitas angkutan umum juga sudah tersedia dan relatif menjangkau masyarakat, dimana persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke jalur angkutan umum kurang dari 1 km sekitar 32,18 persen, dan yang jarak dari rumah ke jalur angkutan umum antara 1 sampai 2 km mencapai 36,38 persen. Demikian juga dengan pasar tradisional, persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke pasar tradisional kurang dari 1 km sekitar 10 persen, dan yang jarak dari rumah ke pasar tradisional antara 1 sampai 2 km mencapai 44 persen.

Jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan relatif jauh, dimana persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke rumah sakit lebih dari 5 km mencapai lebih dari 70 persen. Namun, pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan menyediakan puskesmas yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke puskesmas kurang dari 2 km mencapai 53,61 persen.

Fasilitas bank dan pos polisi relatif cukup jauh jaraknya dari rumah tangga. Jarak dari rumah ke bank atau pos polisi sekitar 3 km lebih. Persentase rumah tangga yang jarak dari rumah ke fasilitas bank lebih dari 5 km mencapai 38,52 persen, yang jaraknya antara 3 sampai 4 km mencapai 17,90 persen, yang jaraknya antara 1 sampai 2 km mencapai 36,49 persen. Sedangkan jarak dari rumah ke pos polisi yang lebih dari 5 km mencapai 37,39 persen, yang jarak dari rumah ke pos polisi antara 3 sampai 4 km mencapai 21,38 persen, dan yang jarak dari rumah ke pos polisi antara 1 sampai 2 km mencapai 36,22 persen.

Tabel 7.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Umum dan Jarak dari Rumah (dalam Kilometer), 2013

Jenis Fasilitas Umum	Jarak ke Fasilitas Umum (km)				Jumlah
	< 1	1-2	3-4	≥ 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS Pemerintah	0,72	9,91	10,00	79,36	100,00
RS Swasta	1,45	17,02	11,82	69,70	100,00
Puskesmas	7,31	46,30	20,83	25,56	100,00
Poliklinik	8,28	36,51	13,41	41,80	100,00
Pos Polisi	5,01	36,22	21,38	37,39	100,00
Pasar Tradisional	10,00	44,00	19,00	26,99	100,00
Pasar Modern	5,87	30,31	13,87	49,95	100,00
Sekolah Dasar	35,29	57,33	3,87	3,52	100,00
Sekolah Menengah Pertama	13,70	56,69	17,44	12,17	100,00
Sekolah Menengah Atas	8,29	42,97	20,12	28,62	100,00
Bank	7,09	36,49	17,90	38,52	100,00
Tempat Ibadah	63,98	31,93	1,71	2,39	100,00
Jalur Angkutan Umum	32,18	36,38	10,29	21,15	100,00

Tabel 7.11.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/ Letak Rumah, 2013

Provinsi	Perkotaan			
	Ditepian sungai, danau	Dipinggir, dalam hutan	Dipinggir rel kereta	Dipinggir jalan, lorong, gang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,38	1,22	0,33	94,87
Sumatera Utara	3,06	0,36	1,99	94,01
Sumatera Barat	3,44	2,30	1,78	86,49
Riau	1,82	1,09	-	96,68
Jambi	8,03	1,10	-	94,69
Sumatera Selatan	3,14	1,57	1,21	95,40
Bengkulu	1,02	1,29	-	98,13
Lampung	2,17	0,23	3,14	90,60
Kep. Bangka Belitung	4,01	2,55	0,04	88,43
Kepulauan Riau	4,66	2,18	-	86,91
DKI Jakarta	7,84	0,03	1,47	92,08
Jawa Barat	2,76	1,18	1,00	87,56
Jawa Tengah	4,02	0,68	1,09	91,53
DI Yogyakarta	1,93	-	-	94,36
Jawa Timur	3,74	1,21	1,06	92,23
Banten	0,70	0,03	1,40	88,87
Bali	3,43	0,94	0,11	97,84
Nusa Tenggara Barat	4,70	5,00	-	68,18
Nusa Tenggara Timur	3,72	0,85	0,73	90,74
Kalimantan Barat	9,38	7,54	0,44	96,61
Kalimantan Tengah	12,21	4,74	-	97,80
Kalimantan Selatan	6,30	1,09	-	96,12
Kalimantan Timur	9,83	1,84	0,27	95,03
Sulawesi Utara	4,54	1,25	-	94,20
Sulawesi Tengah	7,24	2,17	-	91,07
Sulawesi Selatan	5,41	2,15	0,15	92,74
Sulawesi Tenggara	2,42	2,66	-	92,67
Gorontalo	7,24	-	-	97,31
Sulawesi Barat	7,88	-	-	95,93
Maluku	9,92	4,94	-	93,60
Maluku Utara	4,63	1,71	-	94,59
Papua Barat	7,24	6,69	-	91,77
Papua	4,13	4,13	0,54	85,80
Indonesia	3,97	1,15	0,96	90,84

Tabel 7.11.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/ Letak Rumah, 2013

Perdesaan				
Provinsi	Ditepian sungai, danau	Dipinggir, dalam hutan	Dipinggir rel kereta	Dipinggir jalan, lorong, gang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,88	5,14	0,19	94,98
Sumatera Utara	6,19	7,20	0,35	84,49
Sumatera Barat	7,43	13,85	0,24	83,30
Riau	9,00	7,11	-	93,21
Jambi	9,22	5,55	0,14	94,15
Sumatera Selatan	8,37	7,23	-	90,53
Bengkulu	3,01	2,74	0,18	95,52
Lampung	2,55	3,74	0,07	95,04
Kep. Bangka Belitung	2,45	12,23	0,37	88,91
Kepulauan Riau	44,18	9,52	-	70,02
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1,98	10,39	0,13	71,76
Jawa Tengah	2,34	3,97	0,39	87,65
DI Yogyakarta	1,74	3,83	-	86,01
Jawa Timur	3,44	5,88	0,32	79,63
Banten	6,87	10,60	0,24	73,81
Bali	4,07	3,03	0,14	91,85
Nusa Tenggara Barat	5,51	6,92	-	71,96
Nusa Tenggara Timur	2,53	8,60	0,18	81,53
Kalimantan Barat	15,32	18,84	-	81,23
Kalimantan Tengah	27,77	25,71	0,14	90,07
Kalimantan Selatan	26,09	8,76	-	90,80
Kalimantan Timur	19,10	26,92	0,21	80,57
Sulawesi Utara	6,24	4,81	0,22	87,43
Sulawesi Tengah	7,83	9,70	0,04	92,71
Sulawesi Selatan	4,02	9,36	0,23	86,52
Sulawesi Tenggara	6,92	6,15	-	92,00
Gorontalo	9,58	2,02	-	95,90
Sulawesi Barat	7,98	9,31	-	87,20
Maluku	18,80	15,83	-	80,83
Maluku Utara	21,09	10,16	0,17	88,58
Papua Barat	24,11	27,98	-	72,42
Papua	9,13	63,06	0,04	31,09
Indonesia	5,76	8,99	0,20	82,70

Tabel 7.11.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Lokasi/ Letak Rumah, 2013

Perkotaan + Perdesaan				
Provinsi	Ditepian sungai, danau	Dipinggir, dalam hutan	Dipinggir rel kereta	Dipinggir jalan, lorong, gang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,02	4,03	0,23	94,95
Sumatera Utara	4,67	3,88	1,15	89,11
Sumatera Barat	5,90	9,42	0,83	84,53
Riau	6,20	4,77	-	94,56
Jambi	8,87	4,23	0,10	94,31
Sumatera Selatan	6,52	5,22	0,43	92,26
Bengkulu	2,39	2,28	0,13	96,34
Lampung	2,46	2,90	0,81	93,97
Kep. Bangka Belitung	3,20	7,57	0,21	88,68
Kepulauan Riau	11,10	3,38	-	84,16
DKI Jakarta	7,84	0,03	1,47	92,08
Jawa Barat	2,49	4,44	0,69	81,95
Jawa Tengah	3,10	2,48	0,70	89,40
DI Yogyakarta	1,87	1,21	-	91,71
Jawa Timur	3,58	3,69	0,67	85,54
Banten	2,64	3,35	1,04	84,14
Bali	3,67	1,73	0,12	95,58
Nusa Tenggara Barat	5,17	6,10	-	70,34
Nusa Tenggara Timur	2,76	7,11	0,29	83,30
Kalimantan Barat	13,60	15,57	0,13	85,67
Kalimantan Tengah	22,47	18,57	0,09	92,70
Kalimantan Selatan	17,56	5,45	-	93,10
Kalimantan Timur	13,35	11,35	0,25	89,55
Sulawesi Utara	5,46	3,18	0,12	90,53
Sulawesi Tengah	7,68	7,86	0,03	92,31
Sulawesi Selatan	4,52	6,77	0,20	88,75
Sulawesi Tenggara	5,67	5,18	-	92,18
Gorontalo	8,77	1,33	-	96,38
Sulawesi Barat	7,96	7,33	-	89,07
Maluku	15,27	11,50	-	85,91
Maluku Utara	16,53	7,82	0,12	90,25
Papua Barat	19,26	21,87		77,98
Papua	7,89	48,48	0,17	44,63
Indonesia	4,87	5,08	0,58	86,77

Tabel 7.12.1 Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/ Gang/ Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/ Gang/ Lorong, 2013

Perkotaan						
Provinsi	Aspal	Semen/ konblok	Kerikil/ diperkeras	Kayu/ bambu	Tanah/ pasir	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	54,78	18,19	14,26	0,08	12,32	0,38
Sumatera Utara	46,91	23,23	12,10	0,20	17,46	0,10
Sumatera Barat	51,69	23,96	11,19	0,38	12,78	-
Riau	38,95	30,98	8,87	1,67	19,53	-
Jambi	49,25	22,85	10,06	0,70	16,90	0,25
Sumatera Selatan	24,81	53,35	8,40	0,72	12,19	0,53
Bengkulu	61,93	15,40	13,92	-	8,75	-
Lampung	49,06	24,67	16,72	0,09	8,52	0,95
Kep. Bangka Belitung	62,43	15,10	3,67	-	18,80	-
Kepulauan Riau	55,04	27,43	0,78	0,26	16,49	-
DKI Jakarta	53,25	40,05	3,03	-	3,24	0,43
Jawa Barat	27,25	51,65	8,26	-	12,13	0,71
Jawa Tengah	40,25	41,78	6,68	0,13	9,81	1,35
DI Yogyakarta	37,64	50,41	2,64	-	9,31	-
Jawa Timur	40,73	38,90	4,57	0,09	14,05	1,66
Banten	25,88	58,77	3,69	0,04	11,36	0,25
Bali	53,75	31,62	3,63	-	8,63	2,37
Nusa Tenggara Barat	32,80	34,72	11,38	-	20,71	0,38
Nusa Tenggara Timur	54,69	17,75	8,31	-	19,24	-
Kalimantan Barat	32,82	50,15	5,78	0,81	10,17	0,27
Kalimantan Tengah	43,75	22,18	4,93	9,61	19,53	-
Kalimantan Selatan	44,99	26,26	11,98	3,67	12,81	0,28
Kalimantan Timur	27,02	51,52	7,24	4,33	9,31	0,58
Sulawesi Utara	57,90	20,69	9,72	0,35	11,04	0,31
Sulawesi Tengah	56,67	9,03	20,86	-	13,03	0,42
Sulawesi Selatan	44,08	34,47	9,45	0,24	11,27	0,48
Sulawesi Tenggara	46,14	19,99	14,37		18,64	0,86
Gorontalo	55,13	13,94	5,85	1,50	23,58	
Sulawesi Barat	42,46	29,20	18,18	-	9,89	0,28
Maluku	40,94	43,09	2,01	-	13,96	-
Maluku Utara	63,22	26,13	3,97	-	6,68	-
Papua Barat	35,21	36,09	7,86	2,54	18,31	-
Papua	52,04	20,92	13,29	1,48	12,07	0,20
Indonesia	38,91	41,01	7,07	0,36	11,86	0,78

Tabel 7.12.2 Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/ Gang/ Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/ Gang/ Lorong, 2013

Perdesan						
Provinsi	Aspal	Semen/ konblok	Kerikil/ diperkeras	Kayu/ bambu	Tanah/ pasir	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	36,33	12,13	26,66	0,20	23,63	1,04
Sumatera Utara	38,34	5,10	26,07	0,20	30,11	0,19
Sumatera Barat	39,57	21,73	18,52	0,10	19,89	0,19
Riau	19,32	26,51	20,33	0,83	32,89	0,12
Jambi	35,95	17,04	19,36	0,86	26,79	-
Sumatera Selatan	30,64	17,92	15,86	1,71	33,35	0,51
Bengkulu	53,52	5,70	27,17	-	13,52	0,08
Lampung	27,17	4,14	37,52	0,36	30,39	0,41
Kep. Bangka Belitung	61,98	6,58	10,05	-	21,39	-
Kepulauan Riau	35,52	29,97	0,23	7,93	25,85	0,50
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	25,58	26,59	16,97	0,17	30,34	0,36
Jawa Tengah	32,87	32,57	16,32	0,12	17,22	0,89
DI Yogyakarta	29,81	42,71	10,92		16,10	0,46
Jawa Timur	40,35	17,31	14,83	0,02	26,13	1,35
Banten	35,19	27,25	17,15	0,05	18,80	1,57
Bali	52,55	22,28	3,09	0,20	21,89	-
Nusa Tenggara Barat	32,54	19,54	14,19	0,12	33,31	0,30
Nusa Tenggara Timur	32,07	9,90	20,57	0,18	35,89	1,39
Kalimantan Barat	23,12	22,21	8,50	2,87	42,91	0,39
Kalimantan Tengah	17,84	25,70	11,50	4,52	39,10	1,35
Kalimantan Selatan	48,09	9,11	20,04	3,38	18,93	0,45
Kalimantan Timur	26,99	31,29	14,73	3,94	22,94	0,10
Sulawesi Utara	56,53	11,22	21,69	-	9,44	1,12
Sulawesi Tengah	45,10	3,92	31,14	0,29	19,54	-
Sulawesi Selatan	41,73	9,79	29,34	0,08	17,55	1,52
Sulawesi Tenggara	33,97	4,88	39,62	0,05	21,44	0,04
Gorontalo	49,90	12,76	19,88	-	17,46	-
Sulawesi Barat	23,81	17,41	29,74	-	28,44	0,61
Maluku	25,74	38,25	10,32	0,09	25,47	0,13
Maluku Utara	31,22	25,57	14,92	0,57	27,07	0,65
Papua Barat	23,14	28,60	20,88	0,39	25,34	1,65
Papua	21,38	3,71	10,71	3,47	59,93	0,80
Indonesia	34,24	19,55	19,24	0,51	25,74	0,72

Tabel 7.12.3 Persentase Rumah Tangga yang Berlokasi di Pinggir Jalan/ Gang/ Lorong Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Jalan/ Gang/ Lorong, 2013

Perkotaan + Perdesan						
Provinsi	Aspal	Semen/ konblok	Kerikil/ diperkeras	Kayu/ bambu	Tanah/ pasir	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	41,55	13,85	23,15	0,17	20,43	0,85
Sumatera Utara	42,73	14,38	18,92	0,20	23,64	0,14
Sumatera Barat	44,33	22,61	15,64	0,21	17,10	0,12
Riau	27,13	28,29	15,77	1,16	27,57	0,07
Jambi	39,91	18,77	16,59	0,81	23,85	0,07
Sumatera Selatan	28,50	30,93	13,12	1,35	25,58	0,52
Bengkulu	56,22	8,81	22,92	-	11,99	0,06
Lampung	32,24	8,90	32,70	0,30	25,33	0,54
Kep. Bangka Belitung	62,20	10,67	6,99	-	20,14	-
Kepulauan Riau	52,39	27,78	0,71	1,30	17,75	0,07
DKI Jakarta	53,25	40,05	3,03	-	3,24	0,43
Jawa Barat	26,73	43,87	10,96	0,05	17,78	0,60
Jawa Tengah	36,29	36,84	11,85	0,13	13,79	1,10
DI Yogyakarta	35,31	48,12	5,11	-	11,33	0,14
Jawa Timur	40,54	28,23	9,64	0,06	20,02	1,51
Banten	28,45	50,09	7,39	0,04	13,41	0,62
Bali	53,31	28,23	3,43	0,07	13,45	1,51
Nusa Tenggara Barat	32,65	25,84	13,02	0,07	28,08	0,33
Nusa Tenggara Timur	36,80	11,54	18,00	0,15	32,41	1,10
Kalimantan Barat	26,28	31,32	7,61	2,20	32,24	0,35
Kalimantan Tengah	27,14	24,44	9,14	6,35	32,07	0,86
Kalimantan Selatan	46,71	16,74	16,45	3,51	16,21	0,38
Kalimantan Timur	27,01	44,62	9,79	4,20	13,96	0,42
Sulawesi Utara	57,18	15,73	15,99	0,16	10,20	0,73
Sulawesi Tengah	47,89	5,16	28,66	0,22	17,97	0,10
Sulawesi Selatan	42,61	19,05	21,87	0,14	15,19	1,13
Sulawesi Tenggara	37,37	9,09	32,58	0,04	20,66	0,27
Gorontalo	51,71	13,16	15,02	0,52	19,58	-
Sulawesi Barat	28,09	20,12	27,08	-	24,18	0,53
Maluku	32,33	40,35	6,72	0,05	20,48	0,07
Maluku Utara	40,51	25,73	11,74	0,41	21,15	0,46
Papua Barat	27,22	31,13	16,48	1,12	22,96	1,09
Papua	35,96	11,90	11,94	2,52	37,17	0,51
Indonesia	36,69	30,77	12,88	0,43	18,48	0,75

Tabel 7.13.1 Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013

Perkotaan			
Provinsi	Ya, disediakan pemerintah	Ya, dari swadaya masyarakat	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	56,29	11,80	31,91
Sumatera Utara	54,54	16,57	28,89
Sumatera Barat	41,20	12,35	46,45
Riau	33,83	28,82	37,35
Jambi	47,16	7,78	45,05
Sumatera Selatan	33,12	13,32	53,56
Bengkulu	26,42	27,51	46,06
Lampung	26,85	25,94	47,21
Kep. Bangka Belitung	32,77	7,45	59,78
Kepulauan Riau	18,14	26,25	55,61
DKI Jakarta	53,75	28,69	17,56
Jawa Barat	15,68	31,70	52,62
Jawa Tengah	26,44	51,69	21,87
DI Yogyakarta	22,64	67,33	10,04
Jawa Timur	27,73	54,29	17,98
Banten	13,41	40,28	46,31
Bali	51,11	25,57	23,32
Nusa Tenggara Barat	27,37	24,69	47,94
Nusa Tenggara Timur	16,12	7,37	76,52
Kalimantan Barat	41,02	15,21	43,77
Kalimantan Tengah	27,56	24,49	47,95
Kalimantan Selatan	35,80	39,13	25,07
Kalimantan Timur	33,21	15,84	50,95
Sulawesi Utara	31,33	11,92	56,75
Sulawesi Tengah	41,35	9,40	49,25
Sulawesi Selatan	58,75	8,91	32,34
Sulawesi Tenggara	28,75	19,81	51,45
Gorontalo	34,51	19,30	46,19
Sulawesi Barat	48,38	0,93	50,69
Maluku	19,97	12,78	67,25
Maluku Utara	24,90	7,52	67,58
Papua Barat	13,50	11,88	74,61
Papua	20,51	11,73	67,76
Indonesia	29,31	34,52	36,17

Tabel 7.13.2 Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013

Perdesaan			
Provinsi	Ya, disediakan pemerintah	Ya, dari swadaya masyarakat	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	22,76	13,85	63,39
Sumatera Utara	20,57	11,96	67,46
Sumatera Barat	17,27	9,16	73,58
Riau	6,75	13,74	79,52
Jambi	12,60	9,79	77,62
Sumatera Selatan	16,66	11,27	72,07
Bengkulu	12,61	15,15	72,24
Lampung	9,47	17,10	73,43
Kep. Bangka Belitung	12,11	7,51	80,38
Kepulauan Riau	15,79	16,89	67,32
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	11,43	19,04	69,53
Jawa Tengah	12,14	52,51	35,36
DI Yogyakarta	2,92	59,00	38,08
Jawa Timur	17,56	47,01	35,43
Banten	5,11	19,88	75,01
Bali	29,27	17,18	53,55
Nusa Tenggara Barat	18,11	16,17	65,72
Nusa Tenggara Timur	3,38	1,42	95,20
Kalimantan Barat	14,03	6,54	79,43
Kalimantan Tengah	7,28	17,22	75,50
Kalimantan Selatan	36,59	23,57	39,84
Kalimantan Timur	18,55	15,93	65,52
Sulawesi Utara	15,58	13,21	71,21
Sulawesi Tengah	19,13	11,46	69,41
Sulawesi Selatan	22,54	8,09	69,37
Sulawesi Tenggara	11,22	4,04	84,74
Gorontalo	16,73	13,56	69,71
Sulawesi Barat	11,46	7,50	81,04
Maluku	3,12	14,24	82,64
Maluku Utara	12,59	14,20	73,21
Papua Barat	6,44	14,68	78,88
Papua	5,52	2,90	91,57
Indonesia	14,41	25,66	59,93

Tabel 7.13.3 Persentase Rumah Tangga dengan Ketersediaan Lampu Listrik untuk Penerangan Jalan Menurut Provinsi, 2013

Perkotaan + Perdesaan			
Provinsi	Ya, disediakan pemerintah	Ya, dari swadaya masyarakat	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,26	13,27	54,47
Sumatera Utara	37,05	14,20	48,75
Sumatera Barat	26,44	10,38	63,18
Riau	17,29	19,61	63,10
Jambi	22,84	9,19	67,97
Sumatera Selatan	22,51	12,00	65,50
Bengkulu	16,96	19,04	64,00
Lampung	13,65	19,22	67,13
Kep. Bangka Belitung	22,06	7,48	70,46
Kepulauan Riau	17,76	24,72	57,52
DKI Jakarta	53,75	28,69	17,56
Jawa Barat	14,18	27,21	58,62
Jawa Tengah	18,61	52,14	29,25
DI Yogyakarta	16,38	64,68	18,94
Jawa Timur	22,33	50,43	27,24
Banten	10,81	33,87	55,32
Bali	42,86	22,40	34,74
Nusa Tenggara Barat	22,07	19,82	58,11
Nusa Tenggara Timur	5,83	2,56	91,61
Kalimantan Barat	21,83	9,05	69,12
Kalimantan Tengah	14,18	19,69	66,13
Kalimantan Selatan	36,25	30,27	33,47
Kalimantan Timur	27,65	15,88	56,47
Sulawesi Utara	22,79	12,62	64,59
Sulawesi Tengah	24,57	10,96	64,47
Sulawesi Selatan	35,55	8,39	56,07
Sulawesi Tenggara	16,09	8,41	75,50
Gorontalo	22,83	15,53	61,64
Sulawesi Barat	19,33	6,10	74,57
Maluku	9,83	13,66	76,52
Maluku Utara	16,00	12,35	71,65
Papua Barat	8,47	13,88	77,66
Papua	9,23	5,09	85,68
Indonesia	21,85	30,08	48,06

Tabel 7.14.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013

Provinsi	Banjir	Tanah longsor	Kebakaran	Gempa	Angin topan/ puting beliung	Gunung meletus	Perkotaan
							Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	10,71	-	0,51	46,92	0,01	-	0,60
Sumatera Utara	18,20	0,12	0,76	2,75	0,13	1,46	0,03
Sumatera Barat	12,34	0,41	0,52	18,95	1,07	0,30	-
Riau	16,91	-	1,09	-	-	-	0,95
Jambi	13,76	0,83	1,90	0,34	-	-	-
Sumatera Selatan	26,12	-	-	0,07	-	-	-
Bengkulu	1,73	-	0,19	2,86	-	-	0,16
Lampung	11,29	-	0,29	-	1,51	-	-
Kep. Bangka Belitung	9,97	-	-	0,19	0,39	-	-
Kepulauan Riau	2,95	-	1,66	0,07	-	-	0,17
DKI Jakarta	39,15	-	0,98	-	0,18	-	0,08
Jawa Barat	7,34	0,16	0,43	2,57	2,32	-	0,38
Jawa Tengah	7,73	0,01	0,43	0,02	1,58	0,37	0,04
DI Yogyakarta	0,32	-	-	1,34	1,18	0,34	-
Jawa Timur	9,83	0,17	0,01	1,65	0,63	0,03	0,03
Banten	10,69	-	0,00	0,26	0,42	-	-
Bali	3,27	-	0,88	4,77	0,13	-	0,11
Nusa Tenggara Barat	4,09	0,36	0,17	13,72	0,44	-	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,36	-	-	4,14	0,75	-	-
Kalimantan Barat	24,52	-	0,58	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	18,33	-	1,22	-	-	-	3,87
Kalimantan Selatan	16,02	-	5,64	-	1,37	-	-
Kalimantan Timur	19,83	1,91	2,58	0,17	0,14	-	-
Sulawesi Utara	5,43	2,18	0,59	4,41	0,81	3,52	-
Sulawesi Tengah	10,31	-	0,56	9,97	-	-	0,48
Sulawesi Selatan	20,42	-	0,87	0,52	4,08	-	0,30
Sulawesi Tenggara	33,83	8,67	0,54	20,43	-	-	-
Gorontalo	22,87	-	0,60	59,84	-	0,77	-
Sulawesi Barat	7,02	-	0,80	-	7,57	-	-
Maluku	14,82	5,42	0,78	5,53	-	-	0,15
Maluku Utara	0,37	-	-	6,29	-	-	0,21
Papua Barat	11,86	0,57	-	5,92	-	-	0,28
Papua	12,59	-	1,32	3,11	1,46	0,20	-
Indonesia	12,62	0,21	0,56	2,64	1,13	0,16	0,18

Tabel 7.14.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013

Provinsi	Banjir	Tanah longsor	Kebakaran	Gempa	Angin topan/ puting beliung	Perdesaan	
						Gunung meletus	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	17,24	0,37	0,49	32,45	1,06	-	0,07
Sumatera Utara	5,06	0,14	0,20	4,28	0,39	2,01	-
Sumatera Barat	7,72	0,27	0,42	8,91	1,00	-	0,07
Riau	12,60	-	0,38	-	0,53	-	0,81
Jambi	18,08	0,18	1,69	3,41	0,24	-	0,15
Sumatera Selatan	9,06	0,12	0,11	0,64	0,53	0,03	-
Bengkulu	3,31	0,40	0,21	5,41	0,18	-	0,05
Lampung	2,19	0,04	0,37	0,67	1,58	-	0,08
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Riau	2,88	-	0,22	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,56	2,42	1,05	8,96	1,06	-	0,58
Jawa Tengah	2,85	0,71	0,47	0,19	1,43	-	0,19
DI Yogyakarta	0,90	4,90	-	0,27	0,04	-	-
Jawa Timur	3,12	0,70	-	0,63	2,25	0,08	-
Banten	15,01	1,18	-	0,03	0,55	-	-
Bali	0,84	0,64	1,22	9,04	0,19	-	-
Nusa Tenggara Barat	8,58	1,44	0,38	7,33	1,39	-	1,01
Nusa Tenggara Timur	3,35	1,31	0,96	2,72	3,69	-	0,27
Kalimantan Barat	17,68	0,06	0,09	-	0,34	-	0,10
Kalimantan Tengah	29,84	-	2,54	0,04	0,64	0,14	0,35
Kalimantan Selatan	22,46	-	2,60	-	4,71	0,08	-
Kalimantan Timur	22,05	0,31	1,92	0,07	0,65	0,05	-
Sulawesi Utara	9,16	1,74	0,36	4,09	1,52	4,71	0,34
Sulawesi Tengah	11,20	0,32	0,10	2,43	1,27	0,04	-
Sulawesi Selatan	12,37	1,21	0,74	-	2,33	-	0,71
Sulawesi Tenggara	14,84	2,05	-	3,88	-	-	0,05
Gorontalo	22,14	-	0,52	42,60	1,67	-	-
Sulawesi Barat	16,32	6,67	0,91	0,54	1,81	-	0,20
Maluku	8,64	1,39	0,10	1,20	2,77	-	0,63
Maluku Utara	7,80	0,35	0,47	18,16	5,77	1,36	1,90
Papua Barat	3,83	0,28	-	1,99	0,06	-	1,60
Papua	2,56	0,41	0,03	2,38	0,21	-	0,42
Indonesia	7,02	0,92	0,51	3,67	1,39	0,17	0,24

Tabel 7.14.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Bencana yang Sering Terjadi, 2013

Perkotaan + Perdesaan							
Provinsi	Banjir	Tanah longsor	Kebakaran	Gempa	Angin topan/ puting beliung	Gunung meletus	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	15,39	0,26	0,50	36,55	0,76	-	0,22
Sumatera Utara	11,44	0,13	0,47	3,54	0,27	1,74	0,01
Sumatera Barat	9,49	0,33	0,46	12,76	1,03	0,11	0,04
Riau	14,28	-	0,66	-	0,33	-	0,87
Jambi	16,80	0,37	1,75	2,50	0,17	-	0,11
Sumatera Selatan	15,12	0,08	0,07	0,44	0,34	0,02	-
Bengkulu	2,81	0,27	0,20	4,60	0,12	-	0,08
Lampung	4,38	0,03	0,35	0,51	1,57	-	0,06
Kep. Bangka Belitung	4,80	-	-	0,09	0,19	-	-
Kepulauan Riau	2,94	-	1,42	0,06	-	-	0,14
DKI Jakarta	39,15	-	0,98	-	0,18	-	0,08
Jawa Barat	6,00	0,96	0,65	4,84	1,87	-	0,45
Jawa Tengah	5,06	0,40	0,45	0,11	1,50	0,17	0,12
DI Yogyakarta	0,50	1,56	-	1,00	0,81	0,23	-
Jawa Timur	6,27	0,45	0,00	1,11	1,49	0,06	0,02
Banten	12,05	0,37	0,00	0,19	0,46	-	-
Bali	2,35	0,24	1,01	6,38	0,15	-	0,07
Nusa Tenggara Barat	6,66	0,97	0,29	10,07	0,98	-	0,65
Nusa Tenggara Timur	3,35	1,06	0,77	3,00	3,12	-	0,22
Kalimantan Barat	19,66	0,04	0,23	-	0,24	-	0,07
Kalimantan Tengah	25,92	-	2,09	0,03	0,42	0,09	1,54
Kalimantan Selatan	19,68	-	3,91	-	3,27	0,05	-
Kalimantan Timur	20,67	1,30	2,33	0,13	0,33	0,02	-
Sulawesi Utara	7,45	1,94	0,47	4,24	1,19	4,16	0,19
Sulawesi Tengah	10,98	0,24	0,21	4,28	0,96	0,03	0,12
Sulawesi Selatan	15,27	0,78	0,79	0,19	2,96	-	0,57
Sulawesi Tenggara	20,11	3,89	0,15	8,47	-	-	0,04
Gorontalo	22,39	-	0,55	48,52	1,10	0,26	-
Sulawesi Barat	14,34	5,25	0,89	0,42	3,04	-	0,16
Maluku	11,10	2,99	0,37	2,92	1,67	-	0,44
Maluku Utara	5,74	0,26	0,34	14,87	4,17	0,98	1,43
Papua Barat	6,14	0,36	-	3,12	0,05	-	1,22
Papua	5,04	0,31	0,35	2,56	0,52	0,05	0,31
Indonesia	9,82	0,57	0,54	3,15	1,26	0,17	0,21

Tabel 7.15.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

				Perkotaan
Provinsi	Saluran terbuka	Saluran tertutup	Tanpa saluran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	54,22	32,28	13,50	100,00
Sumatera Utara	47,55	46,32	6,12	100,00
Sumatera Barat	39,47	48,18	12,35	100,00
Riau	59,57	34,31	6,12	100,00
Jambi	52,39	32,86	14,75	100,00
Sumatera Selatan	67,59	16,46	15,95	100,00
Bengkulu	48,34	39,23	12,43	100,00
Lampung	61,39	29,74	8,87	100,00
Kep. Bangka Belitung	52,76	25,32	21,92	100,00
Kepulauan Riau	41,32	47,85	10,82	100,00
DKI Jakarta	26,61	70,89	2,50	100,00
Jawa Barat	36,44	56,42	7,15	100,00
Jawa Tengah	40,62	49,90	9,48	100,00
DI Yogyakarta	15,87	74,91	9,22	100,00
Jawa Timur	36,09	53,61	10,30	100,00
Banten	49,70	43,56	6,75	100,00
Bali	17,07	74,57	8,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	32,95	41,96	25,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,15	17,40	50,45	100,00
Kalimantan Barat	54,94	12,85	32,21	100,00
Kalimantan Tengah	42,26	16,83	40,91	100,00
Kalimantan Selatan	22,01	18,01	59,99	100,00
Kalimantan Timur	51,58	30,18	18,23	100,00
Sulawesi Utara	72,17	16,54	11,29	100,00
Sulawesi Tengah	55,20	24,10	20,70	100,00
Sulawesi Selatan	54,23	32,13	13,63	100,00
Sulawesi Tenggara	58,28	24,44	17,29	100,00
Gorontalo	49,12	36,22	14,66	100,00
Sulawesi Barat	57,64	30,51	11,85	100,00
Maluku	48,37	19,96	31,67	100,00
Maluku Utara	47,29	30,59	22,12	100,00
Papua Barat	55,93	25,33	18,74	100,00
Papua	53,71	27,91	18,39	100,00
Indonesia	39,93	49,41	10,66	100,00

Tabel 7.15.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

				Perdesaan
Provinsi	Saluran terbuka	Saluran tertutup	Tanpa saluran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	51,19	13,58	35,23	100,00
Sumatera Utara	49,48	16,13	34,39	100,00
Sumatera Barat	40,51	18,32	41,16	100,00
Riau	49,18	14,43	36,39	100,00
Jambi	48,53	21,28	30,19	100,00
Sumatera Selatan	51,92	10,42	37,66	100,00
Bengkulu	54,48	14,79	30,73	100,00
Lampung	66,25	11,75	22,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	41,28	17,40	41,31	100,00
Kepulauan Riau	31,08	12,41	56,51	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	46,55	33,16	20,29	100,00
Jawa Tengah	55,36	25,41	19,23	100,00
DI Yogyakarta	45,36	27,18	27,45	100,00
Jawa Timur	45,30	20,97	33,72	100,00
Banten	48,10	18,20	33,70	100,00
Bali	27,28	30,94	41,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	40,91	23,49	35,60	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,81	1,78	86,41	100,00
Kalimantan Barat	34,29	3,14	62,56	100,00
Kalimantan Tengah	32,97	4,85	62,18	100,00
Kalimantan Selatan	32,10	8,11	59,79	100,00
Kalimantan Timur	39,26	11,79	48,95	100,00
Sulawesi Utara	63,05	5,96	30,99	100,00
Sulawesi Tengah	49,49	8,15	42,36	100,00
Sulawesi Selatan	53,71	9,24	37,05	100,00
Sulawesi Tenggara	33,67	15,33	51,00	100,00
Gorontalo	45,13	9,08	45,79	100,00
Sulawesi Barat	50,88	6,48	42,64	100,00
Maluku	21,81	12,36	65,83	100,00
Maluku Utara	26,48	5,09	68,43	100,00
Papua Barat	32,54	6,59	60,86	100,00
Papua	12,36	2,37	85,27	100,00
Indonesia	46,26	18,73	35,01	100,00

Tabel 7.15.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Saluran Pembuangan Air Limbah Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

Perkotaan + Perdesaan				
Provinsi	Saluran terbuka	Saluran tertutup	Tanpa saluran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	52,05	18,88	29,07	100,00
Sumatera Utara	48,55	30,78	20,68	100,00
Sumatera Barat	40,11	29,77	30,11	100,00
Riau	53,22	22,17	24,61	100,00
Jambi	49,68	24,71	25,62	100,00
Sumatera Selatan	57,49	12,56	29,95	100,00
Bengkulu	52,54	22,49	24,97	100,00
Lampung	65,08	16,08	18,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	46,81	21,22	31,97	100,00
Kepulauan Riau	39,65	42,08	18,27	100,00
DKI Jakarta	26,61	70,89	2,50	100,00
Jawa Barat	40,02	48,17	11,81	100,00
Jawa Tengah	48,68	36,50	14,82	100,00
DI Yogyakarta	25,23	59,75	15,01	100,00
Jawa Timur	40,98	36,28	22,74	100,00
Banten	49,19	35,59	15,21	100,00
Bali	20,93	58,08	20,99	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,51	31,40	31,09	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,72	4,78	79,51	100,00
Kalimantan Barat	40,26	5,95	53,79	100,00
Kalimantan Tengah	36,13	8,93	54,94	100,00
Kalimantan Selatan	27,75	12,37	59,87	100,00
Kalimantan Timur	46,91	23,21	29,88	100,00
Sulawesi Utara	67,23	10,80	21,97	100,00
Sulawesi Tengah	50,88	12,05	37,06	100,00
Sulawesi Selatan	53,90	17,46	28,64	100,00
Sulawesi Tenggara	40,50	17,86	41,64	100,00
Gorontalo	46,50	18,40	35,10	100,00
Sulawesi Barat	52,32	11,60	36,07	100,00
Maluku	32,38	15,39	52,23	100,00
Maluku Utara	32,24	12,15	55,60	100,00
Papua Barat	39,26	11,98	48,76	100,00
Papua	22,59	8,69	68,73	100,00
Indonesia	43,10	34,05	22,85	100,00

Tabel 7.16.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

Provinsi	Perpi- paan air limbah	Tangki septic	Sumur resapan	Lubanh tanah	Got/ selokan/ sungai	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,83	8,49	2,28	13,09	68,86	3,45	100,00
Sumatera Utara	3,22	12,43	1,00	11,46	69,50	2,40	100,00
Sumatera Barat	4,73	11,14	1,96	13,74	58,52	9,91	100,00
Riau	5,03	4,43	-	7,09	79,93	3,52	100,00
Jambi	3,87	12,10	1,25	10,78	63,85	8,15	100,00
Sumatera Selatan	4,22	6,64	0,30	5,51	71,71	11,62	100,00
Bengkulu	2,14	2,53	0,60	10,82	72,19	11,71	100,00
Lampung	2,83	4,50	0,58	14,22	74,22	3,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,39	5,14	4,74	10,37	61,95	15,40	100,00
Kepulauan Riau	5,59	15,96	0,59	6,41	67,57	3,88	100,00
DKI Jakarta	3,54	10,49	1,90	1,81	80,97	1,30	100,00
Jawa Barat	2,13	15,72	1,11	5,55	69,65	5,83	100,00
Jawa Tengah	2,99	9,61	3,72	12,98	64,14	6,55	100,00
DI Yogyakarta	3,88	27,82	25,79	13,13	22,23	7,15	100,00
Jawa Timur	1,63	8,05	5,15	17,19	62,53	5,45	100,00
Banten	1,15	11,24	0,67	7,99	71,33	7,62	100,00
Bali	11,78	18,09	3,27	9,75	50,01	7,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,46	14,44	3,81	11,92	52,83	15,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,99	4,36	1,31	21,84	30,86	40,64	100,00
Kalimantan Barat	6,52	5,11	0,44	9,72	57,42	20,80	100,00
Kalimantan Tengah	2,76	4,79	2,64	9,16	63,46	17,20	100,00
Kalimantan Selatan	0,67	5,94	3,91	11,58	39,03	38,87	100,00
Kalimantan Timur	5,97	7,77	0,91	3,66	73,92	7,77	100,00
Sulawesi Utara	4,16	3,47	0,24	5,67	81,59	4,87	100,00
Sulawesi Tengah	4,71	4,73	0,79	12,77	62,22	14,78	100,00
Sulawesi Selatan	4,25	5,78	0,33	7,41	70,27	11,97	100,00
Sulawesi Tenggara	2,08	8,40	0,21	16,33	64,80	8,19	100,00
Gorontalo	8,72	17,01	4,56	11,22	45,13	13,36	100,00
Sulawesi Barat	7,68	1,72	1,31	25,48	58,41	5,40	100,00
Maluku	1,26	4,33	1,37	23,34	43,72	25,97	100,00
Maluku Utara	5,10	8,65	1,09	11,21	66,07	7,87	100,00
Papua Barat	3,42	7,70	1,83	6,22	67,90	12,93	100,00
Papua	10,12	1,65	0,97	11,92	67,87	7,47	100,00
Indonesia	2,99	11,25	2,76	9,73	66,20	7,07	100,00

Tabel 7.16.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

							Perdesaan
Provinsi	Perpipaan air limbah	Tangki septic	Sumur resapan	Lubang tanah	Got/ selokan/ sungai	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,37	1,11	2,57	29,33	52,37	11,24	100,00
Sumatera Utara	2,02	6,27	0,92	31,93	45,28	13,58	100,00
Sumatera Barat	1,18	4,52	0,95	25,93	44,78	22,65	100,00
Riau	1,01	3,68	0,79	34,66	48,61	11,24	100,00
Jambi	2,13	6,58	1,02	24,40	47,78	18,09	100,00
Sumatera Selatan	1,71	3,11	0,52	21,09	56,39	17,18	100,00
Bengkulu	1,29	1,02	0,50	36,91	36,97	23,31	100,00
Lampung	0,53	2,20	0,72	54,48	32,20	9,88	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,96	5,73	0,59	22,88	32,04	36,79	100,00
Kepulauan Riau	1,03	4,36	5,31	6,80	37,33	45,17	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,53	10,74	0,89	18,03	51,51	17,30	100,00
Jawa Tengah	1,88	5,87	1,33	22,76	50,93	17,24	100,00
DI Yogyakarta	1,81	10,53	1,86	27,09	28,41	30,30	100,00
Jawa Timur	1,25	3,15	2,73	32,52	37,29	23,06	100,00
Banten	1,33	4,35	1,72	17,23	52,76	22,60	100,00
Bali	1,93	8,92	1,64	18,89	28,34	40,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,11	4,17	2,54	18,42	48,84	23,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,17	0,50	18,53	8,72	72,02	100,00
Kalimantan Barat	0,44	0,93	0,86	17,67	46,11	34,00	100,00
Kalimantan Tengah	0,28	2,20	1,61	16,95	60,22	18,74	100,00
Kalimantan Selatan	0,18	2,20	3,08	27,85	41,37	25,31	100,00
Kalimantan Timur	3,26	3,22	0,56	14,00	61,58	17,38	100,00
Sulawesi Utara	1,51	3,61	1,13	14,87	62,91	15,96	100,00
Sulawesi Tengah	0,63	2,28	0,58	30,70	38,82	26,99	100,00
Sulawesi Selatan	2,02	3,03	1,47	24,49	43,36	25,64	100,00
Sulawesi Tenggara	2,08	2,82	0,14	33,88	23,26	37,83	100,00
Gorontalo	1,10	4,02	0,53	18,82	39,95	35,59	100,00
Sulawesi Barat	0,25	2,93	0,00	14,33	53,51	28,98	100,00
Maluku	0,17	5,06	0,50	26,41	16,91	50,95	100,00
Maluku Utara	0,18	1,30	1,43	21,71	35,50	39,88	100,00
Papua Barat	0,95	2,59	1,79	13,75	43,57	37,35	100,00
Papua	0,32	1,27	0,00	36,79	26,46	35,15	100,00
Indonesia	1,44	4,74	1,41	26,28	43,89	22,24	100,00

Tabel 7.16.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Limbah/ Mandi/ Dapur/ Cuci, 2013

Perkotaan + Perdesaan							
Provinsi	Perpi- paan air limbah	Tangki septic	Sumur resapan	Lubanh tanah	Got/ selokan/ sungai	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,50	3,20	2,49	24,73	57,04	9,03	100,00
Sumatera Utara	2,60	9,26	0,96	22,00	57,03	8,15	100,00
Sumatera Barat	2,54	7,06	1,33	21,26	50,05	17,76	100,00
Riau	2,58	3,97	0,49	23,93	60,80	8,23	100,00
Jambi	2,64	8,22	1,09	20,36	52,54	15,15	100,00
Sumatera Selatan	2,60	4,37	0,45	15,56	61,83	15,20	100,00
Bengkulu	1,56	1,50	0,53	28,69	48,06	19,66	100,00
Lampung	1,09	2,75	0,68	44,80	42,30	8,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,17	5,45	2,59	16,85	46,45	26,49	100,00
Kepulauan Riau	4,85	14,07	1,36	6,47	62,65	10,61	100,00
DKI Jakarta	3,54	10,49	1,90	1,81	80,97	1,30	100,00
Jawa Barat	1,92	13,95	1,03	9,98	63,22	9,90	100,00
Jawa Tengah	2,38	7,56	2,41	18,33	56,91	12,40	100,00
DI Yogyakarta	3,22	22,33	18,19	17,56	24,19	14,50	100,00
Jawa Timur	1,42	5,45	3,86	25,33	49,13	14,80	100,00
Banten	1,21	9,08	1,00	10,90	65,50	12,32	100,00
Bali	8,06	14,62	2,65	13,21	41,82	19,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,83	8,57	3,08	15,64	50,55	20,33	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,25	0,97	0,65	19,16	12,97	65,99	100,00
Kalimantan Barat	2,20	2,14	0,74	15,37	49,38	30,18	100,00
Kalimantan Tengah	1,12	3,08	1,96	14,30	61,32	18,21	100,00
Kalimantan Selatan	0,39	3,81	3,44	20,83	40,36	31,16	100,00
Kalimantan Timur	4,94	6,05	0,78	7,58	69,24	11,41	100,00
Sulawesi Utara	2,73	3,55	0,72	10,66	71,46	10,88	100,00
Sulawesi Tengah	1,63	2,88	0,63	26,31	44,54	24,00	100,00
Sulawesi Selatan	2,82	4,01	1,06	18,35	53,02	20,73	100,00
Sulawesi Tenggara	2,08	4,37	0,16	29,01	34,79	29,60	100,00
Gorontalo	3,71	8,48	1,91	16,21	41,73	27,95	100,00
Sulawesi Barat	1,84	2,67	0,28	16,71	54,56	23,95	100,00
Maluku	0,61	4,77	0,85	25,19	27,58	41,00	100,00
Maluku Utara	1,54	3,34	1,34	18,80	43,97	31,01	100,00
Papua Barat	1,66	4,06	1,80	11,58	50,56	30,34	100,00
Papua	2,74	1,37	0,24	30,64	36,71	28,30	100,00
Indonesia	2,22	7,99	2,08	18,02	55,03	14,67	100,00

**Tabel 7.17.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/
Selokan di Sekitar Rumah, 2013**

					Perkotaan
Provinsi	Lancar	Mengalir lambat	Tergenang	Tidak ada got	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	50,67	23,97	8,96	16,40	100,00
Sumatera Utara	64,41	16,51	9,27	9,81	100,00
Sumatera Barat	64,39	10,43	4,78	20,41	100,00
Riau	68,94	14,86	6,61	9,60	100,00
Jambi	70,03	8,37	3,31	18,29	100,00
Sumatera Selatan	60,75	18,47	6,47	14,31	100,00
Bengkulu	77,60	6,72	1,64	14,04	100,00
Lampung	75,41	12,66	2,56	9,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	66,16	9,11	4,40	20,34	100,00
Kepulauan Riau	70,56	15,63	4,85	8,96	100,00
DKI Jakarta	71,86	23,32	3,40	1,42	100,00
Jawa Barat	67,44	16,61	2,35	13,60	100,00
Jawa Tengah	71,37	10,34	2,61	15,68	100,00
DI Yogyakarta	55,42	2,40	0,45	41,73	100,00
Jawa Timur	66,18	14,40	2,19	17,23	100,00
Banten	66,55	18,67	2,45	12,33	100,00
Bali	75,31	5,45	3,13	16,11	100,00
Nusa Tenggara Barat	61,43	7,80	3,17	27,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,84	5,13	4,05	54,98	100,00
Kalimantan Barat	53,97	14,68	5,90	25,45	100,00
Kalimantan Tengah	35,72	19,73	9,78	34,76	100,00
Kalimantan Selatan	27,09	12,73	4,20	55,98	100,00
Kalimantan Timur	64,70	13,24	8,21	13,85	100,00
Sulawesi Utara	79,78	11,04	1,09	8,09	100,00
Sulawesi Tengah	61,10	13,98	3,47	21,45	100,00
Sulawesi Selatan	52,45	17,94	15,88	13,73	100,00
Sulawesi Tenggara	52,32	12,46	10,20	25,01	100,00
Gorontalo	60,23	14,35	2,79	22,63	100,00
Sulawesi Barat	59,02	17,06	8,71	15,20	100,00
Maluku	46,99	8,40	4,68	39,93	100,00
Maluku Utara	63,44	8,05	7,93	20,58	100,00
Papua Barat	49,36	18,14	11,51	21,00	100,00
Papua	62,36	16,26	5,45	15,93	100,00
Indonesia	65,90	14,91	3,72	15,47	100,00

**Tabel 7.17.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/
Selokan di Sekitar Rumah, 2013**

Perdesaan					
Provinsi	Lancar	Mengalir lambat	Tergenang	Tidak ada got	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	39,72	23,58	10,20	26,50	100,00
Sumatera Utara	41,47	14,97	7,12	36,44	100,00
Sumatera Barat	42,42	8,83	2,17	46,58	100,00
Riau	42,35	12,84	5,66	39,16	100,00
Jambi	51,26	12,30	4,04	32,40	100,00
Sumatera Selatan	45,13	10,96	6,33	37,58	100,00
Bengkulu	45,65	11,61	4,39	38,34	100,00
Lampung	61,42	11,16	4,11	23,32	100,00
Kep. Bangka Belitung	50,18	10,54	3,20	36,07	100,00
Kepulauan Riau	30,66	6,51	0,57	62,26	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	57,90	12,60	2,09	27,42	100,00
Jawa Tengah	64,64	7,18	2,17	26,01	100,00
DI Yogyakarta	40,69	3,82	0,31	55,18	100,00
Jawa Timur	50,16	6,45	1,84	41,55	100,00
Banten	34,27	23,00	4,53	38,21	100,00
Bali	52,29	3,77	0,37	43,57	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,95	13,53	3,90	32,63	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,06	2,99	1,24	81,71	100,00
Kalimantan Barat	33,71	10,50	6,30	49,49	100,00
Kalimantan Tengah	29,38	10,52	6,90	53,20	100,00
Kalimantan Selatan	26,35	8,15	4,33	61,17	100,00
Kalimantan Timur	47,37	7,77	2,04	42,83	100,00
Sulawesi Utara	66,56	7,91	4,10	21,43	100,00
Sulawesi Tengah	41,66	9,19	3,64	45,50	100,00
Sulawesi Selatan	45,70	10,61	6,15	37,54	100,00
Sulawesi Tenggara	28,70	7,86	4,84	58,60	100,00
Gorontalo	35,78	8,79	3,54	51,88	100,00
Sulawesi Barat	43,74	7,55	10,25	38,47	100,00
Maluku	21,21	5,94	1,67	71,17	100,00
Maluku Utara	31,96	9,97	4,44	53,63	100,00
Papua Barat	30,98	13,58	2,52	52,93	100,00
Papua	13,33	6,03	4,31	76,32	100,00
Indonesia	48,28	10,01	3,54	38,17	100,00

**Tabel 7.17.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keadaan Air Got/
Selokan di Sekitar Rumah, 2013**

Perkotaan + Perdesaan					
Provinsi	Lancar	Mengalir lambat	Tergenang	Tidak ada got	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42,83	23,69	9,85	23,63	100,00
Sumatera Utara	52,60	15,72	8,17	23,52	100,00
Sumatera Barat	50,84	9,44	3,17	36,54	100,00
Riau	52,70	13,63	6,03	27,65	100,00
Jambi	56,82	11,14	3,83	28,22	100,00
Sumatera Selatan	50,68	13,63	6,38	29,31	100,00
Bengkulu	55,71	10,07	3,53	30,69	100,00
Lampung	64,78	11,52	3,74	19,97	100,00
Kep. Bangka Belitung	57,88	9,85	3,78	28,50	100,00
Kepulauan Riau	64,06	14,15	4,15	17,65	100,00
DKI Jakarta	71,86	23,32	3,40	1,42	100,00
Jawa Barat	64,06	15,19	2,26	18,50	100,00
Jawa Tengah	67,69	8,61	2,37	21,33	100,00
DI Yogyakarta	50,74	2,85	0,41	46,00	100,00
Jawa Timur	57,67	10,18	2,00	30,14	100,00
Banten	56,41	20,03	3,10	20,46	100,00
Bali	66,61	4,81	2,09	26,49	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,87	11,07	3,59	30,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	18,24	3,40	1,78	76,57	100,00
Kalimantan Barat	39,57	11,71	6,19	42,54	100,00
Kalimantan Tengah	31,54	13,65	7,88	46,93	100,00
Kalimantan Selatan	26,67	10,12	4,28	58,93	100,00
Kalimantan Timur	58,13	11,16	5,87	24,84	100,00
Sulawesi Utara	72,61	9,34	2,72	15,32	100,00
Sulawesi Tengah	46,42	10,36	3,60	39,62	100,00
Sulawesi Selatan	48,13	13,25	9,65	28,98	100,00
Sulawesi Tenggara	35,26	9,14	6,33	49,27	100,00
Gorontalo	44,18	10,70	3,28	41,84	100,00
Sulawesi Barat	47,00	9,58	9,92	33,50	100,00
Maluku	31,47	6,92	2,87	58,73	100,00
Maluku Utara	40,68	9,44	5,40	44,48	100,00
Papua Barat	36,26	14,89	5,10	43,76	100,00
Papua	25,46	8,56	4,59	61,38	100,00
Indonesia	57,08	12,46	3,63	26,83	100,00

Tabel 7.18 Persentase Rumah Tangga dengan Keberadaan Mandi/ Cuci/ Kakus (MCK) Menurut Provinsi, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,02	22,58	18,73
Sumatera Utara	3,19	9,92	6,65
Sumatera Barat	5,03	6,25	5,78
Riau	1,24	4,66	3,33
Jambi	3,02	5,05	4,45
Sumatera Selatan	8,16	7,37	7,65
Bengkulu	2,98	8,19	6,55
Lampung	2,79	3,03	2,97
Kep. Bangka Belitung	12,29	18,01	15,25
Kepulauan Riau	4,20	13,55	5,72
DKI Jakarta	17,89	-	17,89
Jawa Barat	14,40	19,67	16,27
Jawa Tengah	13,28	10,38	11,69
DI Yogyakarta	8,89	7,43	8,43
Jawa Timur	9,25	4,76	6,86
Banten	7,92	8,60	8,14
Bali	0,85	0,84	0,85
Nusa Tenggara Barat	6,55	14,81	11,27
Nusa Tenggara Timur	6,27	4,65	4,96
Kalimantan Barat	4,15	3,95	4,01
Kalimantan Tengah	10,89	13,70	12,74
Kalimantan Selatan	7,65	6,08	6,76
Kalimantan Timur	5,97	11,19	7,95
Sulawesi Utara	6,66	16,44	11,96
Sulawesi Tengah	13,05	18,14	16,90
Sulawesi Selatan	6,81	13,10	10,84
Sulawesi Tenggara	2,81	15,10	11,69
Gorontalo	25,47	35,41	32,00
Sulawesi Barat	8,12	15,03	13,55
Maluku	2,36	15,64	10,36
Maluku Utara	6,67	36,92	28,54
Papua Barat	5,23	44,10	32,93
Papua	3,36	18,67	14,88
Indonesia	10,40	10,74	10,57

Tabel 7.19.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013

Provinsi	Perkotaan								
	Di- angkut petugas	Di- buang ke TPA	Didaur ulang	Dibuat Kompos	Disetor ke bank sampah	Di- buang ke selokan	Dibuang samba- rangan	Dibakar	Di- timbun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	26,90	8,88	0,35	0,55	1,52	5,82	19,74	64,20	11,40
Sumatera Utara	42,44	4,37	0,08	0,94	2,07	5,06	8,90	56,79	6,85
Sumatera Barat	35,71	15,19	-	0,33	1,14	8,50	5,83	52,98	5,61
Riau	49,89	9,21	0,28	0,52	1,09	2,60	3,33	49,86	4,99
Jambi	42,05	25,23	0,61	0,67	2,76	10,77	11,33	36,46	6,80
Sumatera Selatan	45,42	9,50	-	0,46	2,40	9,97	13,39	43,92	7,24
Bengkulu	61,21	8,92	0,32	1,13	0,98	5,54	2,22	43,33	7,33
Lampung	39,87	10,33	0,13	1,29	1,30	5,76	4,01	47,98	7,16
Kep. Bangka Belitung	42,97	7,22	0,04	0,73	0,17	2,33	13,23	59,08	16,15
Kepulauan Riau	71,79	20,18	0,33	0,42	1,92	6,87	7,04	24,64	4,04
DKI Jakarta	93,12	6,82	-	-	0,75	2,54	0,33	3,31	0,20
Jawa Barat	40,70	10,18	0,44	1,57	1,78	10,97	7,80	52,01	9,72
Jawa Tengah	33,04	4,71	0,63	1,42	0,70	9,60	8,57	55,74	15,57
DI Yogyakarta	48,58	5,19	0,81	5,30	3,99	3,07	1,06	49,27	16,85
Jawa Timur	39,53	7,78	0,43	1,61	1,96	8,24	5,41	49,66	19,21
Banten	53,18	10,18	0,22	0,06	1,75	3,61	12,39	42,33	6,12
Bali	55,87	6,67	0,16	1,20	5,57	3,73	9,00	32,61	9,77
Nusa Tenggara Barat	22,11	8,26	-	0,21	1,42	30,07	21,84	43,73	11,59
Nusa Tenggara Timur	27,64	6,27	0,09	3,81	0,28	9,56	7,73	73,04	12,18
Kalimantan Barat	35,09	20,01	0,23	0,87	2,58	7,14	9,35	62,85	9,93
Kalimantan Tengah	50,47	19,02	1,46	1,49	0,86	11,08	20,74	36,47	7,27
Kalimantan Selatan	59,45	10,31	0,17	0,42	0,93	10,53	13,87	34,49	5,17
Kalimantan Timur	68,41	20,85	0,42	1,06	4,81	6,08	4,16	21,59	3,66
Sulawesi Utara	52,44	19,83	0,04	0,78	5,41	11,56	2,87	41,43	9,08
Sulawesi Tengah	44,25	15,28	0,17	0,48	5,60	10,63	15,15	48,33	9,80
Sulawesi Selatan	55,37	10,19	-	0,18	3,90	8,62	14,81	39,57	5,58
Sulawesi Tenggara	56,54	9,65	-	0,21	5,40	5,83	18,74	45,57	7,18
Gorontalo	27,45	7,85	-	-	0,29	15,06	6,02	62,32	1,64
Sulawesi Barat	26,32	2,04	-	-	1,32	9,22	25,91	56,89	5,72
Maluku	43,26	10,38	0,37	0,12	0,12	8,33	9,45	43,24	21,14
Maluku Utara	47,46	12,63	-	-	5,59	13,94	19,58	43,31	4,27
Papua Barat	32,06	20,60	0,68	0,46	5,96	15,52	5,30	53,50	9,61
Papua	62,90	31,51	0,21	0,89	4,03	6,25	9,58	47,86	5,47
Indonesia	46,85	9,21	0,34	1,17	1,88	8,26	7,83	45,31	10,36

Tabel 7.19.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013

Perdesaan									
Provinsi	Di- angkut petugas	Di- buang ke TPA	Didaur ulang	Dibuat Kompos	Disetor ke bank sampah	Di- buang ke selokan	Dibuang samba- rangan	Dibakar	Di- timbun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,98	2,24	0,17	0,25	0,32	14,59	20,39	90,17	27,16
Sumatera Utara	5,25	2,14	0,48	3,70	0,21	9,90	29,82	81,99	16,80
Sumatera Barat	1,45	2,13	0,17	0,76	0,24	16,86	21,93	85,11	18,88
Riau	4,16	0,62	-	0,49	0,10	8,18	20,57	82,90	21,26
Jambi	7,16	4,06	0,26	0,87	0,41	22,10	21,41	81,78	22,26
Sumatera Selatan	5,86	4,88	0,03	0,69	0,75	22,85	24,44	74,12	22,84
Bengkulu	5,20	3,95	-	1,90	0,27	17,19	20,59	74,04	9,36
Lampung	0,89	1,69	0,01	2,23	-	6,63	18,04	87,32	24,24
Kep. Bangka Belitung	14,36	1,10	0,20	0,28	0,41	3,43	43,82	75,46	23,08
Kepulauan Riau	4,40	1,35	0,57	0,57	0,99	23,35	25,48	66,45	15,48
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,27	2,10	0,53	3,04	0,44	19,28	22,73	81,68	22,65
Jawa Tengah	1,84	1,67	0,21	7,31	0,37	15,06	16,47	80,67	32,80
DI Yogyakarta	-	1,21	-	7,60	-	2,63	10,75	94,89	29,98
Jawa Timur	2,18	2,43	0,53	4,12	1,17	11,73	16,15	83,35	31,97
Banten	4,45	2,96	0,03	1,88	0,26	24,52	59,91	71,63	12,09
Bali	3,05	2,68	0,63	5,11	0,22	9,48	24,49	70,15	22,84
Nusa Tenggara Barat	4,20	4,12	0,26	0,29	0,86	30,60	35,61	66,92	18,39
Nusa Tenggara Timur	1,22	1,22	0,21	7,68	0,18	4,59	55,66	81,79	21,96
Kalimantan Barat	1,74	2,16	0,19	1,08	0,05	20,16	43,08	82,36	19,37
Kalimantan Tengah	4,91	5,79	0,16	0,61	0,31	42,10	30,74	72,71	20,90
Kalimantan Selatan	8,12	2,43	0,29	2,22	0,57	28,50	33,00	69,39	26,26
Kalimantan Timur	10,57	5,02	0,44	1,25	3,23	25,33	26,72	75,15	20,74
Sulawesi Utara	9,20	2,63	0,28	0,34	0,43	13,80	17,41	82,01	20,99
Sulawesi Tengah	2,87	2,34	0,69	0,68	0,54	8,59	37,06	84,32	17,01
Sulawesi Selatan	3,76	2,44	0,05	0,82	0,88	15,92	36,82	80,65	18,23
Sulawesi Tenggara	3,23	2,75	0,19	0,45	0,04	6,61	37,83	75,43	14,17
Gorontalo	0,77	0,37	-	-	0,11	10,54	25,98	88,91	5,31
Sulawesi Barat	1,31	1,89	0,78	1,17	1,26	21,97	46,95	75,78	13,56
Maluku	2,16	5,70	2,44	1,50	0,03	12,64	42,09	73,87	18,97
Maluku Utara	5,06	2,05	0,04	0,18	0,08	30,83	47,97	66,17	24,62
Papua Barat	6,95	7,23	-	1,16	1,00	21,89	33,75	79,08	20,86
Papua	3,01	1,40	-	0,09	-	15,77	65,80	82,54	26,28
Indonesia	3,25	2,38	0,32	3,18	0,54	15,55	25,95	80,76	24,55

Tabel 7.19.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Cara Pembuangan Sampah, 2013

Perkotaan + Perdesaan									
Provinsi	Di- angkut petugas	Di- buang ke TPA	Didaur ulang	Dibuat Kompos	Disetor ke bank sampah	Di- buang ke selokan	Dibuang samba- rangan	Dibakar	Di- timbun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	9,05	4,12	0,22	0,34	0,66	12,11	20,21	82,81	22,69
Sumatera Utara	23,30	3,22	0,28	2,36	1,12	7,55	19,67	69,76	11,97
Sumatera Barat	14,59	7,14	0,11	0,59	0,58	13,65	15,76	72,79	13,79
Riau	21,96	3,97	0,11	0,50	0,48	6,01	13,85	70,04	14,92
Jambi	17,49	10,33	0,37	0,81	1,11	18,74	18,42	68,36	17,68
Sumatera Selatan	19,91	6,52	0,02	0,60	1,33	18,28	20,51	63,39	17,30
Bengkulu	22,84	5,52	0,10	1,66	0,50	13,52	14,80	64,37	8,72
Lampung	10,26	3,77	0,04	2,01	0,31	6,42	14,67	77,86	20,13
Kep. Bangka Belitung	28,14	4,05	0,13	0,50	0,30	2,90	29,09	67,57	19,74
Kepulauan Riau	60,81	17,11	0,37	0,44	1,77	9,55	10,04	31,45	5,90
DKI Jakarta	93,12	6,82	-	-	0,75	2,54	0,33	3,31	0,20
Jawa Barat	27,42	7,32	0,47	2,09	1,30	13,92	13,10	62,54	14,31
Jawa Tengah	15,97	3,05	0,40	4,64	0,52	12,59	12,89	69,38	25,00
DI Yogyakarta	33,15	3,93	0,55	6,03	2,72	2,93	4,14	63,76	21,02
Jawa Timur	19,70	4,94	0,48	2,94	1,54	10,09	11,11	67,55	25,99
Banten	37,87	7,91	0,16	0,63	1,29	10,18	27,32	51,53	8,00
Bali	35,91	5,16	0,34	2,68	3,55	5,90	14,86	46,80	14,71
Nusa Tenggara Barat	11,87	5,89	0,15	0,26	1,10	30,37	29,71	56,99	15,48
Nusa Tenggara Timur	6,29	2,19	0,19	6,94	0,20	5,54	46,45	80,11	20,08
Kalimantan Barat	11,38	7,33	0,20	1,02	0,78	16,40	33,33	76,72	16,64
Kalimantan Tengah	20,41	10,29	0,60	0,91	0,50	31,54	27,34	60,38	16,26
Kalimantan Selatan	30,25	5,83	0,23	1,44	0,73	20,75	24,76	54,35	17,17
Kalimantan Timur	46,48	14,85	0,43	1,13	4,21	13,38	12,72	41,90	10,14
Sulawesi Utara	29,00	10,51	0,17	0,54	2,71	12,77	10,75	63,43	15,53
Sulawesi Tengah	12,99	5,51	0,56	0,63	1,78	9,09	31,70	75,51	15,24
Sulawesi Selatan	22,30	5,23	0,03	0,59	1,96	13,30	28,91	65,89	13,68
Sulawesi Tenggara	18,03	4,67	0,13	0,38	1,52	6,39	32,53	67,15	12,23
Gorontalo	9,93	2,94	-	-	0,17	12,10	19,13	79,78	4,05
Sulawesi Barat	6,65	1,92	0,61	0,92	1,27	19,25	42,47	71,75	11,89
Maluku	18,52	7,57	1,62	0,95	0,07	10,92	29,10	61,68	19,83
Maluku Utara	16,80	4,98	0,03	0,13	1,60	26,15	40,11	59,84	18,98
Papua Barat	14,16	11,07	0,20	0,96	2,43	20,06	25,58	71,73	17,63
Papua	17,83	8,85	0,05	0,29	1,00	13,41	51,89	73,96	21,13
Indonesia	25,02	5,79	0,33	2,18	1,21	11,91	16,90	63,06	17,46

Tabel 7.20 Persentase Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah Menurut Provinsi

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	12,51	7,50	8,92
Sumatera Utara	5,71	5,77	5,74
Sumatera Barat	12,77	11,27	11,85
Riau	9,83	8,18	8,82
Jambi	10,77	6,75	7,94
Sumatera Selatan	10,89	7,25	8,54
Bengkulu	13,02	8,56	9,96
Lampung	7,34	7,23	7,25
Kep. Bangka Belitung	12,04	9,59	10,77
Kepulauan Riau	4,28	4,10	4,25
DKI Jakarta	5,36	-	5,36
Jawa Barat	12,67	15,03	13,51
Jawa Tengah	14,41	17,10	15,88
DI Yogyakarta	18,07	22,51	19,48
Jawa Timur	11,27	10,19	10,70
Banten	7,19	6,03	6,82
Bali	11,64	24,41	16,47
Nusa Tenggara Barat	5,78	7,29	6,64
Nusa Tenggara Timur	11,11	11,21	11,19
Kalimantan Barat	13,95	6,32	8,53
Kalimantan Tengah	17,50	11,31	13,42
Kalimantan Selatan	11,15	11,55	11,38
Kalimantan Timur	18,31	12,32	16,04
Sulawesi Utara	21,84	15,60	18,45
Sulawesi Tengah	23,89	11,05	14,19
Sulawesi Selatan	18,54	9,72	12,89
Sulawesi Tenggara	22,51	14,75	16,90
Gorontalo	13,90	11,21	12,13
Sulawesi Barat	13,18	10,52	11,08
Maluku	22,33	4,76	11,75
Maluku Utara	17,40	6,00	9,16
Papua Barat	24,78	15,78	18,36
Papua	21,27	6,50	10,15
Indonesia	11,67	11,35	11,51

Tabel 7.21.1 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013

Provinsi	Perkotaan			
	Asap	Bau	Suara/bunyi	Debu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,62	8,21	11,34	10,14
Sumatera Utara	3,99	12,28	11,45	15,17
Sumatera Barat	3,67	7,02	11,58	6,66
Riau	6,40	12,94	9,93	4,24
Jambi	5,07	7,25	12,84	8,83
Sumatera Selatan	3,42	10,15	10,08	4,10
Bengkulu	2,69	7,33	8,26	1,63
Lampung	1,87	8,28	9,48	2,22
Kep. Bangka Belitung	1,51	6,58	10,80	2,29
Kepulauan Riau	3,54	6,87	9,37	8,94
DKI Jakarta	5,41	10,68	11,56	8,42
Jawa Barat	5,40	9,33	9,72	4,48
Jawa Tengah	4,94	9,16	9,01	5,66
DI Yogyakarta	5,33	8,99	7,12	2,84
Jawa Timur	5,38	9,90	8,35	4,41
Banten	7,86	14,03	11,56	8,11
Bali	2,17	7,29	8,27	1,93
Nusa Tenggara Barat	5,73	4,87	10,14	5,24
Nusa Tenggara Timur	5,14	20,26	20,01	5,59
Kalimantan Barat	1,12	9,85	6,44	5,09
Kalimantan Tengah	4,41	9,31	8,98	5,86
Kalimantan Selatan	2,91	11,41	8,37	3,99
Kalimantan Timur	2,81	11,84	13,42	13,40
Sulawesi Utara	2,34	10,84	17,17	1,94
Sulawesi Tengah	4,81	4,54	8,67	14,90
Sulawesi Selatan	3,81	18,58	13,14	8,98
Sulawesi Tenggara	1,50	9,30	17,04	4,44
Gorontalo	6,86	11,22	19,33	7,53
Sulawesi Barat	5,77	4,84	9,47	9,95
Maluku	8,00	14,53	21,48	5,95
Maluku Utara	2,84	9,04	14,85	8,63
Papua Barat	8,59	14,09	20,35	14,85
Papua	8,33	13,54	21,35	7,52
Indonesia	5,01	10,14	10,19	6,08

Tabel 7.21.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013

Perdesaan				
Provinsi	Asap	Bau	Suara/bunyi	Debu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,86	10,10	11,89	10,40
Sumatera Utara	4,47	7,17	7,76	8,90
Sumatera Barat	1,68	4,15	8,53	2,92
Riau	2,17	7,01	5,65	6,33
Jambi	1,67	4,82	10,97	10,99
Sumatera Selatan	2,08	3,84	6,80	6,19
Bengkulu	3,64	9,43	14,26	6,51
Lampung	0,70	5,82	5,01	4,24
Kep. Bangka Belitung	0,36	2,53	4,44	2,19
Kepulauan Riau	4,92	1,84	5,43	7,96
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1,65	3,35	4,83	2,38
Jawa Tengah	0,86	3,63	2,27	2,24
DI Yogyakarta	0,38	6,54	6,73	1,22
Jawa Timur	1,38	5,37	2,21	1,31
Banten	4,11	10,19	11,38	5,50
Bali	2,01	3,87	2,48	1,61
Nusa Tenggara Barat	3,67	6,80	5,10	3,65
Nusa Tenggara Timur	1,82	8,29	8,81	4,29
Kalimantan Barat	1,71	6,66	6,36	6,41
Kalimantan Tengah	4,74	9,26	9,42	8,39
Kalimantan Selatan	1,75	4,88	8,77	6,06
Kalimantan Timur	2,68	5,60	6,24	9,65
Sulawesi Utara	1,94	4,76	12,81	3,88
Sulawesi Tengah	3,78	8,04	9,96	7,05
Sulawesi Selatan	2,40	4,99	6,49	3,73
Sulawesi Tenggara	0,64	2,32	7,78	11,41
Gorontalo	0,69	4,18	11,77	2,75
Sulawesi Barat	2,32	4,42	9,15	7,02
Maluku	7,28	5,70	18,61	13,14
Maluku Utara	5,32	8,17	14,44	9,85
Papua Barat	3,28	7,45	7,45	3,40
Papua	1,76	3,32	1,22	2,09
Indonesia	2,00	5,29	5,59	4,14

Tabel 7.21.3 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Terganggu oleh Polusi Menurut Provinsi dan Jenis Polusi, 2013

Perkotaan + Perdesaan				
Provinsi	Asap	Bau	Suara/bunyi	Debu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	5,08	9,57	11,74	10,33
Sumatera Utara	4,24	9,65	9,55	11,94
Sumatera Barat	2,44	5,25	9,70	4,35
Riau	3,82	9,32	7,32	5,52
Jambi	2,68	5,54	11,52	10,35
Sumatera Selatan	2,56	6,08	7,96	5,45
Bengkulu	3,34	8,77	12,37	4,97
Lampung	0,98	6,41	6,08	3,75
Kep. Bangka Belitung	0,92	4,48	7,51	2,24
Kepulauan Riau	3,77	6,05	8,73	8,78
DKI Jakarta	5,41	10,68	11,56	8,42
Jawa Barat	4,07	7,21	7,98	3,74
Jawa Tengah	2,71	6,13	5,32	3,79
DI Yogyakarta	3,76	8,21	6,99	2,33
Jawa Timur	3,26	7,49	5,09	2,77
Banten	6,68	12,82	11,51	7,29
Bali	2,11	5,99	6,08	1,81
Nusa Tenggara Barat	4,55	5,97	7,26	4,33
Nusa Tenggara Timur	2,46	10,59	10,96	4,54
Kalimantan Barat	1,54	7,58	6,38	6,03
Kalimantan Tengah	4,62	9,28	9,27	7,53
Kalimantan Selatan	2,25	7,70	8,60	5,17
Kalimantan Timur	2,76	9,47	10,70	11,98
Sulawesi Utara	2,12	7,54	14,80	2,99
Sulawesi Tengah	4,03	7,18	9,64	8,97
Sulawesi Selatan	2,91	9,87	8,88	5,62
Sulawesi Tenggara	0,88	4,26	10,35	9,48
Gorontalo	2,81	6,59	14,36	4,39
Sulawesi Barat	3,06	4,51	9,22	7,65
Maluku	7,57	9,22	19,75	10,28
Maluku Utara	4,63	8,41	14,55	9,52
Papua Barat	4,81	9,36	11,15	6,69
Papua	3,38	5,85	6,20	3,43
Indonesia	3,50	7,71	7,89	5,11

LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

VSEN2013.MKP

Dibuat satu set
Untuk BPS Kab/Kota

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2013
KETERANGAN MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN
[DESEMBER 2013]

RAHASIA

Triwulan: **4**

I. KETERANGAN TEMPAT			
1	Provinsi		
2	Kabupaten/Kota ¹		
3	Kecamatan		
4	Desa/Kelurahan ¹		
5	Klarifikasi desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	
6	Nomor blok sensus		
7	Nomor kode sampel		
8	Nomor urut sampel rumah tangga		
9	Nama kepala rumah tangga		
10	Alamat (nama jalan/gang, RT/RW/dusun)		
11	Hasil kunjungan	1. Berhasil 2. Responden menolak 3. Tidak dapat ditemui } Blok III	

II. KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA			
1	Banyaknya anggota rumah tangga		
2	Jumlah anggota rumah tangga	0-4 tahun	
		5 tahun ke atas	
		10 tahun ke atas	

III. KETERANGAN PETUGAS					
Uraian		Pencacah		Pengawas	
1	Nama				
2	Kode Petugas				
3	Jabatan	1. Staf BPS Provinsi 2. Staf BPS Kab/Kota	3. KSK 4. Mitra	1. Staf BPS Provinsi 2. Staf BPS Kab/Kota	3. KSK 4. Mitra
4	Tanggal	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan
5	Tanda Tangan				

¹Coret yang tidak perlu

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA														
DISALIN DARI VSEN2013 K, BLOK IV.A KOLOM (1) S.D. (6)														
No Urut	Nama anggota rumah tangga (art)	Hubungan dengan kepala rumah tangga (art)	Jenis kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Umur (Tahun)	Status Perkawinan	Apakah biasa menggosok gigi setiap hari?				Apakah pernah pemeriksaan dokter gigi/perawat gigi dalam 6 bulan terakhir?				Anggota nita benumur 0-4 tahun
						Apakah biasa sarapan pagi?	Sesudah bangun pagi	Sesudah makan	Sebelum tidur malam	Pada saat mandi	(Kode)	(Kode)	(Kode)	Tanggal lahir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
01		1												
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														

Kode Kdrom (3)			Kode Kdrom (6)				Kode Kdrom (7)		Kode Kdrom (8) - (12)		
1. Kepala rumah tangga	4. Menantu	7. Famili lain	1. Belum kawin	3. Ceral hidup	1. Ya	2. Tidak	3. Tidak relevan				
2. Istri/suami	5. Cucu	8. Pembantu rumah tangga	2. Kawin	4. Ceral mati							
3. Anak	6. Orang tua/mertua	9. Lainnya									

V. KETERANGAN PERORANGAN TENTANG KESEHATAN																																									
Nama: No Urut: ☐																																									
Pemberi informasi: No Urut: ☐																																									
V.A. PELAYANAN KESEHATAN (UNTUK SEMUA UMUR)																																									
1. a. Apakah [NAMA] pernah berobat jalan selama 1 bulan terakhir? [Salin dari VSEN13.K Blok V.A.R.5] 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.2] b. Di mana tempat berobat jalan yang terakhir? 1. RS Pemerintah 6. Puskesmas/pustu 2. RS Swasta 7. Praktek batra 3. Praktek dokter/ Poliklinik 8. Dukun bersalin 4. Praktek bidan 9. Lainnya [Tuliskan]: 5. Praktek nakes lainnya c. Berapa lama [NAMA] menunggu untuk mendapatkan pelayanan? 1. ≤ 29 menit 3. 61 – 119 menit 2. 30 – 60 menit 4. ≥ 120 menit d. Siapa yang memeriksa? 1. Dokter 4. Bidan 2. Dokter gigi 5. Nakes lainnya 3. Perawat 6. Dukun/tabib/sinthe e. Bagaimana petugas memberikan penjelasan tentang penyakit, pengobatan, dan tindakan? 1. Sangat jelas 4. Sangat tidak jelas 2. Jelas 5. Tidak mendapatkan penjelasan 3. Tidak jelas f. Bagaimana penilaian [NAMA] terhadap kebersihan tempat berobat jalan? 1. Sangat bersih 3. Kotor 2. Bersih 4. Sangat kotor g. Biaya Transportasi untuk ke fasilitas rawat jalan: Rp.	f. Bagaimana penilaian [NAMA] terhadap kebersihan tempat rawat inap? 1. Sangat bersih 3. Kotor 2. Bersih 4. Sangat kotor 3. Berapakah biaya kesehatan, tidak termasuk yang dibayarkan oleh asuransi, perusahaan, dan jaminan sosial, yang dikeluarkan untuk: [Jika R.1.a atau R.2.a salah satu berkode 1] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rincian</th> <th>Rawat Jalan Sebulan terakhir</th> <th>Rawat inap setahun terakhir</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a. Dokter</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>b. Obat</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>c. Laboratorium</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>d. Tindakan medis</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>e. Alat kesehatan</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>f. Akomodasi</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>g. Pemeriksaan Kesehatan</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>h. Administrasi</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>i. Lainnya</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td>j. Total</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr> </tbody> </table> Sumber dana seluruhnya termasuk yang dibayarkan oleh asuransi, perusahaan, dan jaminan sosial [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"] k. Biaya sendiri ☐ l. Pinjaman ☐ m. Klaim asuransi ☐ n. Klaim perusahaan/kantor ☐ o. JPKM, Jamkesmas, Jamkesda, kartu sehat, surat miskin, dan dana sehat ☐ p. Lainnya ☐ 4. a. Apakah pernah mengobati sendiri/berobat alternatif dalam 1 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [Blok V.B] b. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk? 1. Membeli obat tanpa resep dokter Rp. 2. Pengobatan tradisional/alternatif Rp. <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">V.B. MALARIA/TUBERKULOSIS (TB)</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2. a. Apakah [NAMA] pernah menjalani rawat inap selama 1 tahun terakhir? [Salin dari VSEN13.K Blok V.A.R.8] 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.3] b. Di mana tempat rawat inap yang terakhir? 1. RS Pemerintah 6. Puskesmas/pustu 2. RS Swasta 7. Praktek batra 3. Praktek dokter/ Poliklinik 8. Dukun bersalin 4. Praktek bidan 9. Lainnya [Tuliskan]: 5. Praktek nakes lainnya c. Berapa lama [NAMA] menjalani rawat inap? 1. 1-2 hari 3. 6-14 hari 2. 3-5 hari 4. 15 hari atau lebih d. Berapa lama waktu menunggu untuk mendapatkan pelayanan di tempat rawat inap tersebut? 1. ≤ 29 menit 3. 61 – 119 menit 2. 30 – 60 menit 4. ≥ 120 menit e. Bagaimana petugas memberikan informasi tentang penyakit, pengobatan, dan tindakan? 1. Sangat jelas 4. Sangat tidak jelas 2. Jelas 5. Tidak mendapat penjelasan 3. Tidak jelas </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 5. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita malaria yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan darah oleh tenaga kesehatan? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.7] 3. Tidak tahu ⇐ [R.7] 6. Apakah [NAMA] mendapat pengobatan obat program kombinasi artemisinin (ACT)? 1. Ya 2. Tidak </td> </tr>	Rincian	Rawat Jalan Sebulan terakhir	Rawat inap setahun terakhir	(1)	(2)	(3)	a. Dokter	Rp.	Rp.	b. Obat	Rp.	Rp.	c. Laboratorium	Rp.	Rp.	d. Tindakan medis	Rp.	Rp.	e. Alat kesehatan	Rp.	Rp.	f. Akomodasi	Rp.	Rp.	g. Pemeriksaan Kesehatan	Rp.	Rp.	h. Administrasi	Rp.	Rp.	i. Lainnya	Rp.	Rp.	j. Total	Rp.	Rp.	V.B. MALARIA/TUBERKULOSIS (TB)		2. a. Apakah [NAMA] pernah menjalani rawat inap selama 1 tahun terakhir? [Salin dari VSEN13.K Blok V.A.R.8] 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.3] b. Di mana tempat rawat inap yang terakhir? 1. RS Pemerintah 6. Puskesmas/pustu 2. RS Swasta 7. Praktek batra 3. Praktek dokter/ Poliklinik 8. Dukun bersalin 4. Praktek bidan 9. Lainnya [Tuliskan]: 5. Praktek nakes lainnya c. Berapa lama [NAMA] menjalani rawat inap? 1. 1-2 hari 3. 6-14 hari 2. 3-5 hari 4. 15 hari atau lebih d. Berapa lama waktu menunggu untuk mendapatkan pelayanan di tempat rawat inap tersebut? 1. ≤ 29 menit 3. 61 – 119 menit 2. 30 – 60 menit 4. ≥ 120 menit e. Bagaimana petugas memberikan informasi tentang penyakit, pengobatan, dan tindakan? 1. Sangat jelas 4. Sangat tidak jelas 2. Jelas 5. Tidak mendapat penjelasan 3. Tidak jelas	5. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita malaria yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan darah oleh tenaga kesehatan? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.7] 3. Tidak tahu ⇐ [R.7] 6. Apakah [NAMA] mendapat pengobatan obat program kombinasi artemisinin (ACT)? 1. Ya 2. Tidak
Rincian	Rawat Jalan Sebulan terakhir	Rawat inap setahun terakhir																																							
(1)	(2)	(3)																																							
a. Dokter	Rp.	Rp.																																							
b. Obat	Rp.	Rp.																																							
c. Laboratorium	Rp.	Rp.																																							
d. Tindakan medis	Rp.	Rp.																																							
e. Alat kesehatan	Rp.	Rp.																																							
f. Akomodasi	Rp.	Rp.																																							
g. Pemeriksaan Kesehatan	Rp.	Rp.																																							
h. Administrasi	Rp.	Rp.																																							
i. Lainnya	Rp.	Rp.																																							
j. Total	Rp.	Rp.																																							
V.B. MALARIA/TUBERKULOSIS (TB)																																									
2. a. Apakah [NAMA] pernah menjalani rawat inap selama 1 tahun terakhir? [Salin dari VSEN13.K Blok V.A.R.8] 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.3] b. Di mana tempat rawat inap yang terakhir? 1. RS Pemerintah 6. Puskesmas/pustu 2. RS Swasta 7. Praktek batra 3. Praktek dokter/ Poliklinik 8. Dukun bersalin 4. Praktek bidan 9. Lainnya [Tuliskan]: 5. Praktek nakes lainnya c. Berapa lama [NAMA] menjalani rawat inap? 1. 1-2 hari 3. 6-14 hari 2. 3-5 hari 4. 15 hari atau lebih d. Berapa lama waktu menunggu untuk mendapatkan pelayanan di tempat rawat inap tersebut? 1. ≤ 29 menit 3. 61 – 119 menit 2. 30 – 60 menit 4. ≥ 120 menit e. Bagaimana petugas memberikan informasi tentang penyakit, pengobatan, dan tindakan? 1. Sangat jelas 4. Sangat tidak jelas 2. Jelas 5. Tidak mendapat penjelasan 3. Tidak jelas	5. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita malaria yang sudah dipastikan dengan pemeriksaan darah oleh tenaga kesehatan? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.7] 3. Tidak tahu ⇐ [R.7] 6. Apakah [NAMA] mendapat pengobatan obat program kombinasi artemisinin (ACT)? 1. Ya 2. Tidak																																								

7. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah menderita panas disertai menggigil atau panas naik turun secara berkala (dapat disertai sakit kepala, berkeringat, mual, muntah, atau tanpa gejala demam) meskipun sudah minum obat anti malaria? 1. Ya 2. Tidak } ⇐ [R.9] 9. Tidak tahu	☐	18. Dimana ibu melahirkan [NAMA]? 1. RS Pemerintah 7. Puskesmas/pustu 2. RS Swasta 8. Dukun bersalin 3. Rumah Bersalin 9. Rumah sendiri 4. Praktek dokter/ Poliklinik 10. Lainnya [Tuliskan]: 5. Praktek Bidan 99. Tidak tahu 6. Praktek nakes lainnya	☐
8. Apakah gejala di atas terjadi dalam 1 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak	☐	19. Berapa berat [NAMA] ketika lahir? 1. < 2,5 kg 2. ≥ 2,5 kg 9. Tidak tahu	☐
9. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita TB Paru yang dianjurkan diberikan pengobatan obat anti TB minimal 6 bulan oleh tenaga kesehatan? 1. Ya, sedang pengobatan 4. Ya, tidak selesai pengobatan 2. Ya, tidak makan obat anti TB 5. Tidak ⇐ [R.11] 3. Ya, telah selesai	☐	20. a. Apakah [NAMA] mendapat vitamin A dosis tinggi selama 1 tahun terakhir? 1. Ya 2. Tidak 9. Tidak tahu [Jika R.20.a = 2 atau 9, langsung ke R.21] b. Jika Ya, berapa kali mendapat vitamin A dosis tinggi? 1. 1 kali 3. > 2 kali 2. 2 kali 9. Tidak tahu	☐
10. Apakah [NAMA] didiagnosis TB Paru melalui? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"] a. Tes Mantoux ☐ b. Pemeriksaan dahak ☐ c. Pemeriksaan foto dada ☐	☐	21. Berapa kali [NAMA] diperiksa (bukan berobat) oleh tenaga kesehatan selama 1 tahun terakhir? kali ☐	☐
11. Dalam setahun terakhir, apakah [NAMA] pernah menderita batuk selama minimal 2 minggu berturut-turut? 1. Ya 2. Tidak } ⇐ [Blok V.C] 9. Tidak tahu	☐	UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-24 BULAN	
12. Jika Ya, apakah batuk tersebut disertai satu atau lebih gejala: dahak, dahak bercampur darah/ batuk berdarah, sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun/sulit bertambah, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam > 1 bulan? 1. Ya 2. Tidak 9. Tidak tahu	☐	22. a. Apakah [NAMA] ditimbang selama 1 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.23.a] b. Kapan dilakukan penimbangan? (tg-bln-thn) c. Berapa beratnya? kg ☐	☐
V.C. KESEHATAN BALITA (UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 0-59 BULAN)		23. a. Apakah [NAMA] diukur panjang/tinggi selama 1 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.24] b. Kapan dilakukan pengukuran? (tg-bln-thn) c. Berapa panjang/tingginya? cm ☐	☐
13. Umur dalam bulan: bulan [Salin dari VSEN13.K Blok V.B R.10.a]	☐	24. Apakah [NAMA] pernah diperiksa oleh tenaga kesehatan untuk pemeriksaan bayi baru lahir pada saat umur 0-28 hari? 1. Ya 2. Tidak 9. Tidak tahu	☐
14. a. Apakah ibu kandung balita tinggal di rumah tangga ini? 1. Ya 2. Tidak ⇐ [R.18] b. Isikan nomor urut ibu kandung balita..... [Salin dari VSEN13.K Blok IV.A Kol.1]	☐	25. Jika Ya, kapan diperiksa? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"] a. Ketika balita berusia 0 - 2 hari ☐ b. Ketika balita berusia 3 - 7 hari ☐ c. Ketika balita berusia 8 - 28 hari ☐	☐
15. Ketika ibu [NAMA ibu kandung] mengandung [NAMA], apakah memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan? 1. Ya 9. Tidak 2. Tidak ⇐ [R.17] tahu ⇐ [R.17]	☐	UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA 10 TAHUN KE ATAS	
16. Jika Ya, Berapa kali ibu memeriksakan kehamilan? a. Ketika kehamilan berusia 0-3 bulan: kali a. ☐ b. Ketika kehamilan berusia 4-6 bulan: kali b. ☐ c. Ketika kehamilan berusia 7 bulan ke atas: kali c. ☐	☐	V.D. KETERBATASAN/GANGGUAN FUNGSI ANGGOTA TUBUH	
17. Ketika mengandung [NAMA] apakah ibu [NAMA ibu kandung] mengonsumsi tablet tambah darah/zat besi? 1. Ya 2. Tidak 9. Tidak tahu	☐	26. Apakah [NAMA] mempunyai kesulitan melihat, meskipun memakai kacamata? 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah	☐
		27. Apakah [NAMA] mempunyai kesulitan mendengar, meskipun memakai alat bantu dengar? 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah	☐

28. Apakah [NAMA] mempunyai kesulitan berjalan atau naik tangga? 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah		☐
29. Apakah [NAMA] mempunyai kesulitan mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental? 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah		☐
30. Apakah [NAMA] mempunyai kesulitan dalam hal mengurus diri sendiri? 1. Tidak 2. Sedikit 3. Parah		☐
V.E. PERILAKU HIDUP SEHAT		
31. a. Apakah [NAMA] merokok selama 1 bulan terakhir? 1. Ya, setiap hari 2. Ya, kadang-kadang ⇐ [R.31.d] 3. Tidak, sebelumnya pernah ⇐ [R.31.e] 4. Tidak pernah sama sekali ⇐ [R.32]		a. ☐
b. Pada usia berapa [NAMA] pertama kali mulai merokok setiap hari? tahun		b. ☐
c. Berapa batang rokok yang [NAMA] hisap setiap hari? batang		c. ☐
d. Apakah [NAMA] biasa merokok di dalam rumah ketika bersama ART lainnya? 1. Ya 2. Tidak		d. ☐
e. Pada usia berapa [NAMA] pertama kali merokok? tahun		e. ☐
32. Apakah [NAMA] biasa mencuci tangan saat: [Isikan kode 1 bila "Ya, dengan sabun dan air", kode 2 bila "Ya, dengan air saja", kode 3 bila "Tidak", kode 4 bila "Tidak relevan"]		
a. Sesudah buang air besar/kecil		☐
b. Sesudah menceboki bayi atau anak		☐
c. Sebelum makan atau menyuapi anak		☐
d. Setelah memegang hewan		☐
e. Setelah bermain di tanah, lumpur atau tempat kotor		☐
33. Apakah melakukan aktivitas fisik dengan bergerak ≥ 30 menit sehari dalam seminggu terakhir? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]		
Aktivitas fisik		Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
a. Bekerja/sekolah/mengurus rumah tangga		☐
b. Perjalanan/transportasi		☐
c. Waktu senggang/olah raga/rekreasi		☐
34. a. Berapa hari [NAMA] mengonsumsi buah-buahan segar selama seminggu terakhir? hari [Jika isian "0", lanjutkan ke rincian 35.a]		☐
b. Berapa porsi rata-rata [NAMA] mengonsumsi buah-buahan segar per hari?		☐
35. a. Berapa hari [NAMA] mengonsumsi sayuran segar selama seminggu terakhir? hari [Jika isian "0", lanjutkan ke Blok V.F]		☐
b. Berapa porsi rata-rata [NAMA] mengonsumsi sayuran segar per hari?		☐
UNTUK ANGGOTA RUMAH TANGGA 15 TAHUN KE ATAS		
V.F. PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS		
36. Apakah [NAMA] pernah mendengar suatu penyakit yang disebut HIV/AIDS? 1. Ya 2. Tidak 3. Tidak relevan } ⇐ [Blok VI]		☐
37. Darimana [NAMA] mendengar tentang penyakit HIV/AIDS? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]		
a. Media cetak/elektronik		☐
b. Internet		☐
c. Petugas kesehatan		☐
d. Tokoh agama		☐
e. Tokoh masyarakat		☐
f. Seminar, ceramah, pertemuan masyarakat		☐
g. Teman/keluarga		☐
h. Lainnya [Tuliskan]		☐
38. Menurut [NAMA], apa HIV/AIDS itu? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak", kode 9 bila "Tidak tahu"]		
a. Penyakit kelamin		☐
b. Penyakit yang belum bisa disembuhkan		☐
c. Penyakit yang ditularkan melalui kontak darah/jarum suntik/seksual		☐
39. Cara apa saja yang dapat menularkan HIV/AIDS? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak", kode 9 bila "Tidak tahu"]		
a. Berhubungan seksual dengan banyak pasangan		☐
b. Melalui gigitan nyamuk atau serangga lain		☐
c. Menggunakan pakaian/alat makan secara bersama-sama		☐
d. Melalui transfusi darah		☐
e. Penularan dari ibu pengidap HIV/AIDS ke bayinya		☐
40. Cara apa saja yang bisa dilakukan seseorang untuk mencegah terinfeksi HIV/AIDS? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak", kode 9 bila "Tidak tahu"]		
a. Tidak melakukan hubungan seks		☐
b. Hanya berhubungan seks dengan satu pasangan yang setia		☐
c. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual		☐
d. Tidak menggunakan jarum suntik secara bersama		☐
e. Makan makanan bergizi		☐
f. Minum obat antibiotik/ramuan tradisional sebelum melakukan hubungan seksual		☐
g. Sunat/khitan		☐

DITANYAKAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA/PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA																																																				
VI. KETERANGAN MENGENAI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5. Apakah ada ART yang memiliki rumah selain yang ditempati saat ini? 1. Ya 2. Tidak ☐																																																		
VIA. PENGUSAHAAN TEMPAT TINGGAL		VI.B. KONDISI FISIK BANGUNAN																																																		
1. Status penguasaan tempat tinggal : [Salin dari VSEN2013.K, Blok VI R.3]: 1. Milik sendiri ⇐ [R.4.a] 5. Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara ☐ 2. Kontrak ⇐ [R.2] 6. Dinas 3. Sewa ⇐ [R.3] 7. Lainnya 4. Bebas sewa [Bila R.1 = 4 s.d. 7, lanjutkan ke R.5]		6. Luas tapak bangunan :m ² 7. Luas tanah :m ²																																																		
2. [Jika R.1 = 2], Berapa nilai kontrak per bulan? [Salin dari VSEN13.M Blok IV.2 R.233] Rp [Lanjutkan ke R.5]		8. Jenis plafon terluas: 1. Beton 5. Anyaman bambu 2. Gypsum 6. Lainnya 3. Kayu/triplek 7. Tidak ada 4. Asbes ☐																																																		
3. [Jika R.1 = 3], Berapa nilai sewa per bulan? [Salin dari VSEN13.M Blok IV.2 R.234] Rp [Lanjutkan ke R.5]		9. Kondisi atap: 1. Baik 2. Rusak ☐																																																		
		10. Kondisi lantai: 1. Baik 2. Rusak ☐																																																		
		11. Kondisi dinding: 1. Baik 2. Rusak ☐																																																		
VI.C. FASILITAS DAN PERLENGKAPAN BANGUNAN																																																				
4. a. [Jika R.1 = 1] Bagaimana cara memperoleh bangunan milik sendiri ? 1. Membeli dari pengembang (Perumnas, dll) 2. Membeli dari bukan pengembang 3. Membangun sendiri 4. Lainnya (warisan, hibah, dll.) } [R.4.d]		12. a. Jumlah ruangan:ruangan b. Keadaan ruangan menurut fungsinya:																																																		
b. [Jika R.4.a= 1 atau 2], Bagaimana cara membeli dari pengembang dan bukan pengembang? 1. Tunai ⇐ [R.4.d] 2. Angsuran KPR 3. Angsuran bukan KPR 4. Lainnya } [R.4.d]		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Fungsi ruangan</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> <th colspan="3">Jika Kolom 2 ≠ 0, Berapa jumlah ruangan yang</th> </tr> <tr> <th>Cukup sirkulasi udara</th> <th>Cukup cahaya alami</th> <th>Menggunakan AC</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Ruangan Tidur</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>2. Ruangan Keluarga</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>3. Ruangan Tamu</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>4. Ruangan Makan</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>5. Ruangan Campuran</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>6. Dapur</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>7. Kamar Mandi</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>			Fungsi ruangan	Jumlah	Jika Kolom 2 ≠ 0, Berapa jumlah ruangan yang			Cukup sirkulasi udara	Cukup cahaya alami	Menggunakan AC	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1. Ruangan Tidur					2. Ruangan Keluarga					3. Ruangan Tamu					4. Ruangan Makan					5. Ruangan Campuran					6. Dapur				☒	7. Kamar Mandi				☒
Fungsi ruangan	Jumlah	Jika Kolom 2 ≠ 0, Berapa jumlah ruangan yang																																																		
		Cukup sirkulasi udara	Cukup cahaya alami	Menggunakan AC																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																
1. Ruangan Tidur																																																				
2. Ruangan Keluarga																																																				
3. Ruangan Tamu																																																				
4. Ruangan Makan																																																				
5. Ruangan Campuran																																																				
6. Dapur				☒																																																
7. Kamar Mandi				☒																																																
c. Jika angsuran KPR: 1. Berapa lama jangka waktu kredit? tahun 2. Sudah berapa bulan mengangsur? bulan 3. Apakah sudah lunas? 1. Ya 2. Tidak ☐		c. Jika memiliki dapur, apakah dapur terpisah dari bangunan utama? ☐ 1. Ya 2. Tidak																																																		
d. Apakah jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal? 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART 3. Sertipikat selain SHM 4. Tidak punya ☐																																																				

V.I.D. PEMANFAATAN AIR				
13. a. Berikut ini akan ditanyakan mengenai penggunaan air di rumah tangga. [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]				
Sumber air	Apakah rumah tangga ini menggunakan air:	Jika kol (2) berkode 1, digunakan untuk apa air tersebut		
		Minum	Masak	Mandi/Cuci
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Air kemasan bermerk	☐	☐	☐	☐
02. Air isi ulang	☐	☐	☐	☐
03. Leding meteran	☐	☐	☐	☐
04. Hidran umum/ Terminal Air	☐	☐	☐	☐
05. Leding eceran	☐	☐	☐	☐
06. Sumur bor/pompa	☐	☐	☐	☐
07. Sumur terlindung	☐	☐	☐	☐
08. Sumur tak terlindung	☐	☐	☐	☐
09. Mata air terlindung	☐	☐	☐	☐
10. Mata air tak terlindung	☐	☐	☐	☐
11. Air sungai	☐	☐	☐	☐
12. Air hujan	☐	☐	☐	☐
13. Lainnya	☐	☐	☐	☐
b. Dari sumber air yg digunakan di R.13.a, manakah yang merupakan sumber air minum utama:		☐		
14. a. Dimanakah lokasi memperoleh air minum utama? 1. Di dalam rumah ⇨ [R.15] 2. Di halaman ⇨ [R.15] 3. Tempat Lainnya		☐		
b. Berapa lama waktu yang biasanya diperlukan untuk memperoleh air minum tersebut dari sumbernya?menit		☐		
15. Bagaimana kualitas air minum: [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]				
a. Jernih/bening	☐	d. Berbusa	☐	
b. Berwarna	☐	e. Berbau	☐	
c. Berasa	☐			
16. Apa yang biasanya dilakukan supaya air menjadi lebih aman untuk diminum? [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]				
1. Merebus/memasak ☐				
2. Menambah penjernih/klorine ☐				
3. Menyaring dengan kain ☐				
4. Menggunakan filter/saringan (keramik, arang, pasir) ☐				
5. Mengendapkan ☐				
6. Membasmi kuman dengan sinar matahari ☐				
7. Lainnya [Tuliskan]: ☐				
17. Apakah ada ART yang biasa melakukan hal berikut: [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak", kode 3 bila "Tidak relevan"]				
1. Mandi dengan shower ☐				
2. Menyiram tanaman di pagi hari ☐				
3. Memanfaatkan air bekas ☐				
V.I.E. PEMANFAATAN ENERGI				
18. a. Selama setahun yang lalu, apakah rumah tangga ini menggunakan kayu atau arang sebagai bahan bakar untuk memasak? ☐				
1. Ya 2. Tidak ⇨ [R.19]				
b. Berapa bulan rumah tangga ini menggunakan kayu atau arang untuk memasak? Bulan ☐				
c. Bagaimana cara memperoleh kayu atau arang tersebut? 1. Pembelian 4. Pemberian ☐				
2. Mencari sendiri 8. Lainnya ☐				
d. Apakah sekarang masih memakai kayu atau arang? 1. Ya 2. Tidak ☐				
19. a. Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga mengurangi pemakaian listrik? 1. Ya 2. Tidak 3. Tidak relevan } ⇨ [R.20] ☐				
b. Alasan utama mengurangi pemakaian listrik? 1. Penghematan biaya ☐				
2. Peduli lingkungan				
3. Keterbatasan daya/pasokan sumber listrik				
V.I.F. KONDISI LINGKUNGAN				
20. Lokasi rumah/bangunan tempat tinggal: 1. Pemukiman baru 3. Pemukiman lama ☐				
2. Pengembangan 4. Lainnya Pemukiman lama				
21. Apakah rumah terletak/berlokasi: [Isikan kode 1 bila "Ya", kode 2 bila "Tidak"]				
a. Di tepian/di atas sungai/danau/waduk/laut (kurang dari 8 m) ☐				
b. Di pinggir/dalam hutan ☐				
c. Di pinggir rel kereta (kurang dari 15 m) ☐				
d. Di pinggir jalan/gang/orong ☐				
Jika R.21.d = 2, lanjutkan ke R.23				

33. Akses ke fasilitas umum (fasum):

No	Jenis Fasilitas Umum	Jarak terdekat dari rumah (Km)	Transportasi yang biasa digunakan [Jumlahkan Kode]	No	Jenis Fasilitas Umum	Jarak terdekat dari rumah (Km)	Transportasi yang biasa digunakan [Jumlahkan Kode]
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
a.	RS Pemerintah			h.	SD/ sederajat		
b.	RS Swasta			i.	SMP/ sederajat		
c.	Puskesmas			j.	SMA/ sederajat		
d.	Poliklinik			k.	Bank		
e.	Pos polisi			l.	Tempat ibadah		
f.	Pasar tradisional			m.	Jalur angkutan bertrayek		
g.	Pasar modern/ swalayan						

Kode kolom 4 : Transportasi yang biasa digunakan

1. Kendaraan umum bermotor	8. Kendaraan pribadi tidak bermotor
2. Kendaraan umum tidak bermotor	16. Tidak menggunakan kendaraan/jalan kaki
4. Kendaraan pribadi bermotor	

VII. CATATAN

Statistik Perumahan dan Permukiman 2013

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. From <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, June 3th, 2014.

Kementerian Perumahan Rakyat. (2012). *Undang-undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. From <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2011/02/02/undang-undang-no-1-tahun-2011>, June 10th, 2014.

_____. 2011. *Serial Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah, Definisi Operasional Indikator MDGs*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik.

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021)3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021)3857046

E-mail: bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

